



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan

Laporan Keuangan disusun dengan maksud sebagai bentuk pertanggungjawaban Bupati Kebumen atas pengelolaan keuangan beserta kinerja atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kebumen.

Tujuan laporan keuangan adalah:

- a. Menyediakan informasi yang andal dan relevan mengenai posisi keuangan serta seluruh transaksi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kebumen selama satu periode pelaporan;
- b. Untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan;
- c. Untuk menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensinya, dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- d. Menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:
 - 1) Menyediakan informasi mengenai penerimaan pada periode berjalan kaitannya dengan seluruh alokasi pengeluaran;
 - 2) Menyediakan informasi mengenai cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya disesuaikan dengan anggaran yang telah ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
 - 3) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pembangunan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
 - 4) Menyediakan informasi mengenai cara-cara yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam rangka mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
 - 5) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Kabupaten Kebumen berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak maupun pinjaman;
 - 6) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode berjalan;
 - 7) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih,



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan antara lain:

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- c. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;
- e. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- h. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- i. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- j. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- k. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- l. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- m. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan;
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

- r. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- t. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- u. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi daerah;
- v. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- w. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5);
- x. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerinah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);
- y. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- z. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;
- aa. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah;
- bb. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- cc. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual;
- dd. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- ee. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- ff. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- gg. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- hh. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- ii. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 105 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
- jj. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 106 tahun 2021 tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- kk. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 102 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

- II. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 68 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan
- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan
- Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 2.1 Gambaran Umum Kabupaten Kebumen
 - 2.2 Ekonomi Makro
 - 2.3 Arah dan Kebijakan Umum APBD
 - 2.4 Indikator Pencapaian Target Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
- 3.1 Iktisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
 - 3.2 Hambatan dan Kendala yang ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan
- Bab IV Kebijakan Akuntansi
- 4.1 Entitas Akuntansi/Pelaporan Keuangan Daerah
 - 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan
- Bab V Penjelasan Pos – Pos Laporan Keuangan
- 5.1 Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
 - 5.3 Neraca
 - 5.4 Laporan Operasional
 - 5.5 Laporan Arus Kas
 - 5.6 Laporan Perubahan Ekuitas
- Bab VI Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan
- Bab VII Penutup



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2021

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Kebumen

a. Letak Geografis

Kabupaten Kebumen merupakan Kabupaten yang terletak di bagian selatan Provinsi Jawa Tengah, yang secara geografis terletak diantara 7°27' – 7°50' lintang selatan dan 109°22' – 109°50' bujur timur. Wilayah Kabupaten Kebumen berbatasan langsung atau memiliki wilayah pantai dan pegunungan, sehingga ketinggiannya berkisar antara 0 – 997,5 meter di atas permukaan laut, dengan batas-batas:

Sebelah utara : Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo

Sebelah timur : Kabupaten Purworejo

Sebelah selatan : Samudera Indonesia

Sebelah barat : Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banyumas

Luas wilayah Kabupaten Kebumen adalah 128.111,50 hektar yang terbagi dalam 26 kecamatan, terdiri dari 449 desa dan 11 kelurahan.

Gambar 1
Peta Kabupaten Kebumen



*) Sumber : Kebumen dalam Angka

Kabupaten Kebumen secara administratif terdiri dari 26 kecamatan dengan luas wilayah sebesar 128.111,50 hektar atau 1.281,115 km², dengan kondisi beberapa wilayah merupakan daerah pantai dan perbukitan, sedangkan sebagian besar merupakan dataran rendah.

b. Demografi

1) Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Kebumen pada tahun 2020 sebesar 1.350.000 jiwa, selama tahun 2010 – 2020 laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Kebumen



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2021

sebesar 1,64% dengan rasio jenis kelamin penduduk sebesar 102,65% yang artinya setiap 100 jumlah penduduk perempuan terdapat 103 penduduk laki-laki.

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Kebumen tahun 2020 sebesar 0,13 ,melambat dibandingkan baik pada tahun 2019 yang hanya sebesar 0,24, maupun jika dibandingkan tahun 2018 sebesar 0,26. Jumlah penduduk pada tahun 2020 adalah sebesar 1.350.440. Sementara tingkat kepadatan penduduk pada tahun 2020 sebanyak 1054 jiwa per kilometer persegi, naik dari 935 jiwa per kilometer persegi di tahun 2019.

2) Ketenagakerjaan

Penduduk usia kerja (usia 15 tahun atau lebih) di Kabupaten Kebumen pada tahun 2020 sebanyak 910.114 jiwa, meningkat dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 900.240 jiwa. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Kebumen pada tahun 2020 sekitar 69,63 persen dimana hal tersebut menggambarkan bahwa penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) di Kabupaten Kebumen termasuk dalam angkatan kerja. Jumlah ini naik dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 68,72 persen. Kelompok penduduk bukan Angkatan kerja pada tahun 2019 maupun pada tahun 2020 didominasi oleh penduduk yang mengurus rumah tangga yaitu sebesar 188.648 jiwa pada tahun 2019 dan turun menjadi 175.770 jiwa pada tahun 2020 Angkatan kerja terdiri atas dua kelompok yaitu kelompok pengangguran dan kelompok bekerja. Angkatan kerja yang bekerja tahun 2020 sebanyak 93,93 persen terhadap total angkatan kerja yang sebesar 633.687 jiwa. Sementara tingkat pengangguran terbuka persentasenya naik dari 4,69 persen pada tahun 2019 menjadi 6,07 persen dari total angkatan kerja

c. Organisasi

Unsur Pemerintah Kabupaten Kebumen meliputi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Bupati/Wakil Bupati yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Umum. Dalam melaksanakan Pemerintahan Bupati/Wakil Bupati dibantu oleh Perangkat Daerah (PD) yang dibentuk berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

1) DPRD

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dipilih melalui pemilihan umum (pemilu) dan dilantik dalam masa jabatan lima tahun. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen untuk periode tahun 2019-2024 dengan Ketua H. Sarimun, S.Sy dan wakil ketua Fuad Wahyudi, Agung Prabowo, dan Munawar Kholil.

2) Bupati/Wakil Bupati

Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Kebumen untuk periode tahun 2021-2026 dipimpin oleh Arif Sugiyanto, SH dan Hj. Ristawati Purwaningsih, S.ST, M.M.

3) Perangkat Daerah (PD)

Sesuai dengan Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dalam melaksanakan tugas aparaturnya Kabupaten Kebumen melaksanakan kewenangan wajib yang terbagi dalam 22 Bidang Pemerintah, meliputi 52 SKPD sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

Tabel Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun Anggaran 2021

| No | Kode OPD | Nama OPD |
|----|----------|---|
| 1 | 1.01.01 | Dinas Pendidikan |
| 2 | 1.02.01 | Dinas Kesehatan |
| 3 | 1.03.01 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 4 | 1.04.01 | Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup |
| 5 | 1.05.01 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 6 | 1.05.02 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 7 | 1.06.01 | Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |
| 8 | 2.01.01 | Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah |
| 9 | 2.06.01 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 10 | 2.07.01 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| 11 | 2.09.01 | Dinas Perhubungan |
| 12 | 2.10.01 | Dinas Komunikasi Dan Informatika |
| 13 | 2.12.01 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 14 | 2.13.01 | Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata |
| 15 | 2.18.01 | Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan |
| 16 | 3.01.01 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| 17 | 3.03.01 | Dinas Pertanian dan Pangan |
| 18 | 3.06.01 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 19 | 4.01.01 | Sekretariat Daerah |
| 20 | 4.02.01 | Inspektorat |
| 21 | 4.03.01 | Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| 22 | 4.04.01 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| 23 | 4.04.02 | Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah |
| 24 | 4.05.01 | Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah |
| 25 | 4.08.01 | Sekretariat DPRD |
| 26 | 4.11.01 | Kecamatan Kebumen |
| 27 | 4.11.02 | Kecamatan Alian |
| 28 | 4.11.03 | Kecamatan Karangsembung |
| 29 | 4.11.04 | Kecamatan Prembun |
| 30 | 4.11.05 | Kecamatan Mirit |
| 31 | 4.11.06 | Kecamatan Kutowinangun |
| 32 | 4.11.07 | Kecamatan Ambal |
| 33 | 4.11.08 | Kecamatan Buluspesantren |
| 34 | 4.11.09 | Kecamatan Pejagoan |
| 35 | 4.11.10 | Kecamatan Klirong |
| 36 | 4.11.11 | Kecamatan Petanahan |
| 37 | 4.11.12 | Kecamatan Sruweng |
| 38 | 4.11.13 | Kecamatan Karanganyar |
| 39 | 4.11.14 | Kecamatan Karanggayam |
| 40 | 4.11.15 | Kecamatan Adimulyo |
| 41 | 4.11.16 | Kecamatan Kuwarasan |
| 42 | 4.11.17 | Kecamatan Puring |
| 43 | 4.11.18 | Kecamatan Gombong |
| 44 | 4.11.19 | Kecamatan Sempor |
| 45 | 4.11.20 | Kecamatan Buayan |
| 46 | 4.11.21 | Kecamatan Rowokele |
| 47 | 4.11.22 | Kecamatan Ayah |



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

| No | Kode OPD | Nama OPD |
|----|-------------|-----------------------------------|
| 48 | 4 . 11 . 23 | Kecamatan Sadang |
| 49 | 4 . 11 . 24 | Kecamatan Poncowarno |
| 50 | 4 . 11 . 25 | Kecamatan Padureso |
| 51 | 4 . 11 . 26 | Kecamatan Bonorowo |
| 52 | 4 . 12 . 01 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |

d. Kebijakan Pembangunan

Visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Kebumen tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, sebagai berikut:

1) Visi

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kebumen adalah “Kebumen Sejahtera, Mandiri, Berakhlak, Bersama Rakyat”.

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

- a) Sejahtera : bermakna suatu perwujudan kondisi keadaan dimana masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan lahir maupun batin, secara merata;
- b) Mandiri : bermakna bahwa masyarakat Kabupaten Kebumen memiliki kemampuan mendayagunakan potensi lokal dan sumber daya yang ada, sehingga mandiri diterjemahkan sebagai perekonomian yang berpihak pada masyarakat, ekonomi yang tumbuh melalui pemerataan, dan ekonomi yang bertumpu pada sektor-sektor yang berbasiskan pada potensi daerah dalam mencapai kemandirian daerah yang tangguh. Indikator untuk mengukur pencapaian kemandirian adalah meningkatnya daya saing daerah, dan meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian dapat dilihat dari kondisi infrastruktur dan peluang investasi;
- c) Berakhlak : berarti bahwa pembangunan di Kebumen tidak hanya mengejar pemenuhan pembangunan fisik semata, namun jugabertujuan untuk membentuk kualitas rohani masyarakat yang memiliki kualitas moral, etikadan karakter hidup yang tinggi berbasis kehidupan spiritual berlandaskan akhlakul karimah sesuai dengan ajaran-ajaran agama;
- d) Bersama Rakyat : artinya masyarakat tidak hanya sekedar obyek namun juga sebagai subyek pembangunan. Diharapkan masyarakat berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

2) Misi

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

- a) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan opengov terintegrasi;
- b) Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya;
- c) Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan;
- d) Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- e) Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat.

2.2 Ekonomi Makro

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Nilai PDRB Kabupaten Kebumen Atas Dasar Harga Berlaku pada Tahun 2020 mencapai 28.010.813,00 juta rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 42.883 juta rupiah dibandingkan dengan Tahun 2019 yang mencapai 27.967.929,65 juta rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha dan juga adanya inflasi.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Kebumen pada Tahun 2020 juga mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Kabupaten Kebumen Tahun 2020 atas dasar harga berlaku, mencapai 28,01 triliun rupiah, naik dari nilai 2019 sebesar 27,96 triliun rupiah. Laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 sebesar 5,52% dan laju pertumbuhan ekonomi menjadi -1,46 terdampak pandemi covid19.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Informasi dan Komunikasi yaitu sebesar 14,21 persen. Pandemi Covid19 berdampak kemajuan informasi komunikasi menjadi sangat pesat karena semua pergerakan terjadi dari rumah dimana aksesibilitas terhadap informasi menjadi sangat vital. Digitalisasi pada semua lini dan menjadi salah satu indikator kemajuan suatu daerah. Dari 17 lapangan usaha ekonomi yang ada, hanya 9 lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif dan 9 lapangan usaha mengalami pertumbuhan negatif.

TABEL

LAJU PERTUMBUHAN PDRB MENURUT DATA HARGA KONSTAN

| Lapangan Usaha | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019* | 2020** |
|----------------|-------------------------------------|-------|------|------|-------|--------|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| A | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | -5,84 | 0,51 | 2,77 | -0,54 | 0,37 |
| B | Pertambangan dan Penggalian | -1,22 | 4,01 | 3,18 | 3,24 | 2,41 |



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

| Lapangan Usaha | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019* | 2020** |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| C | Industri Pengolahan | 9,55 | 5,66 | 5,79 | 7,18 | 0,67 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 7,97 | 6,23 | 6,76 | 7,2 | 1,58 |
| E | Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang | 2,4 | 0,23 | 4,67 | 4,43 | 2,54 |
| F | Konstruksi | 13,43 | 4,4 | 4,2 | 5,08 | -3,26 |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 8,67 | 7,1 | 6,09 | 7,29 | -3,81 |
| H | Transportasi dan Pergudangan | 12,47 | 7,31 | 5,7 | 7,78 | -22,68 |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 10,42 | 8,73 | 8,2 | 9,12 | -6,84 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 13,62 | 15,72 | 17,3 | 15,28 | 14,21 |
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 6,76 | 5,03 | 2,18 | 2,67 | 2,18 |
| L | Real Estat | 7,37 | 3,07 | 3,21 | 6,82 | -0,06 |
| M,N | Jasa Perusahaan | 11,08 | 11,06 | 8,19 | 10,11 | -7,47 |
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib | 5,03 | 2,39 | 2,3 | 3,95 | -1,3 |
| P | Jasa Pendidikan | 7,02 | 7,99 | 9,72 | 8,24 | -0,28 |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 9,73 | 8,86 | 9,49 | 9,36 | 11,23 |
| R,S,T,U | Jasa Lainnya | 11,98 | 11,02 | 9,33 | 10,78 | -7,33 |
| | Produk Domestik Regional Bruto | 5,01 | 5,15 | 5,53 | 5,52 | -1,46 |

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

b. Struktur Ekonomi

Besarnya aktivitas perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha.

Selama lima tahun terakhir (2015-2019) struktur perekonomian Kabupaten Kebumen didominasi oleh 3 (tiga) kategori lapangan usaha, di antaranya: Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Industri Pengolahan; serta Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Dominasi ketiga sektor tersebut masih terjadi di Tahun 2020, di mana peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Kebumen pada Tahun 2020 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang mencapai 21,79 persen. Naik sebesar 0,5 persen dari 2019 yang hanya sebesar 21,29. Lapangan usaha Industri Pengolahan menjadi sektor terbesar kedua dengan peranan sebesar 21,27 persen, mengalami sedikit kenaikan dari peranan Tahun 2019 yang semula 20,70 persen. Peringkat ketiga ditempati oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan peranan sebesar 14,84 persen yang mengalami penurunan dari tahun 2018 yang sebesar 15,33.

c. Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk tengah tahun. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2021

potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Semakin besar nilai PDRB Perkapita suatu daerah, maka semakin tinggi tingkat kesejahteraannya.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Kebumen atas dasar harga berlaku sejak Tahun 2018 hingga 2020 senantiasa mengalami kenaikan. Pada Tahun 2018 PDRB per kapita tercatat sebesar 26.037.016,66 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga Tahun 2020 mencapai 28.010.813,00 juta rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

2.3 Arah dan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021. RKPD digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021.

Berkaitan dengan itu, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus mendukung tercapainya 5 (lima) prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi yang dituangkan dalam RKPD. 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional Tahun 2021 dimaksud, meliputi:

1. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. memperkuat infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar;
6. membangun lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim; serta
7. memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

a. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah dalam struktur APBD merupakan elemen yang sangat penting, baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberian pelayanan kepada publik. Apabila dikaitkan dengan pembiayaan, maka pendapatan daerah masih merupakan alternatif pilihan utama dalam mendukung program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik.

Pokok kebijakan pendapatan diarahkan untuk :

- 1) penggalan Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi yang harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian (karena sebagian besar sumber Pendapatan Asli Daerah merupakan pengusaha/wajib pajak golongan kecil menengah);



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

- 2) optimalisasi dana perimbangan (DAU, DAK, bagi hasil pajak dan bukan pajak) sehingga lebih proporsional; serta
- 3) penggalian dan optimalisasi potensi pendapatan lain yang sah.

Formulasi kebijakan dalam mendukung pengelolaan anggaran pendapatan daerah akan lebih difokuskan pada upaya untuk memobilisasi Pendapatan Asli Daerah dan penerimaan daerah lainnya. Pertumbuhan komponen pajak daerah, retribusi daerah dan hasil perusahaan daerah akan menjadi faktor yang penting dalam mendorong pertumbuhan PAD nanti. Sedangkan untuk dana perimbangan, komponen bagi hasil pajak serta komponen bagi hasil bukan pajak dan bantuan keuangan provinsi adalah dua unsur yang cukup penting dalam mendorong pertumbuhan dana perimbangan yang akan diperoleh nantinya.

b. Belanja Daerah

1. Kebijakan Perencanaan Belanja daerah

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah digunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan, fungsi penunjang urusan pemerintahan, program pendukung operasional Perangkat Daerah, dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Salah satu aspek terpenting dalam pengelolaan keuangan daerah adalah bagaimana mengelola belanja daerah secara efisien dan efektif, sehingga dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dan menyelenggarakan pembangunan agar hasilnya benar-benar dapat dirasakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu dalam pengalokasian anggaran pada program/kegiatan dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

Dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan daerah menggambarkan program-program strategis daerah, dengan skala prioritas dan arah kebijakan yang jelas. Dengan adanya dokumen-dokumen tersebut, Pemerintah Daerah dapat menentukan dan melaksanakan kerjasama (*sharing*) untuk membiayai program strategis dan prioritas daerah yang telah ditetapkan. Kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi, mencakup berbagai aspek pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Kelancaran koordinasi dan komunikasi dengan Pemerintah Pusat dan provinsi dicerminkan melalui kerjasama dalam wujud program *Budget Sharing*, kegiatan atau dana pendamping di bidang pendidikan, kesehatan, pariwisata, ekonomi kerakyatan, infrastruktur dan lain-lain. Selain itu dilaksanakan juga koordinasi sinergis untuk upaya-upaya percepatan pengentasan kemiskinan.

Struktur belanja daerah dalam rancangan APBD Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

2. Kebijakan Belanja Operasi

Belanja operasi sebagaimana dimaksud merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, yang terdiri dari jenis belanja (a) Belanja Pegawai, (b) Belanja Barang dan Jasa, (c) Belanja Bunga, (d) Belanja Subsidi, (e) Belanja hibah, dan (f) Bantuan Sosial. Arah kebijakan belanja operasi pada tahun 2021, antara lain:

1) Belanja Operasi

a. Belanja Pegawai

- (1) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya;
- (2) Mengantisipasi kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 1% (satu perseratus) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
- (3) Mengalokasikan kebutuhan belanja pegawai untuk mengakomodir kebutuhan pengangkatan CPNS sesuai formasi pegawai tahun 2021;
- (4) Penganggaran gaji pokok dan tunjangan, dan belanja penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (5) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2021 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019;
- (6) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- (7) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD memperhatikan kemampuan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- (9) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- (10) Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2021 melalui DAK Non Fisik, dan
- (11) Belanja Honorarium untuk menganggarkan pemberian honorarium kepada ASN dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah, meliputi honorarium penanggungjawab pengelola keuangan, dengan struktur honorarium berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 dan pemberiannya sesuai kemampuan keuangan daerah, sedangkan honorarium pengadaan barang dan jasa, honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) dengan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD. Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dianggarkan dalam sub kegiatan yang besarnya sesuai kemampuan keuangan daerah sesuai ketentuan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Harga Satuan Tahun 2021.
- (2) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

- (3) Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat dianggarkan dalam rangka: pemberian hadiah yang bersifat perlombaan; penghargaan atas suatu prestasi;
- (4) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai pemerintah daerah mempedomani Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- (5) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa medical check up, kepada: kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (6) Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC), pemerintah daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional;
- (7) Pemerintah daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik pemerintah daerah sesuai amanat Pasal 6 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pada masing-masing SKPD serta besaran tarifnya sesuai dengan masing-masing perda.
- (8) Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada kepala daerah, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah.
- (9) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum.
- (10) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum;



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

(11) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi: pejabat daerah dan staf pemerintah daerah; pimpinan dan anggota DPRD; serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. Belanja Subsidi

Bantuan subsidi bunga merupakan inovasi daerah sekaligus sebagai bagian penanganan dampak Covid-19 dalam rangka peningkatan kemudahan akses permodalan bagi UMKM sebagai upaya membantu meringankan beban pembayaran bunga pinjaman produksi bagi UMKM melalui BUMD perbankan. Belanja subsidi kepada badan usaha milik daerah (BUMD) sebagai penerima subsidi yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021, harus terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Belanja hibah dan bantuan sosial penganggaran yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan Kepala Daerah Nomor 40 Tahun 2017, yang telah disesuaikan dengan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

2) Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria: mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah; dan batas minimal kapitalisasi aset tetap. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada.

Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai maksud Pasal 64 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrua.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2021

Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2021 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.

3) Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

4) Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dirinci atas jenis:

a. Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari: pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota. Kebijakan penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani Pasal 94 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran sebelumnya dengan mempedomani Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Penganggaran belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pihak ketiga, merupakan belanja bagi hasil kepada Pihak Perhutani atas pengelolaan obyek wisata Pantai Logending, dan kepada Koperasi Proyek Induk Pengembangan Wilayah Serayu Bogowonto Sempor atas pengelolaan obyek wisata Waduk Sempor.

b. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa diantaranya harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2021

dalam APBD Tahun Anggaran 2021 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.

Bantuan keuangan kepada partai politik dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2021. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

2.4 Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah TA.2021

Pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 sampai dengan semester 1 (satu) Tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Kebumen telah melakukan perubahan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 102 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebanyak 2 (dua) kali, perubahan yang pertama dilakukan menindaklanjuti terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya, dan perubahan yang kedua menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021, serta Surat Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Nomor 906/2106/Keuda tentang Hasil Inventarisasi dan Pemetaan (Mapping) Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait DAK Non Fisik Jenis Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2021.

Adanya ketentuan untuk menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tanggal 2 Juli 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali, dimana Kabupaten Kebumen ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri masuk kriteria level 4, sehingga beberapa rencana kerja program/kegiatan/sub kegiatan pada satuan kerja perangkat daerah terkait dilakukan pergeseran kembali sebagai upaya aktif Pemerintah Daerah dalam penanganan pandemi Covid-19. Untuk menindaklanjuti hal tersebut Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 yang sudah dilakukan perubahan 2 (dua) kali, harus dilakukan perubahan kembali mengingat beberapa program/kegiatan dan sub kegiatan pada perangkat daerah terkait



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

dilakukan pergeseran antar sub unit organisasi untuk percepatan penanganan pandemi covid di masa darurat. Tindaklanjut Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam percepatan penanganan tanggap darurat covid-19, dibuktikan dengan dikeluarkannya Surat Edaran Bupati Nomor 443/1284 tanggal 3 Juli 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Kebumen, mulai dilaksanakan tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan 20 Juli 2021 sehingga semua pembiayaan menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah termasuk penggunaan belanja yang belum tersedia anggarannya dilakukan dengan menggunakan alokasi anggaran yang dipersiapkan pada Belanja Tidak Terduga (BTT).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka alokasi anggaran dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 yang telah diklasifikasikan menurut organisasi, struktur pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan daerah, mengalami perubahan sehingga alokasi anggaran dimaksud harus disesuaikan dengan melakukan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021. Sebagaimana amanat Pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan adanya beberapa ketentuan tersebut diatas Pemerintah Kabupaten Kebumen memandang perlu melakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021, untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021. Adapun data pergeseran/penyesuaian anggaran tahun 2021 disajikan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

Tabel Pergeseran sebelum APBD-P Tahun Anggaran 2021

| KODE | URAIAN | APBD MURNI 2021 | PERGESERAN 1 | PERGESERAN 2 | PERGESERAN 3 |
|----------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | PERDA 14 TAHUN 2020 | PERBUP 16 TAHUN 2021 | PERBUP 34 TAHUN 2021 | PERBUP 48 TAHUN 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | PENDAPATAN DAERAH | 2.752.338.008.000,00 | 2.710.613.113.000,00 | 2.710.613.113.000,00 | 2.710.613.113.000,00 |
| 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 354.421.071.000,00 | 354.421.071.000,00 | 354.421.071.000,00 | 354.421.071.000,00 |
| 4.1.1 | Pajak Daerah | 95.534.500.000,00 | 95.534.500.000,00 | 95.534.500.000,00 | 95.534.500.000,00 |
| 4.1.2 | Retribusi Daerah | 30.211.764.000,00 | 30.333.764.000,00 | 30.333.764.000,00 | 30.333.764.000,00 |
| 4.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 12.484.000.000,00 | 12.484.000.000,00 | 12.484.000.000,00 | 12.484.000.000,00 |
| 4.1.4 | Lain-lain PAD yang Sah | 216.190.807.000,00 | 216.068.807.000,00 | 216.068.807.000,00 | 216.068.807.000,00 |
| 4.2 | PENDAPATAN TRANSFER | 2.262.776.437.000,00 | 2.223.738.542.000,00 | 2.223.738.542.000,00 | 2.223.738.542.000,00 |
| 4.2.1 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 2.106.071.310.000,00 | 2.067.033.415.000,00 | 2.067.033.415.000,00 | 2.067.033.415.000,00 |
| 4.2.2 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 156.705.127.000,00 | 156.705.127.000,00 | 156.705.127.000,00 | 156.705.127.000,00 |
| 4.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 135.140.500.000,00 | 132.453.500.000,00 | 132.453.500.000,00 | 132.453.500.000,00 |
| 4.3.1 | Pendapatan Hibah | 3.795.000.000,00 | 3.795.000.000,00 | 3.795.000.000,00 | 3.795.000.000,00 |
| 4.3.3 | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 131.345.500.000,00 | 128.658.500.000,00 | 128.658.500.000,00 | 128.658.500.000,00 |
| 5 | BELANJA DAERAH | 2.818.415.166.000,00 | 2.821.753.605.000,00 | 2.822.386.069.000,00 | 2.821.753.605.000,00 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | 1.932.804.072.000,00 | 1.960.851.684.000,00 | 1.960.775.848.000,00 | 1.954.108.570.000,00 |
| 5.1.1 | Belanja Pegawai | 1.187.836.875.000,00 | 1.217.337.459.000,00 | 1.217.337.459.000,00 | 1.214.722.061.000,00 |
| 5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 630.206.760.000,00 | 638.250.229.000,00 | 638.174.393.000,00 | 637.471.513.000,00 |
| 5.1.4 | Belanja Subsidi | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 |
| 5.1.5 | Belanja Hibah | 84.160.160.000,00 | 80.946.480.000,00 | 80.946.480.000,00 | 77.597.480.000,00 |
| 5.1.6 | Belanja Bantuan Sosial | 30.100.277.000,00 | 23.817.516.000,00 | 23.817.516.000,00 | 23.817.516.000,00 |
| 5.2 | BELANJA MODAL | 273.065.757.000,00 | 248.541.584.000,00 | 249.249.884.000,00 | 250.512.928.000,00 |
| 5.2.1 | Belanja Modal Tanah | 3.000.000.000,00 | 3.000.000.000,00 | 3.000.000.000,00 | 3.000.000.000,00 |
| 5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 80.309.474.000,00 | 91.107.265.000,00 | 91.815.565.000,00 | 93.078.609.000,00 |
| 5.2.3 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 53.670.579.000,00 | 48.227.062.000,00 | 48.227.062.000,00 | 48.227.062.000,00 |
| 5.2.4 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 126.053.738.000,00 | 98.194.166.000,00 | 98.194.166.000,00 | 98.194.166.000,00 |
| 5.2.5 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 10.031.966.000,00 | 8.013.091.000,00 | 8.013.091.000,00 | 8.013.091.000,00 |
| 5.3 | BELANJA TIDAK TERDUGA | 1.445.000.000,00 | 1.445.000.000,00 | 1.445.000.000,00 | 6.216.770.000,00 |
| 5.3.1 | Belanja Tidak Terduga | 1.445.000.000,00 | 1.445.000.000,00 | 1.445.000.000,00 | 6.216.770.000,00 |
| 5.4 | BELANJA TRANSFER | 611.100.337.000,00 | 610.915.337.000,00 | 610.915.337.000,00 | 610.915.337.000,00 |
| 5.4.1 | Belanja Bagi Hasil | 14.019.972.000,00 | 14.019.972.000,00 | 14.019.972.000,00 | 14.019.972.000,00 |
| 5.4.2 | Belanja Bantuan Keuangan | 597.080.365.000,00 | 596.895.365.000,00 | 596.895.365.000,00 | 596.895.365.000,00 |
| | Surplus / (Defisit) | (66.077.158.000,00) | (111.140.492.000,00) | (111.772.956.000,00) | (111.140.492.000,00) |
| 6 | PEMBIAYAAN DAERAH | | | | |
| 6.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 70.577.158.000,00 | 115.640.492.000,00 | 115.640.492.000,00 | 115.640.492.000,00 |
| 6.1.1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 70.577.158.000,00 | 115.640.492.000,00 | 115.640.492.000,00 | 115.640.492.000,00 |
| 6.1.5 | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | | | | |
| 6.2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 4.500.000.000,00 | 4.500.000.000,00 | 4.500.000.000,00 | 4.500.000.000,00 |
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Daerah | 3.000.000.000,00 | 3.000.000.000,00 | 3.000.000.000,00 | 3.000.000.000,00 |
| 6.2.4 | Pemberian Pinjaman Daerah | 1.500.000.000,00 | 1.500.000.000,00 | 1.500.000.000,00 | 1.500.000.000,00 |
| | Pembiayaan Netto | 66.077.158.000,00 | 111.140.492.000,00 | 111.140.492.000,00 | 111.140.492.000,00 |
| | Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan (SILPA) | - | - | - | - |

Perubahan KUA dan perubahan PPAS Tahun Anggaran 2021 dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Adanya beberapa regulasi dari Pemerintah Pusat yang mengalami perubahan, diantaranya pendapatan dari dana-dana transfer disesuaikan dengan penerimaan yang akan diterima dan sudah masuk Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), pendapatan pajak dan retribusi daerah disesuaikan dengan potensi yang ada, dan realisasi
- Berdasar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020 (Audited) yang dituangkan pada Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020, terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2020 sebesar Rp219.950.309.565,98. SiLPA tersebut dialokasikan untuk belanja yang sifatnya transitoris antara lain Belanja BOS



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

- sebesar Rp5.489.228.691,00 Belanja BLUD RSUD Soedirman Rp42.520.446.365,00 BLUD RSUD Prembun Rp14.181.489.009,00 dan BLUD Puskesmas sebesar Rp14.639.335.258,98 serta belanja-belanja yang wajib didanai dari Sisa Dana DAK Fisik sebesar Rp1.647.872.802,00, SiLPA Dana Insentif Daerah sebesar Rp3.666.943.755,00, SiLPA DAU Tambahan untuk Kelurahan sebesar Rp172.501.055,00 dan SiLPA DBHCHT sebesar Rp. 577.429.418,00;
- c. Perubahan kebijakan belanja daerah disebabkan adanya beberapa perubahan asumsi belanja transfer ke daerah antara lain transfer dari Pemerintah Pusat dan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang harus disesuaikan mendasari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping adanya perubahan atau pergeseran belanja program/kegiatan/sub kegiatan karena adanya penyesuaian pendapatan asli daerah setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
 - d. Perubahan belanja program kegiatan baik antar organisasi, antar program dan kegiatan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pada belanja Operasi;
 - e. Perubahan Belanja Modal diantaranya untuk penambahan pengadaan motor kades, pembangunan/rehabilitasi sarana prasarana dan utilitas sekolah dasar, rehabilitasi sedang/berat sarana prasarana dan utilitas sekolah, pengadaan sarana prasarana gedung kantor, pengadaan meubeler sekolah, pembayaran ganti rugi tanah drainase, pembangunan Puskesmas Pembantu dan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor.
 - f. Perubahan Belanja Tidak Terduga pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 hanya dilakukan penyesuaian adanya penambahan belanja tidak terduga sebagaimana amanat Permendagri 15 Tahun 2021, dimana belanja tidak terduga bertambah untuk mengakomodir anggaran penanganan covid-19 yang belum tersedia anggarannya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan TA 2021 ditetapkan dengan Perda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Dalam pelaksanaannya APBD-Perubahan mengalami pergeseran sebagaimana berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

| KODE | URAIAN | APBD PERUBAHAN | PERGESERAN STLH PRBHN | PERGESERAN STLH PRBHN |
|------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | PERDA 8 TAHUN 2021 | PERBUP 101 TAHUN 2021 | PERBUP 101 TAHUN 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | PENDAPATAN DAERAH | 2.741.711.600.000,00 | 2.741.711.600.000,00 | 2.741.711.600.000,00 |
| 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 398.974.820.000,00 | 398.974.820.000,00 | 398.974.820.000,00 |
| 4.1.1 | Pajak Daerah | 101.551.500.000,00 | 101.551.500.000,00 | 101.551.500.000,00 |
| 4.1.2 | Retribusi Daerah | 29.520.683.000,00 | 29.520.683.000,00 | 29.520.683.000,00 |
| 4.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 16.552.859.000,00 | 16.552.859.000,00 | 16.552.859.000,00 |
| 4.1.4 | Lain-lain PAD yang Sah | 251.349.778.000,00 | 251.349.778.000,00 | 251.349.778.000,00 |
| 4.2 | PENDAPATAN TRANSFER | 2.209.563.280.000,00 | 2.209.563.280.000,00 | 2.209.563.280.000,00 |
| 4.2.1 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 2.051.701.194.000,00 | 2.051.701.194.000,00 | 2.051.701.194.000,00 |
| 4.2.2 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 157.862.086.000,00 | 157.862.086.000,00 | 157.862.086.000,00 |
| 4.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 133.173.500.000,00 | 133.173.500.000,00 | 133.173.500.000,00 |
| 4.3.1 | Pendapatan Hibah | 3.795.000.000,00 | 3.795.000.000,00 | 3.795.000.000,00 |
| 4.3.3 | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 129.378.500.000,00 | 129.378.500.000,00 | 129.378.500.000,00 |
| 5 | BELANJA DAERAH | 2.958.061.909.000,00 | 2.958.061.909.000,00 | 2.958.061.909.000,00 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | 2.049.740.910.000,00 | 2.049.740.910.000,00 | 2.049.740.910.000,00 |
| 5.1.1 | Belanja Pegawai | 1.213.347.347.000,00 | 1.213.347.347.000,00 | 1.213.347.347.000,00 |
| 5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 733.937.101.000,00 | 733.896.601.000,00 | 733.896.601.000,00 |
| 5.1.4 | Belanja Subsidi | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 |
| 5.1.5 | Belanja Hibah | 78.200.274.000,00 | 78.200.274.000,00 | 78.200.274.000,00 |
| 5.1.6 | Belanja Bantuan Sosial | 23.756.188.000,00 | 23.796.688.000,00 | 23.796.688.000,00 |
| 5.2 | BELANJA MODAL | 291.188.892.000,00 | 291.188.892.000,00 | 291.188.892.000,00 |
| 5.2.1 | Belanja Modal Tanah | 4.911.216.000,00 | 4.911.216.000,00 | 4.911.216.000,00 |
| 5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 122.203.064.000,00 | 122.203.064.000,00 | 122.203.064.000,00 |
| 5.2.3 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 48.461.739.000,00 | 48.461.739.000,00 | 48.461.739.000,00 |
| 5.2.4 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 107.679.178.000,00 | 107.679.178.000,00 | 107.679.178.000,00 |
| 5.2.5 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 7.933.695.000,00 | 7.933.695.000,00 | 7.933.695.000,00 |
| 5.3 | BELANJA TIDAK TERDUGA | 6.216.770.000,00 | 6.216.770.000,00 | 6.216.770.000,00 |
| 5.3.1 | Belanja Tidak Terduga | 6.216.770.000,00 | 6.216.770.000,00 | 6.216.770.000,00 |
| 5.4 | BELANJA TRANSFER | 610.915.337.000,00 | 610.915.337.000,00 | 610.915.337.000,00 |
| 5.4.1 | Belanja Bagi Hasil | 14.019.972.000,00 | 14.019.972.000,00 | 14.019.972.000,00 |
| 5.4.2 | Belanja Bantuan Keuangan | 596.895.365.000,00 | 596.895.365.000,00 | 596.895.365.000,00 |
| | Surplus / (Defisit) | (216.350.309.000,00) | (216.350.309.000,00) | (216.350.309.000,00) |
| 6 | PEMBIAYAAN DAERAH | | | |
| 6.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 221.450.309.000,00 | 221.450.309.000,00 | 221.450.309.000,00 |
| 6.1.1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 219.950.309.000,00 | 219.950.309.000,00 | 219.950.309.000,00 |
| 6.1.5 | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | 1.500.000.000,00 | 1.500.000.000,00 | 1.500.000.000,00 |
| 6.2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 5.100.000.000,00 | 5.100.000.000,00 | 5.100.000.000,00 |
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Daerah | 3.000.000.000,00 | 3.000.000.000,00 | 3.000.000.000,00 |
| 6.2.4 | Pemberian Pinjaman Daerah | 2.100.000.000,00 | 2.100.000.000,00 | 2.100.000.000,00 |
| | Pembiayaan Netto | 216.350.309.000,00 | 216.350.309.000,00 | 216.350.309.000,00 |
| | Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan (SILPA) | | | |

2.5 Indikator Pencapaian Target Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

a. Pendapatan

Estimasi pendapatan daerah didasarkan pada potensi dan perhitungan riil atas pendapatan daerah baik Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah.

Adapun estimasi Pendapatan Daerah tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- 1) Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 398.974.820.000,00 atau 14,55% dari total Pendapatan, yang terdiri dari:
 - a) Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp 101.551.500.000,00 atau 3,70% dari total Pendapatan;
 - b) Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp 29.520.683.000,00 atau 1,08% dari total Pendapatan;



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

- c) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp16.552.859.000,00 atau sebesar 0,60% dari total Pendapatan;
 - d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp 251.349.778.000,00 atau sebesar 9,17% dari total Pendapatan;
 - 2) Pendapatan Transfer sebesar Rp 2.209.563.280.000,00 atau sebesar 80,59% dari total pendapatan, yang terdiri dari:
 - a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp2.051.701.194.000,00 atau sebesar 74,83% dari total Pendapatan.
 - b) Pendapatan Transfer antar Pemerintah Daerah sebesar Rp 157.862.086.000,00 atau sebesar 5,76% dari total Pendapatan;
 - 3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp 133.173.500.000,00 atau sebesar 4,86% dari total Pendapatan.
- b. Belanja
- Belanja Daerah secara rinci diestimasikan sebagai berikut:
- 1) Belanja Operasi sebesar Rp204.9740.910.000,00 atau sebesar 69,29% dari total Belanja, yang terdiri dari:
 - a) Belanja Pegawai sebesar Rp1.213.347.347.000,00 atau sebesar 41,02% dari total Belanja;
 - b) Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp733.937.101.000,00 atau sebesar 24,81% dari total Belanja;
 - c) Belanja Subsidi sebesar Rp500.000.000,00 atau sebesar 0,02% dari total Belanja
 - d) Belanja Hibah sebesar Rp78.200.274.000,00 atau sebesar 2,64% dari total Belanja;
 - e) Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp23.756.188.000,00 atau sebesar 0,80% dari total Belanja;
 - 2) Belanja Modal sebesar Rp 291.188.892.000,00 atau sebesar 9,84% dari total Belanja, yang terdiri dari:
 - a) Belanja Modal Tanah sebesar Rp 4.911.216.000,00 atau sebesar 0,17% dari total Belanja;
 - b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp 1.22.203.064.000,00 atau sebesar 4,13% dari total Belanja;
 - c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp 48.461.739.000,00 atau sebesar 1,64% dari total Belanja;
 - d) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp 107.679.178.000,00 atau sebesar 3,64% dari total Belanja;
 - e) Belanja Modal Aset tetap lainnya sebesar Rp 7.933.695.000,00 atau sebesar 0,27% dari total Belanja;
 - 3) Belanja Tak Terduga sebesar Rp 6.216.770.000,00 atau sebesar 0,21% dari Total Belanja;
 - 4) Belanja Transfer dianggarkan sebesar Rp 610.915.337.000,00 atau sebesar 20,65% dari Total Belanja, yang terdiri dari:



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

- 1) Belanja Bagi Hasil sebesar Rp1.4019.972.000,00 atau sebesar 0,47% dari total Belanja;
 - 2) Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp596.895.365.000,00 atau sebesar 20,18% dari total Belanja.
- c. Pembiayaan
- Pembiayaan dianggarkan untuk menutup selisih jumlah pendapatan dan belanja daerah. Pada APBD tahun 2021 pembiayaan dianggarkan sebesar Rp216.350.309.000 yang berarti sisa lebih perhitungan anggaran minimal diharapkan sebesar tersebut. Pembiayaan terdiri dari estimasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp221.450.309.000,00 sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp5.100.000.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pencapaian kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen diukur dari realisasi atas Anggaran yang telah disepakati dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

a. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah pada APBD murni ditargetkan sebesar Rp2.752.338.008.000,00, dengan adanya pandemi Covid-19 pada APBD-Perubahan targetnya turun menjadi Rp2.741.711.600.000,00. Realisasi pendapatan di Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.832.035.015.733,00 atau 103,29%. Jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2020 yang sebesar Rp2.763.229.307.219,80 mengalami kenaikan sebesar Rp68.805.708.513,20 atau 2,49%. Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021

| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/Kurang | (%) |
|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------|
| Pendapatan Daerah | 2.741.711.600.000,00 | 2.832.035.015.733,00 | 90.323.415.733,00 | 103,29 |

Pendapatan Daerah tersebut secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel
Anggaran dan Realisasi Rincian Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021

| No | Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/Kurang | (%) |
|----|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------|
| 1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 398.974.820.000,00 | 472.017.087.115,00 | 73.042.267.115,00 | 118,31 |
| | Pajak Daerah | 101.551.500.000,00 | 112.474.854.190,00 | 10.923.354.190,00 | 110,76 |
| | Retribusi Daerah | 29.520.683.000,00 | 23.652.739.277,00 | (5.867.943.723,00) | 80,12 |
| | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 16.552.859.000,00 | 16.552.860.815,00 | 1.815,00 | 100,00 |
| | Lain-lain PAD yang Sah | 251.349.778.000,00 | 319.336.632.833,00 | 67.986.854.833,00 | 127,05 |
| 2 | PENDAPATAN TRANSFER | 2.209.563.280.000,00 | 2.222.632.960.883,00 | 13.069.680.883,00 | 100,59 |
| | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 2.051.701.194.000,00 | 2.059.293.466.080,00 | 7.592.272.080,00 | 100,37 |
| | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 157.862.086.000,00 | 163.339.494.803,00 | 5.477.408.803,00 | 103,47 |
| 3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 133.173.500.000,00 | 137.384.967.735,00 | 4.211.467.735,00 | 103,16 |
| | Pendapatan Hibah | 3.795.000.000,00 | 8.794.749.700,00 | 4.999.749.700,00 | 231,75 |
| | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 129.378.500.000,00 | 128.590.218.035,00 | (788.281.965,00) | 99,39 |



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

Dari tabel di atas dapat diketahui Target Pendapatan Asli Daerah tahun anggaran 2021 sebesar Rp398.974.820.000,00 dan terealisasi sebesar Rp472.017.087.115,00 atau sebesar 118,31%. Realisasi ini diperoleh dari Pajak Daerah sebesar Rp112.474.854.190,00 dari target sebesar Rp101.551.500.000,00 atau sebesar 110,76%, Retribusi Daerah sebesar Rp23.652.739.277,00 dari target sebesar Rp29.520.683.000,00 atau sebesar 80,12%, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp16.552.860.815,00 atau sebesar 100,00% dari target Rp16.552.859.000,00 dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp319.336.632.833,00 dari target Rp251.349.778.000,00 atau sebesar 127,05%.

Pendapatan Transfer mencapai target yang ditetapkan, dengan realisasi sebesar Rp2.222.632.960.883,00 dari target sebesar Rp2.209.563.280.000,00 atau 100,59%. Realisasi Pendapatan Transfer ini terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp2.059.293.466.080,00 atau 100,37%, Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp163.339.494.803,00 atau 103,47%.

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2021 terealisasi sebesar Rp137.384.967.735,00. Pendapatan ini terdiri dari Pendapatan Hibah dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Pendapatan Hibah terdiri dari Hibah dari Pemerintah Pusat antara lain Hibah Sanitasi, Hibah Air Minum Perdesaan dan Hibah IPDMIP. Sedangkan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan terdiri dari pendapatan Dana BOS.

Dilihat dari kontribusi masing-masing jenis pendapatan pada tahun 2021, Pendapatan Transfer merupakan komponen pendapatan yang utama dalam Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan kontribusi sebesar 78,48% dari total realisasi pendapatan. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah menyokong Pendapatan Daerah sebesar 16,67% dan Lain-lain Pendapatan yang Sah memberikan kontribusi sebesar 4,85%.

b. Belanja Daerah

Belanja Daerah tahun anggaran 2021 pada APBD murni dianggarkan sebesar Rp2.818.415.166.000,00 menjadi sebesar Rp2.958.061.909.000,00 pada APBD-Perubahan. Berdasarkan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 Belanja Daerah pada tahun anggaran 2021 terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer.

Belanja Daerah tahun anggaran 2021 terealisasi 93,98% atau sebesar Rp2.779.840.698.100,00. Realisasi tersebut terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp1.902.638.912.710,00, Belanja Modal sebesar Rp266.110.950.340,00, Belanja Tak Terduga sebesar Rp545.318.400,00 dan Belanja Transfer sebesar Rp 610.545.516.650,00.

Realisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dirinci sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

Tabel
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

| No | Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/Kurang | (%) |
|----|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|
| 1 | BELANJA OPERASI | 2.049.740.910.000,00 | 1.902.638.912.710,00 | (147.101.997.290,00) | 92,82 |
| | Belanja Pegawai | 1.213.347.347.000,00 | 1.141.295.419.703,00 | (72.051.927.297,00) | 94,06 |
| | Belanja Barang dan Jasa | 733.896.601.000,00 | 666.965.891.277,00 | (66.930.709.723,00) | 90,88 |
| | Belanja Subsidi | 500.000.000,00 | 484.527.400,00 | (15.472.600,00) | 96,91 |
| | Belanja Hibah | 78.200.274.000,00 | 72.414.174.601,00 | (5.786.099.399,00) | 92,60 |
| | Belanja Bantuan Sosial | 23.796.688.000,00 | 21.478.899.729,00 | (2.317.788.271,00) | 90,26 |
| 2 | BELANJA MODAL | 291.188.892.000,00 | 266.110.950.340,00 | (25.077.941.660,00) | 91,39 |
| | Belanja Modal Tanah | 4.911.216.000,00 | 4.062.715.011,00 | (848.500.989,00) | 82,72 |
| | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 122.203.064.000,00 | 112.083.903.500,00 | (10.119.160.500,00) | 91,72 |
| | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 48.461.739.000,00 | 44.827.545.305,00 | (3.634.193.695,00) | 92,50 |
| | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 107.679.178.000,00 | 97.454.097.763,00 | (10.225.080.237,00) | 90,50 |
| | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 7.933.695.000,00 | 7.682.688.761,00 | (251.006.239,00) | 96,84 |
| 3 | BELANJA TIDAK TERDUGA | 6.216.770.000,00 | 545.318.400,00 | (5.671.451.600,00) | 8,77 |
| | Belanja Tidak Terduga | 6.216.770.000,00 | 545.318.400,00 | (5.671.451.600,00) | 8,77 |
| 4 | BELANJA TRANSFER | 610.915.337.000,00 | 610.545.516.650,00 | (369.820.350,00) | 99,94 |
| | Belanja Bagi Hasil | 14.019.972.000,00 | 13.862.929.650,00 | (157.042.350,00) | 98,88 |
| | Belanja Bantuan Keuangan | 596.895.365.000,00 | 596.682.587.000,00 | (212.778.000,00) | 99,96 |
| | Jumlah Belanja | 2.958.061.909.000,00 | 2.779.840.698.100,00 | (178.221.210.900,00) | 93,98 |

Berdasarkan data di atas, maka Belanja Daerah didominasi Belanja Operasi dengan proporsi 68,44% dari total Belanja Daerah, Belanja Modal sebesar 9,57%, Belanja Transfer sebesar 0,50 % dan Belanja Tak Terduga sebesar 0,02%.

c. Pembiayaan

Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 disajikan sebagai berikut:

Tabel
Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Tahun Anggaran 2021

| No | Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%) |
|----|--|---------------------------|---------------------------|---------------|
| 1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 221.450.309.000,00 | 222.085.309.565,98 | 100,29 |
| | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 219.950.309.000,00 | 219.985.309.565,98 | 100,02 |
| | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | 1.500.000.000,00 | 2.100.000.000,00 | 140,00 |
| | | | | |
| 2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 5.100.000.000,00 | 5.100.000.000,00 | 100,00 |
| | Penyertaan Modal Daerah | 3.000.000.000,00 | 3.000.000.000,00 | 100,00 |
| | Pemberian Pinjaman Daerah | 2.100.000.000,00 | 2.100.000.000,00 | 100,00 |
| | Pembiayaan Netto | 216.350.309.000,00 | 216.985.309.565,98 | 100,29 |



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Dari penjelasan komposisi realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan di atas, diperoleh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran TA 2021 sebesar Rp269.179.627.198,98.

2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

a. Pendapatan Daerah

Capaian pendapatan daerah TA 2021 terealisasi sebesar 103,29% namun untuk Pendapatan Retribusi Daerah hanya tercapai 80,12%. Pencapaian target pendapatan dipengaruhi beberapa faktor antara lain:

- 1) Kondisi Pandemi Covid 19 mempengaruhi penurunan pendapatan daerah
- 2) Keterbatasan Sarana dan Prasarana dalam memaksimalkan pendapatan daerah
- 3) Pemungutan pendapatan daerah belum semua sektor memanfaatkan teknologi informasi, masih dilakukan secara manual.
- 4) Terbatasnya kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia pengelola pendapatan daerah;
- 5) Pada kelompok penerimaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah permasalahan yang selalu terjadi adalah kesulitan melakukan prediksi serta terlambatnya informasi atas penerimaan dan bagi hasil baik pajak maupun sumber daya alam dari pemerintah dan penerimaan dana bagi hasil dari provinsi;
- 6) Ketatnya persyaratan pencairan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat.

Adapun upaya yang dilakukan antara lain:

- 1) Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemungutan pendapatan daerah;
- 2) Mempersiapkan kualitas dan kompetensi tenaga pengelola pendapatan daerah melalui pelatihan, bimbingan teknik dan *in house training*;
- 3) Meningkatkan pengawasan pemungutan dan penyetoran pajak dan retribusi.
- 4) Meningkatkan sosialisasi dan promosi untuk menggali pendapatan.
- 5) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait dengan alokasi Dana-dana Transfer.

b. Belanja Daerah

Capaian Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 terealisasi sebesar 93,98%, kendala dalam pencapaian Belanja Daerah antara lain disebabkan :

- 1) Adanya kebijakan Pemerintah terhadap pembatasan kegiatan-kegiatan yang berpotensi menyebabkan penyebaran COVID-19.
- 2) Dana BTT yang bersifat penyediaan untuk penanganan COVID-19 dan bencana alam tidak terserap maksimal karena pada tahun 2021 angka kasus Covid-19 menurun dan tidak terjadi bencana alam.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

- 3) Alokasi belanja peningkatan jalan sumber dana APBD provinsi yang teralokasi pada APBD Perubahan tidak dapat direalisasikan karena tidak cukup waktu.
- 4) Kegiatan Belanja jasa Tenaga Kesehatan dan Kegiatan Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana tidak terserap maksimal karena kasus covid menurun.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tahun Anggaran 2021

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi yang diterapkan pada penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas serta Catatan atas Laporan Keuangan berdasarkan pada peraturan yang telah ditetapkan yaitu Peraturan Bupati Kebumen Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kebumen.

4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas pelaporan adalah Pemerintah Daerah atau satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah atau organisasi lainnya menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

Entitas Pelaporan pada Pemerintah Kabupaten Kebumen dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen yang menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen meliputi rekening-rekening Entitas Pemerintah Daerah secara keseluruhan yang tidak dipisah-pisahkan, termasuk seluruh unit kerja dalam organisasi Pemerintah Kabupaten Kebumen. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen merupakan hasil konsolidasi dari laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen selaku entitas akuntansi.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen tidak mengkonsolidasikan rekening-rekening yang merupakan entitas kekayaan Pemerintah Kabupaten Kebumen yang dipisahkan baik berbentuk Perusahaan Daerah maupun Yayasan dan Entitas terpisah lainnya yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Kebumen.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 adalah basis akrual, dimana pengakuan pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 menggunakan nilai perolehan historis dengan menggunakan mata uang rupiah sehingga transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2021

tukar kurs tengah Bank Indonesia. Angka-angka dalam laporan keuangan disajikan sampai dengan dua digit di belakang koma.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Kebijakan akuntansi akun yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Kebumen secara rinci dijelaskan sebagai berikut.

4.4.1. Kebijakan Akuntansi Aset

Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset non lancar. Aset lancar meliputi Kas dan setara Kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Adapun aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan Aset Tak Berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan Pemerintah Daerah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

4.4.1.1. Aset Lancar

4.4.1.1.1. Kas dan Setara Kas

a. Definisi

- 1) Kas dan setara Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
- 2) Kas meliputi seluruh Uang Persediaan (Sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan), Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran, dan uang tunai atau simpanan di bank yang belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.

Termasuk kas adalah:

- 1) pendapatan yang telah diterima Rekening Kas Umum Daerah;
- 2) penerimaan kas yang diterima oleh Bendahara Penerimaan sebagai pendapatan daerah yang belum disetor ke Rekening Kas Umum Daerah sampai dengan tanggal pelaporan keuangan;
- 3) penerimaan transitoris oleh Bendahara Umum Daerah yang belum disetor ke Rekening Kas Umum Negara maupun pihak lain sampai dengan tanggal pelaporan keuangan;
- 4) potongan pajak oleh Bendahara Pengeluaran yang belum disetor ke Rekening Kas Umum Negara sampai dengan tanggal pelaporan keuangan;
- 5) kas yang diterima dan digunakan langsung oleh SKPD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang dilaporkan ke Bendahara Umum Daerah sebagai pendapatan Badan Layanan Umum Daerah;
- 6) kas yang diterima dan digunakan langsung oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang merupakan bagian dari entitas SKPD yang dilaporkan ke Bendahara Umum Daerah untuk disahkan sebagai pendapatan; dan



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

- 7) hibah langsung yang diterima SKPD yang kemudian digunakan langsung oleh SKPD tanpa disetorkan terlebih dahulu ke Rekening Kas Umum Daerah dan dilaporkan ke Bendahara Umum Daerah untuk diakui sebagai pendapatan daerah.

Kas terdiri dari:

- 1) Kas di Kas daerah;
- 2) Kas di Bendahara Penerimaan;
- 3) Kas di Bendahara Pengeluaran;
- 4) Kas di Badan Layanan Umum Daerah;
- 5) Kas Dana BOS;
- 6) Kas Dana Kapitasi pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; dan
- 7) Kas Lainnya.

Termasuk dalam setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek yaitu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.

b. Pengakuan

- 1) Kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan.
- 2) Hibah Langsung yang diterima SKPD diakui pada saat dilaporkan ke Bendahara Umum Daerah untuk disahkan sebagai pendapatan daerah.

c. Pengukuran

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

d. Penyajian

- 1) Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas.
- 2) Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas.

e. Pengungkapan

Pengungkapan kas dan setara kas dalam CaLK antara lain mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) rincian kas dan nilai kas yang disajikan dalam laporan keuangan;
- 2) rincian kas dan nilai kas yang ada dalam rekening kas umum daerah namun merupakan kas transitoris yang belum disetorkan ke pihak yang berkepentingan seperti PPN/PPH yang dipungut tetapi belum disetorkan ke Kas Negara, Iuran Tunjangan Kesehatan/Taspen/Taperum/Jaminan Kecelakaan Kerja/Jaminan Kematian yang belum disetorkan dan lain-lain; dan
- 3) informasi lainnya yang dianggap penting.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

4.4.1.1.2. Investasi Jangka Pendek

a. Definisi

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, biasanya digunakan untuk tujuan manajemen kas dimana Pemerintah Daerah dapat menjual investasi tersebut jika muncul kebutuhan akan kas dan berisiko rendah serta dimiliki dalam waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan. Investasi Jangka Pendek dapat berupa:

- 1) Saham;
- 2) Deposito;
- 3) Surat Utang Negara;
- 4) Sertifikat Bank Indonesia;
- 5) Surat Perbendaharaan Negara;
- 6) Investasi Jangka Pendek BLUD.

b. Pengakuan

- 1) investasi jangka pendek diakui saat terdapat pengeluaran kas yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) memungkinkan Pemerintah Daerah memperoleh manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; dan
 - b) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).
- 2) Penerimaan Kas dapat diakui sebagai pelepasan/pengurang investasi jangka pendek apabila terjadi penjualan, pelepasan hak atau pencairan dana karena kebutuhan, jatuh tempo, maupun karena peraturan Pemerintah Daerah. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan deviden tunai diakui pada saat diperoleh sebagai pendapatan (Pendapatan Asli Daerah).

c. Pengukuran

Pengukuran investasi jangka pendek sesuai dengan jenisnya, sebagai berikut:

- 1) Saham dicatat sebesar harga perolehan;
- 2) Deposito Berjangka dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut;
- 3) Surat Utang Negara dicatat dengan nilai pasar sebagai dasar penerapan nilai wajar karena terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar;
- 4) Sertifikat Bank Indonesia dicatat dengan nilai pasar sebagai dasar penerapan nilai wajar karena terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar;
- 5) Surat Perbendaharaan Negara dicatat dengan nilai pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar;
- 6) Investasi Jangka Pendek BLUD dicatat sebesar nilai nominal.

d. Penyajian

Investasi jangka pendek disajikan di Neraca sebagai bagian dari Aset Lancar.

e. Pengungkapan

Pengungkapan investasi jangka pendek dalam CaLK antara lain mengenai:



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

- 1) jenis-jenis investasi jangka pendek yang dimiliki;
- 2) penurunan nilai investasi jangka pendek yang dimiliki; dan
- 3) perubahan nilai pasar investasi jangka pendek (bila ada).

4.4.1.1.3. Piutang

a. Definisi

- 1) piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
- 2) piutang diklasifikasikan berdasarkan peristiwa yang menimbulkan piutang, yaitu:
 - a) Piutang Pendapatan, meliputi:
 - (1) piutang berdasarkan pungutan Pendapatan Daerah, adalah hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang yang timbul berdasarkan Undang-undang Pajak dan Retribusi daerah meliputi piutang pajak dan piutang retribusi, serta peraturan daerah yang berlaku di Kabupaten Kebumen meliputi Piutang lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
 - (2) piutang berdasarkan perikatan perjanjian, adalah hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang yang timbul antara lain karena adanya pemberian pinjaman, transaksi jual beli, kemitraan dengan pihak lain, pemberian fasilitas/jasa kepada pihak lain atau adanya transaksi dibayar di muka; dan
 - (3) piutang transfer antar pemerintahan, adalah hak Pemerintah Daerah untuk menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan perundang-undangan. Piutang ini dapat timbul karena perbedaan waktu antara timbulnya hak tagih dan saat dilaksanakannya pembayaran melalui transfer.
 - b) Piutang lainnya, meliputi:
 - (1) piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi, adalah hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang yang terjadi karena adanya peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang disebabkan karena pelaksanaan tuntutan ganti rugi yang telah diputus/ditetapkan oleh pihak yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena adanya kerugian negara/daerah seperti Piutang Tuntutan Ganti Rugi; dan
 - (2) piutang berdasarkan peristiwa lainnya, adalah hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang yang terjadi karena adanya peristiwa lainnya selain peristiwa di atas, meliputi Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Uang Muka Belanja, Beban dibayar di muka, dan uang muka yang harus dipertanggungjawabkan.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

b. Pengakuan

Piutang dapat diakui apabila memenuhi kriteria:

- a) Telah terbit atau keluar dokumen resmi yang menyatakan dan kewajiban secara jelas;
- b) Nilai piutang dapat diukur;
- c) Dapat dilakukan penagihan atas dokumen resmi pada nomor poin a), dan
- d) Kewajiban belum dilunasi.

c. Pengukuran

- 1) Piutang dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) dengan memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak tertagih.
- 2) Penyisihan kerugian piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang dan dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang.
- 3) Untuk menentukan besarnya penyisihan pada tiap akhir tahun piutang dikelompokkan menurut umurnya (*aging schedule*) terlebih dahulu sebagai dasar perhitungan. Besarnya penyisihan piutang pada tiap akhir tahun ditentukan berdasarkan umur piutang sebagai berikut:

Tabel Piutang Pajak

| NO. | UMUR PIUTANG | % PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH |
|-----|-----------------|-----------------------------------|
| 1. | 1 s/d 2 tahun | 30 % |
| 2. | > 2 s/d 3 tahun | 50 % |
| 3. | > 3 s/d 5 tahun | 75 % |
| 4. | > 5 tahun | 100 % |

Tabel Piutang Retribusi Daerah

| NO. | UMUR PIUTANG | % PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH |
|-----|-----------------|-----------------------------------|
| 1. | 1 s/d 2 tahun | 30 % |
| 2. | > 2 s/d 3 tahun | 50 % |
| 3. | > 3 s/d 5 tahun | 75 % |
| 4. | > 5 tahun | 100 % |

Tabel Piutang Lainnya Tuntutan Ganti Rugi

| NO. | UMUR PIUTANG | % PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH |
|-----|-------------------------|-----------------------------------|
| 1. | 1 s/d 6 bulan | 20 % |
| 2. | > 6 bl s/d 12 bulan | 40 % |
| 3. | > 12 bl s/d 18 bulan | 60 % |
| 4. | > 18 bulan s/d 24 bulan | 80% |
| 5. | >24 bulan | 100% |

Tabel Piutang Lainnya karena perikatan/perjanjian

| NO. | UMUR PIUTANG | % PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH |
|-----|-----------------|-----------------------------------|
| 1. | 1 s/d 2 tahun | 30 % |
| 2. | > 2 s/d 3 tahun | 50 % |
| 3. | > 3 s/d 5 tahun | 75 % |
| 4. | > 5 tahun | 100 % |



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

Tabel Piutang Pendapatan BLUD

| NO. | UMUR PIUTANG | % PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH |
|-----|-----------------------|-----------------------------------|
| 1. | 0 s/d 1 bulan | 5 per mil |
| 2. | > 1 bulan s/d 1 tahun | 10 % |
| 3. | > 1 s/d 3 tahun | 50 % |
| 4. | > 3 tahun | 100 % |

- 4) Proses penghapusan piutang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - 5) Jika terdapat pelunasan atas piutang-piutang yang telah dihapuskan sebagaimana dimaksud pada huruf d pelunasan tersebut dibukukan sebagai Pendapatan Lain-lain tahun berjalan.
- d. Penyajian
- Piutang disajikan di Neraca sebagai bagian dari Aset Lancar dengan menyajikan nilai penyisihannya.
- e. Pengungkapan
- 1) Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam CaLK. Informasi dimaksud dapat berupa:
 - a) kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
 - b) rincian jenis-jenis saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
 - c) penjelasan atas penyelesaian piutang; dan
 - d) jaminan atau sita jaminan jika ada. Khusus untuk tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.
 - 2) Penghapus bukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam CaLK agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

4.4.1.1.4. Beban Dibayar Dimuka

a. Definisi

Beban dibayar dimuka adalah pembayaran dimuka suatu biaya yang manfaatnya akan diperoleh pada masa yang akan datang. Beban dibayar dimuka berfungsi untuk membiayai kegiatan operasional jangka panjang Pemerintah Daerah yang jangka waktunya melebihi atau melewati tahun berjalan.

b. Pengakuan

- 1) Beban dibayar di muka diakui dan dicatat pada saat pembayaran.
- 2) Beban dibayar dimuka diakui dan dicatat sebagai biaya pada saat jasa diterima.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

- 3) Beban dibayar di muka berkurang pada saat jasa diterima atau berlalunya waktu.
- c. Pengukuran
Beban dibayar dimuka diukur sebesar jumlah uang yang dibayarkan atau sesuai dengan nilai rupiah pada bukti-bukti yang belum disahkan/ dipertanggungjawabkan.
- d. Penyajian
Biaya Dibayar Dimuka disajikan pada kelompok aset lancar dalam neraca.
- e. Pengungkapan
Hal-hal yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan antara lain:
 - 1) Rincian jenis, jumlah, saldo, dan batas waktu berakhirnya jasa yang diterima.
 - 2) Disajikan secara neto.

4.4.1.1.5. Persediaan

- a. Definisi
 - 1) persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
 - 2) Persediaan merupakan aset yang berupa:
 - a) barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas;
 - b) bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi, misalnya bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku pembuatan benih;
 - c) barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya adalah alat-alat pertanian setengah jadi, benih yang belum cukup umur; dan
 - d) barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, misalnya adalah hewan dan bibit tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
 - 3) Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam CaLK.
- b. Pengakuan
Persediaan diakui:
 - 1) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
 - 2) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

c. Pengukuran

1) Persediaan disajikan sebesar:

- a) biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan;
- b) harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis;
- c) nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

2) persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar;

3) persediaan dinilai dengan menggunakan Metode Harga Pembelian Terakhir; dan

4) persediaan dicatat dengan metode periodik, artinya fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan.

d. Penyajian

Persediaan disajikan di Neraca sebagai bagian dari aset lancar.

e. Pengungkapan

Pengungkapan persediaan dalam Laporan Keuangan antara lain:

- 1) kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
- 2) penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- 3) jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

4.4.1.2. Aset Non Lancar

4.4.1.2.1. Investasi Jangka Panjang

a. Definisi

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu:



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

1) Investasi Non Permanen

- a) investasi jangka panjang non permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

Investasi Non Permanen dapat berupa:

- (1) pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya;
 - (2) penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
 - (3) dana yang disisihkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat; dan
 - (4) investasi non permanen lainnya yang sifatnya tidak untuk dimiliki secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.
- b) Dana Bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.
- c) Dana Bergulir mempunyai karakteristik sebagai berikut:
- (1) merupakan bagian dari Keuangan Daerah;
 - (2) tercantum dalam APBD dan atau laporan keuangan;
 - (3) dikuasai, dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 - (4) merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat, ditagih kembali dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah, selanjutnya dana disalurkan kembali kepada masyarakat/kelompok masyarakat demikian seterusnya (bergulir); dan
 - (5) Pemerintah Daerah dapat menarik kembali dana bergulir.
- d) Dana Bergulir dalam APBD dianggarkan pada Pengeluaran Pembiayaan, untuk pengembalian pokok Dana Bergulir dicatat pada Penerimaan Pembiayaan pos Penerimaan Kembali Pinjaman dan bagi hasil jasa usaha Dana Bergulir dicatat pada Pendapatan Asli Daerah-Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- e) Alokasi Anggaran Dana Bergulir berada di Bendahara Umum Daerah tetapi pelaksanaan pengelolaannya didelegasikan kepada SKPD yang membidangi.
- f) Dana Bergulir disajikan dalam LRA sebagai Pengeluaran Pembiayaan sebesar jumlah Kas yang dikeluarkan dalam rangka perolehan Dana Bergulir.
- g) Dana Bergulir disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen-Dana Bergulir. Pada saat perolehan dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir, tetapi secara periodik Pemerintah Daerah harus melakukan penyesuaian terhadap Dana Bergulir sehingga nilai Dana Bergulir yang tercatat di Neraca menggambarkan nilai bersih yang



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

dapat direalisasikan (*Net realizable Value*). Penyesuaian tersebut berdasarkan data yang dilaporkan oleh SKPD yang membidangi atas pencatatan penatausahaan dana bergulir.

- h) Untuk memperoleh nilai bersih yang dapat direalisasikan, SKPD yang membidangi dana bergulir melakukan penatausahaan dana bergulir sesuai dengan jatuh temponya (*aging scedule*), sehingga diketahui jumlah dana bergulir yang ‘benar-benar tidak dapat ditagih’, dana bergulir kategori ‘diragukan dapat ditagih’ dan dana bergulir yang ‘dapat ditagih’ yang ditentukan berdasarkan umur dana bergulir sejak jatuh tempo sebagai berikut:

Tabel Umur Dana Bergulir

| No. | Umur Dana Bergulir | % Penyisihan Dana Bergulir | Kategori |
|-----|--------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1. | 1 s/d 2 tahun | 30 % | dapat ditagih |
| 2. | >2 s/d 3 tahun | 50 % | memungkinkan dapat ditagih |
| 3. | >3 s/d 5 tahun | 75 % | diragukan dapat ditagih |
| 4. | > 5 tahun | 100 % | tidak dapat ditagih |

2) Investasi Permanen

- a) Investasi Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.
- b) Investasi Permanen dapat berupa:
- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara;
 - (2) Investasi Permanen lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

b. Pengakuan

- 1) Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a) memungkinkan Pemerintah Daerah memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
 - b) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).
- 2) Pengakuan hasil investasi dapat dilakukan dengan cara:
- a) hasil investasi berupa deviden tunai yang diperoleh dari penyertaan modal Pemerintah Daerah yang pencatatannya menggunakan metode biaya dicatat sebagai pendapatan hasil investasi; dan
 - b) apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang berupa deviden tunai yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi Pemerintah Daerah.

c. Pengukuran

- 1) Investasi Permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

- 2) Investasi Nonpermanen:
 - a) investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya;
 - b) investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan;
 - c) penanaman modal di proyek-proyek pembangunan Pemerintah Daerah (seperti Proyek Investasi Rakyat) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga;
 - d) pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi Pemerintah Daerah, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada;
 - e) pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi; dan
 - f) Dana Bergulir diukur berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan, dilaksanakan dengan mengurangi akun Dana Bergulir Diragukan Tertagih dari Dana Bergulir.
- d. Penilaian investasi Pemerintah Daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu:
 - 1) metode biaya;

dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
 - 2) metode ekuitas;

dengan menggunakan metode ekuitas Pemerintah Daerah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi Pemerintah Daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi Pemerintah Daerah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi Pemerintah Daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
 - 3) metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Penggunaan metode tersebut didasarkan pada kriteria sebagai berikut:
 - 1) kepemilikan kurang dari 20% (dua puluh persen) menggunakan metode biaya;
 - 2) kepemilikan 20% (dua puluh persen) sampai 50% (lima puluh persen), atau kepemilikan kurang dari 20% (dua puluh persen) tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
 - 3) kepemilikan lebih dari 50% (lima puluh persen) menggunakan metode ekuitas; dan



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

- 4) kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:

- 1) kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
- 2) kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
- 3) kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*; dan
- 4) kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

e. Penyajian

Investasi Jangka Panjang disajikan di Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK.

f. Pengungkapan

Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam CaLK antara lain mengenai metode penilaian dan jenis investasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

4.4.1.2.2. Aset tetap

a. Definisi

- 1) aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- 2) aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

a) tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

b) peralatan dan mesin

peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

c) gedung dan bangunan

gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

- d) jalan, irigasi, dan jaringan
Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - e) aset tetap lainnya
Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - f) konstruksi dalam pengerjaan
Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pengerjaan namun pada tanggal laporan keuangan belum dapat dimanfaatkan.
- b. Pengakuan
- 1) aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah;
 - 2) apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya;
 - 3) untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) berwujud;
 - b) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - c) biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - d) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
 - e) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
 - f) merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
 - g) nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
 - 4) batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagai berikut:

Tabel Minimal kapitalisasi Aset

| No. | Uraian | Jumlah Harga Satuan/Unit (Rp) |
|-----|--------------------------------------|-------------------------------|
| 1. | Tanah | - |
| 2. | Peralatan dan Mesin | 300.000 |
| 3. | Gedung dan Bangunan | 10.000.000 |
| 4. | Jalan | - |
| 5. | Jembatan | - |
| 6. | Irigasi/Bangunan Air/Pengaman Sungai | - |
| 7. | Instalasi dan Jaringan | - |
| 8. | Buku | - |



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

| No. | Uraian | Jumlah Harga Satuan/Unit (Rp) |
|-----|--|-------------------------------|
| 9. | Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga | - |
| 10. | Hewan/Ternak dan Tumbuhan | - |

- 5) pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria aset tetap di atas akan diperlakukan sebagai belanja; dan
 - 6) aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- c. Pengukuran
- 1) aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan;
 - 2) biaya perolehan aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan;
 - 3) biaya perolehan aset tetap yang dapat diatribusikan secara langsung meliputi:
 - a) honorarium terkait Pengadaan Barang dan Jasa;
 - b) belanja dokumen/administrasi tender;
 - c) belanja jasa pengumuman lelang/pemenang lelang;
 - d) belanja jasa konsultasi (apabila pengadaan aset tetap membutuhkan/menggunakan jasa konsultan);
 - e) belanja perjalanan dinas yang berkaitan dengan pengadaan aset tetap;
 - f) biaya lainnya sampai dengan aset siap digunakan.
 - 4) biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya;
 - 5) setiap potongan pembelian dan rabat dikurangkan dari harga pembelian;
 - 6) bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh;
 - 7) jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan/atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai;
 - 8) biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan;
 - 9) suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperolehnya itu nilai ekuivalen atas nilai tercatat



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas;

- 10) aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional;
- 11) pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Pengeluaran lainnya yang timbul setelah perolehan awal selain pengeluaran yang memberi nilai manfaat tersebut serta yang tidak memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap diakui sebagai beban pengeluaran pada periode di mana beban pengeluaran tersebut terjadi;
- 12) kriteria seperti pada paragraf di atas dan/atau suatu batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak.

Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa *overhaul* dan renovasi disajikan pada table berikut:

Tabel Penambahan Masa Manfaat Aset Tetap Karena Adanya Perbaikan Terhadap Aset Tetap Baik Berupa Overhaul dan Renovasi

| Uraian | Jenis | Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul Dari Nilai Perolehan (di luar penyusutan) | Penambahan Masa manfaat (tahun) |
|------------------------------|----------|--|---------------------------------|
| Alat Besar | | | |
| Alat Besar Darat | Overhaul | >0% s.d. 30% | 1 |
| | | >30% s.d 45% | 3 |
| | | >45% s.d 65% | 5 |
| Alat Besar Apung | Overhaul | >0% s.d. 30% | 1 |
| | | >30% s.d 45% | 2 |
| | | >45% s.d 65% | 4 |
| Alat Bantu | Overhaul | >0% s.d. 30% | 1 |
| | | >30% s.d 45% | 2 |
| | | >45% s.d 65% | 4 |
| Alat Angkutan | | | |
| Alat Angkutan Darat Bermotor | Overhaul | >0% s.d. 25% | 1 |
| | | >25% s.d 50% | 2 |



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

| Uraian | Jenis | Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul Dari Nilai Perolehan (di luar penyusutan) | Penambahan Masa manfaat (tahun) |
|----------------------------------|----------|--|---------------------------------|
| | | >50% s.d 75% | 3 |
| | | >75% s.d.100% | 4 |
| | | | |
| Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | Overhaul | >0% s.d. 25% | 0 |
| | | >25% s.d 50% | 1 |
| | | >50% s.d 75% | 1 |
| | | >75% s.d.100% | 1 |
| | | | |
| Alat Angkutan Apung Bermotor | Overhaul | >0% s.d. 25% | 2 |
| | | >25% s.d 50% | 3 |
| | | >50% s.d 75% | 4 |
| | | >75% s.d.100% | 6 |
| | | | |
| Alat Angkutan Apung Tak Bermotor | Renovasi | >0% s.d. 25% | 1 |
| | | >25% s.d 50% | 1 |
| | | >50% s.d 75% | 1 |
| | | >75% s.d.100% | 2 |
| | | | |
| Alat Angkutan Bermotor Udara | Overhaul | >0% s.d. 25% | 3 |
| | | >25% s.d 50% | 6 |
| | | >50% s.d 75% | 9 |
| | | >75% s.d.100% | 12 |
| | | | |
| Alat Bengkel dan Alat Ukur | | | |
| Alat Bengkel Bermesin | Overhaul | >0% s.d. 25% | 1 |
| | | >25% s.d 50% | 2 |
| | | >50% s.d 75% | 3 |
| | | >75% s.d.100% | 4 |
| | | | |
| Alat Bengkel Tak ber Mesin | Renovasi | >0% s.d. 25% | 0 |
| | | >25% s.d 50% | 0 |
| | | >50% s.d 75% | 1 |
| | | >75% s.d.100% | 1 |
| | | | |
| Alat Ukur | Overhaul | >0% s.d. 25% | 1 |
| | | >25% s.d 50% | 2 |
| | | >50% s.d 75% | 2 |
| | | >75% s.d.100% | 3 |
| | | | |
| Alat Pertanian | | | |
| Alat Pengolahan | Overhaul | >0% s.d. 20% | 1 |
| | | >21% s.d 40% | 2 |
| | | >51% s.d 75% | 5 |
| | | | |



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

| Uraian | Jenis | Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul Dari Nilai Perolehan (di luar penyusutan) | Penambahan Masa manfaat (tahun) |
|--------------------------------------|-----------------|--|---------------------------------|
| Alat Kantor dan Rumah Tangga | | >0% s.d. 25% | 0 |
| Alat Kantor | <i>Overhaul</i> | >25% s.d 50% | 1 |
| | | >50% s.d 75% | 2 |
| | | >75% s.d.100% | 3 |
| Alat Rumah Tangga | <i>Overhaul</i> | >0% s.d. 25% | 0 |
| | | >25% s.d 50% | 1 |
| | | >50% s.d 75% | 2 |
| | | >75% s.d.100% | 3 |
| Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar | <i>Overhaul</i> | >0% s.d. 25% | 1 |
| Alat Studio | | >25% s.d 50% | 1 |
| | | >50% s.d 75% | 2 |
| | | >75% s.d.100% | 3 |
| Alat Komunikasi | <i>Overhaul</i> | >0% s.d. 25% | 1 |
| | | >25% s.d 50% | 1 |
| | | >50% s.d 75% | 2 |
| | | >75% s.d.100% | 3 |
| Peralatan Pemancar | <i>Overhaul</i> | >0% s.d. 25% | 2 |
| | | >25% s.d 50% | 3 |
| | | >50% s.d 75% | 4 |
| | | >75% s.d.100% | 5 |
| Peralatan Komunikasi Navigasi | <i>Overhaul</i> | >0% s.d. 25% | 2 |
| | | >25% s.d 50% | 5 |
| | | >50% s.d 75% | 7 |
| | | >75% s.d.100% | 9 |
| Alat Kedokteran dan Kesehatan | | | |
| Alat Kedokteran | <i>Overhaul</i> | >0% s.d. 25% | 0 |
| | | >25% s.d 50% | 1 |
| | | >50% s.d 75% | 2 |
| | | >75% s.d.100% | 3 |
| Alat Kesehatan Umum | <i>Overhaul</i> | >0% s.d. 25% | 0 |
| | | >25% s.d 50% | 1 |
| | | >50% s.d 75% | 2 |
| | | >75% s.d.100% | 3 |
| Alat laboratorium | | | |
| Unit Alat laboratorium | <i>Overhaul</i> | >0% s.d. 25% | 2 |
| | | >25% s.d 50% | 3 |
| | | >50% s.d 75% | 4 |
| | | >75% s.d.100% | 4 |



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

| Uraian | Jenis | Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul Dari Nilai Perolehan (di luar penyusutan) | Penambahan Masa manfaat (tahun) |
|--|----------|--|---------------------------------|
| Unit Alat laboratorium Kimia Nuklir | Overhaul | >0% s.d. 25% | 3 |
| | | >25% s.d 50% | 5 |
| | | >50% s.d 75% | 7 |
| | | >75% s.d.100% | 8 |
| Alat Laboratorium Fisika | Overhaul | >0% s.d. 25% | 3 |
| | | >25% s.d 50% | 5 |
| | | >50% s.d 75% | 7 |
| | | >75% s.d.100% | 8 |
| Alat Proteksi radiasi / Proteksi Lingkungan | Overhaul | >0% s.d. 25% | 2 |
| | | >25% s.d 50% | 4 |
| | | >50% s.d 75% | 5 |
| | | >75% s.d.100% | 5 |
| Radiation Application & Non Destructive Testing laboratory | Overhaul | >0% s.d. 25% | 2 |
| | | >25% s.d 50% | 4 |
| | | >50% s.d 75% | 5 |
| | | >75% s.d.100% | 5 |
| Alat laboratorium Lingkungan Hidup | Overhaul | >0% s.d. 25% | 1 |
| | | >25% s.d 50% | 2 |
| | | >50% s.d 75% | 3 |
| | | >75% s.d.100% | 4 |
| Peralatan Laboratorium Hidrodinamica | Overhaul | >0% s.d. 25% | 3 |
| | | >25% s.d 50% | 5 |
| | | >50% s.d 75% | 7 |
| | | >75% s.d.100% | 8 |
| Alat laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi | Overhaul | >0% s.d. 25% | 2 |
| | | >25% s.d 50% | 4 |
| | | >50% s.d 75% | 5 |
| | | >75% s.d.100% | 5 |
| Alat Persenjataan Senjata Api | Overhaul | >0% s.d. 25% | 1 |
| | | >25% s.d 50% | 2 |
| | | >50% s.d 75% | 3 |
| | | >75% s.d.100% | 4 |
| Persenjataan Non Senjata Api | Renovasi | >0% s.d. 25% | 0 |
| | | >25% s.d 50% | 0 |
| | | >50% s.d 75% | 1 |
| | | >75% s.d.100% | 1 |
| Senjata Sinar | Overhaul | >0% s.d. 25% | 0 |
| | | >25% s.d 50% | 0 |



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

| Uraian | Jenis | Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul Dari Nilai Perolehan (di luar penyusutan) | Penambahan Masa manfaat (tahun) |
|--|----------|--|---------------------------------|
| | | >50% s.d 75% | 0 |
| | | >75% s.d.100% | 2 |
| Alat Khusus Kepolisian | Overhaul | >0% s.d. 25% | 1 |
| | | >25% s.d 50% | 1 |
| | | >50% s.d 75% | 2 |
| | | >75% s.d.100% | 2 |
| Komputer | | | |
| Komputer Unit | Overhaul | >0% s.d. 25% | 1 |
| | | >25% s.d 50% | 1 |
| | | >50% s.d 75% | 2 |
| | | >75% s.d.100% | 2 |
| Peralatan Komputer | Overhaul | >0% s.d. 25% | 1 |
| | | >25% s.d 50% | 1 |
| | | >50% s.d 75% | 2 |
| | | >75% s.d.100% | 2 |
| Alat Eksplorasi | | | |
| Alat Eksplorasi Topografi | Overhaul | >0% s.d. 25% | 1 |
| | | >25% s.d 50% | 2 |
| | | >50% s.d 75% | 2 |
| | | >75% s.d.100% | 3 |
| Alat Eksplorasi Geofisika | Overhaul | >0% s.d. 25% | 2 |
| | | >25% s.d 50% | 4 |
| | | >50% s.d 75% | 5 |
| | | >75% s.d.100% | 5 |
| Alat Pengeboran | | | |
| Alat Pengeboran Mesin | Overhaul | >0% s.d. 25% | 2 |
| | | >25% s.d 50% | 4 |
| | | >50% s.d 75% | 6 |
| | | >75% s.d.100% | 7 |
| Alat Pengeboran Non Mesin | Renovasi | >0% s.d. 25% | 0 |
| | | >25% s.d 50% | 1 |
| | | >50% s.d 75% | 1 |
| | | >75% s.d.100% | 2 |
| Alat Produksi Pengolahan dan Pemurnian | | | |
| Sumur | Renovasi | >0% s.d. 25% | 0 |
| | | >25% s.d 50% | 1 |
| | | >50% s.d 75% | 1 |
| | | >75% s.d.100% | 2 |
| Produksi | Renovasi | >0% s.d. 25% | 0 |
| | | >25% s.d 50% | 1 |
| | | >50% s.d 75% | 1 |



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

| Uraian | Jenis | Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul Dari Nilai Perolehan (di luar penyusutan) | Penambahan Masa manfaat (tahun) |
|---------------------------------------|----------|--|---------------------------------|
| | | >75% s.d.100% | 2 |
| Pengolahan dan Pemurnian | Overhaul | >0% s.d. 25% | 3 |
| | | >25% s.d 50% | 5 |
| | | >50% s.d 75% | 7 |
| | | >75% s.d.100% | 8 |
| Alat Bantu Explorasi | | | |
| Alat Bantu Explorasi | Overhaul | >0% s.d. 25% | 2 |
| | | >25% s.d 50% | 4 |
| | | >50% s.d 75% | 6 |
| | | >75% s.d.100% | 7 |
| Alat Bantu Produksi | Overhaul | >0% s.d. 25% | 2 |
| | | >25% s.d 50% | 4 |
| | | >50% s.d 75% | 6 |
| | | >75% s.d.100% | 7 |
| Alat keselamatan Kerja | | | |
| Alat Deteksi | Overhaul | >0% s.d. 25% | 1 |
| | | >25% s.d 50% | 2 |
| | | >50% s.d 75% | 2 |
| | | >75% s.d.100% | 3 |
| Alat Pelindung | Renovasi | >0% s.d. 25% | 0 |
| | | >25% s.d 50% | 0 |
| | | >50% s.d 75% | 1 |
| | | >75% s.d.100% | 2 |
| Alat Sar | Renovasi | >0% s.d. 25% | 0 |
| | | >25% s.d 50% | 1 |
| | | >50% s.d 75% | 1 |
| | | >75% s.d.100% | 2 |
| Alat Kerja Penerbang | Overhaul | >0% s.d. 25% | 2 |
| | | >25% s.d 50% | 3 |
| | | >50% s.d 75% | 4 |
| | | >75% s.d.100% | 6 |
| Alat Peraga | | | |
| Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan | Overhaul | >0% s.d. 25% | 2 |
| | | >25% s.d 50% | 4 |
| | | >50% s.d 75% | 5 |
| | | >75% s.d.100% | 5 |
| Peralatan Proses / Produksi | | | |
| Unit Peralatan Proses / Produksi | Overhaul | >0% s.d. 25% | 2 |
| | | >25% s.d 50% | 3 |
| | | >50% s.d 75% | 4 |
| | | >75% s.d.100% | 4 |



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

| Uraian | Jenis | Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul Dari Nilai Perolehan (di luar penyusutan) | Penambahan Masa manfaat (tahun) |
|----------------------------------|----------|--|---------------------------------|
| Rambu-rambu | | | |
| Rambu-rambu Lalu lintas Darat | Overhaul | >0% s.d. 25% | 1 |
| | | >25% s.d 50% | 2 |
| | | >50% s.d 75% | 3 |
| | | >75% s.d.100% | 4 |
| Rambu-rambu Lalu lintas Udara | Overhaul | >0% s.d. 25% | 1 |
| | | >25% s.d 50% | 2 |
| | | >50% s.d 75% | 2 |
| | | >75% s.d.100% | 4 |
| Rambu-rambu Lalu lintas Laut | Overhaul | >0% s.d. 25% | 1 |
| | | >25% s.d 50% | 1 |
| | | >50% s.d 75% | 2 |
| | | >75% s.d.100% | 2 |
| Peralatan Olah Raga | | | |
| Peralatan Olah Raga | Renovasi | >0% s.d. 25% | 1 |
| | | >25% s.d 50% | 1 |
| | | >50% s.d 75% | 2 |
| | | >75% s.d.100% | 2 |
| Bangunan Gedung | | | |
| Bangunan Gedung Tempat Kerja | Renovasi | >0% s.d. 25% | 3 |
| | | >25% s.d 50% | 5 |
| | | >50% s.d 75% | 10 |
| | | >75% s.d.100% | 15 |
| Bangunan Gedung Tempat Tinggal | Renovasi | >0% s.d. 30% | 3 |
| | | >30% s.d 45% | 5 |
| | | >45% s.d 65% | 10 |
| Monumen | | | |
| Candi/ Tugu Peringatan/ Prasasti | Renovasi | >0% s.d. 30% | 5 |
| | | >30% s.d 45% | 10 |
| | | >45% s.d 65% | 15 |
| Bangunan Menara | | | |
| Bangunan Menara Perambuan | Renovasi | >0% s.d. 30% | 5 |
| | | >30% s.d 45% | 10 |
| | | >45% s.d 65% | 15 |
| Tugu Titik Kontrol /Prasasti | | | |
| Tugu / Tanda batas | Renovasi | >0% s.d. 30% | 5 |
| | | >30% s.d 45% | 10 |
| | | >45% s.d 65% | 15 |
| Jalan dan Jembatan | | | |
| Jalan | Renovasi | >0% s.d. 30% | 2 |
| | | >30% s.d 60% | 5 |
| | | >60% s.d 100% | 10 |



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

| Uraian | Jenis | Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul Dari Nilai Perolehan (di luar penyusutan) | Penambahan Masa manfaat (tahun) |
|--|----------|--|---------------------------------|
| Jembatan | Renovasi | >0% s.d. 30% | 5 |
| | | >30% s.d. 45% | 10 |
| | | >45% s.d. 65% | 15 |
| Bangunan Air | | | |
| Bangunan Air Irigasi | Renovasi | >0% s.d. 5% | 2 |
| | | >5% s.d. 10% | 5 |
| | | >10% s.d. 20% | 10 |
| Bangunan Pengairan Pasang Surut | Renovasi | >0% s.d. 5% | 2 |
| | | >5% s.d. 10% | 5 |
| | | >10% s.d. 20% | 10 |
| Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder | Renovasi | >0% s.d. 5% | 1 |
| | | >5% s.d. 10% | 3 |
| | | >10% s.d. 20% | 5 |
| Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana | Renovasi | >0% s.d. 5% | 1 |
| | | >5% s.d. 10% | 2 |
| | | >10% s.d. 20% | 3 |
| Bangunan Pengembangan Sumber air dan Tanah | Renovasi | >0% s.d. 5% | 1 |
| | | >5% s.d. 10% | 2 |
| | | >10% s.d. 20% | 3 |
| Bangunan Air Bersih/Air Baku | Renovasi | >0% s.d. 30% | 5 |
| | | >30% s.d. 45% | 7 |
| | | >45% s.d. 65% | 15 |
| Bangunan Air Kotor | Renovasi | >0% s.d. 30% | 5 |
| | | >30% s.d. 45% | 10 |
| | | >45% s.d. 65% | 15 |
| Instalasi | | | |
| Instalasi Air Bersih/Air baku | Renovasi | >0% s.d. 30% | 2 |
| | | >30% s.d. 45% | 5 |
| | | >45% s.d. 65% | 7 |
| Instalasi Air Kotor | Renovasi | >0% s.d. 30% | 2 |
| | | >30% s.d. 45% | 5 |
| | | >45% s.d. 65% | 7 |
| Instalasi Pengelolaan Sampah | Renovasi | >0% s.d. 30% | 1 |
| | | >30% s.d. 45% | 3 |
| | | >45% s.d. 65% | 5 |
| Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan | Renovasi | >0% s.d. 30% | 1 |
| | | >30% s.d. 45% | 3 |



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

| Uraian | Jenis | Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul Dari Nilai Perolehan (di luar penyusutan) | Penambahan Masa manfaat (tahun) |
|------------------------------|----------|--|---------------------------------|
| | | >45% s.d 65% | 5 |
| Instalasi Pembangkit Listrik | Renovasi | >0% s.d. 30% | 5 |
| | | >30% s.d 45% | 10 |
| | | >45% s.d 65% | 15 |
| Instalasi gardu Listrik | Renovasi | >0% s.d. 30% | 5 |
| | | >30% s.d 45% | 10 |
| | | >45% s.d 65% | 15 |
| Instalasi Pertahanan | Renovasi | >0% s.d. 30% | 1 |
| | | >30% s.d 45% | 3 |
| | | >45% s.d 65% | 5 |
| Instalasi gas | Renovasi | >0% s.d. 30% | 5 |
| | | >30% s.d 45% | 10 |
| | | >45% s.d 65% | 15 |
| Instalasi Pengaman | Renovasi | >0% s.d. 30% | 1 |
| | | >30% s.d 45% | 1 |
| | | >45% s.d 65% | 3 |
| Instalasi Lain | Renovasi | >0% s.d. 30% | 1 |
| | | >30% s.d 45% | 1 |
| | | >45% s.d 65% | 3 |
| Jaringan | | | |
| Jaringan air Minum | Overhaul | >0% s.d. 30% | 2 |
| | | >30% s.d 45% | 7 |
| | | >45% s.d 65% | 10 |
| Jaringan Listrik | Overhaul | >0% s.d. 30% | 5 |
| | | >30% s.d 45% | 10 |
| | | >45% s.d 65% | 15 |
| Jaringan Telepon | Overhaul | >0% s.d. 30% | 2 |
| | | >30% s.d 45% | 5 |
| | | >45% s.d 65% | 10 |
| Jaringan Gas | Overhaul | >0% s.d. 30% | 2 |
| | | >30% s.d 45% | 7 |
| | | >45% s.d 65% | 10 |
| Alat Musik Modern/Band | Overhaul | >0% s.d. 25% | 1 |
| | | >25% s.d 50% | 1 |
| | | >50% s.d 75% | 2 |
| | | >75% s.d 100% | 2 |



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

d. Penyajian

- 1) Aset tetap disajikan di Neraca berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.
- 2) Penyusutan Aset Tetap:
 - a) Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
 - b) Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
 - c) metode penyusutan dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*), dengan asumsi nilai residu Rp.0,00 dan formula penghitungan sebagai berikut:

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

- d) selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.
- e) perkiraan masa manfaat untuk setiap aset tetap adalah sebagai berikut:

Tabel Perkiraan Masa Manfaat

| KODEFIKASI | | | | URAIAN | MASA MANFAAT (TAHUN) |
|------------|---|---|----|---|----------------------|
| 1 | 3 | | | ASET TETAP | |
| 1 | 3 | 2 | | Peralatan Dan Mesin | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | Alat Besar Darat | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 2 | Alat Besar Apung | 8 |
| 1 | 3 | 2 | 3 | Alat Bantu | 7 |
| 1 | 3 | 2 | 4 | Alat Angkutan Darat Bermotor | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 5 | Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | 2 |
| 1 | 3 | 2 | 6 | Alat Angkutan Apung Bermotor | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 7 | Alat Angkutan Apung Tak Bermotor | 3 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | Alat Angkutan Bermotor Udara | 20 |
| 1 | 3 | 2 | 9 | Alat Bengkel Bermesin | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 10 | Alat Bengkel Tak Bermesin | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 11 | Alat Ukur | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 12 | Alat Pengolahan | 4 |
| 1 | 3 | 2 | 13 | Alat Kantor | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 14 | Alat Rumah Tangga | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 15 | Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 16 | Alat Studio | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 17 | Alat Komunikasi | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 18 | Peralatan Pemancar | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 19 | Peralatan Komunikasi Navigasi | 15 |
| 1 | 3 | 2 | 20 | Alat Kedokteran | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 21 | Alat Kesehatan Umum | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 22 | Unit Alat Laboratorium | 8 |
| 1 | 3 | 2 | 23 | Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir | 15 |
| 1 | 3 | 2 | 24 | Alat Peraga Praktek Sekolah | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 25 | Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika | 15 |
| 1 | 3 | 2 | 26 | Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan | 10 |



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

| KODEFIKASI | | | | URAIAN | MASA MANFAAT (TAHUN) |
|------------|---|---|----|--|----------------------|
| 1 | 3 | 2 | 27 | Radiation Application And Non Destructive Testing Laboratory Lainnya | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 28 | Alat Laboratorium Lingkungan Hidup | 7 |
| 1 | 3 | 2 | 29 | Peralatan Laboratorium Hydrodinamica | 15 |
| 1 | 3 | 2 | 30 | Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 31 | Senjata Api | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 32 | Persenjataan Non Senjata Api | 3 |
| 1 | 3 | 2 | 33 | Senjata Sinar | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 34 | Alat Khusus Kepolisian | 4 |
| 1 | 3 | 2 | 35 | Komputer Unit | 4 |
| 1 | 3 | 2 | 36 | Peralatan Komputer | 4 |
| 1 | 3 | 2 | 37 | Alat Eksplorasi Topografi | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 38 | Alat Eksplorasi Geofisika | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 39 | Alat Pengeboran Mesin | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 40 | Alat Pengeboran Non Mesin | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 41 | Sumur | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 42 | Produksi | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 43 | Pengolahan Dan Pemurnian | 15 |
| 1 | 3 | 2 | 44 | Alat Bantu Eksplorasi | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 45 | Alat Bantu Produksi | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 46 | Alat Deteksi | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 47 | Alat Pelindung | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 48 | Alat Sar | 2 |
| 1 | 3 | 2 | 49 | Alat Kerja Penerbangan | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 50 | Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 51 | Unit Peralatan Proses/Produksi | 8 |
| 1 | 3 | 2 | 52 | Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat | 7 |
| 1 | 3 | 2 | 53 | Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 54 | Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut | 15 |
| 1 | 3 | 2 | 55 | Peralatan Olah Raga | 3 |
| 1 | 3 | 3 | | Gedung Dan Bangunan | |
| 1 | 3 | 3 | 1 | Bangunan Gedung Tempat Kerja | 50 |
| 1 | 3 | 3 | 2 | Bangunan Gedung Tempat Tinggal | 40 |
| 1 | 3 | 3 | 3 | Candi/Tugu Peringatan/Prasasti | 50 |
| 1 | 3 | 3 | 4 | Bangunan Menara Perambuan | 40 |
| 1 | 3 | 3 | 5 | Tugu/Tanda Batas | 50 |
| 1 | 3 | 4 | | Jalan, Irigasi, Dan Jaringan | |
| 1 | 3 | 4 | 1 | Jalan | 10 |
| 1 | 3 | 4 | 2 | Jembatan | 50 |
| 1 | 3 | 4 | 3 | Bangunan Air Irigasi | 50 |
| 1 | 3 | 4 | 4 | Bangunan Pengairan Pasang Surut | 50 |
| 1 | 3 | 4 | 5 | Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder | 25 |
| 1 | 3 | 4 | 6 | Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam | 10 |
| 1 | 3 | 4 | 7 | Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah | 30 |
| 1 | 3 | 4 | 8 | Bangunan Air Bersih/Air Baku | 40 |
| 1 | 3 | 4 | 9 | Bangunan Air Kotor | 40 |
| 1 | 3 | 4 | 10 | Instalasi Air Bersih / Air Baku | 30 |
| 1 | 3 | 4 | 11 | Instalasi Air Kotor | 30 |
| 1 | 3 | 4 | 12 | Instalasi Pengolahan Sampah | 10 |
| 1 | 3 | 4 | 13 | Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan | 10 |
| 1 | 3 | 4 | 14 | Instalasi Pembangkit Listrik | 40 |
| 1 | 3 | 4 | 15 | Instalasi Gardu Listrik | 40 |
| 1 | 3 | 4 | 16 | Instalasi Pertahanan | 30 |
| 1 | 3 | 4 | 17 | Instalasi Gas | 30 |
| 1 | 3 | 4 | 18 | Instalasi Pengaman | 20 |
| 1 | 3 | 4 | 19 | Instalasi Lain | 5 |
| 1 | 3 | 4 | 20 | Jaringan Air Minum | 30 |
| 1 | 3 | 4 | 21 | Jaringan Listrik | 40 |
| 1 | 3 | 4 | 22 | Jaringan Telepon | 20 |
| 1 | 3 | 4 | 23 | Jaringan Gas | 30 |



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

- f) Besarnya penyusutan setiap tahun disajikan dalam Neraca dan Laporan Operasional. Penyusutan disajikan dalam Neraca dengan akun Akumulasi Penyusutan yang mengurangi nilai perolehan aset tetap. Penyusutan disajikan dalam Laporan Operasional sebagai beban penyusutan.
 - g) Neraca menyajikan Akumulasi Penyusutan sekaligus nilai perolehan aset tetap sehingga nilai buku aset tetap sebagai gambaran dari potensi manfaat yang masih dapat diharapkan dari aset yang bersangkutan dapat diketahui.
 - 3) suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang;
 - 4) aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam CaLK; dan
 - 5) aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- e. Pengungkapan
- 1) laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
 - a) dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
 - b) rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - (1) penambahan;
 - (2) pelepasan;
 - (3) akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; dan
 - (4) mutasi aset tetap lainnya.
 - c) informasi penyusutan, meliputi:
 - (1) nilai penyusutan;
 - (2) metode penyusutan yang digunakan;
 - (3) masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan
 - (4) nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
 - 2) laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
 - a) eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
 - b) kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
 - c) jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
 - d) jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
 - 3) aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.



4.4.1.2.3. Konstruksi dalam Pengerjaan

a. Definisi

- 1) Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pengerjaan.
- 2) Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut biasanya kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.
- 3) Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

b. Pengakuan

- 1) Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam pengerjaan jika:
 - a) besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
 - b) biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
 - c) aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
- 2) Konstruksi dalam pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.
- 3) Konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
 - b) dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.

Suatu konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan (peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

c. Pengukuran

Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan sebesar persentase kemajuan fisik per tanggal pelaporan Neraca.

d. Penyajian

Konstruksi dalam pengerjaan disajikan di Neraca sebagai bagian dari aset tetap.

e. Pengungkapan

Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai konstruksi dalam pengerjaan pada akhir periode akuntansi, antara lain mengenai:

- 1) rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- 2) nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya;



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

- 3) jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar;
- 4) uang muka kerja yang diberikan; dan
- 5) retensi.

4.4.1.2.4. Dana Cadangan

a. Definisi

- 1) Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
- 2) Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang didalamnya mencakup:
 - a) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - b) program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - c) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri;
 - d) sumber dana cadangan; dan
 - e) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

b. Pengakuan

Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening dana cadangan.

c. Pengukuran

- 1) dana cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan ke dana cadangan;
- 2) pencairan dana cadangan mengurangi dana cadangan yang bersangkutan;
- 3) pembentukan dana cadangan menambah dana cadangan yang bersangkutan; dan
- 4) hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan di Pemerintah Daerah merupakan penambah dana cadangan.

d. Penyajian

Dana cadangan disajikan di Neraca pada kelompok aset non lancar.

e. Pengungkapan

Pengungkapan dana cadangan dalam CaLK, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) dasar hukum (Peraturan Daerah) pembentukan dana cadangan;
- 2) tujuan pembentukan dana cadangan;
- 3) program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- 4) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan;
- 5) sumber dana cadangan; dan
- 6) tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan dana cadangan.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2021

4.4.1.2.5. Aset Lainnya

a. Definisi

1) Aset Lainnya merupakan aset Pemerintah Daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

2) Aset Lainnya terdiri dari:

a) Tagihan Penjualan Angsuran;

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset Pemerintah Daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah Pemerintah Daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III.

b) Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah;

Ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

c) Kemitraan dengan Pihak Ketiga;

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, Pemerintah Daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:

- (1) Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Sewa;
- (2) Kerja Sama Pemanfaatan (KSP);
- (3) Bangun Guna Serah-BGS (*Build, Operate, Transfer-BOT*); dan
- (4) Bangun Serah Guna-BSG (*Build, Transfer, Operate-BTO*).

d) Aset Tak Berwujud;

Aset Tak Berwujud adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset Tak Berwujud dapat berupa:

- (1) *Goodwill*;
- (2) Hak Paten atau Hak Cipta;
- (3) Royalti;
- (4) *Software*;

Software komputer yang diakui sebagai Aset Tak Berwujud adalah *software* yang dibangun sendiri atau diperoleh dengan cara pembelian yang dimaksudkan untuk digunakan dalam operasional pemerintahan, yang bukan merupakan bagian integral dari suatu *hardware*.

(5) Lisensi;



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

- (6) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang; dan
- (7) Aset Tak Berwujud Lainnya.

e) Aset Lain-lain.

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).

b. Pengakuan

- 1) Aset Lainnya diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.
- 2) Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).
- 3) Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan.
- 4) Kerjasama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan.
- 5) Bangun Guna Serah-BGS (*Build, Operate, Transfer-BOT*) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan.
- 6) Bangun Serah Guna-BSG (*Build, Transfer Operate,-BTO*) diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan.
- 7) Pengakuan *Software* komputer:
 - a) *Software* program yang diperoleh dengan cara dikontrakkan dengan pihak ketiga diakui pada saat diterbitkannya tagihan oleh Pihak Ketiga.
 - b) *Software* yang diperoleh dengan cara pembelian:
 - (1) Perolehan *software* yang memiliki izin penggunaan/masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, maka nilai perolehan *software* dan biaya lisensinya harus dikapitalisasi sebagai Aset Tak Berwujud. Sedangkan perolehan *software* yang memiliki izin penggunaan/masa manfaat kurang dari atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan, maka nilai perolehan *software* tidak perlu dikapitalisasi.
 - (2) *Software* yang diperoleh hanya dengan membayar izin penggunaan/lisensi dengan masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan harus dikapitalisasi sebagai Aset Tak Berwujud. *Software* yang diperoleh hanya dengan membayar izin penggunaan/lisensi kurang dari atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan, tidak perlu dikapitalisasi.
 - (3) *Software* yang tidak memiliki pembatasan izin penggunaan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan harus dikapitalisasi. *Software* yang tidak memiliki pembatasan izin penggunaan dan masa manfaatnya kurang dari atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan tidak perlu dikapitalisasi.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

(4) Pengeluaran terkait *software* yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi akan diakui sebagai beban operasi pada periode terjadinya.

c. Pengukuran

- 1) Aset Lainnya diukur sesuai biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
- 2) Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
- 3) Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara perjanjian sewa aset yang bersangkutan.
- 4) Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian.
- 5) Bangun Guna Serah dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset Bangun Guna Serah tersebut.
- 6) Bangun Serah Guna dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan Pemerintah Daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.
- 7) Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas Pemerintah Daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas Pemerintah Daerah tersebut.
- 8) Terhadap Aset Tak Berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap Aset Tak Berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Masa manfaat untuk Aset Tak Berwujud diatur sebagai berikut:

Tabel Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

| Kodifikasi | Uraian | Masa Manfaat (Tahun) |
|-------------|--------------------|----------------------|
| 07.24.01.01 | Perangkat Lunak | 10 |
| 07.24.02.01 | Lisensi | 10 |
| 07.24.03.01 | Hak Cipta | 10 |
| 07.24.04.01 | Hasil Kajian (DED) | 10 |

- 9) Amortisasi disajikan dengan metode garis lurus, tanpa nilai residu yang diperhitungkan setiap akhir periode.
- 10) Apabila suatu Aset Tak Berwujud tidak dapat digunakan karena ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak, atau masa kegunaannya telah berakhir, maka Aset Tak Berwujud tersebut hakekatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan. Apabila suatu Aset Tak Berwujud dihentikan dari penggunaannya, baik karena dipindahtangankan maupun karena berakhirnya masa manfaat/tidak lagi memiliki manfaat ekonomi, maka pencatatan akun Aset Tak Berwujud yang bersangkutan harus dihentikan dan diproses penghapusannya.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2021

d. Penyajian

Aset lainnya disajikan di Neraca sebagai bagian dari aset non lancar sebesar nilai tercatat neto, yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

e. Pengungkapan

Pengungkapan aset lainnya dalam CaLK, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) besaran dan rincian aset lainnya;
- 2) kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud;
- 3) kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, Kerja Sama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah (*Built, Operate and Transfer*) dan Bangun Serah Guna (*Built, Transfer and Operate*); dan
- 4) informasi lainnya yang penting.

4.4.2. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

a. Definisi

- 1) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah. Kewajiban Pemerintah Daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/relokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.
- 2) Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
- 3) Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang transfer Pemerintah Daerah, utang kepada pegawai, utang bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga, dan bagian lancar utang jangka panjang.
- 4) Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:
 - a) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b) entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
 - c) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

b. Pengakuan

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul. Kewajiban tersebut dapat timbul dari:

1) Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*)

dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika Pemerintah Daerah menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumberdaya lain di masa depan, misal utang atas belanja alat tulis kantor.

2) Transaksi tanpa Pertukaran (*non-exchange transactions*)

dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan secara cuma-cuma, misal hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan.

3) Kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah (*government-related events*).

dalam kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah, kewajiban diakui ketika Pemerintah Daerah berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi Pemerintah Daerah dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas Pemerintah Daerah.

4) Kejadian yang Diakui Pemerintah (*government-acknowledge events*)

dalam kejadian yang diakui Pemerintah Daerah, kewajiban diakui ketika Pemerintah Daerah memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah, misal Pemerintah Daerah memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

c. Pengukuran

1) Kewajiban Pemerintah Daerah dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal necara. Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos mengikuti karakteristiknya. Berikut ini akan dijabarkan mengenai pengukuran untuk masing-masing pos kewajiban.

2) Pengukuran kewajiban atau utang jangka pendek Pemerintah Daerah berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya sebagai berikut:

a) Pengukuran Utang kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga terjadi ketika Pemerintah Daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu Pemerintah Daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut. Contoh: bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.

b) Pengukuran Utang Transfer

Utang Transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2021

undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

c) Pengukuran Utang Bunga

Utang Bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

d) Pengukuran Utang Perhitungan Pihak Ketiga

Utang Perhitungan Pihak Ketiga dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode.

e) Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

f) Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya

Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut. Contoh: biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

3) Kewajiban atau utang jangka panjang Pemerintah Daerah juga diukur berdasarkan karakteristiknya. Terdapat dua karakteristik utang jangka panjang Pemerintah Daerah, yaitu:

a) utang yang tidak diperjualbelikan

utang yang tidak diperjualbelikan memiliki nilai nominal sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari *World Bank*.

b) utang yang diperjualbelikan

utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang Pemerintah Daerah. Sekuritas utang pemerintah dinilai sebesar nilai pari (*original face value*) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang pemerintah dijual tanpa sebesar nilai pari, maka dinilai sebesar nilai parinya. Jika sekuritas utang pemerintah dijual dengan harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo. Sementara itu, jika sekuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.

d. Penyajian

Kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang Pemerintah Daerah disajikan dalam neraca disisi pasiva.

e. Pengungkapan

Dalam pengungkapan pada CaLK terkait dengan kewajiban, harus diungkapkan pula hal-hal sebagai berikut:

1) jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

- 2) jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
- 3) bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
- 4) konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
- 5) perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
 - a) pengurangan pinjaman;
 - b) modifikasi persyaratan utang;
 - c) pengurangan tingkat bunga pinjaman;
 - d) pengunduran jatuh tempo pinjaman;
 - e) pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
 - f) pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
- 6) jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur; dan
- 7) biaya pinjaman:
 - a) perlakuan biaya pinjaman;
 - b) jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan;
 - c) tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

4.4.3. Kebijakan Akuntansi Ekuitas

a. Definisi

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pada tanggal pelaporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada laporan perubahan ekuitas.

b. Pengakuan

Pengakuan atas ekuitas tergantung dari saat pengakuan aset dan kewajiban.

c. Penyajian dan Pengungkapan

Ekuitas disajikan di Neraca dan dijelaskan rinciannya dalam CaLK.

4.4.4. Kebijakan Akuntansi Pendapatan Daerah

a. Definisi

Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah SAL dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.

b. Pengakuan

Pendapatan Daerah menggunakan basis kas sehingga Pendapatan Daerah diakui pada saat:

- 1) diterima di rekening Kas Umum Daerah; atau
- 2) diterima oleh SKPD; atau



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

- 3) diterima entitas lain diluar Pemerintah Daerah atas nama Bendahara Umum Daerah.
- c. Pengukuran
- 1) Pendapatan Daerah diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
 - 2) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan Daerah bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- d. Penyajian
- Pendapatan Daerah disajikan dalam LRA dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah.
- e. Pengungkapan
- Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan pendapatan adalah:
- 1) penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - 2) penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
 - 3) penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
 - 4) informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.5. Kebijakan Akuntansi Belanja

- a. Definisi
- Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi SAL dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.
- b. Pengakuan
- Belanja diakui pada saat:
- 1) kas untuk belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
 - 2) kas untuk belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran dan pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut telah disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan; dan
 - 3) dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
- c. Pengukuran
- Belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

d. Penyajian dan Pengungkapan

- 1) belanja disajikan dalam LRA. Rincian atas belanja tersebut dijelaskan dalam CaLK;
- 2) belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi; dan
- 3) penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.6. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

a. Definisi

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan diklasifikasi kedalam 2 (dua) bagian, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) penerimaan pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

2) pengeluaran pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

b. Pengakuan

- 1) penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
- 2) pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

c. Pengukuran

- 1) Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari penerimaan dan pengeluaran.
- 2) Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

d. Penyajian dan Pengungkapan

Pembiayaan disajikan dalam LRA dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tahun Anggaran 2021

4.4.7. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

a. Definisi

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan yang dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah.

Termasuk pendapatan-LO adalah hibah langsung yang diterima SKPD yang kemudian digunakan langsung oleh SKPD tanpa disetorkan terlebih dahulu ke Rekening Kas Umum Daerah dan dilaporkan ke Bendahara Umum Daerah untuk diakui sebagai pendapatan daerah.

b. Pengakuan

1) Pengakuan Pendapatan-LO pada PPKD:

a) Pendapatan Asli Daerah

Merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu Pendapatan Asli Daerah Melalui Penetapan, Pendapatan Asli Daerah Tanpa Penetapan, dan Pendapatan Asli Daerah dari Hasil Eksekusi Jaminan.

b) Pendapatan Asli Daerah Melalui Penetapan

Pendapatan Asli Daerah yang masuk ke dalam kategori ini adalah Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, dan Pendapatan Denda Retribusi. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan atas pendapatan terkait.

c) Pendapatan Asli Daerah Tanpa Penetapan

Pendapatan Asli Daerah yang masuk ke dalam kategori ini antara lain Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan, dan Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran langsung ke Rekening Kas Umum Daerah.

d) Pendapatan Asli Daerah dari Hasil Eksekusi Jaminan

Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pada saat tersebut, PPKD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan, dan mengakuinya sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan.

e) Pendapatan Transfer

Pemerintah Pusat akan mengeluarkan ketetapan mengenai jumlah dana transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah. Namun demikian ketetapan pemerintah belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2021

LO, mengingat kepastian pendapatan tergantung pada persyaratan-persyaratan sesuai peraturan perundangan penyaluran alokasi tersebut. Untuk itu pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah. Walaupun demikian, pendapatan transfer dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, jika itu terkait dengan kurang salur.

f) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada PPKD, antara lain meliputi Pendapatan Hibah baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, Badan/Lembaga/ Organisasi Swasta Dalam Negeri, maupun Kelompok Masyarakat/ Perorangan. Naskah Perjanjian Hibah yang ditandatangani belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO mengingat adanya proses dan persyaratan untuk realisasi pendapatan hibah tersebut.

Hibah langsung yang diterima SKPD yang kemudian digunakan langsung oleh SKPD diakui pada saat dilaporkan ke Bendahara Umum Daerah pada akhir periode.

g) Pendapatan Non Operasional

Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain Surplus Penjualan Aset Nonlancar, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya. Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Nonlancar) telah diterima.

2) Pengakuan Pendapatan-LO pada SKPD

Pendapatan Daerah pada SKPD hanya sebagian dari Pendapatan Asli Daerah yaitu pendapatan pajak daerah dalam hal instansi pungutan pajak terpisah dari Bendahara Umum Daerah, pendapatan retribusi dan sebagian dari lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Alternatif pengakuan pendapatan tersebut dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a) alternatif satu yaitu kelompok pendapatan pajak yang didahului oleh penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah untuk kemudian dilakukan pembayaran oleh wajib pajak yang bersangkutan. Pendapatan Pajak ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan atas pendapatan terkait.
- b) alternatif dua yaitu kelompok pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan Pajak ini diakui ketika telah disampaikannya Surat



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2021

Pemberitahuan Pajak Daerah dari Wajib Pajak ke SKPKD atas pendapatan terkait.

- c) alternatif tiga yaitu kelompok pendapatan retribusi yang pembayarannya diterima untuk memenuhi kewajiban dalam periode tahun berjalan. Pendapatan retribusi ini diakui ketika pembayaran telah diterima atau pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah.

c. Pengukuran

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

d. Penyajian dan pengungkapan

Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK.

4.4.8. Kebijakan Akuntansi Beban

a. Definisi

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

b. Pengakuan

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contoh: tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah. Sedangkan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

1) Pengakuan Beban pada SKPKD

a) Beban Bunga

Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran Pemerintah Daerah untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.

Beban Bunga meliputi Beban Bunga Pinjaman dan Beban Bunga Obligasi. Beban bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2021

b) **Beban Subsidi**

Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. Beban subsidi diakui pada saat kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.

c) **Beban Hibah**

Beban Hibah merupakan beban Pemerintah Daerah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Pengakuan beban hibah sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja hibah, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah karena harus dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran hibah.

d) **Beban Bantuan Sosial**

Beban Bantuan Sosial merupakan beban Pemerintah Daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pengakuan beban bantuan sosial dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja bantuan sosial, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial.

e) **Beban Penyisihan Piutang**

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun.

f) **Beban Transfer**

Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari Pemerintah Daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Beban transfer diakui saat diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana atau pada saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah (jika terdapat dokumen yang memadai). Dalam hal pada akhir tahun anggaran terdapat pendapatan yang harus dibagikan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban.

2) **Pengakuan Beban Pada SKPD**

a) **Beban Pegawai**

Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah yang belum berstatus pegawai negeri sipil sebagai imbalan atas pekerjaan yang



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2021

telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Pembayaran atas beban pegawai dapat dilakukan melalui mekanisme Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan seperti honorarium non pegawai negeri sipil, atau melalui mekanisme langsung seperti beban gaji dan tunjangan.

Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme langsung, beban pegawai diakui saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah (jika terdapat dokumen yang memadai).

Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan, beban pegawai diakui ketika bukti pembayaran beban (misal: bukti pembayaran honor) telah disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Beban pegawai yang pembayarannya didanai dari hibah langsung yang diterima SKPD diakui pada saat dilaporkan ke Bendahara Umum Daerah pada akhir periode.

b) Beban Barang

Beban Barang merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi. Beban barang diakui ketika bukti penerimaan barang atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.

Beban barang yang pembayarannya didanai dari hibah langsung yang diterima SKPD diakui pada saat dilaporkan ke Bendahara Umum Daerah pada akhir periode.

c. Pengukuran

Beban diukur sesuai dengan:

- 1) harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal kewajiban yang timbul, konsumsi aset dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan mata uang rupiah; dan
- 2) menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diketahui harga perolehannya.

d. Penyajian dan Pengungkapan

Beban disajikan dalam LO dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2021

4.4.9. Kebijakan Akuntansi Koreksi

Kesalahan merupakan akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Sedangkan koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

Kesalahan dapat terjadi karena adanya:

- a. keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran;
- b. kesalahan perhitungan matematis;
- c. kesalahan dalam penerapan standar dan kebijakan akuntansi;
- d. kesalahan interpretasi fakta;
- e. kecurangan; atau
- f. kelalaian.

Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan menjadi:

- a. kesalahan berulang dan sistemik

Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak. Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan jurnal koreksi tidak perlu dibuat untuk kesalahan seperti ini, tetapi dicatat pada saat terjadi pengeluaran/penerimaan kas untuk kelebihan/kekurangan pendapatan dengan mengurangi/menambah Pendapatan Daerah maupun Pendapatan-LO yang bersangkutan.

- b. kesalahan tidak berulang

Kesalahan tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali, dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

- 1) kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun Pendapatan Daerah atau akun Belanja, maupun akun Pendapatan-LO atau akun Beban.

- 2) kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya

Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun Pendapatan-Daerah atau akun Belanja, maupun akun Pendapatan-LO atau akun Beban.

Apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan dilakukan dengan pembetulan sebagai berikut:

- a) kesalahan tidak mempengaruhi posisi kas, pembetulan dilakukan pada akun neraca terkait.
- b) kesalahan atas kelebihan pengeluaran Belanja/Beban sehingga mengakibatkan penerimaan kembali Belanja/Beban dilakukan pada akun



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

Pendapatan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah /Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO.

- c) kesalahan atas kekurangan pengeluaran Belanja/Beban sehingga mengakibatkan penambahan belanja/beban dan mengurangi posisi kas, pembetulan dilakukan pada akun Saldo Anggaran Lebih/akun Ekuitas.
- d) koreksi kesalahan atas penerimaan Pendapatan Daerah/ Pendapatan-LO yang menambah maupun mengurangi posisi kas dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo anggaran lebih/akun ekuitas.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Penyajian Laporan Keuangan Tahun 2021 mendasari ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Terhadap perbedaan nama akun dan level akun telah disesuaikan dengan melakukan *mapping* antara saldo akhir 2020 dengan saldo awal 2021.

5.1 Laporan Realisasi Anggaran

5.1.1 Pendapatan

Tabel Anggaran dan Realisasi Pendapatan

| Uraian | 2021 | | | | Realisasi 2020 |
|------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------|----------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/Kurang (Rp) | % | (Rp) |
| Pendapatan | 2.741.711.600.000,00 | 2.832.035.015.733,00 | 90.323.415.733,00 | 103,29 | 2.763.229.307.229,80 |

Realisasi Pendapatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp2.832.035.015.733,00 yang terdiri dari:

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan

| Pendapatan | 2021 | | | % | Realisasi 2020 |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/Kurang (Rp) | | (Rp) |
| Pendapatan Asli Daerah | 398.974.820.000,00 | 472.017.087.115,00 | 73.042.267.115,00 | 118,31 | 403.025.963.783,80 |
| Pendapatan Transfer | 2.209.563.280.000,00 | 2.222.632.960.883,00 | 13.069.680.883,00 | 100,59 | 2.223.453.074.285,00 |
| Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | 133.173.500.000,00 | 137.384.967.735,00 | 4.211.467.735,00 | 103,16 | 136.750.269.161,00 |
| Jumlah | 2.741.711.600.000,00 | 2.832.035.015.733,00 | 90.323.415.733,00 | 103,29 | 2.763.229.307.229,80 |

Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021 mencapai target sebesar 103,29% dari anggaran atau terdapat pelampauan pendapatan sebesar Rp90.323.415.733,00. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan pada tahun 2020 terdapat kenaikan sebesar Rp68.805.708.503,20 atau naik 2,49%.

Dari tabel dapat terlihat bahwa Pendapatan Transfer merupakan komponen pendapatan yang utama dalam Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan kontribusi sebesar 78,48% dari total realisasi pendapatan. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah menyokong Pendapatan Daerah sebesar 16,67% dan Lain-lain Pendapatan yang Sah memberikan kontribusi sebesar 4,85%.

Pendapatan Asli Daerah secara nominal mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya dimana pada tahun 2021 realisasinya sebesar Rp472.017.087.115,00 sedangkan Tahun 2020 sebesar Rp403.025.963.783,80 atau naik sebesar 17,12%. Pendapatan Transfer tahun 2021 terealisasi sebesar Rp2.222.632.960.883,00 atau 100,59% mengalami penurunan sebesar 0,04% jika dibandingkan realisasi tahun 2020 yang bernilai Rp2.223.453.074.285,00. Sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada tahun 2021 terealisasi sebesar Rp137.384.967.735,00 atau 103,16%, jika dibandingkan realisasi tahun 2020 yang bernilai Rp136.750.269.161,00 secara nominal Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami kenaikan sebesar 0,46%.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Tabel Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

| Uraian | 2021 | | | | Realisasi 2020 |
|------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------|--------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/Kurang (Rp) | % | (Rp) |
| Pendapatan Asli Daerah | 398.974.820.000,00 | 472.017.087.115,00 | 73.042.267.115,00 | 118,31 | 403.025.963.783,80 |

Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp472.017.087.115,00 terdiri dari:

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

| Pendapatan Asli Daerah | 2021 | | | | Realisasi 200 |
|---|---------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------|---------------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/Kurang (Rp) | % | (Rp) |
| Pajak Daerah | 101.551.500.000,00 | 112.474.854.190,00 | 10.923.354.190,00 | 110,76 | 100.877.584.517,00 |
| Retribusi Daerah | 29.520.683.000,00 | 23.652.739.277,00 | (5.867.943.723,00) | 80,12 | 22.068.306.403,00 |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 16.552.859.000,00 | 16.552.860.815,00 | 1.815,00 | 100,00 | 15.727.758.649,00 |
| Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 251.349.778.000,00 | 319.336.632.833,00 | 67.986.854.833,00 | 127,05 | 264.352.314.214,80 |
| Jumlah | 398.974.820.000,00 | 472.017.087.115,00 | 73.042.267.115,00 | 118,31 | 403.025.963.783,80 |

Dari 4 (empat) objek Pendapatan Asli Daerah ada 3 (tiga) obyek pendapatan mencapai target yaitu Pendapatan Pajak Daerah sebesar 110,76%, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 100,00% dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar 127,05%. Sedangkan Pendapatan Retribusi Daerah tidak mencapai target yaitu hanya terealisasi sebesar 80,12%.

5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

Tabel Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah

| Uraian | 2021 | | | | Realisasi 2020 |
|--------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------|--------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/Kurang (Rp) | % | (Rp) |
| Pajak Daerah | 101.551.500.000,00 | 112.474.854.190,00 | 10.923.354.190,00 | 110,76 | 100.877.584.517,00 |

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp112.474.854.190,00 terdiri dari:

Tabel Rincian Anggaran dan Realiasi Pajak Daerah

| Pajak Daerah | 2021 | | | | Realisasi 2020 |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------|---------------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/Kurang (Rp) | % | (Rp) |
| Pajak Hotel | 1.300.000.000,00 | 1.549.701.389,00 | 249.701.389,00 | 119,21 | 1.088.928.156,00 |
| Pajak Restoran | 6.250.000.000,00 | 8.564.276.975,00 | 2.314.276.975,00 | 137,03 | 6.714.994.150,00 |
| Pajak Hiburan | 250.000.000,00 | 293.251.222,00 | 43.251.222,00 | 117,30 | 267.136.284,00 |
| Pajak Reklame | 1.250.000.000,00 | 1.585.434.410,00 | 335.434.410,00 | 126,83 | 1.183.735.428,00 |
| Pajak Penerangan Jalan | 30.000.000.000,00 | 31.323.888.090,00 | 1.323.888.090,00 | 104,41 | 29.779.901.282,00 |
| Pajak Parkir | 400.000.000,00 | 407.864.131,00 | 7.864.131,00 | 101,97 | 393.735.093,00 |
| Pajak Air Tanah | 300.000.000,00 | 369.632.900,00 | 69.632.900,00 | 123,21 | 276.760.657,00 |
| Pajak Sarang Burung | 5.000.000,00 | 5.500.000,00 | 500.000,00 | 110,00 | 2.000.000,00 |
| Pajak Mineral Bukan | 1.100.000.000,00 | 1.262.024.726,00 | 162.024.726,00 | 114,73 | 1.774.239.529,00 |
| PBB | 47.775.000.000,00 | 48.772.429.933,00 | 997.429.933,00 | 102,09 | 48.454.001.000,00 |
| BPHTB | 12.921.500.000,00 | 18.340.850.414,00 | 5.419.350.414,00 | 141,94 | 10.942.152.938,00 |
| Jumlah | 101.551.500.000,00 | 112.474.854.190,00 | 10.923.354.190,00 | 110,76 | 100.877.584.517,00 |

Pendapatan dari Pajak Daerah Tahun 2021 terealisasi sebesar Rp112.474.854.190,00 naik sebesar 11,50% dibandingkan pendapatan Pajak Daerah Tahun 2020 yang sebesar Rp100.877.584.517,00. Dari 11 objek pendapatan Pajak Daerah rata-rata tercapai di atas



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

100,00% dari target anggaran. Rincian obyek atas pendapatan Pajak Daerah dijelaskan sebagai berikut:

5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Tabel Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah

| Uraian | TA 2021 | | | | Realisasi 2020 (Rp) |
|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------|---------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/Kurang (Rp) | % | |
| Retribusi Daerah | 29.520.683.000,00 | 23.652.739.277,00 | (5.867.943.723,00) | 80,12 | 22.068.306.403,00 |

Retribusi Daerah sebesar Rp23.652.739.277,00 terdiri dari:

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah

| Retribusi | Tahun 2021 | | | | Realisasi 2020 |
|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|--------------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/Kurang (Rp) | % | (Rp) |
| Retribusi Jasa Umum | | | | | |
| Retribusi Pelayanan Kesehatan | 665.000.000,00 | 1.500.485.137,00 | 835.485.137,00 | 225,64 | 268.178.500,00 |
| Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan | 1.272.702.000,00 | 1.217.025.100,00 | (55.676.900,00) | 95,63 | 1.048.462.600,00 |
| Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 1.404.000.000,00 | 603.608.000,00 | (800.392.000,00) | 42,99 | 474.068.000,00 |
| Retribusi Pelayanan Pasar | 7.163.000.000,00 | 6.312.461.550,00 | (850.538.450,00) | 88,13 | 5.298.745.450,00 |
| Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor | 937.500.000,00 | 620.980.000,00 | (316.520.000,00) | 66,24 | 654.714.000,00 |
| Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang | 40.000.000,00 | 108.471.500,00 | 68.471.500,00 | 271,18 | 0,00 |
| Retribusi Pelayanan Pendidikan | 82.500.000,00 | 69.468.000,00 | (13.032.000,00) | 84,20 | 45.276.000,00 |
| Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi | 1.078.298.000,00 | 545.592.000,00 | (532.706.000,00) | 50,60 | 1.211.472.000,00 |
| Jumlah | 12.643.000.000,00 | 10.978.091.287,00 | (1.664.908.713,00) | 86,83 | 9.000.916.550,00 |
| Retribusi Jasa Usaha | | | | | |
| Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 3.706.802.000,00 | 3.683.632.649,00 | (23.169.351,00) | 99,37 | 2.125.784.433,00 |
| Retribusi Tempat Pelelangan | 1.861.800.000,00 | 1.738.334.141,00 | (123.465.859,00) | 93,37 | 2.013.456.198,00 |
| Retribusi Terminal | 143.300.000,00 | 67.417.800,00 | (75.882.200,00) | 47,05 | 79.163.600,00 |
| Retribusi Tempat Khusus Parkir | 4.381.950.000,00 | 3.489.110.000,00 | (892.840.000,00) | 79,62 | 3.384.771.500,00 |
| Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila | 66.543.000,00 | 51.940.000,00 | (14.603.000,00) | 78,05 | 680.000,00 |
| Retribusi Rumah Potong Hewan | 15.000.000,00 | 17.807.500,00 | 2.807.500,00 | 118,72 | 16.572.500,00 |
| Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga | 5.546.100.000,00 | 2.528.493.500,00 | (3.017.606.500,00) | 45,59 | 2.874.226.800,00 |
| Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 613.655.000,00 |
| Jumlah | 15.721.495.000,00 | 11.576.735.590,00 | (4.144.759.410,00) | 73,64 | 11.108.310.031,00 |
| Retribusi Perizinan Tertentu | | | | | |
| Retribusi Izin Mendirikan Bangunan | 1.100.000.000,00 | 1.083.972.400,00 | (16.027.600,00) | 98,54 | 1.932.379.822,00 |
| Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum | 56.188.000,00 | 13.940.000,00 | (42.248.000,00) | 24,81 | 26.700.000,00 |
| Jumlah | 1.156.188.000,00 | 1.097.912.400,00 | (58.275.600,00) | 94,96 | 1.959.079.822,00 |
| JUMLAH TOTAL | 29.520.683.000,00 | 23.652.739.277,00 | (5.867.943.723,00) | 80,12 | 22.068.306.403,00 |

Realisasi Pendapatan dari Retribusi Daerah Tahun 2021 sebesar Rp23.652.739.277,00 atau 80,12%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 realisasi Retribusi Daerah tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp7.452.376.597,00 atau 33,77%.

Dari 17 (tujuh belas) rincian obyek pendapatan Retribusi Daerah tahun 2021 hanya tiga yang dapat mencapai target yaitu Retribusi Pelayanan Kesehatan 225,64%, Retribusi



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

Pelayanan Tera/Tera Ulang tercapai 271,18% dan Retribusi Rumah Potong Hewan tercapai 118,72%.

Sedangkan 14 (sebelas) lainnya tidak dapat mencapai target yaitu Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebesar 95,63%, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar 42,99%, Retribusi Pelayanan Pasar sebesar 88,13%, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 66,24%, Retribusi Pelayanan Pendidikan sebesar 84,20%, Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi 50,60%, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar 99,37%, Retribusi Tempat Pelelangan sebesar 93,37%, Retribusi Terminal sebesar 47,05%, Retribusi tempat Khusus Parkir sebesar 79,62%, Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa 78,05%, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 45,59%, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 98,54%, Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum 24,81%. Pada tahun 2020 terdapat realisasi Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan, namun pada 2021 anggaran Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dianggarkan pada rekening Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan tidak mencapai target dikarenakan Retribusi Pelayanan Persampahan pada terminal menurun akibat dari dampak Covid 19, dimana jumlah kendaraan angkutan umum yang beroperasi masuk terminal non bus berkurang. Sedangkan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah karena banyak juru parkir yang terlambat setor.

Retribusi Pelayanan Pasar tidak mencapai target disebabkan karena adanya pembatasan kegiatan masyarakat di masa pandemi Covid 19, pedagang banyak yg tutup karena sepi nya tingkat kunjungan ke pasar, selain itu juga banyaknya mini market/pasar online/pasar modern sehingga berpengaruh terhadap kunjungan ke pasar dan pendapatan pedagang yang mengakibatkan pada pemungutan retribusi pasar.

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor tidak mencapai target disebabkan karena masih banyak kendaraan yang terlambat untuk menguji sesuai dengan habis batas waktunya.

Retribusi Pelayanan Pendidikan yang dikelola oleh Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah tidak mencapai target dikarenakan dengan berlakunya kurikulum 13 siswa SMK diarahkan untuk Praktek Kerja Industri (prakerin) di dunia industri serta karena berlakunya PPKM menyebabkan beberapa SMK diluar kebumen yang sudah mendaftarkan untuk prakerin di BLK menarik kembali siswanya.

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu antara lain dikarenakan kesulitan mencari alamat pemilik tower karena pemindahan jual/beli tower tanpa sepengetahuan pihak dinas, sehingga tagihannya bisa lebih/kurang tergantung menara yang dikelola saat itu, serta masa retribusi berakhir pada akhir tahun dan untuk penagihan retribusi pengendalian menara dilakukan pada semester II setelah dilakukan wasdal oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dilaksanakan oleh 16 SKPD, beberapa penyebab tidak tercapainya target pendapatan antara lain disebabkan penurunan sewa alun-alun dan sewa Gedung Setda akibat dampak Covid-19, keterlambatan pembayaran sewa



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

kendaraan perintis sebanyak 4 unit, dan sewa kios terminal non bus. Selain itu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dari sewa tanah oleh pihak ketiga yang digunakan sebagai tambak udang dihentikan karena lokasinya menjadi kawasan industri. Pendapatan dari retribusi pemakaian kekayaan daerah berupa tanah dan bangunan di sekolah tidak mencapai target dikarenakan sekolah banyak yang tutup dikarenakan pandemi covid 19 dan proses pembelajaran secara daring. Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tidak tercapai antara lain karena saat ini banyak rekanan yang sudah memiliki alat berat untuk disewakan, dan alat berat digunakan/dipinjamkan untuk penanganan bencana dengan tidak dikenakan retribusi, serta sekarang banyak jalan yang konstruksinya menggunakan beton.

Retribusi Tempat Pelelangan merupakan retribusi pelelangan ikan yang dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, tidak tercapainya target pendapatan disebabkan karena faktor cuaca yang menghalangi nelayan melaut serta terjadi penurunan produksi untuk komoditas perikanan yang memiliki harga tinggi.

Kendala pendapatan Retribusi Terminal tidak tercapai dikarenakan menurunnya jumlah kendaraan angkutan umum yang beroperasi dan masuk terminal non bus, hal tersebut merupakan dampak dari perubahan perilaku masyarakat yang beralih menggunakan kendaraan pribadi atau moda transportasi online.

Retribusi Tempat Khusus Parkir yang dikelola Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata tidak tercapai karena sepi pengunjung akibat dari penutupan lokasi wisata pada masa pandemi Covid-19. Sementara itu Retribusi Tempat Khusus Parkir yang dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan tidak memenuhi target juga disebabkan karena akibat sepi pengunjung ke pasar dimasa pandemi Covid 19.

Tidak tercapainya target pendapatan Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga antara lain dikarenakan adanya penutupan obyek wisata yang dikelola pemerintah, pemberlakuan PPKM, larangan mudik serta pembatasan maksimal 30% dari kapasitas obyek wisata, serta dampak Pembatalan cuti bersama pada idul fitri dan idul adha.

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan tidak tercapai karena adanya Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja, sehingga bagi kabupaten yang belum memiliki Peraturan Daerah tentang Persetujuan Bangunan Gedung tidak dapat menarik retribusi IMB.

Sementara itu Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum tidak memenuhi target dikarenakan belum ada penambahan kendaraan baru dan untuk menentukan jumlah trayek baru perlu ada survey load faktor, waktu perpanjangan SK ijin Trayek berlaku 5 Tahun, banyak jalur trayek yang kendaraannya sudah tidak beroperasi karena sepi pengguna angkutan dan batasan usia kendaraan angkutan umum 25 tahun.

Rincian Pendapatan Retribusi per SKPD dapat dilihat pada Tabel Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah per SKPD pada **lampiran 1**.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Tabel Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

| Uraian | 2021 | | | | Realisasi 2020 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------|-------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/Kurang (Rp) | % | (Rp) |
| Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 16.552.859.000,00 | 16.552.860.815,00 | 1.815,00 | 100,00 | 15.727.758.649,00 |

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terdiri dari Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

| Uraian | 2021 | | | % | Realisasi 2020 |
|--|--------------------------|--------------------------|-------------------|---------------|--------------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/Kurang (Rp) | | (Rp) |
| Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusda/BUMD: | | | | | |
| a. Apotik Luk Ulo | 171.246.000,00 | 171.246.615,00 | 615,00 | 100,00 | 146.874.735,00 |
| b. Perusda Air Minum (PDAM) | 1.858.068.000,00 | 1.858.068.270,00 | 270,00 | 100,00 | 1.675.346.434,00 |
| c. PD BPR Kebumen | 1.362.256.000,00 | 1.362.256.022,00 | 22,00 | 100,00 | 1.390.079.812,00 |
| d. PD BPR BKK Kebumen | 3.655.192.000,00 | 3.655.192.203,00 | 203,00 | 100,00 | 3.731.198.675,00 |
| e. Bank Jateng | 9.506.097.000,00 | 9.506.097.705,00 | 705,00 | 100,00 | 8.782.974.368,00 |
| f. PT PRPP Jateng | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.284.625,00 |
| Jumlah | 16.552.859.000,00 | 16.552.860.815,00 | 1.815,00 | 100,00 | 15.727.758.649,00 |

Pendapatan dari Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2021 terealisasi 100,00%, naik sebesar 5,25% dibandingkan pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun 2020 yang sebesar Rp15.727.758.649,00. Pendapatan tersebut berasal dari penerimaan pembagian deviden dari Perusahaan Daerah yang diterima Pemerintah Daerah berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

5.1.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Tabel Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

| Uraian | 2021 | | | | Realisasi 2020 |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------|--------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/Kurang (Rp) | % | (Rp) |
| Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 251.349.778.000,00 | 319.336.632.833,00 | 67.986.854.833,00 | 127,05 | 264.352.314.214,80 |

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terealisasi sebesar Rp319.336.632.833,00 terdiri dari:



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

| Uraian | 2021 | | | | Realisasi 2020 |
|--|---------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------|---------------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/Kurang (Rp) | % | (Rp) |
| Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan | 1.102.000.000,00 | 1.748.608.031,00 | 646.608.031,00 | 158,68% | 1.342.174.490,00 |
| Hasil Kerja Sama Daerah | 50.300.000,00 | 27.915.525,00 | (22.384.475,00) | 55,50% | 1.352.715,00 |
| Jasa Giro | 4.247.500.000,00 | 2.525.596.113,00 | (1.721.903.887,00) | 59,46% | 3.896.010.559,00 |
| Pendapatan Bunga | 6.000.000.000,00 | 10.048.808.180,00 | 4.048.808.180,00 | 167,48% | 12.795.027.102,00 |
| Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan | 0,00 | 101.398.261,00 | 101.398.261,00 | 100,00% | 65.896.066,00 |
| Pendapatan Denda Pajak Daerah | 275.000.000,00 | 284.950.359,00 | 9.950.359,00 | 103,62% | 249.842.943,00 |
| Pendapatan Denda Retribusi Daerah | 13.000.000,00 | 23.530.800,00 | 10.530.800,00 | 181,01% | 370.377.740,00 |
| Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan | 18.500.000,00 | 0,00 | (18.500.000,00) | 0,00% | 43.035.400,00 |
| Pendapatan dari Pengembalian | 406.690.000,00 | 439.796.371,00 | 33.106.371,00 | 108,14% | 821.104.559,00 |
| Pendapatan BLUD | 229.899.288.000,00 | 294.669.542.386,00 | 64.770.254.386,00 | 128,17% | 241.773.683.117,00 |
| Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir | 37.500.000,00 | 35.400.000,00 | (2.100.000,00) | 94,40% | 40.625.000,00 |
| Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht) | 8.800.000.000,00 | 9.055.846.807,00 | 255.846.807,00 | 102,91% | 0,00 |
| Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah | 500.000.000,00 | 375.240.000,00 | (124.760.000,00) | 75,05% | 0,00 |
| Lain-lain PAD yang Sah Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.972.377.823,80 |
| Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980.806.700,00 |
| Jumlah | 251.349.778.000,00 | 319.336.632.833,00 | 67.986.854.833,00 | 127,05 | 264.352.314.214,80 |

Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tahun 2021 terealisasi 127,05% naik sebesar 20,80% dibandingkan Pendapatan tahun 2020 yang sebesar Rp264.352.314.214,80. Rincian objek pada Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang melampaui target anggaran yang ditetapkan sebanyak 7 objek, yaitu yaitu Hasil Penjualan BMD yang tidak Dipisahkan sebesar 158,68%, Pendapatan Bunga Deposito 167,48%, Pendapatan Denda Pajak sebesar 103,62%, Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebesar 181,01%, Pendapatan dari Pengembalian sebesar 108,14%, Pendapatan BLUD 128,17%, dan Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht) 102,91%. Tabel Rincian Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah per SKPD disajikan pada **lampiran 2**.

5.1.1.2 Pendapatan Transfer

Tabel Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer

| Uraian | 2021 | | | | Realisasi 2020 |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------|-------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/Kurang (Rp) | % | (Rp) |
| Pendapatan Transfer | 2.209.563.280.000,00 | 2.222.632.960.883,00 | 13.069.680.883,00 | 100,59 | 2.223.453.074.285 |

Pendapatan Transfer dianggarkan sebesar Rp2.209.563.280.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.222.632.960.883,00 merupakan pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan pendapatan Transfer Antar Daerah. Rincian Pendapatan Transfer adalah sebagai berikut:

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer

| Uraian | 2021 | | | | Realisasi 2020 |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/ kurang (Rp) | % | (Rp) |
| Transfer Pemerintah Pusat | 2.051.701.194.000,00 | 2.059.293.466.080,00 | 7.592.272.080,00 | 100,37 | 2.074.494.939.094,00 |
| Transfer Antardaerah | 157.862.086.000,00 | 163.339.494.803,00 | 5477408803,00 | 103,47 | 148.958.135.191,00 |
| Jumlah | 2.209.563.280.000,00 | 2.222.632.960.883,00 | 13.069.680.883,00 | 100,59 | 2.223.453.074.285,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

Pendapatan Transfer realisasinya sebesar 100,20% dari target anggaran sebesar Rp2.222.632.960.883,00 dan turun 0,04% dari penerimaan tahun 2020.

5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Tabel Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

| Uraian | 2021 | | | | Realisasi 2020 |
|---------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------|----------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/Kurang (Rp) | % | (Rp) |
| Transfer Pemerintah Pusat | 2.051.701.194.000,00 | 2.059.293.466.080,00 | 7.592.272.080,00 | 100,37 | 2.074.494.939.094,00 |

Realisasi pendapatan dari Transfer Pemerintah Pusat terealisasi Rp2.059.293.466.080,00 atau sebesar 100,37% dari target anggaran sebesar Rp2.051.701.194.000,00 atau menurun sebesar 0,73% dibandingkan realisasi Tahun 2020 yang terealisasi sebesar Rp2.074.494.939.094,00. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

| Uraian | 2021 | | | | Realisasi 2020 |
|----------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------|----------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/ kurang (Rp) | % | (Rp) |
| Dana Perimbangan | 1.600.006.881.000,00 | 1.607.599.153.080,00 | 7.592.272.080,00 | 100,47 | 1.607.599.153.080,00 |
| Dana Insentif Daerah (DID) | 46.433.860.000,00 | 46.433.860.000,00 | 0,00 | 100,00 | 46.433.860.000,00 |
| Dana Desa | 405.260.453.000,00 | 405.260.453.000,00 | 0,00 | 100,00 | 405.260.453.000,00 |
| Jumlah | 2.051.701.194.000,00 | 2.059.293.466.080,00 | 7.592.272.080,00 | 100,37 | 2.059.293.466.080,00 |

Transfer Pemerintah Pusat mencapai target atau sebesar 99,65%, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak 97,34%, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam sebesar 86,81%, Dana Alokasi Umum sebesar 99,28% dan Dana Alokasi Khusus 101,10%.

5.1.1.2.1.1 Dana Perimbangan

Tabel Anggaran dan Realisasi Dana Perimbangan

| Uraian | 2021 | | | | Realisasi 2020 |
|------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------|----------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/Kurang (Rp) | % | (Rp) |
| Dana Perimbangan | 1.600.006.881.000,00 | 1.607.599.153.080,00 | 7.592.272.080,00 | 100,47 | 1.607.599.153.080,00 |

Realisasi pendapatan dari Dana Perimbangan terealisasi Rp1.607.599.153.080,00 atau sebesar 100,47% dari target anggaran sebesar Rp1.600.006.881.000,00. Dana Perimbangan dirinci sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Perimbangan

| Uraian | 2021 | | | | Realisasi 2020 |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|--------|----------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/Kurang (Rp) | % | (Rp) |
| Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) | 29.867.666,00 | 41.397.337.217,00 | 11.529.671.217,00 | 138,60 | 35.146.538.958,00 |
| Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) | 1.179.288.910.000,00 | 1.179.288.910.000,00 | 0,00 | 100,00 | 1.197.504.293.000,00 |
| Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik | 82.393.122.000,00 | 78.732.325.023,00 | (3.660.796.977,00) | 95,56 | 62.784.147.975,00 |
| Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik | 308.457.183.000,00 | 308.180.580.840,00 | (276.602.160,00) | 99,91 | 328.790.425.161,00 |
| DID | 46.433.860.000,00 | 46.433.860.000,00 | 0,00 | 100,00 | 45.243.665.000,00 |
| Dana Desa | 405.260.453.000,00 | 405.260.453.000,00 | 0,00 | 100,00 | 405.025.869.000,00 |
| Jumlah | 2.051.701.194.000,00 | 2.059.293.466.080,00 | 7.592.272.080,00 | 100,37 | 2.074.494.939.094,00 |

Realisasi Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp41.397.337.217,00 atau 138,60% dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

| Uraian Pendapatan | TA 2021 | | | | Realisasi 2020 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------|-------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/Kurang (Rp) | % | (Rp) |
| DBH Pajak Bumi dan Bangunan | 6.447.972.000,00 | 11.321.276.739,00 | 4.873.304.739,00 | 175,58 | 6.560.363.542,00 |
| DBH PPh Pasal 21 | 12.164.454.000,00 | 16.423.637.908,00 | 4.259.183.908,00 | 135,01 | 20.009.675.591,00 |
| DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND | 1.479.026.000,00 | 2.612.765.190,00 | 1.133.739.190,00 | 176,65 | 0,00 |
| DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) | 8.190.396.000,00 | 8.650.954.298,00 | 460.558.298,00 | 105,62 | 6.726.858.288,00 |
| DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi | 70.404.000,00 | 213.027.500,00 | 142.623.500,00 | 302,58 | 56.090.685,00 |
| DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi | 0,00 | 62.242.900,00 | 62.242.900,00 | 100,00 | 711.359.243,00 |
| DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi | 53.648.000,00 | 108.913.482,00 | 55.265.482,00 | 203,01 | 48.791.038,00 |
| DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent | 0,00 | 4.701.350,00 | 4.701.350,00 | 100,00 | 13.058.772,00 |
| Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty | 2.857.000,00 | 2.168.975,00 | (688.025,00) | 75,92 | 6.158.153,00 |
| DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) | 330.590.000,00 | 640.029.725,00 | 309.439.725,00 | 193,60 | 225.907.357,00 |
| DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan | 1.128.319.000,00 | 1.357.619.150,00 | 229.300.150,00 | 120,32 | 788.276.289,00 |
| Jumlah | 29.867.666.000,00 | 41.397.337.217,00 | 11.529.671.217,00 | 138,60 | 35.146.538.958,00 |

Realisasi pendapatan dari Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2021 adalah sebesar Rp1.179.288.910.000,00 atau 100% dari target anggaran. Penerimaan Dana Alokasi Umum turun sebesar 1,52% dibanding dengan realisasi tahun 2020.

Realisasi pendapatan dari Dana Alokasi Khusus tercapai sebesar Rp386.912.905.863,00 atau 98,99% dari target anggaran sebesar Rp390.850.305.000,00. Dibandingkan dengan tahun 2020 yang realisasinya sebesar Rp406.201.238.000,00, realisasi tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 4,75%. Realisasi Dana Alokasi Khusus tahun 2021 terdiri atas DAK Fisik dan DAK Non Fisik yang dirinci pada tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik

| Uraian | 2021 | | | | Realisasi 2020 |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------|-----------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/Kurang (Rp) | % | (Rp) |
| Bidang Pendidikan-Reguler-SD | 6.927.787.000 | 6.196.275.975 | (731.511.025,0) | 89,44 | 6.927.787.000 |
| Bidang Pendidikan-Reguler-SMP | 6.882.088.000 | 6.232.055.262 | (650.032.738,0) | 90,55 | 6.882.088.000 |
| Bidang Pendidikan-Reguler- Perpustakaan Daerah | 300.000.000 | 296.747.000 | (3.253.000,0) | 98,92 | 300.000.000 |
| Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar | 8.996.146.000 | 8.748.768.800 | (247.377.200,0) | 97,25 | 8.996.146.000 |
| Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan | 14.444.000.000 | 14.960.158.392 | 516.158.392,0 | 103,57 | 14.444.000.000 |
| Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kefarmasian | 7.740.276.000 | 7.660.022.051 | (80.253.949,0) | 98,96 | 7.741.089.000 |
| Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Tot | 2.545.006.000 | 0 | (2.545.006.000,0) | - | 2.554.320.000 |
| Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-KB | 1.469.042.000 | 2.326.084.000 | 857.042.000,0 | 158,34 | 1.469.042.000 |
| Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penurunan Stunting (KB) | 0 | 221.250.000 | 221.250.000,0 | 100,00 | 0 |
| Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya | 2.715.051.000 | 2.715.051.000 | - | 100,00 | 2.715.051.000 |
| Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM | 1.360.398.000 | 1.351.219.000 | (9.179.000,0) | 99,33 | 1.360.398.000 |
| Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian | 4.281.500.000 | 5.909.274.800 | 1.627.774.800,0 | 138,02 | 4.281.500.000 |
| Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan | 1.391.000.000 | 1.309.398.415 | (81.601.585,0) | 94,13 | 1.391.000.000 |
| Bidang Jalan-Reguler-Jalan | 9.935.662.000 | 9.439.902.000 | (495.760.000,0) | 95,01 | 9.935.662.000 |
| Bidang Air Minum-Penugasan | 5.199.754.000 | 4.993.032.730 | (206.721.270,0) | 96,02 | 5.199.754.000 |
| Bidang Sanitasi-Penugasan | 4.258.348.000 | 4.257.917.398 | (430.602,0) | 99,99 | 4.266.933.000 |
| Bidang Irigasi-Penugasan | 2.396.064.000 | 667.889.200 | (1.728.174.800,0) | 27,87 | 2.396.064.000 |
| Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup | 1.551.000.000 | 1.447.279.000 | (103.721.000,0) | 93,31 | 0 |
| Jumlah | 82.393.122.000 | 78.732.325.023 | (3.660.796.977,0) | 95,56 | 80.860.834.000 |

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus Non-Fisik

| Uraian | 2021 | | | | Realisasi 2020 |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|--------------|------------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/Kurang (Rp) | % | (Rp) |
| TPG PNSD | 255.174.218.000 | 255.174.218.000 | 0,00 | 100,00 | 255.174.218.000 |
| Tamsil Guru PNSD | 1.383.000.000 | 1.106.400.000 | (276.600.000,0) | 80,00 | 1.383.000.000 |
| BOP PAUD | 18.501.000.000 | 18.501.000.000 | 0,00 | 100,00 | 20.310.000.000 |
| BOP Pendidikan Kesetaraan | 1.545.950.000 | 1.545.950.000 | 0,00 | 100,00 | 2.044.700.000 |
| BOKKB-BOK | 15.069.685.000 | 25.290.917.471 | 10.221.232.471,0 | 167,83 | 28.044.924.000 |
| BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan | 521.383.000 | 0,00 | (521.383.000,0) | 0,00 | 1.793.695.000 |
| BOKKB-Akreditasi Puskesmas | 1.793.695.000 | 0,00 | (1.793.695.000,0) | 0,00 | 3.706.483.000 |
| BOKKB-Jaminan Persalinan | 3.706.483.000 | 0,00 | (3.706.483.000,0) | 0,00 | 8.849.798.000 |
| BOKKB-BOKB | 8.188.692.000 | 3.989.019.123 | (4.199.672.877,0) | 48,71 | 762.766.000 |
| PK2UKM | 607.958.000 | 607.957.300 | (700,0) | 100,00 | 2.749.437.000 |
| Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan | 1.965.119.000 | 1.965.118.946 | (54,0) | 100,00 | 521.383.000 |
| Dana Bantuan BLPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah | 308.457.183.000 | 308.180.580.840 | (276.602.160,0) | 99,91 | 325.340.404.000 |

5.1.1.2.1.2 Dana Insentif Daerah (DID)

Tabel Anggaran dan Realisasi Dana Insentif Daerah

| Uraian | 2021 | | | | Realisasi 2020 |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|-------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/Kurang (Rp) | % | (Rp) |
| Dana Insentif Daerah | 46.433.860.000,00 | 46.433.860.000,00 | 0,00 | 100,00 | 45.243.665.000,00 |

Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Kebumen memperoleh Dana Insentif Daerah sebesar Rp46.433.860.000,00 atau 100% dari target. Bila dibandingkan realisasi tahun 2020 sebesar Rp45.243.665.000,00 naik sebesar 2,63%.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

5.1.1.2.1.3 Dana Desa

Tabel Anggaran dan Realisasi Dana Desa

| Uraian | 2021 | | | | 2020 |
|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------|--------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/ kurang (Rp) | % | (Rp) |
| Dana Desa | 405.260.453.000,00 | 405.260.453.000,00 | 0,00 | 100,00 | 405.025.869.000,00 |

Dana Desa yang diterima Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 sebesar Rp405.260.453.000,00 (untuk 449 Desa) terealisasi 100% dari anggarannya.

5.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah

Tabel Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

| Uraian | 2021 | | | | Realisasi 2020 |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------|--------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih / (Kurang) (Rp) | % | (Rp) |
| Transfer Antar Daerah | 157.862.086.000,00 | 163.339.494.803,00 | 5.477.408.803 | 103,47 | 148.958.135.191,00 |

Transfer Antar Daerah realisasinya sebesar Rp163.339.494.803,00 atau 100%, merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan yang diterima Kas Umum Daerah pada Tahun 2021.

5.1.1.2.2.1 Pendapatan Bagi Hasil

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil

| Uraian | 2021 | | | | Realisasi 2020 |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------|--------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/Kurang (Rp) | % | (Rp) |
| Pendapatan Bagi Hasil | 145.819.086.000,00 | 157.491.424.803,00 | 5.477.408.803,00 | 103,47 | 130.966.524.602,00 |

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Tahun 2021 terealisasi sebesar Rp157.491.424.803,00 atau 103,47% dari anggaran Rp145.819.086.000,00. Dibandingkan realisasi tahun 2020 yang sebesar Rp130.966.524.602,00, realisasi tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 20,25%. Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun 2021 terdiri dari Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan dan pemanfaatan Air Permukaan dan Bagi Hasil Pajak Rokok dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Rincian Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak

| Uraian | Realisasi 2021 (Rp) | Realisasi 2020 (Rp) | Kenaikan/Penurunan (Rp) |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|
| Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor | 38.589.247.000,00 | 30.088.085.262,00 | 8.501.161.738,00 |
| Bagi Hasil dari Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor | 22.676.722.000,00 | 14.730.085.880,00 | 7.946.636.120,00 |
| Bagi Hasil dari Pajak Bea Bahan Bakar Kendaraan Bermotor | 30.495.157.000,00 | 24.879.147.338,00 | 5.616.009.662,00 |
| Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan | 298.458.000,00 | 230.823.370,00 | 67.634.630,00 |
| Bagi Hasil dari pajak Rokok | 53.759.502.000,00 | 61.038.382.752,00 | (7.278.880.752,00) |
| Jumlah | 145.819.086.000,00 | 130.966.524.602,00 | 14.852.561.398,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

5.1.1.2.2 Bantuan Keuangan

Tabel Anggaran dan Realisasi Bantuan Keuangan

| Uraian | TA 2021 | | | | Realisasi 2020 |
|------------------|-------------------|------------------|--------------------|-------|-------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/ Kurang | % | (Rp) |
| Bantuan Keuangan | 12.043.000.000,00 | 5.848.070.000,00 | (6.194.930.000,00) | 48,56 | 17.991.610.589,00 |

Bantuan Keuangan dari Provinsi untuk tahun 2021 dari anggaran sebesar Rp12.043.000.000,00 realisasinya sebesar 48,06% atau Rp5.848.070.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel Rincian Realisasi Bantuan Keuangan

| Uraian | Realisasi |
|---|-------------------------|
| Bantuan TMMD Sengkuyung I, II & III Tahun 2020 | 753.000.000,00 |
| Bantuan Sarana dan Prasarana (Banprop) Dinas Pendidikan | 4.223.426.600,00 |
| Bantuan sapras Banprop DPUPR Kegiatan peningkatan ruas jalan Peniron -Karanggayam Kab | 871.643.400,00 |
| Jumlah | 5.848.070.000,00 |

5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Tabel Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

| Uraian | 2021 | | | | Realisasi 2020 |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------|--------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/ Kurang | % | (Rp) |
| Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah | 133.173.500.000,00 | 137.384.967.735,00 | 4.211.467.735,00 | 103,16 | 136.750.269.161,00 |

Penerimaan dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2021 sebesar Rp137.384.967.735,00 terdiri dari pendapatan hibah, lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Rincian Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

| Uraian | 2021 | | | | Realisasi 2020 |
|--|---------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------|---------------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/ kurang (Rp) | % | (Rp) |
| Pendapatan Hibah | 3.795.000.000,00 | 8.794.749.700,00 | 3.795.000.000,00 | 231,75 | 1.393.643.553,00 |
| Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 129.378.500.000,00 | 128.590.218.035,00 | (788.281.965,00) | 99,39 | 135.114.333.007,00 |
| Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat Dalam Negeri/Perorangan dalam Negeri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242.292.601,00 |
| Jumlah | 133.173.500.000,00 | 137.384.967.735,00 | 3.006.718.035,00 | 103,16 | 136.750.269.161,00 |

5.1.1.3.1 Pendapatan Hibah

Tabel Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Hibah

| Uraian | 2021 | | | | Realisasi 2020 |
|------------------|------------------|------------------|------------------|--------|--------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/ Kurang | % | (Rp) |
| Pendapatan Hibah | 3.795.000.000,00 | 8.794.749.700,00 | 3.795.000.000,00 | 231,75 | 136.507.976.560,00 |

Pendapatan hibah dari pemerintah tahun 2021 sebesar Rp8.794.749.700,00. Rincian adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

Tabel Rincian Realisasi Pendapatan Hibah

| Uraian | Realisasi (Rp) |
|--|-------------------------|
| Pendapatan Hibah Sanitasi dari Pemerintah (Hibah SAIG) | 522.000.000,00 |
| Pendapatan Hibah IPDMIP | 6.508.749.700,00 |
| Pendapatan Hibah Air Minum Perdesaan dari Pemerintah | 1.764.000.000,00 |
| Jumlah | 8.794.749.700,00 |

5.1.1.3.1.2 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan

Tabel Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan

| Uraian | 2021 | | | | Realisasi 2020 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------|--------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/ Kurang (Rp) | % | (Rp) |
| Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 129.378.500.000,00 | 128.590.218.035,00 | (788.281.965,00) | 99,39 | 135.114.333.007,00 |

Pendapatan hibah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terdiri dari pendapatan hibah dana BOS yang diterima Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp128.590.218.035,00. Rincian adalah sebagai berikut:

Tabel Rincian Realisasi Pendapatan Hibah Dana BOS

| Uraian | Nilai (Rp) |
|---|---------------------------|
| Pendapatan sesuai SP2B | 128.590.218.035,00 |
| Bunga Bank | 73.753,00 |
| Pendapatan atas LHP Tahun Lalu | 30.068.230,00 |
| Koreksi Tambah | 128.560.450.000,00 |
| Koreksi Kurang | (373.948,00) |
| Realisasi Pendapatan BOS TA 2020 | 128.590.218.035,00 |

Sedangkan Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/pihak ketiga tidak ada realisasi pada tahun 2021.

5.1.2 Belanja

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja

| Uraian | 2021 | | | | Realisasi 2020 |
|---------|----------------------|----------------------|----------------------|-------|----------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/Kurang (Rp) | % | (Rp) |
| Belanja | 2.958.061.909.000,00 | 2.779.840.698.100,00 | (178.221.210.900,00) | 93,98 | 2.737.861.916.080,00 |

Belanja Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp2.958.061.909.000,00 terealisasi 93,98% atau sebesar Rp2.779.840.698.100,00, apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yang sebesar Rp2.737.861.916.080,00 maka mengalami kenaikan sebesar 1,53%. Realisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.737.861.916.080,00, dirinci sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja

| Uraian | 2021 | | | | Realisasi 2020 |
|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/Kurang (Rp) | % | (Rp) |
| Belanja Operasi | 2.049.740.910.000,00 | 1.902.638.912.710,00 | (147.101.997.290,00) | 92,82 | 1.839.589.218.113,00 |
| Belanja Modal | 291.188.892.000,00 | 266.110.950.340,00 | (25.077.941.660,00) | 91,39 | 288.801.049.018,00 |
| Belanja Tak Terduga | 6.216.770.000,00 | 545.318.400,00 | (5.671.451.600,00) | 8,77 | 10.188.825.249,00 |
| Belanja Transfer | 610.915.337.000,00 | 610.545.516.650,00 | (369.820.350,00) | 99,94 | 599.282.823.700,00 |
| Jumlah | 2.958.061.909.000,00 | 2.779.840.698.100,00 | (178.221.210.900,00) | 93,98 | 2.737.861.916.080,00 |

Kontribusi masing-masing jenis belanja terhadap total Belanja Daerah didominasi oleh Belanja Operasi yang mencapai 68,44% kemudian Belanja Transfer sebesar 21,96%, Belanja Modal sebesar 9,57% dan Belanja Tak Terduga sebesar 0,02%.

Pada tahun 2020 Belanja Transfer merupakan akun tersendiri dengan nama akun Transfer, namun mendasari Permendagri nomor 90 tahun 2019 maka akun Transfer disesuaikan menjadi akun Belanja Transfer.

5.1.2.1 Belanja Operasi

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi

| Uraian | TA 2021 | | | | Realisasi 2020 |
|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------|----------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/Kurang (Rp) | % | (Rp) |
| Belanja Operasi | 2.049.740.910.000,00 | 1.902.638.912.710,00 | (147.101.997.290,00) | 92,82 | 1.839.589.218.113,00 |

Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp1.902.638.912.710,00 mencapai 92,82% dari anggaran sebesar Rp2.049.740.910.000,00 apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yang sebesar Rp1.839.589.218.113,00 mengalami penurunan sebesar 3,43%. Adapun rincian Belanja Operasi adalah sebagai berikut :

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi

| Uraian | TA 2021 | | | | Realisasi 2020 |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/Kurang (Rp) | % | (Rp) |
| Belanja Pegawai | 1.213.347.347.000,00 | 1.141.295.419.703,00 | (72.051.927.297,00) | 94,06 | 1.169.696.600.650,00 |
| Belanja Barang dan Jasa | 733.937.101.000,00 | 666.965.891.277,00 | (66.971.209.723,00) | 90,88 | 557.946.733.726,00 |
| Belanja Subsidi | 500.000.000,00 | 484.527.400,00 | (15.472.600,00) | 96,91 | 0,00 |
| Belanja Hibah | 78.200.274.000,00 | 72.414.174.601,00 | (5.786.099.399,00) | 92,60 | 81.112.633.737,00 |
| Belanja Bantuan Sosial | 23.756.188.000,00 | 21.478.899.729,00 | (2.277.288.271,00) | 90,41 | 30.833.250.000,00 |
| Jumlah | 2.049.740.910.000,00 | 1.902.638.912.710,00 | (147.101.997.290,00) | 92,82 | 1.839.589.218.113,00 |

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai

| Uraian | TA 2021 | | | | 2020 |
|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------|----------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/Kurang (Rp) | % | (Rp) |
| Belanja Pegawai | 1.213.347.347.000,00 | 1.141.295.419.703,00 | (72.051.927.297,00) | 94,06 | 1.169.696.600.650,00 |

Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp1.141.295.419.703,00 atau 94,06% dari anggaran dan mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar Rp28.401.180.947 atau sebesar 2,43%. Adapun rincian realisasi Belanja Pegawai adalah sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai

| Uraian | TA 2021 | | | | Realisasi 2020 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------|-----------------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/Kurang (Rp) | % | (Rp) |
| Belanja Gaji dan Tunjangan ASN | 749.721.734.000,00 | 720.872.064.041,00 | (28.849.669.959,00) | 96,15 | 733.153.139.603,00 |
| Belanja Tambahan Penghasilan ASN | 109.335.983.000,00 | 90.928.546.880,00 | (18.407.436.120,00) | 83,16 | 70.978.554.505,00 |
| Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | 293.312.106.000,00 | 269.466.287.145,00 | (23.845.818.855,00) | 91,87 | 292.203.733.786,00 |
| Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD | 30.318.287.000,00 | 29.959.433.106,00 | (358.853.894,00) | 98,82 | 23.008.503.675,00 |
| Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH | 595.048.000,00 | 509.329.781,00 | (85.718.219,00) | 85,59 | 0,00 |
| Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan | 993.120.000,00 | 993.080.000,00 | (40.000,00) | 100,00 | 821.640.000,00 |
| Belanja Pegawai BOS | 28.533.425.000,00 | 28.196.816.750,00 | (336.608.250,00) | 98,82 | 24.471.297.371,00 |
| Belanja Pegawai BLUD | 537.644.000,00 | 369.862.000,00 | (167.782.000,00) | 68,79 | 25.059.731.710,00 |
| Jumlah | 1.213.347.347.000,00 | 1.141.295.419.703,00 | (72.051.927.297,00) | 94,06 | 1.169.696.600.650,00 |

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa

| Uraian | TA 2021 | | | | Realisasi 2020 |
|-------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------|--------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/Kurang (Rp) | % | (Rp) |
| Belanja Barang dan Jasa | 733.896.601.000,00 | 666.965.891.277,00 | (66.930.709.723,00) | 90,88 | 557.946.733.726,00 |

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Rp666.965.891.277,00 atau 90,88% dari anggaran, mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar Rp109.019.157.551,00 atau sebesar 19,54%. Adapun rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa adalah sebagai berikut:

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa

| Uraian | TA 2021 | | | | Realisasi 2020 |
|--|--------------------|--------------------|---------------------|--------|--------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/Kurang (Rp) | % | (Rp) |
| Belanja Barang Pakai Habis | 108.880.309.000,00 | 101.684.234.820,00 | (7.196.074.180,00) | 93,39 | 128.802.393.050,00 |
| Belanja Barang Tak Habis Pakai | 997.143.000,00 | 924.183.434,00 | (72.959.566,00) | 92,68 | 0,00 |
| Belanja Jasa Kantor | 140.120.718.000,00 | 123.213.540.362,00 | (16.954.477.638,00) | 87,90 | 76.824.853.873,00 |
| Belanja Iuran Jaminan/Asuransi | 40.951.959.000,00 | 39.651.686.377,00 | (1.300.272.623,00) | 96,82 | 16.144.896.865,00 |
| Belanja Sewa Tanah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Belanja Sewa Peralatan dan Mesin | 2.243.990.000,00 | 1.657.081.285,00 | (586.908.715,00) | 73,85 | 1.106.336.281,00 |
| Belanja Sewa Gedung dan Bangunan | 2.103.216.000,00 | 1.486.232.942,00 | (616.983.058,00) | 70,66 | 578.483.289,00 |
| Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya | 83.768.000,00 | 66.617.000,00 | (17.151.000,00) | 79,53 | 0,00 |
| Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi | 5.611.923.000,00 | 5.328.209.600,00 | (283.713.400,00) | 94,94 | 5.236.946.500,00 |
| Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi | 5.529.169.000,00 | 4.461.246.461,00 | (1.067.922.539,00) | 80,69 | 478.359.000,00 |
| Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) | 440.000.000,00 | 434.361.400,00 | (5.638.600,00) | 98,72 | 0,00 |
| Belanja Beasiswa Pendidikan PNS | 18.000.000,00 | 12.000.000,00 | (6.000.000,00) | 66,67 | 0,00 |
| Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan | 6.115.861.000,00 | 5.682.766.286,00 | (433.094.714,00) | 92,92 | 2.292.755.854,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

| Uraian | TA 2021 | | | | Realisasi 2020 |
|---|---------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------|---------------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/Kurang (Rp) | % | (Rp) |
| Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah | 2.380.808.000,00 | 2.357.408.691,00 | (23.399.309,00) | 99,02 | 0,00 |
| Belanja Pemeliharaan Tanah | 14.027.000,00 | 14.022.000,00 | (5.000,00) | 99,96 | 0,00 |
| Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 4.333.413.000,00 | 4.090.743.919,00 | (242.669.081,00) | 0,00 | 4.386.840.373,00 |
| Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 9.722.077.000,00 | 9.417.350.479,00 | (304.726.521,00) | 96,87 | 10.415.497.762,00 |
| Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 18.825.369.000,00 | 18.330.841.823,00 | (494.527.177,00) | 97,37 | 20.053.909.625,00 |
| Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.015.477.720,00 |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | 44.857.811.000,00 | 36.167.630.230,00 | (8.690.180.770,00) | 80,63 | 46.421.057.045,00 |
| Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri | 13.631.000,00 | 13.631.000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 1.148.281.000,00 | 1.127.513.000,00 | (20.768.000,00) | 98,19 | 2.657.306.490,00 |
| Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 55.000.000,00 | 54.950.000,00 | (50.000,00) | 99,91 | 0,00 |
| Belanja Barang dan Jasa BOS | 75.398.305.000,00 | 70.727.729.119,00 | (4.670.575.881,00) | 93,81 | 72.714.779.407,00 |
| Belanja Barang dan Jasa BLUD | 264.044.981.000,00 | 240.061.869.049,00 | (23.983.111.951,00) | 90,92 | 168.816.840.592,00 |
| Jumlah | 733.937.101.000,00 | 666.965.891.277,00 | (66.971.209.723,00) | 90,88 | 557.946.733.726,00 |

Belanja barang dan jasa selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 direalisasikan untuk menunjang operasional pemerintah Kabupaten Kebumen dan tersebar di masing masing SKPD.

5.1.2.1.3 Belanja Subsidi

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Subsidi

| Uraian | TA 2021 | | | | Realisasi 2020 |
|--------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------|----------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/Kurang (Rp) | % | (Rp) |
| Belanja Belanja dan Jasa | 500.000.000,00 | 484.527.400,00 | (15.472.600,00) | 96,91 | 0,00 |

Pada Tahun Anggaran 2021 pemerintah Kabupaten Kebumen mengalokasikan dana untuk Program Subsidi bunga sebesar Rp500.000.000,00. Program Subsidi Bunga dilaksanakan dalam rangka memfasilitasi pelaku usaha mikro kecil guna mendapatkan akses permodalan dari lembaga keuangan/perbankan. Pedoman pelaksanaan Belanja Subsidi Bunga diatur dalam Peraturan Bupati Nomor Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga Kepada Usaha Mikro Kecil Di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021.

Program subsidi bunga tersebut disalurkan melalui Lembaga Keuangan Penyalur dengan alokasi sebagai berikut:

| No | Lembaga Keuangan Penyalur | Alokasi APBD 2021(Rp) |
|----|---------------------------------|-----------------------|
| 1 | PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) | 200.000.000,00 |
| 2 | PT BPR BKK Kebumen (Perseroda) | 225.000.000,00 |
| 3 | PT BPR BKK Jateng (Perseroda) | 75.000.000,00 |
| | Jumlah | 500.000.000,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

Belanja Subsidi direalisasikan pada tanggal 26 April 2021 dengan nomor SP2D 000338/LS-SUBSIDI/DAU/2021 sebesar Rp500.000.000,00. Namun pada tanggal 10 Desember 2021 terdapat pengembalian sisa anggaran subsidi bunga dari PT.BKK Jateng Kecamatan Kebumen sebesar Rp15.472.600,00 . Hal tersebut dikarenakan pelunasan atau top up kredit debitur penerima penerima subsidi bunga dibayarkan sebelum jatuh tempo jangka waktu kredit sehingga tidak berhak mendapatkan subsidi bunga lagi.

5.1.2.1.4 Belanja Hibah

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah

| Uraian | TA 2021 | | | | Realisasi 2020 |
|---------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------|-------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/Kurang (Rp) | % | (Rp) |
| Belanja Hibah | 78.200.274.000,00 | 72.414.174.601,00 | (5.786.099.399,00) | 92,60 | 81.112.633.737,00 |

Rincian realisasi Belanja Hibah dijelaskan sebagai berikut:

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah

| Uraian | TA 2021 | | | | Realisasi TA 2020 |
|--|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|--------------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | lebih/kurang (Rp) | % | Rp |
| Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan | 64.679.132.000,00 | 59.160.044.814,00 | (5.519.087.186,00) | 91,47 | 80.562.633.737,00 |
| Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar | 6.203.212.000,00 | 5.939.420.787,00 | (263.791.213,00) | 95,75 | 0,00 |
| Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan | 5.051.054.000,00 | 5.048.283.000,00 | (2.771.000,00) | 99,95 | 550.000.000,00 |
| Belanja Hibah kepada Koperasi | 202.000.000,00 | 201.550.000,00 | (450.000,00) | 99,78 | 0,00 |
| Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik | 2.064.876.000,00 | 2.064.876.000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| Jumlah | 78.200.274.000,00 | 72.414.174.601,00 | (5.786.099.399,00) | 92,60 | 81.112.633.737,00 |

Realisasi Belanja Hibah tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp8.698.459.136,00 atau 10,72%. Rincian Belanja Hibah per SKPD disajikan pada lampiran 3.

Pada tahun 2021 penganggaran dan pelaksanaan belanja hibah berada di masing-masing SKPD , tidak seperti pada tahun 2021 yang penganggarannya berada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait

Rincian Belanja Hibah dijelaskan sebagai berikut:

- a. Belanja Hibah Kepada Badan Dan Lembaga Yang Bersifat Nirlaba, Sukarela Dan Sosial Yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Realisasi Belanja Hibah Kepada Badan Dan Lembaga Yang Bersifat Nirlaba, Sukarela Dan Sosial Yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

sebesar Rp59.160.044.814,00 atau 91,47% jika dibandingkan dengan realisasi 2020 mengalami penurunan sebesar Rp21.402.588.923,00 atau sebesar 26,57%.

- b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar.
Realisasi Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebesar Rp5.939.420.787,00 atau 95,75%.
- c. Belanja Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan
Realisasi Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan tahun 2021 sebesar Rp5.048.283.000,00 atau 99,95% jika dibandingkan dengan realisasi 2020 mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar Rp 4.498.283.000,00 atau 817,87%.
- d. Belanja Hibah kepada Koperasi
Realisasi Belanja Hibah kepada Koperasi sebesar Rp201.550.000,00 dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah berupa belanja hibah barang. Hibah diberikan kepada Koperasi Jasa Windu Sari Urut Sewu Desa Jogomertan Kecamatan Petanahan dalam bentuk Paket Mesin Penyulingan Air Minum Reverse Osmosis (RO).
- e. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
Pada tahun 2020 bantuan keuangan kepada partai politik direalisasikan melalui rekening Transfer Bantuan Keuangan Lainnya di anggarkan di BPKAD selaku PPKD, namun pada tahun 2021 mengalami perubahan rekening belanja mendasari ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, sehingga pada tahun 2021 bantuan keuangan kepada partai politik dianggarkan di SKPD terkait pada rekening Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
Realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik tahun 2021 sebesar Rp2.064.876.000,00 diberikan kepada 9 Partai Politik berupa hibah uang. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah. Adapun Rincian Penerimaan per Partai Politik adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

| OPD | Uraian Hibah | Anggaran | Realisasi |
|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Partai Nasional Demokrat | 162.873.000,00 | 162.873.000,00 |
| | Partai Kebangkitan Bangsa | 356.487.000,00 | 356.487.000,00 |
| | Partai Keadilan Sejahtera | 126.141.000,00 | 126.141.000,00 |
| | PDI Perjuangan | 464.832.000,00 | 464.832.000,00 |
| | Partai Golongan Karya | 228.741.000,00 | 228.741.000,00 |
| | Partai Gerakan Indonesia Raya | 281.346.000,00 | 281.346.000,00 |
| | Partai Demokrat | 133.671.000,00 | 133.671.000,00 |
| | Partai Amanat Nasional | 146.091.000,00 | 146.091.000,00 |
| | Partai Persatuan Pembangunan | 164.694.000,00 | 164.694.000,00 |
| Jumlah | | 2.064.876.000,00 | 2.064.876.000,00 |

5.1.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial

| Uraian | TA 2021 | | | | Realisasi 2020 (Rp) |
|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------|---------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/Kurang (Rp) | % | |
| Belanja Bantuan Sosial | 23.796.688.000,00 | 21.478.899.729,00 | (2.317.788.271,00) | 90,26 | 30.833.250.000,00 |

Pada tahun 2021 penganggaran dan pelaksanaan belanja Bantuan Sosial berada di masing-masing SKPD, tidak seperti pada tahun 2020 yang penganggarnya berada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu Penganggaran belanja Bantuan Sosial dianggarkan pada SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.

Adapun rincian realisasi Belanja Bantuan Sosial adalah sebagai berikut:

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial

| Uraian | TA 2021 | | | | Realisasi 2020 (Rp) |
|--|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|--------------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/Kurang (Rp) | % | |
| Belanja Bantuan Sosial kepada Individu | 19.095.188.000,00 | 17.005.641.729,00 | (2.089.546.271,00) | 89,06 | 0,00 |
| Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga | 3.501.500.000,00 | 3.273.258.000,00 | (228.242.000,00) | 93,48 | 0,00 |
| Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat | 1.200.000.000,00 | 1.200.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 27.727.750.000,00 |
| Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 3.105.500.000,00 |
| Jumlah | 23.796.688.000,00 | 21.478.899.729,00 | (2.317.788.271,00) | 90,26 | 30.833.250.000,00 |

Realisasi Belanja Bantuan Sosial tahun 2021 dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp9.354.350.271,00 atau 30,34%. Rincian Belanja Bantuan Sosial per SKPD disajikan pada lampiran 4.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

5.1.2.2 Belanja Modal

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Modal

| Uraian | 2021 | | | | Realisasi 2020 (Rp) |
|---------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------|------------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/Kurang (Rp) | % | |
| Belanja Modal | 291.188.892.000,00 | 266.110.950.340,00 | (25.077.941.660,00) | 91,39 | 288.801.049.018,00 |

Rincian Anggaran dan realisasi Belanja Modal tahun anggaran 2021 dijelaskan sebagai berikut.

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal

| Uraian | 2021 | | | | Realisasi 2020 (Rp) |
|---|---------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------|---------------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/Kurang (Rp) | % | |
| Belanja Modal Tanah | 4.911.216.000,00 | 4.062.715.011,00 | (848.500.989,00) | 82,72 | 8.217.772.363,00 |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 122.203.064.000,00 | 112.083.903.500,00 | (10.119.160.500,00) | 91,72 | 89.087.259.542,00 |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 48.461.739.000,00 | 44.827.545.305,00 | (3.634.193.695,00) | 92,50 | 43.302.380.801,00 |
| Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan | 107.679.178.000,00 | 97.454.097.763,00 | (10.225.080.237,00) | 90,50 | 136.180.943.682,00 |
| Belanja Modal Aset tetap Lainnya | 7.933.695.000,00 | 7.682.688.761,00 | (251.006.239,00) | 96,84 | 12.012.692.630,00 |
| Belanja Modal Aset Tak Berwujud | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah | 291.188.892.000,00 | 266.110.950.340,00 | (25.077.941.660,00) | 91,39 | 288.801.049.018,00 |

Realisasi Belanja Modal tahun 2021 sebesar Rp.266.110.950.340,00 atau tercapai 91,39% dari anggaran sebesar Rp291.188.892.000,00. Dibandingkan realisasi tahun 2020 yang sebesar Rp288.801.049.018,00 realisasi Belanja Modal tahun 2021 turun sebesar Rp22.690.098.678,00 atau 7,86%.

Belanja Modal yang penyerapannya tertinggi adalah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dengan sebesar 96,84% dari anggaran. Sedangkan realisasi terendah adalah Belanja Modal Tanah sebesar 82,72% dari anggaran.

Kontribusi terbesar Belanja Modal adalah Belanja Modal Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang mencapai 42,12% dari realisasi total Belanja Modal, kemudian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 36,62%, Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar 16,85%, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar 2,89%, Belanja Modal Tanah 1,53%.

5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah

| Uraian | 2021 | | | | Realisasi 2020 (Rp) |
|---------------------|------------------|------------------|-------------------|-------|------------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/Kurang (Rp) | % | |
| Belanja Modal Tanah | 4.911.216.000,00 | 4.062.715.011,00 | (848.500.989,00) | 82,72 | 8.217.772.363,00 |

Realisasi Belanja Modal Tanah sebesar Rp4.062.715.011,00 atau 82,72% dari anggaran sebesar Rp4.911.216.000,00. Jika dibandingkan tahun 2020, realisasi belanja modal tanah mengalami penurunan sebesar 50,56%. Rincian Belanja Modal Tanah adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah

| Uraian | 2020 | | | | Realisasi 2019 (Rp) |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/Kurang (Rp) | % | |
| Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Perkampungan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1199655960,00 |
| Belanja Modal Tanah Persil | 950.000.000,00 | 628.973.110,00 | 417.269.740,00 | 66,21 | 417.269.740,00 |
| Belanja Modal Lapangan | 3.961.216.000,00 | 3.433.741.901,00 | 5.990.141.898,00 | 86,68 | 5.990.141.898,00 |
| Belanja Modal Tanah - BLUD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610.704.765,00 |
| Jumlah | 4.911.216.000,00 | 4.062.715.011,00 | (848.500.989,00) | 82,72 | 8.217.772.363,00 |

Belanja Modal Tanah tahun anggaran 2021 tersebar di SKPD sebagai berikut.

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah per SKPD

| OPD | 2021 | | | | Realisasi 2020 (Rp) |
|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/Kurang (Rp) | % | |
| Dinas Pendidikan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264.709.340,00 |
| Dinas Kesehatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.199.655.960,00 |
| RSUD dr. Sudirman | 950.000.000,00 | 628.973.110,00 | (321.026.890,00) | 66,21 | 610.704.765,00 |
| DPU-PR | 3.820.416.000,00 | 3.292.941.901,00 | (527.474.099,00) | 86,19 | 6.064.010.998,00 |
| Disporawisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.691.300,00 |
| Disperkim LH | 140.800.000 | 140.800.000 | - | 0,00 | 78.691.300,00 |
| Jumlah | 4.911.216.000,00 | 4.062.715.011,00 | (848.500.989,00) | 82,72 | 8.296.463.663,00 |

5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Tabel Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin

| Uraian | 2021 | | | | Realisasi 2020 (Rp) |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------|------------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/Kurang (Rp) | % | |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 122.203.064.000,00 | 112.083.903.500,00 | (10.119.160.500,00) | 91,72 | 89.087.259.542,00 |

Belanja Modal Peralatan dan Mesin terealisasi sebesar Rp112.083.903.500,00 atau 91,72% dari nilai anggaran Rp122.203.064.000,00. Jika dibandingkan tahun 2020, realisasi belanja modal peralatan dan mesin mengalami kenaikan sebesar 25,81%. Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun anggaran 2021 sebagai berikut:

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

| Uraian | 2020 | | | | Realisasi 2019 (Rp) |
|--|---------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------|--------------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/Kurang (Rp) | % | |
| Belanja Modal Alat Besar | 903.719.000,00 | 860.807.800,00 | (42.911.200,00) | 0,00 | 48.966.451.510,00 |
| Belanja Modal Alat Angkutan | 24.803.348.000,00 | 23.884.933.455,00 | (918.414.545,00) | 96,30 | 6.055.915.280,00 |
| Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur | 315.696.000,00 | 269.071.718,00 | (46.624.282,00) | 85,23 | 2.717.802.000,00 |
| Belanja Modal Alat Pertanian | 255.189.000,00 | 252.179.300,00 | (3.009.700,00) | 98,82 | 58.380.800,00 |
| Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | 16.172.811.000,00 | 12.898.238.224,00 | (3.274.572.776,00) | 79,75 | 6.826.795.275,00 |
| Belanja Modal Komputer | 35.327.049.000,00 | 33.707.878.237,00 | (1.619.170.763,00) | 95,42 | 6.087.126.517,00 |
| Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemasaran | 1.440.144.000,00 | 1.246.807.500,00 | (193.336.500,00) | 86,58 | 969.287.050,00 |
| Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan | 38.626.862.000,00 | 34.864.085.166,00 | (3.762.776.834,00) | 90,26 | 14.280.467.881,00 |
| Belanja Modal Alat Laboratorium | 1.180.278.000,00 | 1.042.909.150,00 | (137.368.850,00) | 88,36 | 1.892.277.140,00 |
| Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemukiman | 299.529.000,00 | 283.060.450,00 | (16.468.550,00) | 94,50 | 0,00 |
| Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja | 147.000.000,00 | 134.885.200,00 | (12.114.800,00) | 91,76 | 1.232.756.089,00 |
| Belanja Modal Alat Peraga | 107.549.000,00 | 61.585.500,00 | (45.963.500,00) | 57,26 | 0,00 |
| Belanja Modal Rambu-Rambu | 2.622.290.000,00 | 2.575.861.800,00 | (46.428.200,00) | 98,23 | 0,00 |
| Belanja Modal Peralatan Olahraga | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| Jumlah | 122.203.064.000,00 | 112.083.903.500,00 | (10.119.160.500,00) | 91,72 | 89.087.259.542,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

| Uraian | 2021 | | | | Realisasi 2020 (Rp) |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------|------------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/Kurang (Rp) | % | |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 48.461.739.000,00 | 44.827.545.305,00 | (3.634.193.695,00) | 92,50 | 43.302.380.801,00 |

Belanja Modal Gedung dan Bangunan terealisasi sebesar Rp44.827.545.305,00 atau 92,50% dari nilai anggaran Rp48.461.739.000,00. Jika dibandingkan tahun 2020, realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan mengalami kenaikan sebesar 3,52%..

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun anggaran 2021 terdiri dari berikut.

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

| Uraian | 2021 | | | | Realisasi 2020 (Rp) |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|--------------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/Kurang (Rp) | % | |
| Bangunan Gedung Tempat Kerja | 48.279.394.000,00 | 44.695.487.755,00 | (3.583.906.245,00) | 92,58 | 41.376.510.082,00 |
| Bangunan Bersejarah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.162.000,00 |
| Bangunan Tugu Peringatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.879.000,00 |
| Bangunan Rambu-Rambu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.561.655.919,00 |
| Bangunan – BLUD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138.173.800,00 |
| Tugu Titik Kontrol/Pasti | 182.345.000,00 | 132.057.550,00 | (50.287.450,00) | 72,42 | 0,00 |
| Jumlah | 48.461.739.000,00 | 44.827.545.305,00 | (3.634.193.695,00) | 92,50 | 43.302.380.801,00 |

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2021 per SKPD disajikan sebagai berikut:

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per SKPD

| No | SKPD | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/Kurang (Rp) | % |
|----|--|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|
| 1 | Dinas Pendidikan | 19.857.861.000,00 | 18.088.493.368,00 | (1.769.367.632,00) | 91,09 |
| 2 | Dinas Kesehatan | 14.687.568.000,00 | 13.776.529.197,00 | (911.038.803,00) | 93,80 |
| 3 | RSUD dr. Soedirman | 4.500.000.000,00 | 4.344.527.500,00 | (155.472.500,00) | 96,55 |
| 4 | Puskesmas Ambal II | 50.000.000,00 | 0,00 | (50.000.000,00) | 0,00 |
| 5 | Puskesmas Buayan | 253.128.000,00 | 201.615.100,00 | (51.512.900,00) | 79,65 |
| 6 | Puskesmas Buluspesantren II | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 7 | Puskesmas Gombang I | 220.000.000,00 | 197.850.000,00 | (22.150.000,00) | 89,93 |
| 8 | Puskesmas Klirong I | 84.700.000,00 | 30.000.000,00 | (54.700.000,00) | 35,42 |
| 9 | Puskesmas Pejagoan | 73.467.000,00 | 18.467.000,00 | (55.000.000,00) | 25,14 |
| 10 | Puskesmas Petanahan | 199.000.000,00 | 198.659.000,00 | (341.000,00) | 99,83 |
| 11 | Puskesmas Prembun | 39.500.000,00 | 39.500.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 12 | Puskesmas Sempor I | 393.000.000,00 | 390.758.000,00 | (2.242.000,00) | 99,43 |
| 13 | DPUPR | 433.486.000,00 | 388.019.600,00 | (45.466.400,00) | 89,51 |
| 14 | DPKPLH | 599.154.000,00 | 592.912.000,00 | (6.242.000,00) | 98,96 |
| 15 | BPBD | 2.030.000.000,00 | 1.963.324.000,00 | (66.676.000,00) | 96,72 |
| 16 | Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 413.633.000,00 | 383.362.000,00 | (30.271.000,00) | 92,68 |
| 17 | Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 18 | Dishub | 3.127.000,00 | 814.000,00 | (2.313.000,00) | 26,03 |
| 19 | Disporawisata | 699.280.000,00 | 570.120.000,00 | (129.160.000,00) | 81,53 |
| 20 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 1.603.285.000,00 | 1.416.124.076,00 | (187.160.924,00) | 88,33 |
| 21 | Dinas Pertanian dan Pangan | 1.920.165.000,00 | 1.832.466.750,00 | (87.698.250,00) | 95,43 |
| 22 | Disperindag | 361.191.000,00 | 353.861.714,00 | (7.329.286,00) | 97,97 |
| 23 | Bagian Umum | 18.462.000,00 | 18.410.000,00 | (52.000,00) | 99,72 |
| 24 | Kecamatan Prembun | 1.732.000,00 | 1.732.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Jumlah | 48.461.739.000,00 | 44.827.545.305,00 | (3.634.193.695,00) | 92,50 |



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

| Uraian | 2020 | | | | Realisasi 2019 |
|---|--------------------|-------------------|---------------------|-------|--------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/Kurang (Rp) | % | (Rp) |
| Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan | 107.679.178.000,00 | 97.454.097.763,00 | (10.225.080.237,00) | 90,50 | 136.180.943.682,00 |

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan terealisasi sebesar Rp97.454.097.763,00 atau 90,50% dari nilai anggaran Rp107.679.178.000,00. Jika dibandingkan tahun 2020 realisasi belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan mengalami penurunan sebesar 28,44%.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel rincian sebagai berikut :

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

| Uraian | 2021 | | | | Realisasi 2020 |
|----------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------|---------------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/Kurang (Rp) | % | (Rp) |
| Belanja Modal Jalan dan Jembatan | 69.225.868.000,00 | 60.859.274.395,00 | (8.366.593.605,00) | 87,91 | 98.293.058.850,00 |
| Belanja Modal Bangunan Air | 27.870.372.000,00 | 26.811.838.052,00 | (1.058.533.948,00) | 96,20 | 29.386.076.106,00 |
| Belanja Modal Instalasi | 7.243.007.000,00 | 6.783.198.405,00 | (459.808.595,00) | 93,65 | 3.788.490.268,00 |
| Belanja Modal Jaringan | 3.339.931.000,00 | 2.999.786.911,00 | (340.144.089,00) | 89,82 | 4.713.318.458,00 |
| Jumlah | 107.679.178.000,00 | 97.454.097.763,00 | (10.225.080.237,00) | 90,50 | 136.180.943.682,00 |

Sedangkan rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2021 per SKPD disajikan sebagai berikut:

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

| No | OPD | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/Kurang (Rp) | % |
|----|--------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------|
| 1 | Puskesmas Bonorowo | 5.000.000,00 | 4.500.000,00 | (500.000,00) | 90,00 |
| 2 | Puskesmas Buayan | 199.529.000,00 | 198.063.350,00 | (1.465.650,00) | 99,27 |
| 3 | Puskesmas Karanganyar | 25.256.000,00 | 25.250.000,00 | (6.000,00) | 99,98 |
| 4 | Puskesmas Karanggayam II | 214.000.000,00 | 14.000.000,00 | (200.000.000,00) | 6,54 |
| 5 | Puskesmas Petanahan | 32.750.000,00 | 32.395.000,00 | (355.000,00) | 98,92 |
| 6 | Puskemas Sadang | 100.000.000,00 | 0,00 | (100.000.000,00) | 0,00 |
| 7 | Puskesmas Sruweng | 216.403.000,00 | 192.728.000,00 | (23.675.000,00) | 89,06 |
| 8 | DPUPR | 94.031.922.000,00 | 84.889.498.542,00 | (9.142.423.458,00) | 90,28 |
| 9 | DPKPLH | 6.675.325.000,00 | 6.341.533.960,00 | (333.791.040,00) | 95,00 |
| 10 | BPBD | 2.683.468.000,00 | 2.604.393.000,00 | (79.075.000,00) | 97,05 |
| 11 | Dishub | 3.257.385.000,00 | 2.917.276.911,00 | (340.108.089,00) | 89,56 |
| 12 | Kelurahan Panjer | 34.758.000,00 | 34.730.000,00 | (28.000,00) | 99,92 |
| 13 | Kelurahan Plarangan | 198.000.000,00 | 194.349.000,00 | (3.651.000,00) | 98,16 |
| 14 | Kelurahan Wonokriyo | 5.382.000,00 | 5.380.000,00 | (2.000,00) | 99,96 |
| | Jumlah | 107.679.178.000,00 | 97.454.097.763,00 | (10.225.080.237,00) | 90,50 |



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

| Uraian | 2021 | | | | Realisasi 2020 |
|----------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------|-------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/Kurang (Rp) | % | (Rp) |
| Belanja Modal Aset tetap Lainnya | 7.933.695.000,00 | 7.682.688.761,00 | (251.006.239,00) | 96,84 | 12.012.692.630,00 |

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya terealisasi sebesar Rp7.682.688.761,00 atau 96,84% dari nilai anggaran Rp7.933.695.000,00. Jika dibandingkan tahun 2020 realisasi belanja Modal Aset Tetap Lainnya mengalami penurunan sebesar 36,05%. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

| Uraian | 2021 | | | | Realisasi 2020 |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/Kurang (Rp) | % | (Rp) |
| Belanja Modal Bahan Perpustakaan | 6.840.508.000,00 | 6.675.917.261,00 | (164.590.739,00) | 97,59 | 36.800.000,00 |
| Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga | 93.650.000,00 | 90.570.000,00 | (3.080.000,00) | 96,71 | 625.000,00 |
| Belanja Modal Tanaman | 732.000,00 | 600.000,00 | (132.000,00) | 81,97 | 8.500.000,00 |
| Belanja Modal Aset Tidak Berwujud | 998.805.000,00 | 915.601.500,00 | (83.203.500,00) | 91,67 | 53.005.000,00 |
| Aset Tetap Renovasi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aset tetap lainnya BLUD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.724.000,00 |
| Aset tetap lainnya BOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.908.038.630,00 |
| Jumlah | 7.933.695.000,00 | 7.682.688.761,00 | (251.006.239,00) | 96,84 | 12.012.692.630,00 |

5.1.2.3 Belanja Tak Terduga

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Tak Terduga

| Uraian | 2021 | | | | Realisasi 2020 |
|---------------------|------------------|----------------|--------------------|------|-------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/Kurang (Rp) | % | (Rp) |
| Belanja Tak Terduga | 6.216.770.000,00 | 545.318.400,00 | (5.671.451.600,00) | 8,77 | 10.188.825.249,00 |

Belanja Tak Terduga terealisasi sebesar Rp545.318.400,00 atau 8,77% dari nilai anggaran Rp6.216.770.000,00.

5.1.2.3.1 Belanja Tak Terduga

Rincian Realisasi Belanja Tak Terduga sebesar Rp545.318.400,00 adalah sebagai berikut:

Tabel Rincian Realisasi Belanja Tak Terduga

| No. | Uraian | Realisasi |
|-----|---|-----------------------|
| 1 | Pembayaran Pengembalian Setoran Hak Bersih Ielang an. Susmadyo Putro ke KPKNL | 15.500.000,00 |
| 2 | Pembayaran Pengembalian gaji bulan ke 13 Tahun Anggaran 2020 an. Alm. Slamet Guru SDN Kalipoh Korwi | 5.368.400,00 |
| 3 | Pemb. Belanja Tidak Terduga Bantuan Untuk Korban Bencana Alam | 112.500.000,00 |
| 4 | Pemb. Belanja Tidak Terduga Peny. Jaring Pengaman Sosial Dampak PPKM Darurat Covid | 230.000.000,00 |
| 5 | Pembayaran Belanja Tidak Terduga untuk bantuan Migran Korban Tindak kekerasan | 2.000.000,00 |
| 6 | Pembayaran Belanja Tidak Terduga untuk bantuan orang kehabisan bekal/PMKS | 29.950.000,00 |
| 7 | Pemb. Belanja Tidak Terduga Bantuan kepada Korban Kebakaran | 150.000.000,00 |
| | Jumlah | 545.318.400,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

5.1.2.4 Belanja Transfer

Tabel Anggaran dan Realisasi Transfer

| Uraian | 2021 | | | | Realisasi 2020 |
|----------|--------------------|--------------------|-------------------|-------|--------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/Kurang (Rp) | % | (Rp) |
| Transfer | 610.915.337.000,00 | 610.545.516.650,00 | (369.820.350,00) | 99,94 | 599.282.823.700,00 |

Rincian realisasi transfer sebesar Rp610.545.516.650,00 terdiri dari:

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Transfer

| Uraian | 2021 | | | | Realisasi 2020 |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|---------------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/Kurang (Rp) | % | (Rp) |
| Belanja Bagi Hasil | 14.019.972.000,00 | 13.862.929.650,00 | (157.042.350,00) | 98,88 | 13.527.756.700,00 |
| Belanja Bantuan Keuangan | 596.895.365.000,00 | 596.682.587.000,00 | (212.778.000,00) | 99,96 | 585.755.067.000,00 |
| Jumlah | 610.915.337.000,00 | 610.545.516.650,00 | (369.820.350,00) | 99,94 | 599.282.823.700,00 |

Realisasi transfer adalah sebesar Rp610.545.516.650,00 atau 99,94% dari anggaran sebesar Rp610.915.337.000,00. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2020, Transfer tahun 2021 naik sebesar 1,88%.

5.1.2.4.1 Belanja Bagi Hasil

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil

| Uraian | 2021 | | | | Realisasi 2020 |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|-------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/Kurang (Rp) | % | (Rp) |
| Transfer Bagi Hasil | 14.019.972.000,00 | 13.862.929.650,00 | (157.042.350,00) | 98,88 | 13.527.756.700,00 |

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Bagi Hasil Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel rincian sebagai berikut:

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Transfer Bagi Hasil

| Uraian | 2021 | | | | Realisasi 2020 |
|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/Kurang (Rp) | % | (Rp) |
| Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada | 11.305.259.000,00 | 11.148.216.650,00 | (157.042.350,00) | 98,61 | 9.657.463.900,00 |
| Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah | 2.714.713.000,00 | 2.714.713.000,00 | 0,00 | 100,00 | 3.870.292.800,00 |
| Jumlah | 14.019.972.000,00 | 13.862.929.650,00 | (157.042.350,00) | 98,88 | 13.527.756.700,00 |

Realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah sebesar Rp11.148.216.650,00 terdiri dari Transfer Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa yang merupakan transfer kepada Pemerintah Desa atas bagi hasil pajak daerah yang disalurkan untuk 449 desa berdasarkan Peraturan Bupati No.73 tahun 2021 tanggal 17 November 2021 tentang Alokasi dan Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

5.1.2.4.2 Belanja Bantuan Keuangan

Tabel Anggaran dan Realisasi Transfer Bantuan Keuangan

| Uraian | 2021 | | | | Realisasi 2020 |
|--------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------|--------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/Kurang (Rp) | % | (Rp) |
| Belanja Bantuan Keuangan | 596.895.365.000,00 | 596.682.587.000,00 | (212.778.000,00) | 99,96 | 585.755.067.000,00 |

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan terdiri dari:

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Transfer Bantuan Keuangan

| Uraian | 2021 | | | | Realisasi 2020 |
|--|---------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|---------------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/Kurang (Rp) | % | (Rp) |
| Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa | 596.895.365.000,00 | 596.682.587.000,00 | (212.778.000,00) | 99,96 | 583.690.191.000,00 |
| Transfer Bantuan Keuangan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.064.876.000,00 |
| Jumlah | 596.895.365.000,00 | 596.682.587.000,00 | (212.778.000,00) | 99,96 | 547.521.693.400,00 |

Transfer Bantuan Keuangan ke Desa realisasinya sebesar Rp596.682.587.000,00 atau 99,96%. Rincian Realisasi Transfer Bantuan Keuangan ke Desa sebesar Rp596.682.587.000,00 adalah sebagai berikut:

| Uraian Transfer | Keterangan | Realisasi |
|---|---|---------------------------|
| Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa | Kep Bupati No. 900/155 Tgl. 16-04-2021 & Kep Bupati No. 900/285 Tgl. 16-04-2021 | Rp 20.841.000.000 |
| Bantuan Keuangan Operasional TPQ | Kep Bupati Kebumen No.489/81 Tahun 2021 Tgl. 8 Maret 2021 | Rp 2.235.000.000 |
| Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) | Perbup No. 5 Tahun 2021 Tgl. 14-01-2021 | Rp 166.072.435.250 |
| Belanja Bantuan Keuangan Pendanaan BPJS Perangkat Desa | Perbup No. 5 Tahun 2021 Tgl 14-1-2021 | Rp 1.273.698.750 |
| Dana Desa | Perbup No.6 Tahun 2021 tanggal 14 Januari 2021 | Rp 405.260.453.000 |
| Pembangunan Kawasan Perdesaan | Kep Bupati No. 900/285 TAHUN 2021 Tgl. 16-08-2021 | Rp 1.000.000.000 |
| Jumlah Transfer Bantuan Keuangan ke Desa | | Rp 596.682.587.000 |

Untuk rincian Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) per desa tercantum pada **lampiran 5 dan lampiran 6**.

5.1.3 Pembiayaan

Tabel Anggaran dan Realisasi Pembiayaan

| Uraian | 2021 | | | | Realisasi 2020 |
|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------|--------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/Kurang (Rp) | % | (Rp) |
| Pembiayaan Neto | 216.350.309.000,00 | 216.985.309.565,98 | 635.000.565,98 | 100,29 | 194.582.918.416,18 |

Terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan sebagai berikut:

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Pembiayaan

| Uraian | 2021 | | | | Realisasi 2020 |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------|---------------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/Kurang (Rp) | % | (Rp) |
| Penerimaan Pembiayaan | 221.450.309.000,00 | 222.085.309.565,98 | 635.000.565,98 | 100,29 | 204.132.918.416,18 |
| Pengeluaran Pembiayaan | 5.100.000.000,00 | 5.100.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 9.550.000.000,00 |
| Pembiayaan Neto | 216.350.309.000,00 | 216.985.309.565,98 | 635.000.565,98 | 100,29 | 194.582.918.416,18 |



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

5.1.3.1 Penerimaan Pembiayaan

Tabel Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan

| Uraian | 2021 | | | | Realisasi 2020 |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------|--------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/Kurang (Rp) | % | (Rp) |
| Penerimaan Pembiayaan | 221.450.309.000,00 | 222.085.309.565,98 | 635.000.565,98 | 100,29 | 204.132.918.426,18 |

Realisasi penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp222.085.309.565,98 dirinci sebagai berikut:

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan

| Uraian | 2021 | | | | Realisasi 2020 |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------|--------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/Kurang (Rp) | % | (Rp) |
| SILPA tahun sebelumnya | 219.950.309.000,00 | 219.985.309.565,98 | 35.000.565,98 | 100,02 | 202.667.918.416,18 |
| Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah | 1.500.000.000,00 | 2.100.000.000,00 | 600.000.000,00 | 140,00 | 1.465.000.000,00 |
| Jumlah | 221.450.309.000,00 | 222.085.309.565,98 | 635.000.565,98 | 100,29 | 204.132.918.416,18 |

5.1.3.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya

Tabel Anggaran dan Realisasi SILPA Tahun Sebelumnya

| Uraian | 2021 | | | | Realisasi 2020 |
|------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------|--------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/Kurang (Rp) | % | (Rp) |
| SILPA tahun sebelumnya | 219.950.309.000,00 | 219.985.309.565,98 | 35.000.565,98 | 100,02 | 202.667.918.416,18 |

Pada Tahun Anggaran 2021 seluruh SILPA Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp219.985.309.565,98 direalisasikan sebagai penerimaan pembiayaan.

5.1.3.1.2 Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah

Tabel Anggaran dan Realisasi Pemberian Pinjaman Daerah

| Uraian | 2021 | | | | Realisasi 2020 |
|------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|--------|------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/Kurang (Rp) | % | (Rp) |
| Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah | 1.500.000.000,00 | 2.100.000.000,00 | 600.000.000,00 | 140,00 | 1.465.000.000,00 |

Penerimaan kembali pinjaman daerah merupakan penerimaan kembali dari pemberian pinjaman kepada 31 Gapoktan/Kelompok Tani berdasarkan Surat Keputusan Bupati No.523/237 tahun 2021 tanggal 30 Juni 2021 dan 4 Rukun Nelayan berdasarkan Surat Keputusan Bupati No.523/359 tahun 2021 tanggal 11 Oktober 2021. Rincian penerimaan kembali pinjaman daerah dijelaskan sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

Tabel Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah

| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|----|---|-------------------------|
| 1 | Kelompok Tani Usaha Agribisnis Karya Dadi V Desa Caruban Kec Adimulyo | 55.000.000,00 |
| 2 | Kelompok Tani Mekar Jaya I desa Bendungan Kecamatan Kuwarasan | 45.000.000,00 |
| 3 | Kelompok Tani Sumber Barokah Desa Kedungweru Kecamatan Ayah | 55.000.000,00 |
| 4 | Kelompok Tani Margo Rahayu Desa Kuwaru Kecamatan Kuwarasan | 45.000.000,00 |
| 5 | Kelompok Tani Pucung DEsa Mangunwani Kecamatan Ayah | 55.000.000,00 |
| 6 | Kelompok Tani Sumber Jaya Desa Jatijajar Kecamatan Ayah | 55.000.000,00 |
| 7 | Kelompok tani Makaryo Sari Desa Sukomulyo Kecamata Rowokele | 55.000.000,00 |
| 8 | Kelompok Tani Marsudi Tani Desa Podourip Kecamatan Petanahan | 55.000.000,00 |
| 9 | Gapoktan Ngudi Makmur Desa Jogomertan Kecamatan Petanahan | 55.000.000,00 |
| 10 | Gapoktan Redi MUlyo Desa Watukelir Kecamatan Ayah | 50.000.000,00 |
| 11 | Gapoktan Sendang Mukti Desa Sendangdalem Kecamatan Padureso | 40.000.000,00 |
| 12 | Gapoktan Tani Usodo Desa Sidorejo Kecamatan Ambal | 45.000.000,00 |
| 13 | Gapoktan Mitra Tani Desa Tresnorejo Kecamatan Petanahan | 50.000.000,00 |
| 14 | Gapoktan Sumber Rejeki Desa Gunungsari Kecamatan Karanggayam | 40.000.000,00 |
| 15 | Gapoktan Bahagia Desa Pejengkelon Kecamatan Padureso | 45.000.000,00 |
| 16 | Gapoktan Rawa Panggang Desa Kalibeji Kecamatan Sempor | 40.000.000,00 |
| 17 | Gapoktan Sri Jaya Desa Kalijirek Kecamatan Kebumen | 55.000.000,00 |
| 18 | Gapoktan Sumber Karya Tani Desa Sitirejo Kecamatan Klirong | 45.000.000,00 |
| 19 | Gapoktan Sari Rimba Desa Kalirejo Kecamatan Karanggayam | 50.000.000,00 |
| 20 | Gapoktan Usaha Karya Tani Desa Caruban Kecamatan Adimulyo | 45.000.000,00 |
| 21 | Gapoktan Dewi Sri Desa Lerepkebumen Kecamatan Poncowarno | 45.000.000,00 |
| 22 | Gapoktan Tani Makmur Desa Trikarso Kecamatan Sruweng | 45.000.000,00 |
| 23 | Gapoktan Werdi Dadi Desa Sngubanyu Kecamatan Buluspesantren | 40.000.000,00 |
| 24 | Gapoktan Purwo Tani Desa Redisari Kecamatan Rowokele | 50.000.000,00 |
| 25 | Gapoktan Asri Desa Peneket Kecamatan Ambal | 45.000.000,00 |
| 26 | Gapoktan Sumber Rejeki Desa Bocor Kecamatan Buluspesantren | 45.000.000,00 |
| 27 | Gapoktan Murah Rejeki Desa Sidomukti Kecamatan Kuwarasan | 45.000.000,00 |
| 28 | Gapoktan Ngesti Utomo Desa Kaliputih Kecamatan Kutowinangun | 55.000.000,00 |
| 29 | Setoran Pokok Dana Talangan | 55.000.000,00 |
| 30 | Gapoktan Tani Maju Desa Kalibagor Kecamatan Kebumen | 50.000.000,00 |
| 31 | Gapoktan Enggar Maju Desa Tanjungsari Kecamatan Kutowinangun | 45.000.000,00 |
| 32 | Rukun nelayan TPI Logending | 100.000.000,00 |
| 33 | Rukun nelayan TPI Karangduwur | 200.000.000,00 |
| 34 | Rukun nelayan TPI Pasir | 200.000.000,00 |
| 35 | Rukun nelayan TPI Argopeni | 100.000.000,00 |
| | JUMLAH | 2.100.000.000,00 |

5.1.3.2 Pengeluaran Pembiayaan

Tabel Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan

| Uraian | 2021 | | | | Realisasi 2020 |
|------------------------|------------------|------------------|-------------------|--------|------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/Kurang (Rp) | % | (Rp) |
| Pengeluaran Pembiayaan | 5.100.000.000,00 | 5.100.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 9.550.000.000,00 |

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2021 Rp5.100.000.000,00 terdiri dari:

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan

| Uraian | 2021 | | | | Realisasi 2020 |
|--|------------------|------------------|-------------------|--------|------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/Kurang (Rp) | % | (Rp) |
| Penyertaan Modal Daerah | 3.000.000.000,00 | 3.000.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 8.050.000.000,00 |
| Pemberian Pinjaman Daerah | 2.100.000.000,00 | 2.100.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| Pembentukan Investasi Non Permanen Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000.000,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

5.1.3.2.1 Penyertaan Modal Daerah

Anggaran dan Realisasi Penyertaan Modal Daerah

| Uraian | 2021 | | | | Realisasi 2020 |
|-------------------------|------------------|------------------|-------------------|--------|------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/Kurang (Rp) | % | (Rp) |
| Penyertaan Modal Daerah | 3.000.000.000,00 | 3.000.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 8.050.000.000,00 |

Penyertaan modal sebesar Rp3.000.000.000,00 merupakan penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah sesuai Perda No.3 Tahun 2020 tanggal 12 Oktober 2020 yang teralokasi untuk PDAM.

5.1.3.2.2 Pemberian Pinjaman Daerah

Anggaran dan Realisasi Pemberian Pinjaman Daerah

| Uraian | 2021 | | | | Realisasi 2020 |
|---------------------------|------------------|------------------|-------------------|--------|----------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/Kurang (Rp) | % | (Rp) |
| Pemberian Pinjaman Daerah | 2.100.000.000,00 | 2.100.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |

Pemberian pinjaman daerah sebesar Rp2.100.000.000,00 terdiri dari pemberian pinjaman daerah kepada masyarakat sebesar Rp1.500.000.000,00 dan pinjaman dana bergulir kepada masyarakat sebesar Rp600.000.000,00. Pemberian pinjaman daerah direalisasikan untuk pemberian pinjaman kepada 24 Gapoktan/Kelompok Tani berdasarkan Surat Keputusan Bupati No.520/99 tahun 2021 tanggal 18 Maret 2021 dan 7 Gapoktan/Kelompok Tani lainnya berdasarkan Surat Keputusan Bupati No.520/237 tahun 2021 tanggal 30 Juni 2021.

Pengeluaran pembiayaan untuk pemberian pinjaman daerah sebesar Rp1.500.000.000,00 tersebut direalisasikan dengan SP2D No. 00274/LS-PEMBY.PPD/PP/2021 dan SP2D No. 00852/LS-PEMBY/PP/2021 kepada 31 Gapoktan/Kelompok Tani sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

Tabel Rincian Pemberian Pinjaman Daerah

| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|----|---|-------------------------|
| 1 | Kelompok Tani Usaha Agribisnis Karya Dadi V Desa Caruban Kec Adimulyo | 55.000.000,00 |
| 2 | Kelompok Tani Mekar Jaya I desa Bendungan Kecamatan Kuwarasan | 45.000.000,00 |
| 3 | Kelompok Tani Sumber Barokah Desa Kedungweru Kecamatan Ayah | 55.000.000,00 |
| 4 | Kelompok Tani Margo Rahayu Desa Kuwaru Kecamatan Kuwarasan | 45.000.000,00 |
| 5 | Kelompok Tani Pucung DEsa Mangunwani Kecamatan Ayah | 55.000.000,00 |
| 6 | Kelompok Tani Sumber Jaya Desa Jatijajar Kecamatan Ayah | 55.000.000,00 |
| 7 | Kelompok tani Makaryo Sari Desa Sukomulyo Kecamata Rowokele | 55.000.000,00 |
| 8 | Kelompok Tani Marsudi Tani Desa Podourip Kecamatan Petanhan | 55.000.000,00 |
| 9 | Gapoktan Ngudi Makmur Desa Jogomertan Kecamatan Petanahan | 55.000.000,00 |
| 10 | Gapoktan Redi MUlyo Desa Watukelir Kecamatan Ayah | 50.000.000,00 |
| 11 | Gapoktan Sendang Mukti Desa Sendangdalem Kecamatan Padureso | 40.000.000,00 |
| 12 | Gapoktan Tani Usodo Desa Sidorejo Kecamatan Ambal | 45.000.000,00 |
| 13 | Gapoktan Mitra Tani Desa Tresnorejo Kecamatan Petanahan | 50.000.000,00 |
| 14 | Gapoktan Sumber Rejeki Desa Gunungsari Kecamatan Karanggayam | 40.000.000,00 |
| 15 | Gapoktan Bahagia Desa Pejengkelon Kecamatan Padureso | 45.000.000,00 |
| 16 | Gapoktan Rawa Panggang Desa Kalibeji Kecamatan Sempor | 40.000.000,00 |
| 17 | Gapoktan Sri Jaya Desa Kalijirek Kecamatan Kebumen | 55.000.000,00 |
| 18 | Gapoktan Sumber Karya Tani Desa Sitirejo Kecamatan Klirong | 45.000.000,00 |
| 19 | Gapoktan Sari Rimba Desa Kalirejo Kecamatan Karanggayam | 50.000.000,00 |
| 20 | Gapoktan Usaha Karya Tani Desa Caruban Kecamatan Adimulyo | 45.000.000,00 |
| 21 | Gapoktan Dewi Sri Desa Lerepkebumen Kecamatan Poncowarno | 45.000.000,00 |
| 22 | Gapoktan Tani Makmur Desa Trikarso Kecamatan Sruweng | 45.000.000,00 |
| 23 | Gapoktan Werdi Dadi Desa Sngubanyu Kecamatan Buluspesantren | 40.000.000,00 |
| 24 | Gapoktan Purwo Tani Desa Redisari Kecamatan Rowokele | 50.000.000,00 |
| 25 | Gapoktan Asri Desa Peneket Kecamatan Ambal | 45.000.000,00 |
| 26 | Gapoktan Sumber Rejeki Desa Bocor Kecamatan Buluspesantren | 45.000.000,00 |
| 27 | Gapoktan Murah Rejeki Desa Sidomukti Kecamatan Kuwarasan | 45.000.000,00 |
| 28 | Gapoktan Ngesti Utomo Desa Kaliputih Kecamatan Kutowinangun | 55.000.000,00 |
| 29 | Setoran Pokok Dana Talangan | 55.000.000,00 |
| 30 | Gapoktan Tani Maju Desa Kalibagor Kecamatan Kebumen | 50.000.000,00 |
| 31 | Gapoktan Enggar Maju Desa Tanjungsari Kecamatan Kutowinangun | 45.000.000,00 |
| | JUMLAH | 1.500.000.000,00 |

Sedangkan pemberian pinjaman dana bergulir kepada masyarakat direalisasikan berupa dana bergulir kepada 4 rukun nelayan berdasarkan Surat Keputusan Bupati No. 523/359 tahun 2021 Tgl. 11 Oktober 2021, sebagai berikut:

| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|----|-------------------------------|----------------|
| 1 | Rukun nelayan TPI Logending | 100.000.000,00 |
| 2 | Rukun nelayan TPI Karangduwur | 200.000.000,00 |
| 3 | Rukun nelayan TPI Pasir | 200.000.000,00 |
| 4 | Rukun nelayan TPI Argopeni | 100.000.000,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

5.1.4 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Tabel Anggaran dan Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

| Uraian | 2021 | | | | Realisasi 2020 |
|--------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|------|--------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/Kurang (Rp) | % | (Rp) |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran | 0,00 | 269.179.627.198,98 | 269.179.627.198,98 | 0,00 | 219.950.309.565,98 |

Dengan demikian, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2021 sebesar Rp269.179.627.198,98. Adapun perincian SiLPA adalah sebagai berikut :

Tabel Rincian SiLPA Tahun Anggaran 2021

| Rincian SiLPA | Kas (Rp) | Utang Pfk (Rp) | Silpa (Rp) |
|------------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------|
| Kas di RKUD | 167.807.726.233,00 | 0,00 | 167.807.726.233,00 |
| Kas di Bendahara Penerimaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kas di Bendahara Pengeluaran | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| Kas BLUD RSUD Soedirman | 42.767.044.674,00 | 0,00 | 42.767.044.674,00 |
| Kas BLUD RSUD Prembun | 48.873.491.269,00 | 0,00 | 48.873.491.269,00 |
| Kas BLUD Puskesmas | 4.735.938.728,98 | 0,00 | 4.735.938.728,98 |
| Kas Lainnya - Dana BOS | 4.995.026.294,00 | 0,00 | 4.995.026.294,00 |
| Jumlah | 269.179.627.198,98 | 0,00 | 269.179.627.198,98 |

Adapun SiLPA tahun anggaran 2021 yang berada di Kas Daerah per 31 Desember 2021 sejumlah Rp142.972.001.462,00 terdiri dari:

| No. | Uraian | Jumlah |
|-----|--|---------------------------|
| 1 | DAK FISIK 2020 | 206.053.459,00 |
| 2 | Tunjangan Profesi Guru PNSD | 14.177.587.848,00 |
| 3 | Tamsil Guru PNSD | 150.000,00 |
| 4 | TKG | 64.691.200,00 |
| 5 | BOK | 8.568.602.528,00 |
| 6 | ADMINDUK | 354.192.162,00 |
| 7 | BOP Pendidikan Kesetaraan | 737.350.000,00 |
| 8 | BOP PAUD | 2.136.300.000,00 |
| 9 | BOKB | 589.277.959,00 |
| 10 | Fasilitasi Penanaman Modal (FPM) | 51.372.845,00 |
| 11 | PK2UKM | 76.048.248,00 |
| 12 | Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPPA) | 308.711.798,00 |
| 13 | Ketahanan Pangan dan Pertanian(KPP) | 394.613.000,00 |
| 14 | DID | 5.109.026.545,00 |
| 15 | DBHCHT | 1.690.812.802,00 |
| | TOTAL SISA DANA MANDATORI (1-20) | 34.464.790.394,00 |
| 16 | Sisa Gaji dan Tunjangan | 28.849.669.959,00 |
| 17 | Sisa Tamsil | 18.407.436.120,00 |
| 18 | Sisa Belanja Tak Terduga | 5.671.451.600,00 |
| 19 | Sisa Tender | 12.082.039.602,35 |
| 20 | Pelampauan Pajak Daerah | 10.923.354.190,00 |
| 21 | Efisiensi Belanja | 57.408.984.367,65 |
| | TOTAL SISA DANA (16 - 21) | 133.342.935.839,00 |
| | SILPA RKUD | 167.807.726.233,00 |



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021**

5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun pelaporan.

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya, yaitu sebesar Rp219.985.309.565,98.

5.2.2 Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL merupakan SiLPA Tahun 2020 yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun 2021 sebesar Rp219.985.309.565,98.

5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran sebesar Rp269.179.627.198,98 dapat diuraikan sebagai berikut:

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| - Surplus/ Defisit Anggaran | Rp 52.194.317.633,00 |
| - Pembiayaan Netto | <u>Rp 216.985.309.565,98</u> |
| SiLPA/SiKPA Tahun berjalan | Rp 269.179.627.198,98 |

5.2.4 Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya

Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 artinya tidak ada koreksi yang menambah ataupun mengurangi Saldo Anggaran Lebih Tahun berjalan.

5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2021 sebesar Rp269.179.627.198,98. Adapun perincian SiLPA Tahun Anggaran 2021 terdiri dari:

Tabel Rincian SILPA Tahun Anggaran 2021

| Rincian SILPA | Kas (Rp) | Utang Pfk (Rp) | Silpa (Rp) |
|------------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Kas di Kas Daerah | 167.807.726.233,00 | 0,00 | 167.807.726.233,00 |
| Kas di bendahara Penerimaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kas di Bendahara Pengeluaran | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| Kas BLUD RSUD Soedirman | 42.767.044.674,00 | 0,00 | 42.767.044.674,00 |
| Kas BLUD RSUD Prembun | 48.873.491.269,00 | 0,00 | 48.873.491.269,00 |
| Kas BLUD Puskesmas | 4.735.938.728,98 | 0,00 | 4.735.938.728,98 |
| Kas Dana BOS | 4.995.026.294,00 | 0,00 | 4.995.026.294,00 |
| Jumlah | 269.179.627.198,98 | 0,00 | 269.179.627.198,98 |



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

Adapun Silpa yang berada di Kas di Kas Daerah Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp167.807.726.233,00 terdiri dari:

Tabel Rincian Silpa di Kas Daerah TA 2021

| NO | Uraian | Jumlah (Rp) |
|----|--|---------------------------|
| 1 | DAK FISIK 2020 | 206.053.459,00 |
| 2 | TPG PNSD | 14.177.587.848,00 |
| 3 | Tamsil Guru PNSD | 150.000,00 |
| 4 | TKG | 64.691.200,00 |
| 5 | BOK | 8.568.602.528,00 |
| 6 | ADMINDUK | 354.192.162,00 |
| 7 | BOP Pendidikan Kesetaraan | 737.350.000,00 |
| 8 | BOP PAUD | 2.136.300.000,00 |
| 9 | BOKB | 589.277.959,00 |
| 10 | Fasilitasi Penanaman Modal (FPM) | 51.372.845,00 |
| 11 | PK2UKM | 76.048.248,00 |
| 12 | Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPPA) | 308.711.798,00 |
| 13 | Ketahanan Pangan dan Pertanian(KPP) | 394.613.000,00 |
| 14 | DID | 5.109.026.545,00 |
| 15 | DBHCHT | 1.690.812.802,00 |
| | Total Sisa Dana Mandatori (1-15) | 34.464.790.394,00 |
| 14 | Sisa Gaji dan Tunjangan | 28.849.669.959,00 |
| 15 | Sisa Tamsil | 18.407.436.120,00 |
| 16 | Sisa Belanja Tak Terduga | 5.671.451.600,00 |
| 17 | Sisa Tender | 12.082.039.602,35 |
| 18 | Pelampauan Pajak Daerah | 10.923.354.190,00 |
| 19 | Efisiensi Belanja | 57.408.984.367,65 |
| | Total Sisa Dana (14-19) | 133.342.935.839,00 |
| | SILPA RKUD | 167.807.726.233,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

5.3 Neraca

5.3.1 Aset

31 Desember 2021
 Rp4.677.053.408.067,90

31 Desember 2020
 Rp4.525.738.172.682,03

Saldo Aset terdiri dari berikut ini.

Tabel Rincian Aset

| Uraian | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) | Kenaikan/Penurunan (Rp) | % |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------|
| Aset Lancar | 412.250.682.888,85 | 319.990.472.248,96 | 92.260.210.639,89 | 28,83 |
| Investasi Jangka Panjang | 156.731.786.248,61 | 150.432.666.979,57 | 6.299.119.269,04 | 4,19 |
| Aset Tetap | 3.986.354.436.044,26 | 3.931.529.890.869,50 | 54.824.545.174,76 | 1,39 |
| Aset Lainnya | 121.716.502.886,18 | 123.785.142.584,00 | (2.068.639.697,82) | (1,67) |
| Jumlah | 4.677.053.408.067,90 | 4.525.738.172.682,03 | 151.315.235.385,87 | 3,34 |

Saldo Aset tahun 2021 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp151.315.235.385,87 atau 3,34% antara lain disebabkan oleh:

- Penghapusan Piutang Daerah
- Penghapusan Aset
- Belanja Modal Tahun berjalan
- Kenaikan Nilai Piutang

5.3.1.1 Aset Lancar

31 Desember 2021
 Rp412.250.682.888,85

31 Desember 2020
 Rp319.990.472.248,96

Saldo Aset Lancar terdiri dari berikut ini.

Tabel Rincian Aset Lancar

| Uraian | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) | Kenaikan/Penurunan (Rp) | % |
|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------|
| Kas di Kas Daerah | 167.807.726.233,00 | 142.972.001.462,00 | 24.835.724.771,00 | 17,37 |
| Kas di Bendahara Penerimaan | 0,00 | 34.633.880,00 | (34.633.880,00) | (100,00) |
| Kas di Bendahara Pengeluaran | 400.000,00 | 206.799,00 | 193.201,00 | 93,42 |
| Kas di BLUD | 96.376.474.671,98 | 71.363.739.445,98 | 25.012.735.226,00 | 35,05 |
| Kas Dana BOS | 4.995.026.294,00 | 0,00 | 4.995.026.294,00 | 100,00 |
| Kas Lainnya | 0,00 | 5.614.042.929,00 | (5.614.042.929,00) | (100,00) |
| Piutang Pajak Daerah | 7.480.313.798,00 | 6.846.684.862,00 | 633.628.936,00 | 9,25 |
| Piutang Retribusi Daerah | 3.425.900.530,00 | 2.645.872.630,00 | 780.027.900,00 | 29,48 |
| Piutang Lain-lain PAD yang Sah | 91.883.226.262,00 | 44.088.606.927,00 | 47.794.619.335,00 | 108,41 |
| Piutang Transfer Antar Daerah | 4.770.941.665,00 | 14.715.007.496,00 | (9.944.065.831,00) | (67,58) |
| Penyisihan Piutang | (11.457.871.449,00) | (8.189.140.922,75) | (3.268.730.526,25) | 39,92 |
| Beban Dibayar Dimuka | 29.284.210,30 | 65.598.889,00 | (36.314.678,70) | (55,36) |
| Persediaan | 46.939.260.673,57 | 39.833.217.851,73 | 7.106.042.821,84 | 17,84 |
| Jumlah | 412.250.682.888,85 | 319.990.472.248,96 | 92.260.210.639,89 | 28,83 |



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

5.3.1.1.4 Kas di BLUD

31 Desember 2021
Rp 96.376.474.671,98

31 Desember 2020
Rp 71.363.739.445,98

Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2021 terdiri dari berikut ini.

Tabel Rincian Saldo Kas di BLUD Per 31 Desember 2021

| No | Nama OPD | Kas di BLUD | Utang Pfk (Rp) | Jumlah | Nomor Rekening |
|----|----------------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|----------------------|
| 1 | UPTD RSUD Dr. Soedirman | 42.767.044.674,00 | 0,00 | 42.767.044.674,00 | 1.008.00287.4 |
| 2 | UPTD RSUD Prembun | 48.873.491.269,00 | 0,00 | 48.873.491.269,00 | 1.008.00729.9 |
| 3 | UPTD Puskesmas Adimulyo | 141.574.447,00 | 0,00 | 141.574.447,00 | 1.100.00126.4 |
| 4 | UPTD Puskesmas Alian | 173.016.507,00 | 0,00 | 173.016.507,00 | 1.008.00624.1 |
| 5 | UPTD Puskesmas Ambal I | 9.574.995,00 | 0,00 | 9.574.995,00 | 1.115.00090.6 |
| 6 | UPTD Puskesmas Ambal II | 66.899.778,00 | 0,00 | 66.899.778,00 | 1.115.00091.4 |
| 7 | UPTD Puskesmas Ayah I | 139.216.108,00 | 0,00 | 139.216.108,00 | 1.006.00121.7 |
| 8 | UPTD Puskesmas Ayah II | 19.723.681,00 | 0,00 | 19.723.681,00 | 1.066.00120.9 |
| 9 | UPTD Puskesmas Bonorowo | 189.996.618,00 | 0,00 | 189.996.618,00 | 1.071.00137.3 |
| 10 | UPTD Puskesmas Buayan | 56.334.086,00 | 0,00 | 56.334.086,00 | 1.06600124.1 |
| 11 | UPTD Puskesmas Buluspesantren I | 89.378.809,00 | 0,00 | 89.378.809,00 | 1.115.00092.2 |
| 12 | UPTD Puskesmas Buluspesantren II | 45.519.435,00 | 0,00 | 45.519.435,00 | 1.008.00622.5 |
| 13 | UPTD Puskesmas Gombang I | 69.257.567,00 | 0,00 | 69.257.567,00 | 1.006.00125.0 |
| 14 | UPTD Puskesmas Gombang II | 4.579.202,00 | 0,00 | 4.579.202,00 | 1.006.00126.8 |
| 15 | UPTD Puskesmas Karanganyar | 114.605.944,00 | 0,00 | 114.605.944,00 | 1.100.00123.0 |
| 16 | UPTD Puskesmas Karanggayam I | 141.792.634,00 | 0,00 | 141.792.634,00 | 1.100.00124.8 |
| 17 | UPTD Puskesmas Karanggayam II | 72.781.815,00 | 0,00 | 72.781.815,00 | 1.100.00125.6 |
| 18 | UPTD Puskesmas Karangsambung | 315.754.590,00 | 0,00 | 315.754.590,00 | 1.008.00625.0 |
| 19 | UPTD Puskesmas Kebumen I | 31.414.866,00 | 0,00 | 31.414.866,00 | 1.008.00623.3 |
| 20 | UPTD Puskesmas Kebumen II | 48.150.150,54 | 0,00 | 48.150.150,54 | 1.008.00619.5 |
| 21 | UPTD Puskesmas Kebumen III | 76.995.472,00 | 0,00 | 76.995.472,00 | 1.008.00621.7 |
| 22 | UPTD Puskesmas Klirong I | 415.425.541,00 | 0,00 | 415.425.541,00 | 1.008.00626.8 |
| 23 | UPTD Puskesmas Klirong II | 310.026.346,00 | 0,00 | 310.026.346,00 | 1.008.00628.4 |
| 24 | UPTD Puskesmas Kutowinangun | 154.930.501,00 | 0,00 | 154.930.501,00 | 1.115.00093.1 |
| 25 | UPTD Puskesmas Kuwarasan | 75.363.784,44 | 0,00 | 75.363.784,44 | 1.066.00122.5 |
| 26 | UPTD Puskesmas Mirit | 298.484.863,00 | 0,00 | 298.484.863,00 | 1.071.00136.5 |
| 27 | UPTD Puskesmas Padureso | 68.564.675,00 | 0,00 | 68.564.675,00 | 1.071.00134.9 |
| 28 | UPTD Puskesmas Pejagoan | 79.588.474,00 | 0,00 | 79.588.474,00 | 1.008.00617.9 |
| 29 | UPTD Puskesmas Petanahan | 45.430.694,00 | 0,00 | 45.430.694,00 | 1.008.00618.7 |
| 30 | UPTD Puskesmas Poncowarno | 196.433.304,00 | 0,00 | 196.433.304,00 | 1.115.00094.9 |
| 31 | UPTD Puskesmas Prembun | 76.158.881,00 | 0,00 | 76.158.881,00 | 1.071.00135.7 |
| 32 | UPTD Puskesmas Puring | 245.519.697,00 | 0,00 | 245.519.697,00 | 1.066.00115.2 |
| 33 | UPTD Puskesmas Rowokele | 244.719.283,00 | 0,00 | 244.719.283,00 | 1.066.00123.3 |
| 34 | UPTD Puskesmas Sadang | 480.499.481,00 | 0,00 | 480.499.481,00 | 1.008.00627.6 |
| 35 | UPTD Puskesmas Sempor I | 146.147.458,00 | 0,00 | 146.147.458,00 | 1.066.00118.7 |
| 36 | UPTD Puskesmas Sempor II | 51.046.268,00 | 0,00 | 51.046.268,00 | 1.066.00119.5 |
| 37 | UPTD Puskesmas Sruweng | 41.032.774,00 | 0,00 | 41.032.774,00 | 1.008.00620.9 |
| | Jumlah | 96.376.474.671,98 | 0,00 | 96.376.474.671,98 | 1.008.00620.9 |



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

Saldo Kas di BLUD RSUD Dr. Soedirman per 31 Desember 2021 sebesar Rp42.767.044.674,00 terdiri dari:

Tabel Rincian Kas BLUD RSUD Dr. Soedirman

| No | Jenis | Bank | No. Rekening | Jumlah |
|----|-----------------------------------|-------------|--------------|--------------------------|
| 1 | Kas Tunai di Bendahara Penerimaan | | | 18.606.677,00 |
| 2 | Giro | Bank Jateng | 1-008-002874 | 748.437.997,00 |
| 3 | Deposito | | | 42.000.000.000,00 |
| | Jumlah | | | 42.767.044.674,00 |

Saldo kas tunai pada Bendahara Penerimaan RSUD Dr. Soedirman merupakan pendapatan yang diterima tanggal 31 Desember 2021 yang baru disetorkan ke rekening BLUD pada tanggal 3 Januari 2022.

Giro RSUD dr Soedirman tersimpan pada Bank Jateng Cabang Kebumen Nomor rekening 1-008-00287-4 dengan saldo sebesar Rp748.437.997,00. Sedangkan Deposito sebesar Rp42.000.000.000,00 merupakan penempatan deposito pada bank umum berikut.

Tabel Deposito RSUD Dr. Soedirman

| No | Nama Bank | No Seri Bilyet | Nomor Rekening | Jumlah Deposito (Rp) | Suku Bunga (%) | Tanggal Penempatan | Jangka Waktu |
|----|------------------|----------------|-----------------|--------------------------|----------------|--------------------|--------------|
| 1 | BRI CAB. KEBUMEN | DC 2644730 | 003201004364409 | Rp 2.000.000.000 | 7,25% | 25/8/2016 | 1 BULAN |
| 2 | BRI CAB. KEBUMEN | DC 2998107 | 003201005008404 | Rp 1.000.000.000 | 7,20% | 28/12/2018 | 1 BULAN |
| 3 | BRI CAB. KEBUMEN | DD 2324610 | 003201005622402 | Rp 2.000.000.000 | 4,00% | 5/10/2021 | 1 BULAN |
| 4 | BRI CAB. KEBUMEN | DD 2324611 | 003201005623408 | Rp 2.000.000.000 | 4,00% | 5/10/2021 | 1 BULAN |
| 5 | BRI CAB. KEBUMEN | DD 2324609 | 003201005621406 | Rp 2.000.000.000 | 4,00% | 5/10/2021 | 1 BULAN |
| 7 | BANK JATENG | A 101913 | | Rp 3.000.000.000 | 8,25% | 6/8/2015 | 1 BULAN |
| 8 | BANK JATENG | A 295836 | | Rp 1.000.000.000 | 8,00% | 9/4/2019 | 1 BULAN |
| 9 | BANK JATENG | A 295572 | | Rp 2.000.000.000 | 7,50% | 11/12/2019 | 1 BULAN |
| 10 | BANK JATENG | A 295847 | | Rp 2.000.000.000 | 8,00% | 26/4/19 | 1 BULAN |
| 11 | BANK JATENG | A 295862 | | Rp 2.000.000.000 | 8,00% | 27/5/19 | 1 BULAN |
| 12 | BANK JATENG | A 301303 | | Rp 1.000.000.000 | 7,50% | 30/12/19 | 1 BULAN |
| 13 | BANK JATENG | A 301304 | | Rp 2.000.000.000 | 7,50% | 30/12/19 | 1 BULAN |
| 14 | BANK JATENG | A 295594 | | Rp 2.000.000.000 | 7,50% | 30/12/19 | 1 BULAN |
| 15 | BANK JATENG | A 295595 | | Rp 1.000.000.000 | 7,50% | 30/12/19 | 1 BULAN |
| 16 | BANK JATENG | A 295637 | | Rp 2.000.000.000 | 7,00% | 24/2/20 | 1 BULAN |
| 17 | BANK JATENG | A 295638 | | Rp 2.000.000.000 | 7,00% | 24/2/20 | 1 BULAN |
| 18 | BANK JATENG | A 318890 | | Rp 1.000.000.000 | 6,75% | 25/6/20 | 1 BULAN |
| 19 | BANK JATENG | A 318946 | | Rp 2.000.000.000 | 6,40% | 27/8/20 | 1 BULAN |
| 20 | BANK JATENG | A318983 | | Rp 1.000.000.000 | 6,25% | 26/10/20 | 1 BULAN |
| 21 | BANK JATENG | A318982 | | Rp 2.000.000.000 | 6,25% | 26/10/20 | 1 BULAN |
| 22 | BANK JATENG | A330291 | | Rp 2.000.000.000 | 3,75% | 26/2/21 | 1 BULAN |
| 23 | BANK JATENG | A 341719 | | Rp 2.000.000.000 | 3,75% | 21/4/21 | 1 BULAN |
| 24 | BANK BNI | PAB 1620667 | 0972330817 | Rp 1.000.000.000 | 5,25% | 25/6/20 | 3 BULAN |
| 25 | BRI CAB. KEBUMEN | DD 2324526 | 003201005587408 | Rp 2.000.000.000 | 4,00% | 16/7/21 | 1 BULAN |
| | JUMLAH | | | Rp 42.000.000.000 | | | |

Saldo Kas BLUD pada RSUD Prembun sebesar Rp48.873.491.269,00 terdiri dari:

| No. | Uraian | Bank | Jumlah | Keterangan |
|-----|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| 1. | Kas di Bendahara Penerimaan (tunai) | | 11.541.311,00 | disetor ke Rek BLUD tgl 3 Jan 2022 |
| 2. | Kas di Rekening BLUD (giro) | Bank Jateng Cab Kebumen | 48.861.949.958,00 | |
| | Jumlah | | 48.873.491.269,00 | |



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

5.3.1.1.5 Kas Dana BOS

31 Desember 2021
Rp4.995.026.294,00

31 Desember 2020
Rp.00,00

Saldo Kas Dana BOS per 31 Desember 2021 terdiri dari sisa dana Bantuan Operasional Sekolah yang berada pada Bendahara BOS SD/SMP Negeri se-Kabupaten Kebumen sebesar Rp4.995.026.294,00. Pada tahun 2020 Kas Bos dicatat pada Kas Lainnya, namun mendasari Permendagri nomor 90 tahun 2019 pada tahun 2021 kas BOS disajikan pada Kas Dana BOS.

Dana BOS merupakan dana yang diterima langsung ke rekening BOS Satuan Pendidikan dan dilaporkan ke Bupati untuk diakui sebagai pendapatan dan belanja dan disajikan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Saldo Kas BOS per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.995.026.294,00 dijelaskan sebagaimana berikut:

Tabel Rincian Saldo Kas Dana BOS

| No | SKPD | Saldo Kas BOS |
|----------|--|-------------------------|
| A | SD NEGERI (Korwil Biddik Kecamatan) | 1.397.129.314,00 |
| 1 | AYAH | 47.493.233,00 |
| 2 | BUAYAN | 67.310.831,00 |
| 3 | PURING | 66.782.268,00 |
| 4 | PETANAHAN | 65.040.441,00 |
| 5 | KLIRONG | 76.639.676,00 |
| 6 | BULUSPESANTREN | 28.342.806,00 |
| 7 | AMBAL | 112.484.250,00 |
| 8 | MIRIT | 17.490.218,00 |
| 9 | BONOROWO | 10.507.597,00 |
| 10 | PREMBUN | 24.150.153,00 |
| 11 | PADURESO | 8.313.616,00 |
| 12 | KUTOWINANGUN | 27.741.345,00 |
| 13 | ALIAN | 118.311.635,00 |
| 14 | PONCOWARNO | 11.552.840,00 |
| 15 | KEBUMEN | 132.048.920,00 |
| 16 | PEJAGOAN | 31.391.327,00 |
| 17 | SRUWENG | 46.286.286,00 |
| 18 | ADIMULYO | 99.814.785,00 |
| 19 | KUWARASAN | 33.613.310,00 |
| 20 | ROWOKELE | 36.085.947,00 |
| 21 | SEMPOR | 64.185.272,00 |
| 22 | GOMBONG | 50.527.558,00 |
| 23 | KARANGANYAR | 18.083.396,00 |
| 24 | KARANGGAYAM | 49.997.803,00 |
| 25 | KARANGSAMBUNG | 136.737.978,00 |
| 26 | SADANG | 16.195.823,00 |
| B | SMP NEGERI | 3.597.896.980,00 |
| | TOTAL | 4.995.026.294,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

5.3.1.1.6 Kas Lainnya

| | |
|------------------|--------------------|
| 31 Desember 2021 | 31 Desember 2020 |
| Rp00,00 | Rp5.614.042.929,00 |

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp00,00, sedangkan saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2020 merupakan sisa dana BOS dan dana Kas Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Saldo kas Gugus Tugas telah disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah pada tanggal 5 Mei 2021, sedangkan sisa dana BOS 2020 pada 2021 direklas dari Kas Lainnya menjadi Kas Dana BOS.

5.3.1.1.7 Piutang Pajak daerah

| | |
|--------------------|--------------------|
| 31 Desember 2021 | 31 Desember 2020 |
| Rp7.480.313.798,00 | Rp6.846.684.862,00 |

Piutang Pajak Daerah merupakan hak Pemerintah Kabupaten Kebumen yang belum diterima. Jumlah piutang merupakan saldo piutang pajak yang sudah ada ketetapannya, namun belum dibayar oleh Wajib Pajak per 31 Desember 2021 disajikan sebagai berikut.

Tabel Rincian Saldo Piutang Pajak Daerah

| Uraian | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) | Kenaikan/Penurunan (Rp) | % |
|--|--------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------|
| Piutang Pajak Hotel | 400.000,00 | 82.681.227,00 | (82.281.227,00) | (99,52) |
| Piutang Pajak Restoran | 16.545.968,00 | 66.927.217,00 | (50.381.249,00) | (75,28) |
| Piutang Pajak Hiburan | 0,00 | 400.000,00 | (400.000,00) | (100,00) |
| Piutang Pajak Reklame | 45.980.550,00 | 47.035.965,00 | (1.055.415,00) | (2,24) |
| Piutang Pajak Parkir | 650.000,00 | 3.178.000,00 | (2.528.000,00) | (79,55) |
| Piutang Pajak Air Tanah | 7.695.300,00 | 8.303.900,00 | (608.600,00) | (7,33) |
| Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | 0,00 | 130.480.000,00 | (130.480.000,00) | (100,00) |
| Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) | 7.409.041.980,00 | 6.505.678.553,00 | 903.363.427,00 | 13,89 |
| Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan | 0,00 | 2.000.000,00 | (2.000.000,00) | (100,00) |
| Jumlah | 7.480.313.798,00 | 6.846.684.862,00 | 633.628.936,00 | 9,25 |

Piutang Pajak Daerah mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya sebesar 9,25%, kenaikan terbesar ada pada nilai Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebesar 13,89% dari tahun 2020.

5.3.1.1.8 Piutang Retribusi Daerah

| | |
|--------------------|--------------------|
| 31 Desember 2021 | 31 Desember 2020 |
| Rp3.425.900.530,00 | Rp2.645.872.630,00 |

Piutang Retribusi merupakan hak Pemerintah Kabupaten Kebumen yang berasal dari retribusi daerah, berupa tunggakan retribusi yang belum dibayar per 31 Desember 2021 dengan perincian sebagai berikut.



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021**

Tabel Rincian Saldo Piutang Retribusi Daerah

| Uraian | SKPD | 31 Desember 2021 | 31 Desember 2020 | Kenaikan/Penurunan | % |
|---|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|
| | | (Rp) | (Rp) | (Rp) | |
| Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | Dinas Perhubungan | 1.072.365.000,00 | 1.072.365.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piutang Retribusi Pelayanan Pasar | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 653.823.100,00 | 332.950.050,00 | 320.873.050,00 | 96,37 |
| Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | 0,00 | 4.155.000,00 | (4.155.000,00) | (100,00) |
| | Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata | 1.096.512.430,00 | 936.402.580,00 | 160.109.850,00 | 17,10 |
| | Dinas Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 300.000.000,00 | (300.000.000,00) | (100,00) |
| | Dinas Perhubungan | 603.200.000,00 | 0,00 | 603.200.000,00 | 100,00 |
| Jumlah | | 3.425.900.530,00 | 2.645.872.630,00 | 780.027.900,00 | 29,48 |

Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah piutang atas pengelolaan retribusi parkir di tepi jalan umum yang pengelolaannya dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Piutang tersebut merupakan piutang atas tunggakan tahun 2019 dan 2020 yang hingga 2021 belum dibayarkan, rincian piutang dijelaskan sebagai berikut.

Tabel Piutang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

| NO | PIHAK KETIGA | NO.PERJANJIAN | TUNGGAKAN 2019 | TUNGGAKAN 2020 | JUMLAH |
|----|------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1. | KSU Jalan Persaudaraan | 551.2/0614/II/2019 | 348.735.000,00 | 723.630.000,00 | 1.072.365.000,00 |
| | Jumlah | | 348.735.000,00 | 723.630.000,00 | 1.072.365.000,00 |

Piutang Retribusi Pelayanan Pasar sebesar Rp653.823.100,00 merupakan tunggakan retribusi pasar yang sampai dengan 31 Desember 2021 belum dibayar dengan rincian sebagai berikut.

Tabel Rincian Piutang Retribusi Pelayanan Pasar

| No | Wilayah | 31 Desember 2021 | 31 Desember 2020 |
|----|----------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | UPTD PASAR I | 267.555.300,00 | 153.266.950,00 |
| 2 | UPTD PASAR II | 74.727.700,00 | 31.382.000,00 |
| 3 | UPTD PASAR III | 276.954.000,00 | 109.238.500,00 |
| 4 | UPTD PASAR IV | 34.586.100,00 | 39.062.600,00 |
| | JUMLAH | 653.823.100,00 | 332.950.050,00 |

Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pada Tahun 2020 merupakan tunggakan sewa bangunan yang digunakan oleh Koperasi Gumelar dan kantin DPU-PR total sebesar Rp4.155.000,00, yang sudah dilunasi pada tanggal 8 Februari 2021.

Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata sebesar Rp1.096.512.430,00 merupakan tunggakan sewa kios pada Obyek Wisata dengan rincian sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

Tabel Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Disporawisata

| No | Uraian | 31 Desember 2021 | 31 Desember 2020 |
|----|---------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1 | Goa Jatijajar | 122.287.670,00 | 92.649.420,00 |
| 2 | Pantai Logending | 77.610.800,00 | 48.841.200,00 |
| 3 | Pantai Karangbolong | 5.600.000,00 | 3.080.000,00 |
| 4 | Pantai Petanahan | 172.030.000,00 | 121.705.000,00 |
| 5 | Goa Petruk | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Pantai Suwuk | 709.880.960,00 | 664.486.960,00 |
| 7 | PAP Krakal | 3.594.000,00 | 1.677.000,00 |
| 8 | Waduk Sempor | 5.509.000,00 | 3.963.000,00 |
| | Jumlah | 1.096.512.430,00 | 936.402.580,00 |

Pada tahun 2020 terdapat Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp300.000.000,00 merupakan tunggakan sewa lahan untuk tambak udang oleh CV.Sugeng Joyo yang sudah dibayar pelunasannya pada tanggal 6 april 2021 sebesar Rp5.000.000,00, 22 Juli 2021 sebesar Rp30.000.000,00 dan 29 Oktober 2021 sebesar Rp265.000.000,00.

Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Perhubungan sebesar Rp603.200.000,00 merupakan Piutang atas Retribusi Kios Terminal.

5.3.1.1.9 Piutang Lain-lain PAD yang Sah

31 Desember 2021
 Rp91.883.226.262,00

31 Desember 2020
 Rp44.088.606.927,00

Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan hak Pemerintah Kabupaten Kebumen yang belum diterima dari pendapatan Lain-lain PAD yang Sah dengan rincian sebagai berikut.

Tabel Piutang Lain-lain PAD yang Sah

| Uraian | SKPD | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) | Kenaikan/Penurunan (Rp) | % |
|--|----------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------|
| Piutang Pendapatan Denda Pajak Hotel | Bappenda | 12.000,00 | 10.007.224,00 | (9.995.224,00) | (99,88) |
| Piutang Pendapatan Denda Pajak Restoran | Bappenda | 2.406.725,00 | 7.531.871,00 | (5.125.146,00) | (68,05) |
| Piutang Pendapatan Denda Pajak Hiburan | Bappenda | 0,00 | 192.000,00 | (192.000,00) | (100,00) |
| Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame | Bappenda | 6.747.461,00 | 6.007.806,00 | 739.655,00 | 12,31 |
| Piutang Pendapatan Denda Pajak Parkir | Bappenda | 295.000,00 | 817.960,00 | (522.960,00) | (63,93) |
| Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Tanah | Bappenda | 1.083.588,00 | 2.361.800,00 | (1.278.212,00) | (54,12) |
| Piutang Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | Bappenda | 0,00 | 19.146.400,00 | (19.146.400,00) | (100,00) |
| Piutang Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) | Bappenda | 2.697.672.475,00 | 2.183.545.399,00 | 514.127.076,00 | 23,55 |
| Piutang Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | Bappenda | 0,00 | 960.000,00 | (960.000,00) | (100,00) |
| Piutang Pendapatan BLUD | BLUD | 88.549.903.612,00 | 40.583.431.066,00 | 47.966.472.546,00 | 118,19 |
| Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir | BPKAD | 625.105.401,00 | 600.052.401,00 | 25.053.000,00 | 4,18 |
| Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya | BPKAD | 0,00 | 674.553.000,00 | (674.553.000,00) | (100,00) |
| Jumlah | | 91.883.226.262,00 | 44.088.606.927,00 | 47.794.619.335,00 | 108,41 |



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

Pada tahun 2021 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah mengalami kenaikan sebesar Rp47.794.619.335,00 atau 108,41% dibandingkan dengan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah tahun 2020 sebesar Rp44.088.606.927,00. Prosentase kenaikan tertinggi Piutang Lain-Lain PAD yang Sah ada di Piutang Pendapatan BLUD sebesar 118,19%. Rincian Piutang Pendapatan BLUD disajikan sebagai berikut.

Tabel Rincian Piutang Pendapatan BLUD

| BLUD | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) | Kenaikan/Penurunan (Rp) | % |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------|
| UPTD RSUD Dr. Soedirman | 69.394.165.702,00 | 33.889.560.326,00 | 35.504.605.376,00 | 104,77 |
| UPTD RSUD Prembun | 18.642.529.510,00 | 5.820.916.090,00 | 12.821.613.420,00 | 220,27 |
| UPTD Puskesmas Adimulyo | 6.380.000,00 | 22.655.000,00 | (16.275.000,00) | (71,84) |
| UPTD Puskesmas Alian | 22.111.000,00 | 37.232.000,00 | (15.121.000,00) | (40,61) |
| UPTD Puskesmas Ambal I | 48.344.000,00 | 31.650.000,00 | 16.694.000,00 | 52,75 |
| UPTD Puskesmas Ambal II | 9.225.000,00 | 18.600.000,00 | (9.375.000,00) | (50,40) |
| UPTD Puskesmas Ayah I | 37.017.000,00 | 106.114.250,00 | (69.097.250,00) | (65,12) |
| UPTD Puskesmas Ayah II | 6.700.000,00 | 19.525.000,00 | (12.825.000,00) | (65,69) |
| UPTD Puskesmas Bonorowo | 13.726.500,00 | 21.153.000,00 | (7.426.500,00) | (35,11) |
| UPTD Puskesmas Buayan | 6.500.000,00 | 15.250.000,00 | (8.750.000,00) | (57,38) |
| UPTD Puskesmas Buluspesantren I | 2.995.000,00 | 9.855.000,00 | (6.860.000,00) | (69,61) |
| UPTD Puskesmas Buluspesantren II | 13.935.000,00 | 29.850.000,00 | (15.915.000,00) | (53,32) |
| UPTD Puskesmas Gombang I | 22.010.000,00 | 36.325.000,00 | (14.315.000,00) | (39,41) |
| UPTD Puskesmas Gombang II | 135.000,00 | 1.115.000,00 | (980.000,00) | (87,89) |
| UPTD Puskesmas Karanganyar | 46.722.000,00 | 36.292.000,00 | 10.430.000,00 | 28,74 |
| UPTD Puskesmas Karanggayam I | 14.995.000,00 | 21.440.000,00 | (6.445.000,00) | (30,06) |
| UPTD Puskesmas Karanggayam II | 4.730.000,00 | 11.440.000,00 | (6.710.000,00) | (58,65) |
| UPTD Puskesmas Karangsembung | 19.686.000,00 | 19.946.500,00 | (260.500,00) | (1,31) |
| UPTD Puskesmas Kebumen I | 9.695.000,00 | 17.575.000,00 | (7.880.000,00) | (44,84) |
| UPTD Puskesmas Kebumen II | 13.685.000,00 | 37.610.000,00 | (23.925.000,00) | (63,61) |
| UPTD Puskesmas Kebumen III | 14.635.000,00 | 23.140.000,00 | (8.505.000,00) | (36,75) |
| UPTD Puskesmas Klirong I | 7.465.000,00 | 11.255.000,00 | (3.790.000,00) | (33,67) |
| UPTD Puskesmas Klirong II | 17.580.000,00 | 15.215.000,00 | 2.365.000,00 | 15,54 |
| UPTD Puskesmas Kutowinangun | 25.770.000,00 | 41.254.400,00 | (15.484.400,00) | (37,53) |
| UPTD Puskesmas Kuwarasan | 4.665.000,00 | 16.562.000,00 | (11.897.000,00) | (71,83) |
| UPTD Puskesmas Mirit | 27.491.400,00 | 64.671.000,00 | (37.179.600,00) | (57,49) |
| UPTD Puskesmas Padureso | 8.915.000,00 | 34.380.000,00 | (25.465.000,00) | (74,07) |
| UPTD Puskesmas Pejagoan | 22.095.000,00 | 32.340.000,00 | (10.245.000,00) | (31,68) |
| UPTD Puskesmas Petanahan | 19.918.000,00 | 47.231.000,00 | (27.313.000,00) | (57,83) |
| UPTD Puskesmas Poncowarno | 7.065.000,00 | 23.775.000,00 | (16.710.000,00) | (70,28) |
| UPTD Puskesmas Prembun | 1.060.000,00 | 3.570.000,00 | (2.510.000,00) | (70,31) |
| UPTD Puskesmas Puring | 22.280.000,00 | 8.565.000,00 | 13.715.000,00 | 160,13 |
| UPTD Puskesmas Rowokele | 6.715.000,00 | 18.320.000,00 | (11.605.000,00) | (63,35) |
| UPTD Puskesmas Sadang | 5.432.500,00 | 14.893.500,00 | (9.461.000,00) | (63,52) |
| UPTD Puskesmas Sempor I | 4.415.000,00 | 5.925.000,00 | (1.510.000,00) | (25,49) |
| UPTD Puskesmas Sempor II | 14.625.000,00 | 9.510.000,00 | 5.115.000,00 | 53,79 |
| UPTD Puskesmas Sruweng | 4.490.000,00 | 8.720.000,00 | (4.230.000,00) | (48,51) |
| Jumlah | 88.549.903.612,00 | 40.583.431.066,00 | 47.966.472.546,00 | 118,19 |



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

Kenaikan Piutang RSUD Prembun sebesar 220,27% dan Piutang RSUD Dr. Soedirman dengan kenaikan sebesar Rp104,77% memiliki pengaruh terbesar pada kenaikan Piutang Pendapatan BLUD. Rincian Piutang RSUD Prembun dan RSUD Dr. Soedirman disajikan sebagai berikut.

Tabel Rincian Piutang Pendapatan BLUD RSUD Dr. Soedirman

| Uraian | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) | Kenaikan/Penurunan (Rp) | % |
|--|--------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------|
| Piutang Umum | 2.725.480.976,00 | 2.583.792.175,00 | 141.688.801,00 | 5,48 |
| BPJS | 6.495.185.707,00 | 13.346.618.569,00 | (6.851.432.862,00) | (51,33) |
| KEMENKES | 59.919.733.100,00 | 17.572.761.500,00 | 42.346.971.600,00 | 240,98 |
| Piutang Jasa Raharja | 39.845.120,00 | 22.996.176,00 | 16.848.944,00 | 73,27 |
| Piutang Jamkesda | 29.757.136,00 | 20.644.073,00 | 9.113.063,00 | 44,14 |
| Piutang Radiologi dan Laboratorium | 68.426.720,00 | 60.010.175,00 | 8.416.545,00 | 14,03 |
| Piutang LPSK | 2.880.482,00 | 2.880.482,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piutang Bunga Deposito | 0,00 | 41.156.166,00 | (41.156.166,00) | (100,00) |
| Piutang Sewa | 6.073.000,00 | 7.143.000,00 | (1.070.000,00) | (14,98) |
| Piutang PTKAI | 0,00 | 131.174,00 | (131.174,00) | (100,00) |
| Piutang TCM | 22.700.000,00 | 3.225.000,00 | 19.475.000,00 | 603,88 |
| Piutang Obat | 5.000.486,00 | 0,00 | 5.000.486,00 | 100,00 |
| Piutang Lain-Lain (Cut off Bunga Deposito) | 29.972.602,38 | 0,00 | 29.972.602,38 | 100,00 |
| Piutang Diklat | 3.675.000,00 | 0,00 | 3.675.000,00 | 100,00 |
| Piutang JKK | 45.405.373,00 | 130.486,00 | 45.274.887,00 | 34.697,12 |
| Piutang Biaya Transfer | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 100,00 |
| Piutang PT Menjangan | 0,00 | 228.071.250,00 | (228.071.250,00) | (100,00) |
| Jumlah | 69.394.165.702,38 | 33.889.560.226,00 | 35.504.605.476,38 | 104,77 |

Piutang Pendapatan BLUD RSUD Dr. Soedirman mengalami kenaikan sebesar Rp35.504.605.476,38 atau 104,77%, secara nominal kenaikan terbesar adalah piutang Kemenkes atas pelayanan Covid-19 sebesar Rp42.346.971.600,00 atau 240,98%.

Tabel Rincian Piutang Pendapatan BLUD RSUD Prembun

| Uraian | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) | Kenaikan/Penurunan (Rp) | % |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------|
| Piutang Klaim Covid / Kemenkes | 16.262.701.800,00 | 0,00 | 16.262.701.800,00 | 100,00 |
| Piutang BPJS | 2.114.672.163,00 | 5.721.525.352,00 | (3.606.853.189,00) | (63,04) |
| Piutang Jasa Raharja | 29.447.269,00 | 0,00 | 29.447.269,00 | 100,00 |
| Piutang JCT Scan | 71.368.153,00 | 0,00 | 71.368.153,00 | 100,00 |
| Piutang Taspen | 8.025.544,00 | 0,00 | 8.025.544,00 | 100,00 |
| Piutang Sewa Gedung | 1.545.000,00 | 0,00 | 1.545.000,00 | 100,00 |
| Piutang Umum | 142.694.581,00 | 97.353.738,00 | 45.340.843,00 | 46,57 |
| Piutang TCM Laboratorium | 12.075.000,00 | 0,00 | 12.075.000,00 | 100,00 |
| Piutang Pendapatan Parkir | 0,00 | 2.037.000,00 | (2.037.000,00) | (100,00) |
| Jumlah | 18.642.529.510,00 | 5.820.916.090,00 | 12.821.613.420,00 | 220,27 |

Sementara itu untuk Piutang Pendapatan BLUD RSUD Prembun mengalami kenaikan sebesar Rp12.821.613.420,00 atau 220,27% dikarenakan terdapat 7 jenis piutang yang



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

mengalami kenaikan. Secara nominal kenaikan terbesar ada di Piutang Kemenkes atas pelayanan Covid -19 yaitu sebesar Rp16.262.701.800,00.

Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebesar Rp625.105.401,00 dirinci sebagai berikut:

Tabel Rincian Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

| No | Uraian | 31 Desember 2021 |
|----|---|-----------------------|
| 1 | Piutang dari jasa Investasi Dana Bergulir (Pengguliran 2005-2008) | 24.178.000,00 |
| 2 | Piutang Dana Bergulir Eks Disperindagkop | 600.052.401,00 |
| 3 | Piutang atas jasa Dana Talangan Pengadaan Pangan TA 2020 | 875.000,00 |
| | Jumlah | 625.105.401,00 |

- a. Piutang dari jasa Investasi Dana Bergulir (Pengguliran 2005-2008) yang dikelola Dinas Pertanian dan Pangan Sebesar Rp24.178.000,00 dengan dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel Piutang Jasa Investasi dana Bergulir Dinas Pertanian dan Pangan
Per 31 Desember 2021**

| No | Tahun | Sisa Pinjaman per 31 Desember 2021 | | |
|----|---------------|------------------------------------|-------------------|--------------------|
| | | Pokok (Rp) | Jasa (Rp) | Jumlah (Rp) |
| 1 | 2005 | 1.000.000 | 1.600.000 | 2.600.000 |
| 2 | 2006 | 94.487.000 | 7.278.000 | 101.765.000 |
| 3 | 2007 | 70.500.000 | 3.000.000 | 73.500.000 |
| 4 | 2008 | 161.945.000 | 12.300.000 | 174.245.000 |
| | Jumlah | 327.932.000 | 24.178.000 | 352.110.000 |

- b. Piutang Dana Bergulir Eks Disperindagkop yang pada tahun 2012 telah dilimpahkan pengurusannya ke Kantor Pengurusan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto. Perkembangan per 31 Desember 2021 sebanyak 24 debitur sudah dinyatakan lunas dan sebanyak 44 debitur dalam kategori Piutang Sementara Belum Dapat Tertagih (PSBDT). Piutang Dana Bergulir Eks Disperindagkop sebesar Rp600.052.401,00 disajikan sebagai berikut.

**Tabel Piutang Dana bergulir eks Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
per 31 Desember 2021**

| No. | Tahun Pengguliran | Saldo | | |
|-----|---------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|
| | | Pokok (Rp) | Jasa Pinjaman (Rp) | Jumlah Saldo Pinjaman (Rp) |
| I | Pengguliran | | | |
| 1 | Tahun 2000 | 116.674.500,00 | 11.711.500,00 | 128.386.000,00 |
| 2 | Tahun 2002 | 45.434.500,00 | 4.719.500,00 | 50.154.000,00 |
| 3 | Tahun 2003 | 120.474.700,00 | 13.730.000,00 | 134.204.700,00 |
| 5 | Tahun 2005 | 41.313.455,00 | 7.179.000,00 | 48.492.455,00 |
| 6 | Tahun 2006 | 37.263.409,00 | 6.993.700,00 | 44.257.109,00 |
| 7 | Tahun 2007 | 60.633.137,00 | 7.950.000,00 | 68.583.137,00 |
| | Jumlah | 421.793.701,00 | 52.283.700,00 | 474.077.401,00 |
| II | Digulirkan Kembali | | | |
| 1 | Tahun 2001 | 34.005.000,00 | 3.345.000,00 | 37.350.000,00 |
| 2 | Tahun 2002 | 33.481.000,00 | 3.350.000,00 | 36.831.000,00 |
| 3 | Tahun 2005 | 8.990.000,00 | 1.050.000,00 | 10.040.000,00 |
| 5 | Tahun 2006 | 11.435.000,00 | 1.129.000,00 | 12.564.000,00 |
| 6 | Tahun 2007 | 7.450.000,00 | 1.840.000,00 | 9.290.000,00 |
| 7 | Tahun 2008 | 16.100.000,00 | 3.800.000,00 | 19.900.000,00 |
| | Jumlah | 111.461.000,00 | 14.514.000,00 | 125.975.000,00 |
| | Jumlah Keseluruhan | 533.254.701,00 | 66.797.700,00 | 600.052.401,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

- c. Piutang Jasa Dana Talangan pada BPKAD sebesar Rp875.000,00 merupakan piutang atas jasa Dana Talangan Pengadaan Pangan TA 2020 yang belum dilunasi sampai dengan 31 Desember 2020, yaitu dari kelompok tani Karya Utama, Kec.Buayan.

Sedangkan Realisasi Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya tahun 2021 Rp.0,00 dikarenakan terdapat Reklas Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya ke Piutang Jasa Dana Talangan sebesar Rp 26.653.000,00 dan ke Retribusi Kios Terminal Rp647.900.000,00. Hal tersebut dikarenakan menyesuaikan dengan nomenklatur baru.

5.3.1.1.10 Piutang Transfer Antar Daerah

| | |
|--------------------|---------------------|
| 31 Desember 2021 | 31 Desember 2020 |
| Rp4.770.941.665,00 | Rp14.715.007.496,00 |

Piutang Transfer Antar Daerah merupakan Alokasi Transfer Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah Provinsi yang belum diterima Pemerintah Kabupaten Kebumen sbb.

Tabel Piutang Transfer Antar Daerah

| Uraian | SKPD | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) | Kenaikan/Penurunan (Rp) | % |
|--------------------------|-------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|---------|
| Piutang Bagi Hasil Pajak | BPKAD | 4.770.941.665,00 | 14.715.007.496,00 | (9.944.065.831,00) | (67,58) |

Piutang Transfer Antar Daerah tahun lalu berupa Bagi Hasil Pajak Provinsi sudah disalurkan seluruhnya oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 7 Desember 2021 sebesar Rp14.715.007.496,00.

Pada Tahun 2020 Piutang Transfer Antar Daerah bernama Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya, namun sesuai Permendagri 90 tahun 2019 maka berubah menjadi Piutang Transfer Antar Daerah.

Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya per 31 Desember 2021 dicatat berdasarkan hasil rekonsiliasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai Berita Acara Rekonsiliasi Nomor 024/BA-RKN/KAB-KOTA/I/2022, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel Rincian Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

| No | Jenis Bagi Hasil | Kurang Salur (Rp) |
|----|--------------------------|-------------------------|
| 1 | Pajak Kendaraan Bermotor | 1.199.523.388,00 |
| 2 | BBNKB | 697.432.275,00 |
| 3 | PBBKB | 2.826.374.186,00 |
| 4 | PAP | 47.611.816,00 |
| | Jumlah | 4.770.941.665,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

5.3.1.1.11 Penyisihan Piutang

31 Desember 2021
 (Rp11.457.871.449,00)

31 Desember 2020
 (Rp8.189.140.922,75)

Penyisihan piutang merupakan estimasi atas jumlah piutang yang diperkirakan tak tertagih berdasarkan metode penghitungan penyisihan menurut umur piutang (*aging schedule*). Besarnya penyisihan piutang pada tiap akhir tahun ditentukan berdasarkan umur piutang sesuai jenisnya. Saldo penyisihan piutang per 31 Desember 2021 disajikan sebagai berikut.

Tabel Penyisihan Piutang per 31 Desember 2021

| Piutang Daerah | Piutang Bruto | Penyisihan Piutang | NRV Piutang |
|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | (Rp) | (Rp) | (Rp) |
| Piutang Pajak Daerah | 7.480.313.798,00 | 3.824.187.919,00 | 3.656.125.879,00 |
| Piutang Retribusi Daerah | 3.425.900.530,00 | 285.894.281,00 | 3.140.006.249,00 |
| Piutang Lain-lain PAD yang Sah | 91.883.226.262,00 | 7.347.789.249,00 | 84.535.437.013,00 |
| Piutang Transfer Antar Daerah | 4.770.941.665,00 | 0,00 | 4.770.941.665,00 |
| Jumlah | 107.560.382.255,00 | 11.457.871.449,00 | 96.102.510.806,00 |

Perhitungan penyisihan per jenis piutang berdasarkan umur piutang disajikan sebagai berikut.

a. Penyisihan Piutang Pajak Daerah

Tabel Penyisihan Piutang Pajak

| No | Uraian | Umur Piutang | | | | Saldo Akhir |
|----|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| | | 1 s/d 2 Tahun | > 2 s/d 3Tahun | > 3 s/s 5 Tahun | > 5 Tahun | |
| 1 | PBBP2 | 3.149.623.345 | 2.209.278.833 | 1.201.578.278 | 848.561.524 | 7.409.041.980,00 |
| 2 | Pajak Hotel | 400.000 | | | | 400.000,00 |
| 3 | Pajak Restoran | 14.720.968 | 525.000 | 1.300.000 | | 16.545.968,00 |
| 4 | Pajak Air Tanah | 5.749.200 | 1.588.800 | 357.300 | | 7.695.300,00 |
| 5 | Pajak Parkir | 50.000 | | | 600.000 | 650.000,00 |
| 6 | Pajak Reklame | 36.249.675 | 9.730.875 | | | 45.980.550,00 |
| | Jumlah | 3.206.793.188 | 2.221.123.508 | 1.203.235.578 | 849.161.524 | 7.480.313.798 |
| | Penyisihan Piutang | 30% | 50% | 75% | 100% | |
| | Nilai Penyisihan | 962.037.957 | 1.110.561.754 | 902.426.684 | 849.161.524 | 3.824.187.919 |
| | Net Realizable Value (NRV) | | | | | 3.656.125.879 |

b. Penyisihan Piutang Retribusi Daerah

- Perhitungan penyisihan untuk piutang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum yang dikelola Dinas Perhubungan, disajikan sebagai berikut:

Tabel Penyisihan Piutang Retribusi parkir Di tepi Jalan Umum

| No | Uraian | Umur Piutang | | | | | Saldo Akhir |
|----|---|--------------|-------------------------|----------------|-----------------|-----------|-------------------------|
| | | 0 Tahun | 1 s/d 2 Tahun | > 2 s/d 3Tahun | > 3 s/s 5 Tahun | > 5 Tahun | |
| 1 | Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | | 1.072.365.000,00 | | | | 1.072.365.000,00 |
| | | | | | | | - |
| | Jumlah | - | 1.072.365.000,00 | - | - | - | 1.072.365.000,00 |
| | Penyisihan Piutang | 0% | 30% | 50% | 75% | 100% | |
| | Nilai Penyisihan | - | 321.709.500,00 | - | - | - | 321.709.500,00 |
| | Net Realizable Value(NRV) | | | | | | 750.655.500,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

- Perhitungan penyisihan untuk piutang Retribusi Pelayanan Pasar yang dikelola Dinas Perindustrian dan Perdagangan disajikan sebagai berikut.

Tabel Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Pasar

| No | Uraian | Umur Piutang | | | | | Saldo Akhir |
|----|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------------|
| | | 0 Tahun | 1 s/d 2 Tahun | > 2 s/d 3Tahun | > 3 s/s 5 Tahun | > 5 Tahun | |
| 1 | Pasar UPT I | 209.046.500,00 | 58.508.800,00 | | | | 267.555.300,00 |
| 2 | Pasar UPT-UPW II | 73.302.100,00 | 1.425.600,00 | | | | 74.727.700,00 |
| 3 | Pasar UPT-UPW III | 200.815.000,00 | 76.139.000,00 | | | | 276.954.000,00 |
| 4 | Pasar UPT-UPW IV | 34.586.100,00 | - | | | | 34.586.100,00 |
| | Jumlah | 517.749.700,00 | 136.073.400,00 | - | - | - | 653.823.100,00 |
| | Penyisihan Piutang | 0% | 30% | 50% | 75% | 100% | |
| | Nilai Penyisihan | - | 40.822.020,00 | - | - | - | 40.822.020,00 |
| | Net Realizable Value(NRV) | | | | | | 613.001.080,00 |

- Perhitungan penyisihan untuk piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah atas pemakaian kios di lokasi Obyek Wisata yang dikelola Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata disajikan sebagai berikut.

Tabel Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

| No | Uraian | Umur Piutang | | | | | Saldo Akhir |
|----|----------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | 0 Tahun | 1 s/d 2 Tahun | > 2 s/d 3Tahun | > 3 s/s 5 Tahun | > 5 Tahun | |
| 1 | Goa Jatijajar | | 93.565.170,00 | 17.578.400,00 | 1.386.000,00 | 9.758.100,00 | 122.287.670,00 |
| 2 | Pantai Logending | | 41.417.600,00 | 24.349.200,00 | 2.638.000,00 | 9.206.000,00 | 77.610.800,00 |
| 3 | Pantai Suwuk | | 105.652.000,00 | 320.495.960,00 | 189.101.000,00 | 94.632.000,00 | 709.880.960,00 |
| 4 | Pantai Petanahan | | 82.752.000,00 | 20.476.000,00 | 16.876.000,00 | 51.926.000,00 | 172.030.000,00 |
| 5 | PAP Krakal | | 3.402.000,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | | 3.594.000,00 |
| 6 | Pantai Karangbolong | | 5.600.000,00 | | | | 5.600.000,00 |
| 7 | Waduk Sempor | | 5.505.000,00 | 4.000,00 | | | 5.509.000,00 |
| 8 | Goa Petruk | | | | | | - |
| | Jumlah | - | 337.893.770,00 | 382.999.560,00 | 210.097.000,00 | 165.522.100,00 | 1.096.512.430,00 |
| | Penyisihan Piutang | 0% | 30% | 50% | 75% | 100% | |
| | Nilai Penyisihan | - | 101.368.131,00 | 191.499.780,00 | 157.572.750,00 | 165.522.100,00 | 615.962.761,00 |
| | Net Realizable Value(NRV) | | | | | | 480.549.669,00 |

- Perhitungan penyisihan untuk piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah atas pemakaian kios terminal yang dikelola Dinas Perhubungan disajikan sebagai berikut.

Tabel Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

| No | Uraian | Umur Piutang | | | | | Saldo Akhir |
|----|-------------------------------------|--------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 0 Tahun | 1 s/d 2 Tahun | > 2 s/d 3Tahun | > 3 s/s 5 Tahun | > 5 Tahun | |
| 1 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | | | | | 603.200.000,00 | 603.200.000,00 |
| | Jumlah | - | - | - | - | 603.200.000,00 | 603.200.000,00 |
| | Penyisihan Piutang | 0% | 30% | 50% | 75% | 100% | |
| | Nilai Penyisihan | - | - | - | - | 603.200.000,00 | 603.200.000,00 |
| | Net Realizable Value(NRV) | | | | | | - |



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

c. Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Penjelasan penyisihan piutang lain-lain PAD yang Sah disajikan sebagai berikut.

- 1) Perhitungan penyisihan piutang Denda Pajak Hotel disajikan sebagai berikut.

Tabel Penyisihan Piutang Denda Pajak Hotel

| No | Uraian | Umur Piutang | | | | Saldo Akhir |
|----|----------------------------|---------------|----------------|-----------------|-----------|-------------|
| | | 1 s/d 2 Tahun | > 2 s/d 3Tahun | > 3 s/s 5 Tahun | > 5 Tahun | |
| 1 | Denda Pajak Hotel | 12.000 | - | | | 12.000 |
| | Jumlah | 12.000 | - | - | - | 12.000 |
| | Penyisihan Piutang Denda | 30% | 50% | 75% | 100% | |
| | Nilai Penyisihan | 3.600 | - | - | - | 3.600 |
| | Net Realizable Value (NRV) | | | | | 8.400 |

- 2) Perhitungan penyisihan piutang Denda Pajak Restoran disajikan sebagai berikut

Tabel Penyisihan Piutang Denda Pajak Restoran

| No | Uraian | Umur Piutang | | | | Saldo Akhir |
|----|----------------------------|---------------|----------------|-----------------|-----------|-------------|
| | | 1 s/d 2 Tahun | > 2 s/d 3Tahun | > 3 s/s 5 Tahun | > 5 Tahun | |
| 1 | Denda Pajak Restoran | 1.530.725 | 252.000 | 624.000 | | 2.406.725 |
| | Jumlah | 1.530.725 | 252.000 | 624.000 | - | 2.406.725 |
| | Penyisihan Piutang Denda | 30% | 50% | 75% | 100% | |
| | Nilai Penyisihan | 459.218 | 126.000 | 468.000 | - | 1.053.218 |
| | Net Realizable Value (NRV) | | | | | 1.353.507 |

- 3) Perhitungan penyisihan piutang Denda Pajak Reklame disajikan sebagai berikut

Tabel Penyisihan Piutang Denda Pajak Reklame

| No | Uraian | Umur Piutang | | | | Saldo Akhir |
|----|----------------------------|---------------|----------------|-----------------|-----------|-------------|
| | | 1 s/d 2 Tahun | > 2 s/d 3Tahun | > 3 s/s 5 Tahun | > 5 Tahun | |
| 1 | Denda Pajak Reklame | 2.076.641 | 4.670.820 | | | 6.747.461 |
| | Jumlah | 2.076.641 | 4.670.820 | - | - | 6.747.461 |
| | Penyisihan Piutang Denda | 30% | 50% | 75% | 100% | |
| | Nilai Penyisihan | 622.992 | 2.335.410 | - | - | 2.958.402 |
| | Net Realizable Value (NRV) | | | | | 3.789.059 |

- 4) Perhitungan penyisihan piutang Denda Pajak Parkir disajikan sebagai berikut

Tabel Penyisihan Piutang Denda Pajak Parkir

| No | Uraian | Umur Piutang | | | | Saldo Akhir |
|----|----------------------------|---------------|----------------|-----------------|-----------|-------------|
| | | 1 s/d 2 Tahun | > 2 s/d 3Tahun | > 3 s/s 5 Tahun | > 5 Tahun | |
| 1 | Denda Pajak Parkir | 7.000 | - | | 288.000 | 295.000 |
| | Jumlah | 7.000 | - | - | 288.000 | 295.000 |
| | Penyisihan Piutang Denda | 30% | 50% | 75% | 100% | |
| | Nilai Penyisihan | 2.100 | - | - | 288.000 | 290.100 |
| | Net Realizable Value (NRV) | | | | | 4.900 |



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021**

5) Perhitungan penyisihan piutang Denda Pajak Air Tanah disajikan sebagai berikut

Tabel Penyisihan Piutang Denda Pajak Air Tanah

| No | Uraian | Umur Piutang | | | | Saldo Akhir |
|----|----------------------------|---------------|----------------|-----------------|-----------|-------------|
| | | 1 s/d 2 Tahun | > 2 s/d 3Tahun | > 3 s/s 5 Tahun | > 5 Tahun | |
| 1 | Denda Pajak Air Tanah | 149.460 | 762.624 | 171.504 | | 1.083.588 |
| | Jumlah | 149.460 | 762.624 | 171.504 | - | 1.083.588 |
| | Penyisihan Piutang Denda | 30% | 50% | 75% | 100% | |
| | Nilai Penyisihan | 44.838 | 381.312 | 128.628 | - | 554.778 |
| | Net Realizable Value (NRV) | | | | | 528.810 |

6) Perhitungan penyisihan piutang Denda Pajak Air Tanah disajikan sebagai berikut

Tabel Penyisihan Piutang Denda Pajak Air Tanah

| No | Uraian | Umur Piutang | | | | Saldo Akhir |
|----|----------------------------|---------------|----------------|-----------------|-------------|---------------|
| | | 1 s/d 2 Tahun | > 2 s/d 3Tahun | > 3 s/s 5 Tahun | > 5 Tahun | |
| 1 | Denda PBB P2 | 653.151.531 | 1.060.453.840 | 576.757.573 | 407.309.532 | 2.697.672.475 |
| | Jumlah | 653.151.531 | 1.060.453.840 | 576.757.573 | 407.309.532 | 2.697.672.475 |
| | Penyisihan Piutang Denda | 30% | 50% | 75% | 100% | |
| | Nilai Penyisihan | 195.945.459 | 530.226.920 | 432.568.180 | 407.309.532 | 1.566.050.091 |
| | Net Realizable Value (NRV) | | | | | 1.131.622.384 |

7) Perhitungan Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD

- Perhitungan Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD RSUD Dr. Soedirman

Dari piutang BLUD pada RSUD Dr Soedirman sebesar Rp69.394.165.702,38 hanya piutang umum sebesar Rp2.725.480.976,00 yang diperhitungkan penyisihan piutang, dengan perhitungan sebagai berikut.

Tabel Penyisihan Piutang Umum RSUD Dr Soedirman

| Umur Piutang | Jumlah Piutang | Penyisihan | | NRV |
|-----------------------|-------------------------|------------|----------------------|--------------------|
| | | % | Rp | Rp |
| 0 s/d 1 bulan | 49.547.461,00 | 0,05% | 24.773,73 | 49.522.687,27 |
| > 1 bulan s/d 1 tahun | 159.822.646,00 | 10,00% | 15.982.264,60 | 143.840.381,40 |
| > 1 s/d 3 tahun | 768.008.951,00 | 50,00% | 384.004.475,50 | 384.004.475,50 |
| > 3 tahun | 1.748.101.918,00 | 100,00% | 1.748.101.918,00 | 0,00 |
| Total Piutang | 2.725.480.976,00 | | 2.148.113.432 | 577.367.544 |

- Perhitungan Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD RSUD Prembun

Penyisihan Piutang Lainnya pada RSUD Prembun diperhitungkan dari tunggakan piutang pasien umum, dengan perhitungan sebagai berikut.



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021**

Tabel Penyisihan Piutang Umum RSUD Prembun

| Umur Piutang | Jumlah Piutang | Penyisihan | | NRV |
|-----------------------|--------------------------|------------|----------------------|-----------------------|
| | | % | Rp | Rp |
| 0 s/d 1 bulan | 2.395.020.340,00 | 0,50% | 11.975.101,70 | 2.383.045.238,30 |
| > 1 bulan s/d 1 tahun | 16.115.880.704,00 | 10,00% | 1.611.588.070,40 | 14.504.292.633,60 |
| > 1 s/d 3 tahun | 96.112.823,00 | 50,00% | 48.056.411,50 | 48.056.411,50 |
| > 3 tahun | 35.515.643,00 | 100,00% | 35.515.643,00 | 0,00 |
| Total Piutang | 18.642.529.510,00 | | 1.707.135.227 | 16.935.394.283 |

8) Perhitungan Penyisihan Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

- Perhitungan penyisihan piutang Dan Bergulir eks Disperindagkop

Penyisihan piutang lainnya dana bergulir eks Disperindagkop sebesar 100% dari saldo piutang, dengan perhitungan sebagai berikut.

Tabel Penyisihan Piutang eks Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi

| No. | Tahun Pengguliran | Pinjaman | | | Umur Piutang (th) | Penyisihan Piutang | | NRV (Rp) |
|-----|--------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------|
| | | Pokok (Rp) | Jasa (Rp) | Jumlah (Rp) | | (%) | Nilai (Rp) | |
| I | Pengguliran | | | | | | | |
| 1 | 2000 | 116.674.500,00 | 11.711.500,00 | 128.386.000,00 | > 5 th | 100 | 128.386.000,00 | 0,00 |
| 2 | 2002 | 45.434.500,00 | 4.719.500,00 | 50.154.000,00 | > 5 th | 100 | 50.154.000,00 | 0,00 |
| 3 | 2003 | 120.474.700,00 | 13.730.000,00 | 134.204.700,00 | > 5 th | 100 | 134.204.700,00 | 0,00 |
| 5 | 2005 | 41.313.455,00 | 7.179.000,00 | 48.492.455,00 | > 5 th | 100 | 48.492.455,00 | 0,00 |
| 6 | 2006 | 37.263.409,00 | 6.993.700,00 | 44.257.109,00 | > 5 th | 100 | 44.257.109,00 | 0,00 |
| 7 | 2007 | 60.633.137,00 | 7.950.000,00 | 68.583.137,00 | > 5 th | 100 | 68.583.137,00 | 0,00 |
| | Sub Jumlah | 421.793.701,00 | 52.283.700,00 | 474.077.401,00 | | | 474.077.401,00 | 0,00 |
| II | Digulirkan Kembali | | | | | | | |
| 10 | 2001 | 34.005.000,00 | 3.345.000,00 | 37.350.000,00 | > 5 th | 100 | 37.350.000,00 | 0,00 |
| 11 | 2002 | 33.481.000,00 | 3.350.000,00 | 36.831.000,00 | > 5 th | 100 | 36.831.000,00 | 0,00 |
| 12 | 2005 | 8.990.000,00 | 1.050.000,00 | 10.040.000,00 | > 5 th | 100 | 10.040.000,00 | 0,00 |
| 13 | 2006 | 11.435.000,00 | 1.129.000,00 | 12.564.000,00 | > 5 th | 100 | 12.564.000,00 | 0,00 |
| 14 | 2007 | 7.450.000,00 | 1.840.000,00 | 9.290.000,00 | > 5 th | 100 | 9.290.000,00 | 0,00 |
| 15 | 2008 | 16.100.000,00 | 3.800.000,00 | 19.900.000,00 | > 5 th | 100 | 19.900.000,00 | 0,00 |
| | Sub Jumlah | 111.461.000,00 | 14.514.000,00 | 125.975.000,00 | | | 125.975.000,00 | 0,00 |
| | Jumlah | 533.254.701,00 | 66.797.700,00 | 600.052.401,00 | | | 600.052.401,00 | 0,00 |

- Perhitungan Penyisihan piutang jasa dana bergulir eks Kantor Ketahanan Pangan sebesar Rp24.178.000,00 atau 100 % dari saldo piutang jasa bergulir disajikan sebagai berikut.



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021**

Tabel Penyisihan Piutang Dana Bergulir eks Kantor Ketahanan Pangan

| Tahun | Saldo 31 Desember 2020 | | Angsuran 2021 | | Saldo 31 Desember 2021 | | |
|-----------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| | Pokok (Rp) | Jasa (Rp) | Pokok (Rp) | Jasa (Rp) | Pokok (Rp) | Jasa (Rp) | Jumlah (Rp) |
| 2005 | 1.000.000,00 | 1.600.000,00 | | | 1.000.000,00 | 1.600.000,00 | 2.600.000,00 |
| 2006 | 94.487.000,00 | 7.278.000,00 | | | 94.487.000,00 | 7.278.000,00 | 101.765.000,00 |
| 2007 | 70.500.000,00 | 3.000.000,00 | | | 70.500.000,00 | 3.000.000,00 | 73.500.000,00 |
| 2008 | 163.345.000,00 | 13.900.000,00 | 1.400.000,00 | 1.600.000,00 | 161.945.000,00 | 12.300.000,00 | 174.245.000,00 |
| Jumlah | 329.332.000,00 | 25.778.000,00 | 1.400.000,00 | 1.600.000,00 | 327.932.000,00 | 24.178.000,00 | 352.110.000,00 |
| Penyisihan > 5th (100%) | | | | | 327.932.000,00 | 24.178.000,00 | 352.110.000,00 |
| Net Realizable Value (NRV) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5.3.1.1.12 Beban Dibayar Dimuka

| | |
|------------------|------------------|
| 31 Desember 2021 | 31 Desember 2020 |
| Rp29.284.210,30 | Rp65.598.889,00 |

Beban dibayar dimuka disajikan sebagai berikut.

Tabel Beban Dibayar di Muka

| Uraian | OPD | 31-Dec-21 | 31-Dec-20 | Kenaikan/ (Penurunan) (Rp) | % |
|--------------------------|--------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|----------------|
| | | (Rp) | (Rp) | | |
| Sewa Rumah Dinas | RSUD Prembun | 0,00 | 9.444.444,00 | (9.444.444,00) | (100,00) |
| Asuransi Kendaraan Dinas | BPKAD | 29.284.210,30 | 56.154.445,00 | (26.870.234,70) | (47,85) |
| Jumlah | | 29.284.210,30 | 65.598.889,00 | (36.314.678,70) | (55,36) |

Sedangkan beban dibayar di muka pada BPKAD secara rinci disajikan sebagai berikut.

Tabel Beban Dibayar di Muka pada BPKAD

| No | Uraian Beban | No Dokumen Bukti Pengeluaran | Tgl Dokumen | Jumlah Beban | Jangka Waktu | Masa Manfaat | Sisa Masa Manfaat | Nilai Beban Dibayar Dimuka |
|---------------|----------------------------------|------------------------------|-------------|--------------------|--------------------------|--------------|-------------------|----------------------------|
| 1 | Beban Jasa Premi Kendaraan Dinas | 11.900.0000.93262 | 7/29/2019 | 27.996.820 | 01-08-2019 sd 01-08-2022 | 36 | 8 | 6.221.516 |
| 2 | Beban Jasa Premi Kendaraan Dinas | 12.000.0000.060.097 | 5/11/2020 | 49.904.833 | 23-04-2020 sd 23-04-2022 | 24 | 4 | 8.317.472 |
| 3 | Beban Jasa Premi Kendaraan Dinas | 12.100.0000.339.839 | 7/20/2021 | 21.379.000 | 01-08-2021 sd 01-08-2023 | 36 | 20 | 11.877.222 |
| 4 | Beban Jasa Premi Kendaraan Dinas | 12.100.0000.335.400 | 7/20/2021 | 4.302.000 | 01-08-2021 sd 01-08-2022 | 12 | 8 | 2.868.000 |
| Jumlah | | | | 103.582.653 | | | | 29.284.210 |

5.3.1.1.13 Persediaan

| | |
|---------------------|---------------------|
| 31 Desember 2021 | 31 Desember 2020 |
| Rp46.939.260.673,57 | Rp39.833.217.851,73 |

Nilai persediaan merupakan hasil *stok opname* dari persediaan bahan pakai habis, bahan/material dan bahan lainnya yang dilakukan per 31 Desember 2021, yang disajikan dengan harga beli terakhir, sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

Tabel Daftar Persediaan

| Uraian | 31 Desember 2021 Rp | 31 Desember 2020 Rp | Kenaikan/Penurunan Rp | % |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| Bahan | 5.397.766.666,00 | 5.560.293.222,49 | (162.526.556,49) | (2,92) |
| Suku Cadang | 288.195.736,00 | 88.836.326,00 | 199.359.410,00 | 224,41 |
| Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor | 4.640.620.726,50 | 7.299.235.790,00 | (2.658.615.063,50) | (36,42) |
| Obat-obatan | 35.580.905.456,55 | 26.117.087.265,24 | 9.463.818.191,31 | 36,24 |
| Natura dan Pakan | 1.031.772.088,52 | 767.765.248,00 | 264.006.840,52 | 34,39 |
| Jumlah | 46.939.260.673,57 | 39.833.217.851,73 | 7.106.042.821,84 | 17,84 |

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa Persediaan tahun 2021 naik sebesar 17,84% dibandingkan nilai Persediaan tahun 2020. Secara rinci persediaan per 31 Desember 2021 di SKPD disajikan sebagaimana **lampiran 7**.

5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

| | |
|----------------------|----------------------|
| 31 Desember 2021 | 31 Desember 2020 |
| Rp156.731.786.248,61 | Rp150.432.666.979,57 |

Investasi Jangka Panjang adalah penyertaan modal yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi.

Investasi jangka panjang terdiri dari :

Tabel Investasi Jangka Panjang

| Uraian | 31-Dec-21 | 31-Dec-20 | Kenaikan/ (Penurunan) (Rp) | % |
|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------|
| | (Rp) | (Rp) | | |
| Investasi Jangka Panjang Non Permanen | 0,00 | 35.000.000,00 | (35.000.000,00) | 100,00 |
| Investasi Jangka Panjang Permanen | 156.731.786.248,61 | 150.397.666.979,57 | 6.334.119.269,04 | 4,21 |
| Jumlah | 156.731.786.248,61 | 150.432.666.979,57 | 6.299.119.269,04 | 4,19 |

5.3.1.2.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen

| | |
|------------------|------------------|
| 31 Desember 2021 | 31 Desember 2020 |
| 0,00 | Rp35.000.000,00 |

Investasi Jangka Panjang Non Permanen pada Pemerintah Kabupaten Kebumen berupa Investasi Non Permanen Lainnya dalam bentuk dana bergulir yaitu dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

Investasi Non Permanen Lainnya dalam bentuk dana bergulir ini dikelola oleh Dinas Pertanian dan Pangan, disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan atau *Net Realizable Value (NRV)* setelah dikurangi dengan penyisihan investasi tidak tertagih dengan rincian berikut ini.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

Tabel Daftar Investasi Non Permanen Lainnya

| Uraian | 31-Dec-21 | 31-Dec-20 | Kenaikan/ | % |
|--------------------------------------|-------------|----------------------|------------------------|-------------|
| | (Rp) | (Rp) | (Penurunan) (Rp) | |
| Dana Bergulir (penguliran 2005-2008) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dana Talangan (pembiayaan 2020) | 0,00 | 35.000.000,00 | (35.000.000,00) | 100% |
| Jumlah | 0,00 | 35.000.000,00 | (35.000.000,00) | 100% |

Dana Bergulir pada Dinas Pertanian dan Pangan (penguliran 2005-2008) per 31 Desember 2021 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel Rincian Dana bergulir Penguliran 2005-2008 per 31 Desember 2021

| Uraian | Nilai (Rp) |
|--|----------------|
| Saldo awal 1 Januari 2021 | 329.332.000,00 |
| Penerimaan kembali pokok pinjaman di th 2020 | 1.400.000,00 |
| Saldo akhir per 31 Desember 2020 | 327.932.000,00 |
| Penyisihan (tahun ke-8) | 100% |
| Nilai Penyisihan | 327.932.000,00 |
| Nilai Bersih (NRV) per 31 Desember 2021 | 0,00 |

Sedangkan Dana Talangan Pengadaan Pangan tahun 2020 sebesar Rp35.000.000,00 merupakan Pengeluaran Pembiayaan tahun 2020 yang dibayarkan pada tahun 2021 atas nama kelompok tani Karya Utama, Kec.Buayan.

5.3.1.2.2 Investasi Jangka Panjang Permanen

| | |
|----------------------|----------------------|
| 31 Desember 2021 | 31 Desember 2020 |
| Rp156.731.786.248,61 | Rp150.397.666.979,57 |

Investasi Jangka Panjang Permanen terdiri dari berikut ini.

Tabel Daftar Investasi Jangka Panjang Permanen

| Uraian | 31 Des 2021 (Rp) | 31 Des 2020 (Rp) | Kenaikan/Penurunan (Rp) | % |
|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------|
| Penyertaan Modal | 156.731.786.248,61 | 150.397.666.979,57 | 6.334.119.269,04 | 4,21 |
| Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah | 156.731.786.248,61 | 150.397.666.979,57 | 6.334.119.269,04 | 4,21 |

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah terdiri dari penyertaan modal pada tujuh BUMD dengan perincian sebagai berikut.

Tabel Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

| No | Uraian | 31 Des 2021 (Rp) | 31 Des 2020 (Rp) | Kenaikan/Penurunan (Rp) | % |
|----|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | PD BPR KEBUMEN | 20.253.469.276,00 | 19.426.562.906,00 | 826.906.370,00 | 4,26 |
| 2 | PD APOTEK LUK ULO | 2.206.157.712,00 | 2.099.835.967,00 | 106.321.745,00 | 5,06 |
| 3 | PDAM | 56.489.283.007,00 | 51.945.666.756,00 | 4.543.616.251,00 | 8,75 |
| 4 | PD BPR BKK KEBUMEN | 28.832.876.253,61 | 27.975.601.350,57 | 857.274.903,04 | 3,06 |
| 5 | PT BKK JATENG | 2.520.000.000,00 | 2.520.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | PT BPD JATENG | 46.279.000.000,00 | 46.279.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | PT PRPP | 151.000.000,00 | 151.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Jumlah | 156.731.786.248,61 | 150.397.666.979,57 | 6.334.119.269,04 | 4,21 |



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2021

Nilai Penyertaan Modal Pemerintah daerah yang disajikan pada laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen dihitung dengan dua metode penilaian yaitu metode biaya dan metode ekuitas. Penyertaan modal pada PT BKK Jateng, PT BPD Jateng dan PT Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (PT PRPP) disajikan menggunakan metode biaya karena kepemilikan saham <20%, sedangkan untuk PD BPR Kebumen, PD Apotek Luk Ulo, PDAM, dan PD BPR BKK Kebumen menggunakan metode ekuitas.

Nilai investasi dengan metode ekuitas diperoleh dari data Laporan Keuangan Perusahaan Daerah untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021. Sehingga penyajian penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kebumen berdasarkan kedua metode tersebut dilihat dari nilai ekuitas yang tersaji pada Laporan Keuangan BUMD adalah sebagai berikut.

Tabel Investasi Permanen dengan Metode Ekuitas & Metode Biaya

| No | BUMD | Modal Disetor (Rp) | Ekuitas BUMD (Rp) | Opini LK BUMD | Prosentase Kepemilikan | Metode Penilaian | Nilai Investasi (Rp) |
|----|--------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|
| 1 | PD BPR KEBUMEN | 12.500.000.000,00 | 20.253.469.276,00 | audit | 100,00% | Ekuitas | 19.426.562.906,00 |
| 2 | PD APOTEK LUK ULO | 1.606.500.000,00 | 2.206.157.712,00 | audit | 100,00% | Ekuitas | 2.099.835.967,00 |
| 3 | PDAM | 42.961.647.118,00 | 56.489.283.007,00 | audit | 100,00% | Ekuitas | 51.945.666.756,00 |
| 4 | PD BPR BKK KEBUMEN | 15.700.000.000,00 | 56.925.718.171,00 | audit | 50,65% | Ekuitas | 27.975.601.350,57 |
| 5 | PT BKK JATENG | 2.520.000.000,00 | 327.091.583.605,00 | audit | 0,73% | Biaya | 2.520.000.000,00 |
| 6 | PT BPD JATENG | 46.279.000.000,00 | 8.767.432.148,00 | audit | 1,21% | Biaya | 46.279.000.000,00 |
| 7 | PT PRPP | 151.000.000,00 | 34.155.374.541,00 | audit | 0,30% | Biaya | 151.000.000,00 |
| | Jumlah | 121.718.147.118,00 | 505.889.018.460,00 | | | | 150.397.666.979,57 |

Penambahan modal disetor yang disertakan Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp3.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel Penambahan Modal Disetor BUMD oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen

| No | BUMD | 31 Des 2020 (Rp) | Tambahan Modal 2021 (Rp) | 31 Desember 2021 (Rp) | Keterangan |
|----|--------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|---|
| 1 | PD BPR KEBUMEN | 12.500.000.000,00 | 0,00 | 12.500.000.000,00 | |
| 2 | PD APOTEK LUK ULO | 1.606.500.000,00 | 0,00 | 1.606.500.000,00 | |
| 3 | PDAM | 39.961.647.118,00 | 3.000.000.000,00 | 42.961.647.118,00 | SP2D No. 00746/LS-PENY.Modal/DAU/2021 tanggal 21 Juli 2021 |
| 4 | PD BPR BKK KEBUMEN | 15.700.000.000,00 | 0,00 | 15.700.000.000,00 | |
| 5 | PT BKK JATENG | 2.520.000.000,00 | 0,00 | 2.520.000.000,00 | |
| 6 | PT BPD JATENG | 46.279.000.000,00 | 0,00 | 46.279.000.000,00 | |
| 7 | PT PRPP | 151.000.000,00 | 0,00 | 151.000.000,00 | |
| | Jumlah | 118.718.147.118,00 | 3.000.000.000,00 | 121.718.147.118,00 | |



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

5.3.5.1 Aset Tetap

31 Desember 2021
31 Desember 2020
Rp6.227.708.448.531,80
Rp5.872.465.177.043,80

Perincian masing-masing aset tetap disajikan sebagai berikut.

Tabel Rincian Aset Tetap

| No | Uraian | 31 Desember 2021 | Saldo Awal | Kenaikan | % |
|----|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------|
| | | (Rp) | (Rp) | (Penurunan) (Rp) | |
| 1. | Tanah | 798.158.085.264,55 | 777.646.197.820,55 | 20.511.887.444,00 | 2,57 |
| 2. | Peralatan dan Mesin | 990.034.882.048,00 | 870.303.689.719,00 | 119.731.192.329,00 | 12,09 |
| 3. | Gedung dan Bangunan | 1.633.602.684.010,00 | 1.519.382.588.544,00 | 114.220.095.466,00 | 6,99 |
| 4. | Jalan, Irigasi, dan Jaringan | 2.662.630.755.709,25 | 2.559.955.132.444,25 | 102.675.623.265,00 | 3,86 |
| 5. | Aset Tetap Lainnya | 138.004.707.625,00 | 132.900.631.859,00 | 5.104.075.766,00 | 3,70 |
| 6. | Konstruksi dalam Pengerjaan | 5.277.333.875,00 | 12.276.936.657,00 | (6.999.602.782,00) | (132,64) |
| 7. | Akumulasi Penyusutan | (2.241.354.012.487,54) | (1.940.935.286.174,30) | (300.418.726.313,24) | |
| | | 3.986.354.436.044,26 | 3.931.529.890.869,50 | 54.824.545.174,77 | |

Penjelasan masing-masing jenis aset tetap disajikan sebagai berikut:

5.3.5.1.1 Tanah

31 Desember 2021
31 Desember 2020
Rp. 798.158.085.264,55
Rp.777.646.197.820,55

Bertambah dan berkurangnya Aset Tetap Tanah selama tahun 2021 sebagai berikut.

Tabel Bertambah dan Berkurang Aset Tetap Tanah

| Saldo Awal (Rp) | Penambahan | Pengurangan | Mutasi Bersih | 31-Dec-20 |
|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------------|
| | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) |
| 777.646.197.820,55 | 32.529.857.144,00 | 12.017.969.700,00 | 20.511.887.444 | 798.158.085.264,55 |

Penambahan nilai Aset Tetap Tanah terjadi karena hal-hal sebagai berikut.

Tabel Penambahan Aset Tetap Tanah

| No | Uraian | Nilai |
|----|------------------------|--------------------------|
| 1 | Belanja Modal | 3.433.741.901,00 |
| 2 | Belanja Modal BLUD | 628.973.110,00 |
| 3 | Mutasi antar OPD | 4.501.587.080,00 |
| 4 | Hibah | 13.605.279.220,00 |
| 5 | Baru dicatat | 7.939.142.000,00 |
| 6 | Koreksi | 1.924.746.640,00 |
| 6 | Penambahan dari Reklas | 496.387.193,00 |
| | JUMLAH | 32.529.857.144,00 |

- 1) Penambahan Aset Tetap Tanah dari Belanja Modal Tanah sebesar Rp3.433.741.901,00 merupakan belanja modal tanah pada SKPD sebagai berikut



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

Tabel Belanja Modal Tanah Tahun 2021

| No | OPD | Peruntukan Tanah | Nilai (Rp) |
|---------------|---|--|-------------------------|
| 1. | Dinas PU & PR | Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek (keluar masuk Makodim) | 771.538.599,00 |
| | | Tanah untuk Pembangunan Oprit Jembatan Sokalilla Telomoyo Desa | 803.115.109,00 |
| | | Tanah bagi Pemb Oprit Jembatan Bulurejo Sungai Kali Ijo desa | 721.938.922,00 |
| | | Staking Out Paket 1 (Jembatan Brangkal II Desa Klopogodo) | 49.474.000,00 |
| | | Tanah untuk Pembangunan Drainase - Adikarso-Depokrejo | 946.875.271,00 |
| 2. | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Tanah Bangunan Puskesmas (Kebumen 2) | 140.800.000,00 |
| Jumlah | | | 3.433.741.901,00 |

- 2) Penambahan Aset Tetap Tanah dari Belanja Modal BLUD sebesar Rp.628.973.110,00 merupakan belanja modal tanah Rumah Sakit Dr. Soedirman berupa tanah yang digunakan untuk pembangunan gudang.
- 3) Penambahan Aset Tetap Tanah karena mutasi antar SKPD dijelaskan dalam tabel berikut ini.

Tabel Penambahan Karena Mutasi Aset Tetap Tanah antar SKPD

| No | OPD Asal | OPD Penerima | Harga Perolehan (Rp) | Keterangan |
|---------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------|--|
| 1 | DPUPR | Kecamatan Ambal | 1.731.984.720,00 | Tanah untuk pembangunan Kantor Kecamatan Ambal |
| | | Disperkim LH | 19.366.000,00 | Tanah menuju TPU Bong Cina |
| | | Disperkim LH | 490.796.520,00 | Tanah menuju TPST Kembaran |
| 2 | Dinas Pendidikan | SMP Negeri 1 Kuwarasan | 264.709.340,00 | Tanah untuk SMP N 1 Kuwarasan |
| 3 | Dinas Kelautan dan Perikanan | PPKD | 1.074.112.500,00 | Tanah Tambak |
| 4 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | PPKD | 920.618.000,00 | Tanah Tambak |
| Jumlah | | | 4.501.587.080,00 | |

- 4) Penambahan Aset Tetap Tanah yang berasal dari Hibah merupakan perolehan hibah tanah pada SKPD sebagai berikut:
 - a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp970.585.000,00 berupa Tanah Jaringan Irigasi dengan Berita Acara Nomor 030/0012419/2021 dan 030/1719.3 Tanggal 6 September 2021.
 - b. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup berupa Penyerahan Sarana Prasarana Perumahan pada Perumahan Korpri Jatimulyo senilai Rp1.630.598.400,00, pada Perumahan Tamanwinangun Indah senilai Rp6.380.765.820,00, pada Perumahan Selang senilai Rp910.170.000,00, dan pada Perumahan Jatisari senilai Rp3.713.160.000,00
- 5) Penambahan Aset Tetap Tanah karena baru dicatat ada pada SKPD sebagai berikut:
 - a. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup senilai Rp1.113.424.000,00 berupa tanah makam yang terletak di Kelurahan Plarangan dan Hutan Kota yang ada di Kelurahan Bumirejo.
 - b. Dinas Pertanian dan Pangan senilai Rp525.000.000,00 berupa tanah untuk bangunan gedung BPP Sadang dan BPP Poncowarno.
 - c. Satuan Polisi Pamong Praja senilai Rp170.850.000,00 berupa tanah bangunan kantor pemerintah.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

- d. Kelurahan Kebumen senilai Rp5.262.000.000,00 berupa tanah Jalan Mangga.
- e. Kelurahan Wonokriyo senilai Rp867.868.000,00 berupa tanah sawah dan tanah Jalan Nanas.
- 6) Penambahan Aset Tetap Tanah karena koreksi berupa penggabungan pencatatan nilai tanah pada RSUD Dr. Soedirman yang semula tercatat 2 bidang menjadi 1 bidang sebagaimana sertifikat Hak Pakai Nomor 74.
- 7) Sedangkan penambahan Aset Tetap Tanah karena reklas ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp49.662.193,00 merupakan reklas dari Aset Lainnya berupa biaya *stacking-out* Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jembatan Bulurejo Kecamatan Ayah, dan pada Dinas Kesehatan senilai Rp446.725.000,00 berupa Pengadaan Tanah Puskesmas Bonorowo yang dibeli dengan anggaran Belanja Modal pada rekening bangunan gedung.

Pengurangan Aset Tanah Tahun 2021 dijelaskan sebagai berikut.

Tabel Pengurangan Aset Tetap Tanah

| No | Uraian | Nilai |
|----|------------------|--------------------------|
| 1 | Mutasi antar OPD | 4.501.587.080,00 |
| 2 | Koreksi | 7.466.908.620,00 |
| 3 | Reklas | 49.474.000,00 |
| | JUMLAH | 12.017.969.700,00 |

- 1) Pengurangan nilai Aset Tetap Tanah karena mutasi antar SKPD tahun 2020 sebesar Rp4.501.587.080,00 sebagaimana dijelaskan pada tabel penambahan mutasi Aset Tetap Tanah antar SKPD di atas.
- 2) Pengurangan aset tetap tanah karena koreksi dobel pencatatan terdapat pada SKPD sebagai berikut.

Tabel Pengurangan Koreksi Pencatatan Aset Tetap Tanah

| No | OPD | Nilai (Rp) | Uraian |
|----|---|-------------------------|--|
| 1 | Bagian Pemerintahan | 74.025.000,00 | smp 2 sruweng |
| | | 49.675.600,00 | Puskesmas Sadang |
| | | 59.640.000,00 | Puskesmas Buayan |
| | | 108.033.700,00 | bantuan uang pengadaan tanah untuk desa pada 5 desa |
| | | 15.400.000,00 | bantuan uang pengadaan tanah untuk desa Seling |
| 2 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 4.715.705.980,00 | Pencatatan ganda tanah kelurahan |
| | | 43.887.500,00 | Koreksi nilai tanah berdasarkan BAST Nomor 030/0012419/2021 dan 030/1719.3 Tgl. 6 September 2021 |
| 3 | RS Dr. Soedirman | 1.924.746.640,00 | penggabungan pencatatan nilai tanah pada RSUD Dr. Soedirman yang semula tercatat 2 bidang menjadi 1 bidang sebagaimana sertifikat Hak Pakai Nomor 74 |
| 4 | Dinas Pendidikan | 355.320.000,00 | Tanah yang tercatat di SDN 1 Tunggalroso merupakan tanah milik Desa Tunggalroso sebagaimana Surat Keterangan Kepala Desa Tunggalroso |
| | | 24.246.000,00 | Tanah Korwil Dinas Pendidikan Kecamatan sempor yang merupakan tanah milik PGRI |
| 5 | Dinas Pertanian dan Pangan | 12.082.000,00 | Pencatatan ganda tanah sawah irigasi di Desa Purbowangi Kecamatan Buayan sebagaimana Sertifikat Hak Pakai Nomor 19 register 1 |
| 6 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 55.885.800,00 | Pencatatan ganda tanah tambak di Desa Tanggulung Kecamatan Klirong sebagaimana Sertifikat Hak Pakai Nomor 363 Tahun 2021 register 11 |
| 7 | Kecamatan Karanggayam | 3.260.400,00 | Pencatatan ganda dengan tanah bangunan kantor pemerintah pada Dinas Perhubungan register 3 |
| 8 | Kecamatan Padureso | 25.000.000,00 | Merupakan tanah milik Kementerian PUPR |
| | | 7.466.908.620,00 | |



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

- 3) Sedangkan pengurangan Aset Tetap Tanah karena reklasifikasi terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa biaya *Staking Out* Tanah untuk Jembatan Brangkal II Desa Klopogodo.

Pemerintah Kabupaten Kebumen senantiasa berupaya meningkatkan pengamanan aset tanah dengan melakukan pensertifikatan tanah-tanah milik Pemerintah Daerah. Dari total tanah milik Pemda sebanyak 2.313 bidang, sebanyak 1.410 bidang telah memiliki bukti kepemilikan berupa sertifikat yang disimpan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen.

5.3.5.1.2 Peralatan dan Mesin

31 Desember 2021
 Rp990.034.882.048

31 Desember 2020
 Rp870.303.689.719,00

Bertambah dan berkurangnya Aset Tetap Peralatan dan Mesin selama tahun 2021 disajikan sebagai berikut.

Tabel Bertambah dan Berkurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin

| Saldo Awal (Rp) | Penambahan | Pengurangan | Mutasi Bersih | 31 Desember 2020 |
|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) |
| 870.303.689.719,00 | 152.049.698.003,00 | 32.318.505.674,00 | 119.731.192.329,00 | 990.034.882.048,00 |

Penambahan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin dijelaskan sebagai berikut.

Tabel Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin

| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|----|---|---------------------------|
| 1. | Belanja Modal | 66.350.359.438,00 |
| 2. | Belanja Modal BOS/BLUD | 45.733.544.062,00 |
| 3. | Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa | 1.057.802.630,00 |
| 4. | Mutasi antar OPD | 8.738.718.595,00 |
| 5. | Perolehan dari Hibah | 29.637.480.348,00 |
| 6. | Aset yang Belum/Baru Tercatat | 144.920.730,00 |
| 7. | Koreksi Pencatatan | 86.310.000,00 |
| 8. | Penambahan dari Reklas | 300.562.200,00 |
| | Jumlah | 152.049.698.003,00 |

- 1) Penambahan Aset Peralatan dan Mesin dari Belanja Modal tahun 2021 sebesar Rp66.350.359.438,00 per SKPD disajikan sebagaimana **Lampiran 8**.
- 2) Penambahan Aset Peralatan dan Mesin dari Belanja Modal BOS/BLUD sebesar Rp45.733.544.062,00 berasal dari Belanja Modal Dana BOS senilai Rp23.613.813.752,00 dan Belanja Modal Peralatan Mesin BLUD senilai Rp22.119.730.310,00, dengan rincian tercantum dalam tabel.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

Tabel Penambahan Aset Peralatan dan Mesin dari Belanja Barang dan Jasa

| No | OPD | Nilai (Rp) | BOS/BLUD |
|---------------|----------------------------------|--------------------------|---------------|
| 1 | Dinas Pendidikan (Korwil Biddik) | 15.719.124.605,00 | BOS SD Negeri |
| 2 | SMP Negeri | 7.894.689.147,00 | BOS |
| 3 | Puskesmas | 6.302.393.372,00 | BLUD |
| 4 | RS Dr. Sudirman | 13.867.921.875,00 | BLUD |
| 5 | RSUD Prembun | 1.949.415.063,00 | BLUD |
| JUMLAH | | 45.733.544.062,00 | |

- 3) Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berasal dari Belanja Barang dan Jasa disajikan sebagai berikut.

Tabel Penambahan Aset Peralatan dan Mesin dari Belanja Barang dan Jasa

| No | OPD | Jumlah Barang | Nilai (Rp) |
|---------------|--|---------------|-------------------------|
| 1 | Bagian Umum | 33 | 30.200.000,00 |
| 2 | Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman | 142 | 1.000.947.130,00 |
| 3 | Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah | 1 | 9.655.500,00 |
| 4 | Kecamatan Petanahan | 1 | 17.000.000,00 |
| Jumlah | | 177 | 1.057.802.630,00 |

- 4) Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena mutasi antar SKPD disajikan dalam tabel **Lampiran 9**.
- 5) Rincian penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin perolehan dari Hibah disajikan sebagai berikut



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

Tabel Penambahan karena Hibah

| NO | NAMA OPD | NILAI | KETERANGAN |
|----|---------------------------------------|--------------------------|---|
| 1 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 546.624.592,00 | Hibah dari BNPB (Sepeda Motor) |
| 2 | Puskesmas Ambal I | 571.750.000,00 | Hibah dari Provinsi (Alat Laboratorium) |
| 3 | Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman | 25.353.082.956,00 | Hibah dari Kemenkes (Alat Kedokteran) |
| 4 | Dinas Pendidikan | 3.062.910.000,00 | Hibah dari Kemendiknas dan Komite |
| 5 | Dinas Pertanian dan Pangan | 38.929.000,00 | Hibah dari Kementerian Pertanian |
| 6 | Kecamatan Kebumen | 594.000,00 | Hibah dari KPU (Thermogun) |
| 7 | Kelurahan Tamanwinangun | 594.000,00 | Hibah dari KPU (Thermogun) |
| 8 | Kelurahan Panjer | 594.000,00 | Hibah dari KPU (Thermogun) |
| 9 | Kelurahan Kebumen | 5.914.000,00 | Hibah dari KPU (Thermogun) |
| 10 | Kelurahan Bumirejo | 5.634.000,00 | Hibah dari KPU (Thermogun) |
| 11 | Kelurahan Selang | 594.000,00 | Hibah dari KPU (Thermogun) |
| 12 | Kecamatan Alian | 594.000,00 | Hibah dari KPU (Thermogun) |
| 13 | Kecamatan Karangsembung | 594.000,00 | Hibah dari KPU (Thermogun) |
| 14 | Kecamatan Prembun | 594.000,00 | Hibah dari KPU (Thermogun) |
| 15 | Kecamatan Mirit | 874.000,00 | Hibah dari KPU (Thermogun) |
| 16 | Kecamatan Kutowinangun | 594.000,00 | Hibah dari KPU (Thermogun) |
| 17 | Kecamatan Ambal | 874.000,00 | Hibah dari KPU (Thermogun) |
| 18 | Kecamatan Buluspesantren | 594.000,00 | Hibah dari KPU (Thermogun) |
| 19 | Kecamatan Pejagoan | 594.000,00 | Hibah dari KPU (Thermogun) |
| 20 | Kecamatan Klirong | 594.000,00 | Hibah dari KPU (Thermogun) |
| 21 | Kecamatan Petanahan | 594.000,00 | Hibah dari KPU (Thermogun) |
| 22 | Kecamatan Karanganyar | 594.000,00 | Hibah dari KPU (Thermogun) |
| 23 | Kelurahan Panjatan | 594.000,00 | Hibah dari KPU (Thermogun) |
| 24 | Kelurahan Karanganyar | 594.000,00 | Hibah dari KPU (Thermogun) |
| 25 | Kelurahan Jatiluhur | 2.274.000,00 | Hibah dari KPU (Thermogun) |
| 26 | Kelurahan Plarangan | 3.674.000,00 | Hibah dari KPU (Thermogun) |
| 27 | Kecamatan Karanggayam | 594.000,00 | Hibah dari KPU (Thermogun) |
| 28 | Kecamatan Adimulyo | 594.000,00 | Hibah dari KPU (Thermogun) |
| 29 | Kecamatan Kuwarasan | 594.000,00 | Hibah dari KPU (Thermogun) |
| 30 | Kecamatan Puring | 594.000,00 | Hibah dari KPU (Thermogun) |
| 31 | Kecamatan Gombong | 594.000,00 | Hibah dari KPU (Thermogun) |
| 32 | Kelurahan Gombong | 3.954.000,00 | Hibah dari KPU (Thermogun) |
| 33 | Kelurahan Wonokriyo | 4.514.000,00 | Hibah dari KPU (Thermogun) |
| 34 | Kecamatan Sempor | 594.000,00 | Hibah dari KPU (Thermogun) |
| 35 | Kecamatan Buayan | 594.000,00 | Hibah dari KPU (Thermogun) |
| 36 | Kecamatan Rowokele | 874.000,00 | Hibah dari KPU (Thermogun) |
| 37 | Kecamatan Ayah | 874.000,00 | Hibah dari KPU (Thermogun) |
| 38 | Kecamatan Sadang | 874.000,00 | Hibah dari KPU (Thermogun) |
| 39 | Kecamatan Poncowarno | 19.593.800,00 | Hibah dari KPU (Thermogun) |
| 40 | Kecamatan Padureso | 594.000,00 | Hibah dari KPU (Thermogun) |
| 41 | Kecamatan Bonorowo | 594.000,00 | Hibah dari KPU (Thermogun) |
| | JUMLAH | 29.637.480.348,00 | |



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

- 6) Rincian penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang baru tercatat disajikan sebagai berikut.

Tabel Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang Baru Tercatat

| No | Nama OPD | Nilai (Rp) |
|----|---|-----------------------|
| 1 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 25.090.000,00 |
| 2 | Dinas Pendidikan | 63.551.730,00 |
| 3 | Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 31.790.000,00 |
| 4 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 7.914.000,00 |
| 5 | Dinas Pertanian dan Pangan | 16.575.000,00 |
| | Jumlah | 144.920.730,00 |

- 7) Mutasi Tambah Peralatan dan Mesin karena Koreksi Pencatatan terdapat pada SKPD sebagai berikut.

Tabel Koreksi Tambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin

| No | OPD | Nilai (Rp) |
|----|---|----------------------|
| 1 | Dinas Pendidikan | 21.885.000,00 |
| 2 | Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 62.425.000,00 |
| 3 | Kecamatan Puring | 2.000.000,00 |
| | Jumlah | 86.310.000,00 |

- 8) Mutasi tambah Aset Peralatan dan Mesin yang berasal dari Reklas terdapat pada SKPD sebagai berikut:

Tabel Reklas Aset Tetap Peralatan dan Mesin

| No | OPD | Nilai (Rp) |
|----|---|-----------------------|
| 1 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 25.619.000,00 |
| 2 | Puskesmas Petanahan | 32.395.000,00 |
| 3 | Puskesmas Gombang I | 197.850.000,00 |
| 4 | Dinas Pendidikan | 39.318.200,00 |
| 5 | Kelurahan Wonokriyo | 5.380.000,00 |
| | Jumlah | 300.562.200,00 |

Pengurangan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin tahun 2021 dijelaskan sebagai berikut.

Tabel Pengurangan Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin

| No. | Uraian | Jumlah (Rp) |
|-----|--|--------------------------|
| 1. | Diusulkan Hapus karena Kondisi Rusak Berat | 19.961.433.060,00 |
| 2. | Mutasi antar OPD | 8.738.718.595,00 |
| 3. | Koreksi Pencatatan | 2.504.227.516,00 |
| 4. | Pengurangan karena Reklas | 1.114.126.503,00 |
| | Jumlah | 32.318.505.674,00 |

- 1) Mutasi kurang Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp19.961.433.060,00 yang di reklas ke Aset Lainnya merupakan usulan penghapusan yang diajukan oleh SKPD terhadap barang-barang dengan kondisi rusak berat.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

- 2) Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena mutasi antar SKPD sama dengan mutasi penambahannya sebagaimana tabel **Lampiran 9**.
- 3) Mutasi Kurang Aset Peralatan dan Mesin karena koreksi pencatatan senilai Rp2.504.227.516,00 disebabkan karena pengadaan belanja modal yang tidak memenuhi kategori aset tetap. Rincian sebagai berikut :

Tabel Pengurangan Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena Koreksi Pencatatan

| No | OPD | Nilai (Rp) |
|----|---|-------------------------|
| 1 | Bagian Umum | 28.651.000,00 |
| 2 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 812.875.100,00 |
| 3 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 2.880.000,00 |
| 4 | Puskesmas Puring | 2.720.200,00 |
| 5 | Puskesmas Petanahan | 6.000.000,00 |
| 6 | Puskesmas Prembun | 300.000,00 |
| 7 | Puskesmas Kuwarasan | 1.039.900,00 |
| 8 | Puskesmas Gombang II | 9.200.000,00 |
| 9 | Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman | 71.958.500,00 |
| 10 | Rumah Sakit Umum Daerah Prembun | 50.815.572,00 |
| 11 | Dinas Pendidikan | 1.394.932.369,00 |
| 12 | Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 88.577.000,00 |
| 13 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 1.355.400,00 |
| 14 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 682.000,00 |
| 15 | Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata | 1.160.000,00 |
| 16 | Satuan Polisi Pamong Praja | 5.317.800,00 |
| 17 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 3.448.675,00 |
| 18 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | 1.104.000,00 |
| 19 | Kelurahan Selang | 198.000,00 |
| 20 | Kecamatan Alian | 56.000,00 |
| 21 | Kecamatan Ambal | 495.600,00 |
| 22 | Kecamatan Buluspesantren | 192.000,00 |
| 23 | Kecamatan Pejagoan | 943.000,00 |
| 24 | Kecamatan Kuwarasan | 17.000.000,00 |
| 25 | Kecamatan Puring | 2.000.000,00 |
| 26 | Kecamatan Padureso | 325.400,00 |
| | Jumlah | 2.504.227.516,00 |

- 4) Rincian pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena dilakukan reklasifikasi adalah sebagaimana tabel berikut



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

Tabel Pengurangan Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena Reklas

| No | OPD | Nilai (Rp) |
|----|---|-------------------------|
| 1 | Bagian Umum | 3.835.000,00 |
| 2 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 801.000,00 |
| 3 | Dinas Perhubungan | 2.060.000,00 |
| 4 | Dinas Kesehatan | 261.800,00 |
| 5 | Puskesmas Ayah II | 1.566.000,00 |
| 6 | Puskesmas Buayan | 200.000,00 |
| 7 | Puskesmas Puring | 875.000,00 |
| 8 | Puskesmas Petanahan | 12.815.499,00 |
| 9 | Puskesmas Buluspesantren I | 555.000,00 |
| 10 | Puskesmas Bulus Pesantren II | 2.156.500,00 |
| 11 | Puskesmas Ambal I | 4.500.000,00 |
| 12 | Puskesmas Bonorowo | 795.000,00 |
| 13 | Puskesmas Prembun | 14.521.200,00 |
| 14 | Puskesmas Padureso | 246.000,00 |
| 15 | Puskesmas Kutowinangun | 9.440.000,00 |
| 16 | Puskesmas Poncowarno | 1.320.000,00 |
| 17 | Puskesmas Kebumen I | 14.455.010,00 |
| 18 | Puskesmas Kebumen II | 2.052.000,00 |
| 19 | Puskesmas Sruweng | 12.880.000,00 |
| 20 | Puskesmas Adimulyo | 781.000,00 |
| 21 | Puskesmas Kuwarasan | 3.868.400,00 |
| 22 | Puskesmas Rowokele | 1.110.000,00 |
| 23 | Puskesmas Sempor I | 5.072.100,00 |
| 24 | Puskesmas Gombang I | 4.631.700,00 |
| 25 | Puskesmas Gombang II | 900.000,00 |
| 26 | Puskesmas Karanganyar | 9.000.000,00 |
| 27 | Puskesmas Sadang | 2.456.000,00 |
| 28 | Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediman | 10.691.850,00 |
| 29 | Rumah Sakit Umum Daerah Prembun | 883.982,00 |
| 30 | Dinas Pendidikan | 950.143.562,00 |
| 31 | Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 4.285.500,00 |
| 32 | Dinas Pertanian dan Pangan | 6.147.400,00 |
| 33 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 546.000,00 |
| 34 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 1.150.000,00 |
| 35 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 1.129.000,00 |
| 36 | Kelurahan Kebumen | 5.320.000,00 |
| 37 | Kelurahan Bumirejo | 5.400.000,00 |
| 38 | Kecamatan Alian | 360.000,00 |
| 39 | Kecamatan Mirit | 280.000,00 |
| 40 | Kecamatan Ambal | 280.000,00 |
| 41 | Kecamatan Petanahan | 330.000,00 |
| 42 | Kelurahan Jatiluhur | 1.680.000,00 |
| 43 | Kelurahan Plarangan | 3.080.000,00 |
| 44 | Kecamatan Puring | 900.000,00 |
| 45 | Kelurahan Gombang | 3.360.000,00 |
| 46 | Kelurahan Wonokriyo | 3.920.000,00 |
| 47 | Kecamatan Rowokele | 280.000,00 |
| 48 | Kecamatan Ayah | 280.000,00 |
| 49 | Kecamatan Sadang | 280.000,00 |
| 50 | Kecamatan Poncowarno | 245.000,00 |
| | Jumlah | 1.114.126.503,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

5.3.5.1.3 Gedung dan Bangunan

31 Desember 2021
Rp1.633.602.684.010,00

31 Desember 2020
Rp1.519.382.588.544,00

Bertambah dan berkurangnya Aset Tetap Gedung dan Bangunan selama tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel Bertambah dan Berkurang Aset Tetap Gedung dan Bangunan

| 31 Desember 2020 | Penambahan | Pengurangan | Mutasi Bersih | 31 Desember 2021 |
|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| | (Rp) | (Rp) | (Rp) | |
| 1.519.382.588.544,00 | 171.449.655.306,00 | 57.229.559.840,00 | 114.220.095.466,00 | 1.633.602.684.010,00 |

Penambahan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan terdiri dari berikut.

Tabel Penambahan Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan

| No. | Uraian | Jumlah (Rp) |
|-----|---|---------------------------|
| 1. | Belanja Modal | 39.396.168.705,00 |
| 2. | Belanja Modal BLUD | 5.431.376.600,00 |
| 3. | Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa | 6.781.950.477,00 |
| 4. | Mutasi antar OPD | 51.702.941.306,00 |
| 5. | Perolehan dari Hibah | 63.204.629.308,00 |
| 6. | Aset yang belum/baru tercatat | 483.620.800,00 |
| 7. | Koreksi pencatatan | 1.135.108.360,00 |
| 8. | Penambahan dari Reklas | 3.313.859.750,00 |
| | Jumlah | 171.449.655.306,00 |

- 1) Penambahan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Belanja Modal disajikan sebagai berikut.

Tabel Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2021

| No | Nama OPD | Jumlah (Rp) |
|----|---|--------------------------|
| 1 | Bagian Umum | 18.410.000,00 |
| 2 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 388.019.600,00 |
| 3 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | 592.912.000,00 |
| 4 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 1.963.324.000,00 |
| 5 | Dinas Perhubungan | 814.000,00 |
| 6 | Dinas Kesehatan | 13.776.529.197,00 |
| 7 | Dinas Pendidikan | 18.088.493.368,00 |
| 8 | Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 10.000.000,00 |
| 9 | Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 383.362.000,00 |
| 10 | Dinas Pertanian dan Pangan | 1.832.466.750,00 |
| 11 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 1.416.124.076,00 |
| 12 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 353.861.714,00 |
| 13 | Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata | 570.120.000,00 |
| 14 | Kecamatan Prembun | 1.732.000,00 |
| | JUMLAH | 39.396.168.705,00 |

- 2) Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Belanja Modal BLUD senilai Rp5.431.376.600,00 secara rinci disajikan sebagai berikut:



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021**

Tabel Belanja Modal BLUD Gedung dan Bangunan Tahun 2021

| No | Nama OPD | Jumlah (Rp) |
|----|---------------------------------------|-------------------------|
| 1 | Puskesmas Buayan | 201.615.100,00 |
| 2 | Puskesmas Puring | 39.500.000,00 |
| 3 | Puskesmas Petanahan | 198.659.000,00 |
| 4 | Puskesmas Klirong I | 30.000.000,00 |
| 5 | Puskesmas Bulus Pesantren II | 10.000.000,00 |
| 6 | Puskesmas Pejagoan | 18.467.000,00 |
| 7 | Puskesmas Sempor I | 390.758.000,00 |
| 8 | Puskesmas Gombong I | 197.850.000,00 |
| 9 | Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman | 4.344.527.500,00 |
| | JUMLAH | 5.431.376.600,00 |

- 3) Penambahan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa disajikan sebagai berikut.

**Tabel Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan
Dari Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa**

| No. | Uraian | Jumlah (Rp) |
|-----|--|----------------------|
| 1 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2.482.993.508,00 |
| 2 | Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman | 4.051.103.969,00 |
| 3 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 172.367.000,00 |
| 4 | Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah | 10.000.000,00 |
| 5 | Kecamatan Bonorowo | 65.486.000,00 |
| | Jumlah | 75.486.000,00 |

- 4) Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari mutasi antar SKPD, disajikan disajikan dalam tabel **Lampiran 10**.
- 5) Rincian penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari perolehan hibah disajikan pada SKPD sebagai berikut.

Tabel Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Hibah

| No. | OPD | Nilai (Rp) | Keterangan |
|-----|---|--------------------------|--|
| 1 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | 5.493.471.150,00 | Hibah dari Pengembang berupa PSU Perumahan Jatimulyo Alian, Perumahan Tamanwinangun Indah, Perumahan Selang dan Perumahan Griya Jatisari Indah |
| 2 | Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman | 24.183.553.658,00 | Hibah dari Kementerian Kesehatan |
| 3 | Dinas Pendidikan | 176.797.000,00 | Hibah dari Komite Baangunan SMP Negeri 1 Pejagoan dan SMP Negeri 2 Karanggayam |
| 4 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 33.350.807.500,00 | Hibah dari Kementerian Perdagangan (Bangunan Pasar Kutowinangun dan Pasar Kabekelan) |
| | Jumlah | 63.204.629.308,00 | |

- 6) Rincian penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp483.620.200,00 karena barang baru dicatat ada pada Dinas Pendidikan berupa bangunan gedung pendidikan SD Negeri Pekunden Kecamatan Kutowinangun dan SMP Negeri 1 Pejagoan.
- 7) Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena koreksi pencatatan adalah sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

Tabel Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Karena Koreksi Pencatatan

| No. | OPD | Nilai (Rp) | Keterangan |
|-----|--|----------------------|---|
| 1. | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 32.736.000,00 | Koreksi penggabungan nilai bangunan Rumah Dinas DPU |
| 2. | Dinas Pendidikan | 314.219.000,00 | Koreksi pencatatan bangunan bersejarah dan bangunan gedung SD Negeri 1 Gunungsari Kecamatan Karanggayam |
| 3. | Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata | 788.153.360,00 | Koreksi pencatatan bangunan di lokasi wisata Pantai Logending |
| | Jumlah | 1.135.108.360 | |

- 8) Sedangkan Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena reklas adalah sebagai berikut.

Tabel Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Karena Penambahan dari Reklas

| No. | OPD | Nilai (Rp) | Keterangan |
|-----|-------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| 1 | Dinas Kesehatan | 2.997.399.750,00 | reklas dari KDP |
| 2 | Dinas Pendidikan | 243.896.000,00 | |
| 3 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 72.564.000,00 | reklas dari KDP |
| | JUMLAH | 3.313.859.750,00 | |

Penjelasan atas Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut.

Tabel Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan

| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|----|---|--------------------------|
| 1. | Direklas ke Aset Lain-lain (diusulkan hapus karena kondisi Rusak Berat) | 2.924.462.460,00 |
| 2. | Mutasi antar OPD | 51.702.941.306,00 |
| 3. | Koreksi pencatatan | 1.393.845.013,00 |
| 4. | Reklas | 1.208.311.061,00 |
| | Jumlah | 57.229.559.840,00 |

- 1) Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena reklas ke Aset Lain-lain atas barang kondisi rusak berat dan diusulkan penghapusan, adalah sebagai berikut.

Tabel Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Karena Diusulkan Hapus

| No. | OPD | Jumlah Barang | Nilai (Rp) |
|-----|--|---------------|-------------------------|
| 1 | Puskesmas Ayah I | 2 | 545.000.000,00 |
| 2 | Puskesmas Buayan | 4 | 326.757.000,00 |
| 3 | Puskesmas Pejagoan | 1 | 92.752.000,00 |
| 4 | Puskesmas Adimulyo | 1 | 80.080.000,00 |
| 5 | Dinas Pendidikan | 3 | 504.640.000,00 |
| 6 | Dinas Pertanian dan Pangan | 5 | 354.275.100,00 |
| 7 | Inspektorat | 3 | 232.805.000,00 |
| 8 | Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata | 1 | 788.153.360,00 |
| | Jumlah | 20 | 2.924.462.460,00 |

- 2) Rincian pengurangan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp51.702.941.306,00 karena mutasi antar SKPD dijelaskan sebagaimana



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

penambahannya dapat dilihat sebagaimana tabel pada **Lampiran 10** Penambahan Karena Mutasi Aset Tetap Gedung Dan Bangunan Antar SKPD di atas.

- 3) Pengurangan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena koreksi pencatatan dijelaskan sebagai berikut.

Tabel Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena Koreksi Pencatatan

| No. | OPD | Nilai (Rp) | Keterangan |
|-----|--|-------------------------|---|
| 1 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 32.736.000,00 | Koreksi penggabungan nilai bangunan Rumah Dinas DPU |
| 2 | Dinas Perhubungan | 814.000,00 | Koreksi belanja modal berupa persediaan (ATK) |
| 3 | Dinas Pendidikan | 357.092.000,00 | Koreksi pencatatan bangunan bersejarah dan bangunan gedung SD Negeri 1 Gunungsari Kecamatan Karanggayam |
| 4 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 180.883.653,00 | Koreksi belanja modal berupa persediaan (ATK) dan honor yang tidak ada pembangunan fisik gedung |
| 5 | Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata | 820.587.360,00 | Koreksi pencatatan bangunan di lokasi wisata Pantai Logending |
| 6 | Kecamatan Prembun | 1.732.000,00 | Koreksi belanja modal bangunan berupa persediaan |
| | Jumlah | 1.393.845.013,00 | |

- 4) Pengurangan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena reklasifikasi dijelaskan sebagai berikut

Tabel Pengurangan Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena Reklasifikasi

| No | Nama OPD | Nilai (Rp) | Reklas Ke |
|----|-------------------------------------|----------------------|---|
| 1 | Dinas Kesehatan | 446.725.000,00 | Reklas ke Aset Tetap Tanah (Tanah Puskesmas Bonorowo) |
| 2 | Puskesmas Sempor I | 390.758.000,00 | Reklas ke KDP (Bangunan Aula) |
| 3 | Puskesmas Gombang I | 197.850.000,00 | Reklas ke Peralatan dan Mesin (Alat IPAL) |
| 4 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 172.978.061,00 | Reklas ke KDP (DED Pembangunan Pasar) |
| | | 1.208.311.061 | |

5.3.5.1.4 Jalan Irigasi dan Jaringan

31 Desember 2021
 Rp2.662.630.755.709,25

31 Desember 2020
 Rp2.559.955.132.444,25

Bertambah dan berkurangnya Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan selama tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel Bertambah dan Berkurang Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan

| Saldo Awal (Rp) | Penambahan | Pengurangan | Mutasi Bersih | 31 Desember 2020 |
|----------------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------------|
| | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) |
| 2.559.955.132.444,25 | 111.374.602.661,00 | 8.698.979.396,00 | 102.675.623.265,00 | 2.662.630.755.709,25 |

Penambahan Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan berasal dari berikut.



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021**

Tabel Penambahan Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan Tahun 2021

| No. | Uraian | Jumlah (Rp) |
|-----|----------------------------------|---------------------------|
| 1. | Belanja Modal | 96.987.161.413,00 |
| 2. | Belanja Modal BLUD | 466.936.350,00 |
| 3. | Kapitalisasi Belanja Barang/Jasa | 193.042.000,00 |
| 4. | Mutasi antar OPD | 39.915.309,00 |
| 5. | Hibah | 8.903.956.540,00 |
| 6. | Aset baru dicatat | 52.351.149,00 |
| 7. | Penambahan Reklas | 4.731.239.900,00 |
| | Jumlah | 111.374.602.661,00 |

- 1) Penambahan Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan yang berasal dari Belanja Modal tahun 2021 disajikan sebagai berikut.

Tabel Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan Tahun 2021

| No | Nama OPD | Jumlah (Rp) |
|----|---|--------------------------|
| 1 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 84.889.498.542,00 |
| 2 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | 6.341.533.960,00 |
| 3 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 2.604.393.000,00 |
| 4 | Dinas Perhubungan | 2.917.276.911,00 |
| 5 | Kelurahan Panjer | 34.730.000,00 |
| 6 | Kelurahan Plarangan | 194.349.000,00 |
| 7 | Kelurahan Wonokriyo | 5.380.000,00 |
| | JUMLAH | 96.987.161.413,00 |

- 2) Penambahan nilai Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan yang berasal dari Belanja BLUD senilai Rp466.936.350,00 dijelaskan sebagai berikut.

Tabel Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan Tahun 2021

| No | Nama OPD | Jumlah (Rp) |
|----|--------------------------|-----------------------|
| 1 | Puskesmas Buayan | 198.063.350,00 |
| 2 | Puskesmas Petanahan | 32.395.000,00 |
| 3 | Puskesmas Bonorowo | 4.500.000,00 |
| 4 | Puskesmas Sruweng | 192.728.000,00 |
| 5 | Puskesmas Karanganyar | 25.250.000,00 |
| 6 | Puskesmas Karanggayam II | 14.000.000,00 |
| | JUMLAH | 466.936.350,00 |

- 3) Penambahan nilai Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan yang berasal dari kapitalisasi belanja barang dan jasa senilai Rp24.742.000,00 ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa DED atas pembangunan SPAM Tahun 2021, dan pada RS Dr. Soedirman senilai Rp168.300.000,00 berupa Jaringan Listrik bawah tanah.
- 4) Penambahan nilai Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan karena Mutasi antar SKPD tahun 2021 dijelaskan sebagai berikut.

Tabel Penambahan Aset Jalan Irigasi dan Jaringan karena Mutasi antar SKPD Tahun 2021

| No | OPD Asal | OPD Penerima | Harga Perolehan (Rp) | Keterangan |
|----|---------------|--|----------------------|-------------------------------------|
| 1 | DPU-PR | Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata | 39.915.309,00 | Jalan Kompleks Stadion Candradimuka |
| | Jumlah | | 39.915.309 | |

- 5) Penambahan Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan dari hibah senilai Rp8.903.956.540,00 ada pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

Lingkungan Hidup berupa PSU berupa jalan pada Perumahan Hibah dari Pengembang berupa PSU Perumahan Jatimulyo Alian, Perumahan Tamanwinangun Indah, Perumahan Griya Jatisari Indah .

- 6) Penambahan nilai Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan karena koreksi nilai berupa jalan Kabupaten ruas Jalan Kebulusan-Sidomulyo (ruas No. 204) senilai Rp52.351.149,00.
- 7) Penambahan nilai Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan karena Reklasifikasi terdapat pada SKPD sebagai berikut.

Tabel Penambahan Jalan Irigasi dan Jaringan karena Reklas

| No | OPD | Nilai (Rp) | Reklas dari |
|----|---|-------------------------|-----------------|
| 1 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 4.564.153.500,00 | Reklas dari KDP |
| 2 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | 71.500.400,00 | Reklas dari KDP |
| 3 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 95.586.000,00 | Reklas dari KDP |
| | Jumlah | 4.731.239.900,00 | |

Pengurangan nilai Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan disebabkan sebagai berikut.

Tabel Pengurangan Aset Jalan Irigasi dan Jaringan

| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|----|--------------------|-------------------------|
| 1. | Mutasi ke OPD lain | 39.915.309,00 |
| 2. | Koreksi | 7.927.089.336,00 |
| 3. | Reklas | 731.974.751,00 |
| | Jumlah | 8.698.979.396,00 |

- 1) Rincian pengurangan nilai Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp39.915.309,00 karena mutasi antar SKPD tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel Penambahan Karena Mutasi antar SKPD di atas.
- 2) Mutasi Kurang Aset Jalan Irigasi dan Jaringan karena koreksi sebesar Rp7.927.089.336,00 terdapat pada SKPD sebagai berikut.

Tabel Pengurangan Aset Jalan Irigasi dan Jaringan Karena Koreksi

| No | OPD | Nilai (Rp) | Keterangan |
|----|---|-------------------------|--|
| 1 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 7.907.089.336,00 | koreksi dobel catat jalan dengan jalan kelurahan |
| 2 | Kecamatan Klirong | 5.000.000,00 | koreksi bukan Aset Tetap (tambah daya) |
| 3 | Kecamatan Karanggayam | 5.000.000,00 | koreksi bukan Aset Tetap (tambah daya) |
| 4 | Kecamatan Kuwarasan | 5.000.000,00 | koreksi bukan Aset Tetap (tambah daya) |
| 5 | Kecamatan Poncowarno | 5.000.000,00 | koreksi bukan Aset Tetap (tambah daya) |
| | JUMLAH | 7.927.089.336,00 | |

- 3) Pengurangan karena reklasifikasi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan senilai Rp731.974.751,00 sebagaimana rincian pada tabel berikut.



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021**

Tabel Pengurangan Karena Reklasifikasi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan

| No | OPD | Nilai (Rp) | Reklas ke |
|----|---|-----------------------|---|
| 1 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 644.963.751,00 | reklas ke KDP dan Aset Lainnya |
| 2 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | 49.236.000,00 | reklas ke KDP |
| 3 | Puskesmas Petanahan | 32.395.000,00 | reklas ke Peralatan Mesin |
| 4 | Kelurahan Wonokriyo | 5.380.000,00 | reklas ke Peralatan Mesin (alat kantor lainnya) |
| | Jumlah | 731.974.751,00 | |

5.3.5.1.5 Aset Tetap Lainnya

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| <u>31 Desember 2021</u> | <u>31 Desember 2020</u> |
| Rp138.004.707.625,00 | Rp132.900.631.859,00 |

Bertambah dan berkurangnya Aset Tetap Lainnya selama tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel Bertambah dan Berkurang Aset Tetap Lainnya

| Saldo Awal | Penambahan | Pengurangan | Mutasi Bersih | 31 Desember 2020 |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) |
| 132.900.631.859,00 | 7.735.472.261,00 | 2.631.396.495,00 | 5.104.075.766,00 | 138.004.707.625,00 |

Penambahan Aset Tetap Lainnya selama tahun 2021 terdiri dari berikut ini.

Tabel Penambahan Aset Tetap Lainnya Tahun 2021

| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|----|--------------------------|-------------------------|
| 1. | Belanja Modal | 419.205.950,00 |
| 2. | Belanja Modal BOS/BLUD | 7.263.482.811,00 |
| 3. | Perolehan dari Hibah | 39.184.500,00 |
| 4. | Penambahan karena reklas | 13.599.000,00 |
| | Jumlah | 7.735.472.261,00 |

- 1) Penambahan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp419.205.950,00 berasal dari belanja modal SKPD berikut.

Tabel Penambahan Aset Tetap Lainnya dari Belanja Modal Tahun 2020

| No | Nama OPD | Nilai (Rp) | Keterangan |
|----|---|-----------------------|--------------------------------------|
| 1 | Bagian Hukum | 4.999.350,00 | Buku Peraturan Perundang-undangan |
| 2 | Dinas Perhubungan | 57.420.000,00 | Barang bercorak kebudayaan (diorama) |
| 3 | Dinas Kesehatan | 12.190.000,00 | Aplikasi |
| 4 | Dinas Pendidikan | 92.199.000,00 | Buku dan Alat Kesenian |
| 5 | Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 2.710.000,00 | Software Microsoft |
| 6 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 2.997.500,00 | Lisensi zoom |
| 7 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 29.810.000,00 | Aplikasi |
| 8 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 1.500.000,00 | Buku |
| 9 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 97.000.000,00 | Aplikasi |
| 10 | Inspektorat | 19.652.000,00 | Software Microsoft |
| 11 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 39.160.000,00 | Software Antivirus |
| 12 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | 59.568.100,00 | Buku |
| | Jumlah | 246.690.100,00 | |



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

- 2) Penambahan Aset Tetap Lainnya dari Belanja Modal BOS dan Belanja Modal BLUD disajikan sebagai berikut.

Tabel Penambahan Aset Tetap Lainnya dari Belanja Modal BOS/BLUD Tahun 2021

| No. | SKPD | Jumlah | Ket |
|-----|--------------------------------------|------------------|------------------|
| 1 | Puskesmas Petanahan | 79.600.000,00 | Aplikasi |
| 2 | Puskesmas Bulus Pesantren II | 600.000,00 | Tanaman |
| 3 | Puskesmas Mirit | 2.700.000,00 | Software Windows |
| 4 | Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediman | 629.782.000,00 | Aplikasi SIMRS |
| 5 | Rumah Sakit Umum Daerah Prembun | 4.740.000,00 | Buku referensi |
| 6 | Dinas Pendidikan | 4.201.246.281,00 | Belanja BOS SD |
| 7 | Dinas Pendidikan | 2.344.814.530,00 | Belanja BOS SMP |

- 3) Mutasi tambah Aset Tetap Lainnya yang berasal dari perolehan hibah ada pada SKPD sebagai berikut.

Tabel Penambahan Aset Tetap Lainnya Karena Hibah Tahun 2021

| No | OPD | Nilai | Keterangan |
|----|----------------------|----------------------|--|
| 1 | Dinas Pendidikan | 784.500,00 | Hibah dari komite pada SD 2 Gemeksekti Kecamatan Kebumen |
| 2 | SMP Negeri 1 Klirong | 38.400.000,00 | Buku dari Komite |
| | Jumlah | 39.184.500,00 | |

- 4) Mutasi tambah Aset Tetap Lainnya yang berasal dari reklasifikasi tahun 2021 ada pada SKPD Dinas Pendidikan (SD Negeri) senilai Rp13.599.000,00 berupa belanja BOS dengan rincian sebagai berikut.

Tabel Penambahan Aset Tetap Lainnya Karena Reklasifikasi Tahun 2021

| No | OPD | Nilai | Keterangan |
|----|--|----------------------|-----------------------------|
| 1 | SD Negeri Pencil Kecamatan Karangsembung | 550.000,00 | reklas dari peralatan mesin |
| 2 | SD Negeri 2 Prigi Kecamatan Pejagoan | 8.500.000,00 | reklas dari peralatan mesin |
| 3 | SD Negeri Kedaleman Kulon Kecamatan Puring | 4.549.000,00 | reklas dari peralatan mesin |
| | Jumlah | 13.599.000,00 | |

Pengurangan Aset Tetap Lainnya selama tahun 2021 disebabkan oleh berikut ini.

Tabel Pengurangan Aset Tetap Lainnya

| No | Uraian | Nilai (Rp) |
|----|---|-------------------------|
| 1. | Kondisi Rusak Berat/ Reklas ke Aset Lainnya | 897.269.370,00 |
| 4. | Koreksi | 851.496.925,00 |
| 5. | Reklas | 882.630.200,00 |
| | Jumlah | 2.631.396.495,00 |

- 1) Pengurangan Aset Tetap Lainnya yang berasal dari reklasifikasi ke Aset Lainnya karena kondisi rusak berat terletak pada SKPD sebagai berikut.

Tabel Pengurangan Aset Tetap Lainnya Karena Barang Rusak Berat/Diusulkan hapus Tahun 2021

| No | OPD | Nilai (Rp) |
|----|-------------------|-----------------------|
| 1 | Bagian Organisasi | 29.280.000,00 |
| 2 | Dinas Pendidikan | 855.057.572,00 |
| 3 | Inspektorat | 12.931.798,00 |
| | Jumlah | 897.269.370,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

- 2) Rincian pengurangan Aset Tetap Lainnya karena koreksi terletak pada SKPD sebagai berikut.

Tabel Pengurangan Aset Tetap Lainnya Karena Koreksi

| No | OPD | Nilai (Rp) |
|----|---|-----------------------|
| 1 | Puskesmas Mirit | 2.700.000,00 |
| 2 | Dinas Pendidikan | 786.987.425,00 |
| 3 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 2.997.500,00 |
| 4 | Inspektorat | 19.652.000,00 |
| 5 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 39.160.000,00 |
| | JUMLAH | 851.496.925,00 |

- 3) Rincian pengurangan Aset Tetap Lainnya karena reklasifikasi tahun 2021 dijelaskan sebagai berikut.

Tabel Pengurangan Aset Tetap Lainnya Karena Reklasifikasi

| No | OPD | Nilai (Rp) | Keterangan |
|----|---|-----------------------|--------------------------------------|
| 1 | Dinas Kesehatan | 12.190.000,00 | Reklas ke Aset Tak Berwujud/Software |
| 2 | Puskesmas Petanahan | 79.600.000,00 | Reklas ke Aset Tak Berwujud/Software |
| 3 | Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman | 629.782.000,00 | Reklas ke Aset Tak Berwujud/Software |
| 4 | Dinas Pendidikan | 31.538.200,00 | Reklas ke Peralatan dan Mesin |
| 5 | Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 2.710.000,00 | Reklas ke Aset Tak Berwujud/Software |
| 6 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 29.810.000,00 | Reklas ke Aset Tak Berwujud/Software |
| 7 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 97.000.000,00 | Reklas ke Aset Tak Berwujud/Software |
| | JUMLAH | 882.630.200,00 | |

5.3.5.1.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

| | |
|--------------------|---------------------|
| 31 Desember 2021 | 31 Desember 2020 |
| Rp5.277.333.875,00 | Rp12.276.936.657,00 |

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021 disajikan sebesar Rp5.277.333.875,00 secara rinci kami sajikan dalam tabel berikut

Tabel rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2021

| No | OPD | Nilai (Rp) | Keterangan |
|----|---|-------------------------|----------------------------------|
| 1 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 3.946.512.814,00 | DED yang belum dilaksanakan |
| 2 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | 98.829.000,00 | DED yang belum dilaksanakan |
| 3 | Dinas Kesehatan | 58.674.000,00 | DED yang belum dilaksanakan |
| 4 | Puskesmas Sempor I | 390.758.000,00 | Bangunan Aula Puskesmas Sempor I |
| 5 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 19.600.000,00 | DED yang belum dilaksanakan |
| 6 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 521.887.061,00 | DED yang belum dilaksanakan |
| 7 | Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata | 241.073.000,00 | DED yang belum dilaksanakan |
| | | 5.277.333.875,00 | |

5.3.5.1.7 Akumulasi Penyusutan

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| 31 Desember 2021 | 31 Desember 2020 |
| (Rp2.241.354.012.487,54) | (Rp1.940.935.286.173,54) |

Nilai akumulasi penyusutan per 31 Desember 2021 per jenis akun disajikan sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

Tabel Nilai Akumulasi Penyusutan per Jenis Akun

| No. | Uraian | Per 31 Desember 2021 | | |
|-----|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| | | Nilai Perolehan (Rp) | Akumulasi Penyusutan (Rp) | Nilai Buku (Rp) |
| 1. | Tanah | 798.158.085.264,55 | - | 798.158.085.264,55 |
| 2. | Peralatan dan Mesin | 990.034.882.048,00 | (721.439.025.023,00) | 268.595.857.025,00 |
| 3. | Gedung dan Bangunan | 1.633.602.684.010,00 | (354.021.003.235,00) | 1.279.581.680.775,00 |
| 4. | Jalan, Irigasi dan Jaringan | 2.662.630.755.709,25 | (1.165.893.984.229,54) | 1.496.736.771.479,71 |
| 5. | Aset Tetap Lainnya | 138.004.707.625,00 | - | 138.004.707.625,00 |
| 6. | Konstruksi Dalam Pengerjaan | 5.277.333.875,00 | - | 5.277.333.875,00 |
| | Jumlah | 6.227.708.448.531,80 | (2.241.354.012.487,54) | 3.986.354.436.044,27 |

5.3.5.2 Aset Lainnya

| | |
|----------------------|----------------------|
| 31 Desember 2021 | 31 Desember 2020 |
| Rp121.716.502.886,18 | Rp123.785.142.584,00 |

Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Kebumen disajikan secara neto setelah diperhitungkan akumulasi amortisasi, sebagai berikut.

Tabel Aset Lainnya

| Uraian | 31 Desember 2021 | 31 Desember 2020 | Kenaikan/ (Penurunan) (Rp) | % |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------|
| | (Rp) | (Rp) | | |
| Tagihan jangka Panjang | - | - | - | - |
| Kemitraan dengan Pihak Ketiga | 16.134.562.688,00 | 16.134.562.688,00 | - | - |
| Aset Tidak berwujud | 3.061.609.445,18 | 2.243.798.380,00 | 817.811.065,18 | 36,45 |
| Aset Lain-lain | 102.520.330.753,00 | 105.406.781.516,00 | (2.886.450.763,00) | (2,74) |
| Jumlah | 121.716.502.886,18 | 123.785.142.584,00 | (2.068.639.697,82) | (1,67) |

5.3.5.2.1 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

| | |
|---------------------|---------------------|
| 31 Desember 2021 | 31 Desember 2020 |
| Rp16.134.562.688,00 | Rp16.134.562.688,00 |

Kemitraan dengan Pihak Ketiga berupa aset Bangun Guna Serah atau *Built Operate Transfer (BOT)*. Aktiva lain-lain Built Operate Transfer adalah penyertaan Pemerintah Kabupaten dalam kemitraannya dengan pihak ketiga. Adapun nilai penyertaan sampai dengan tahun 2021 dan perinciannya adalah sebagai berikut.

Tabel Rincian Kemitraan dengan Pihak Ketiga

| Uraian | 31 Desember 2020 (Rp) |
|---|--------------------------|
| Tanah Pemkab HPL No.2, seluas 34.877m ² , di Pasar Gombang Wonokriyo | 15.379.170.688,00 |
| Tanah Pemkab HPL No.3, seluas 1.628m ² , di Pasar Gombang Wonokriyo | 755.392.000,00 |
| Jumlah | 16.134.562.688,00 |

Nilai *Built Operate Transfer* di atas merupakan *Built Operate Transfer* pada pembangunan pasar Wonokriyo Gombang. Sesuai Surat Perjanjian Nomor 511.2.1336 dan 081.KBBP-SI/X/1995 tanggal 10 Oktober 1995 yang dikuatkan dengan Keputusan Kementrian Dalam Negeri nomor 644.133-166 tanggal 5 Maret 1996 antara Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan PT Karsa Bayu Bangun Perkasa dalam pembangunan pasar Wonokriyo Gombang, Pemerintah Kabupaten Kebumen menyertakan modal berupa tanah Milik Pemerintah Kabupaten Kebumen seluas 39.805m² (tiga puluh sembilan ribu delapan ratus lima meter persegi) senilai Rp4.962.112.500,00. Atas perjanjian kerjasama



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

tersebut tidak diperoleh data nilai pembangunan Pasar Wonokriyo Gombang. Kemitraan ini disepakati sesuai dengan masa perjanjian adalah 30 (tiga puluh) tahun.

Pada tahun 2011 dilakukan koreksi penilaian atas tanah yang diserahkan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak tahun penyusunan neraca awal yaitu sebesar Rp17.552.192.000,00. Hal ini dilakukan karena tanah diserahkan sebelum neraca awal. Tahun 2014 dilakukan koreksi tambah atas aset tanah yang mitrakan sebesar Rp755.392.000,00 sehingga total nilai kemitraan dengan pihak ketiga menjadi sebesar Rp18.307.584.000,00.

Pada tahun 2018, aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga dikoreksi kurang seluas 4.928m² atau senilai Rp2.173.021.312,00 direklas ke Aset Tetap Tanah, dengan adanya pelepasan hak pengelolaan yang dilakukan oleh PT Karsa Bayu Bangun Perkasa atas tanah untuk Pasar Wonokriyo Blok J, K, dan L akibat kebakaran yang terjadi pada tahun 2017.

5.3.5.2.2 Aset Tidak Berwujud

| | |
|--------------------|--------------------|
| 31 Desember 2021 | 31 Desember 2020 |
| Rp3.061.609.445,18 | Rp2.243.798.380,00 |

Aset Tidak Berwujud secara rinci disajikan sebagai berikut

Tabel Aset Tidak Berwujud

| Uraian | 31 Desember 2021 | 31 Desember 2020 | Kenaikan/ (Penurunan) (Rp) | % |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------|
| | (Rp) | (Rp) | | |
| DED | 1.375.216.000,00 | 913.115.000,00 | 462.101.000,00 | 33,60 |
| Software | 3.878.370.030,00 | 3.001.878.030,00 | 876.492.000,00 | 22,60 |
| Jumlah Nilai Perolehan | 5.253.586.030,00 | 3.914.993.030,00 | 1.338.593.000,00 | 25,48 |
| Amortisasi | (2.191.976.584,82) | (1.671.194.650,00) | (520.781.934,82) | 23,76 |
| Jumlah Nilai Buku | 3.061.609.445,18 | 2.243.798.380,00 | 817.811.065,18 | 26,71 |

Rincian aset tidak berwujud per SKPD disajikan sebagai berikut.

Tabel Rincian Aset Tidak Berwujud per SKPD Per 31 Desember 2021

| No | OPD | DED (Rp) | Software (Rp) | Jumlah (Rp) |
|----|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata | | 121.110.000,00 | 121.110.000,00 |
| 2 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.375.216.000,00 | 7.900.000,00 | 1.383.116.000,00 |
| 3 | Dinas Perhubungan | | 181.945.900,00 | 181.945.900,00 |
| 4 | Rumah Sakit Umum Daerah Prembun | | 33.000.000,00 | 33.000.000,00 |
| 5 | Rumah Sakit Umum dr.Soedirman | | 1.401.956.000,00 | 1.401.956.000,00 |
| 6 | Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | 416.096.000,00 | 416.096.000,00 |
| 7 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | | 159.215.000,00 | 159.215.000,00 |
| 8 | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | | 105.862.000,00 | 105.862.000,00 |
| 9 | Bagian Hukum | | 80.473.300,00 | 80.473.300,00 |
| 10 | Bagian Organisasi | | 54.340.000,00 | 54.340.000,00 |
| 11 | Bagian Pembangunan | | 82.809.000,00 | 82.809.000,00 |
| 12 | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | | 122.658.800,00 | 122.658.800,00 |
| 13 | Dinas Komunikasi dan Informatika | | 350.317.150,00 | 350.317.150,00 |
| 14 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | | 259.148.180,00 | 259.148.180,00 |
| 15 | Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan | | 96.765.000,00 | 96.765.000,00 |
| 16 | Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah | | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 |
| 17 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | | 194.258.100,00 | 194.258.100,00 |
| 18 | Puskesmas Karanggayam II | | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| 19 | Unit Pengobatan Penyakit Paru | | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 |
| 20 | Kecamatan Kutowinangun | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| 21 | Dinas Pendidikan | | 71.225.600,00 | 71.225.600,00 |
| 22 | Puskesmas Petanahan | | 79.600.000,00 | 79.600.000,00 |
| 23 | Dinas Kesehatan | | 12.190.000,00 | 12.190.000,00 |
| | JUMLAH | 1.375.216.000,00 | 3.878.370.030,00 | 5.253.586.030,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

Amortisasi Aset Tidak Berwujud per SKPD disajikan sebagai berikut.

Tabel Amortisasi Aset Tak Berwujud per SKPD per 31 Desember 2021

| No | OPD | Nilai Perolehan (Rp) | Amortisasi (Rp) | Nilai Buku (Rp) |
|----|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata | 121.110.000,00 | 67.716.000,00 | 53.394.000,00 |
| 2 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.383.116.000,00 | 252.357.931,82 | 1.130.758.068,18 |
| 3 | Dinas Perhubungan | 181.945.900,00 | 72.778.360,00 | 109.167.540,00 |
| 4 | Rumah Sakit Umum Daerah Prembun | 33.000.000,00 | 9.900.000,00 | 23.100.000,00 |
| 5 | Rumah Sakit Umum dr.Soediman | 1.401.956.000,00 | 611.867.800,00 | 790.088.200,00 |
| 6 | Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah | 416.096.000,00 | 375.224.500,00 | 40.871.500,00 |
| 7 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset | 159.215.000,00 | 39.057.500,00 | 120.157.500,00 |
| 8 | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 105.862.000,00 | 59.001.800,00 | 46.860.200,00 |
| 9 | Bagian Hukum | 80.473.300,00 | 48.283.980,00 | 32.189.320,00 |
| 10 | Bagian Organisasi | 54.340.000,00 | 32.604.000,00 | 21.736.000,00 |
| 11 | Bagian Pembangunan | 82.809.000,00 | 66.247.200,00 | 16.561.800,00 |
| 12 | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | 122.658.800,00 | 49.063.520,00 | 73.595.280,00 |
| 13 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 350.317.150,00 | 200.197.935,00 | 150.119.215,00 |
| 14 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 259.148.180,00 | 136.789.508,00 | 122.358.672,00 |
| 15 | Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha | 96.765.000,00 | 41.902.000,00 | 54.863.000,00 |
| 16 | Badan Kepegawaian, Pendidikan dan | 35.000.000,00 | 24.500.000,00 | 10.500.000,00 |
| 17 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | 194.258.100,00 | 66.918.730,00 | 127.339.370,00 |
| 18 | Puskesmas Karanggayam II | 4.000.000,00 | 1.200.000,00 | 2.800.000,00 |
| 19 | Unit Pengobatan Penyakit Paru | 3.500.000,00 | 1.400.000,00 | 2.100.000,00 |
| 20 | Kecamatan Kutowinangun | 5.000.000,00 | 2.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| 21 | Dinas Pendidikan | 71.225.600,00 | 23.786.820,00 | 47.438.780,00 |
| 22 | Puskesmas Petanahan | 79.600.000,00 | 7.960.000,00 | 71.640.000,00 |
| 23 | Dinas Kesehatan | 12.190.000,00 | 1.219.000,00 | 10.971.000,00 |
| | | 5.253.586.030,00 | 2.191.976.584,82 | 3.061.609.445,18 |

5.3.5.2.3 Aset Lain-lain

31 Desember 2021
 Rp102.520.330.753,00

31 Desember 2020
 Rp105.406.781.516,00

Aset Lain-lain per SKPD disajikan dengan nilai akumulasi penyusutannya dengan rincian sebagaimana **Lampiran 11**

Aset lain-lain terdiri dari

1. Aset lainnya berupa tanah jalan (JJLS) dan jalan desa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang belum diserahkan ke Pemerintah Pusat dan ke Pemerintah Desa senilai Rp99.329.551.387,00.
2. Aset lainnya berupa DED (*Detail Engineering Design*) yang dibuat untuk pihak lain senilai Rp498.617.500,00 yaitu:
 - a) DED jembatan jalan desa pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp95.941.000,00.
 - b) DED desa wisata Seboro, Karangsembung, Desa Pasir, Desa Tirtomoyo pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata senilai Rp83.526.000,00.
 - c) DED GOR Desa Ambalresmi, Jembatan Ambakliwonan, Gedung Mapolres Kebumen, Jaringan Irigasi pedesaan, Jalan Desa Gemeksekti, dan DED perbaikan



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

tebing tanggul sungai serta pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp319.150.500,00.

- Barang Rusak Berat yang telah dihentikan penggunaannya oleh SKPD namun belum dihapuskan dari daftar Barang Inventaris senilai Rp25.068.003.050,00.

Bertambah dan berkurangnya Aset Lain-lain selama tahun 2021 sebagai berikut.

Tabel Bertambah dan Berkurang Aset Lain-lain

| 31 Desember 2020 (Rp) | Penambahan | Pengurangan | Mutasi Bersih | 31 Desember 2021 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| | (Rp) | (Rp) | (Rp) | |
| 116.890.241.799,00 | 23.802.190.641,00 | 15.796.260.503,00 | 8.005.930.138,00 | 124.896.171.937,00 |

Penambahan Aset Lain-lain selama tahun 2021 senilai Rp23.802.196.641,00 terdiri dari

- Penambahan barang rusak berat senilai Rp23.783.164.890,00 berada pada SKPD sebagaimana tabel pada **Lampiran 12**.
- Penambahan Aset lain-lain karena koreksi senilai Rp1.000.000,00 ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa koreksi nilai penggabungan.
- Penambahan Aset Lain-lain karena reklas dari jalan Irigasi Jaringan senilai Rp18.025.751,00 ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa jalan desa yang belum diserahkan.

Pengurangan Aset Lain-lain terdiri dari:

Tabel Pengurangan Aset lain-lain

| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|----|-------------------------|--------------------------|
| 1. | Penghapusan (terbit SK) | 13.162.707.581,00 |
| 2. | Koreksi | 2.399.300.922,00 |
| 3. | Reklas | 234.252.000,00 |
| | Jumlah | 15.796.260.503,00 |

- Pengurangan Aset Lain-lain sebesar Rp13.162.707.581,00 merupakan aset rusak berat yang sudah terbit SK Penghapusan.
- Pengurangan Aset Lain-lain karena koreksi senilai Rp2.399.300.922,00 secara rinci ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang secara rinci sebagai berikut:

Tabel Pengurangan Aset Lain-lain karena koreksi

| No | Nama OPD | Nilai (Rp) | Keterangan |
|----|------------------------|-------------------------|---|
| 1 | Dump Truck | 2.031.879.000,00 | Koreksi nilai |
| 2 | Yeengler/Trailer | 1.000.000,00 | Koreksi penggabungan pencatatan |
| 3 | Sepeda Motor | 11.850.000,00 | Koreksi dobel catat |
| 4 | Aset Lain-Lain Lainnya | 52.351.149,00 | Bagian dari KIB D Jalan K1 Ruas Jalan Kebulusan-Sidomulyo |
| 5 | Aset Lain-Lain Lainnya | 5.761.195,00 | Koreksi dobel catat dengan Dinas Perhubungan |
| 6 | Aset Lain-Lain Lainnya | 52.329.978,00 | Koreksi dobel catat dengan Kelurahan Bumirejo |
| 7 | Aset Lain-Lain Lainnya | 76.510.000,00 | Koreksi dobel catat dengan Kelurahan Bumirejo |
| 8 | Aset Lain-Lain Lainnya | 167.619.600,00 | Koreksi dobel catat dengan Kelurahan Karanganyar |
| | JUMLAH | 2.399.300.922,00 | |

- Pengurangan karena reklas Aset Lain-lain senilai Rp234.252.000,00 ada pada Dinas Pendidikan berupa gedung bangunan rusak berat yang direklas ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

5.3.2 Kewajiban

31 Desember 2021
Rp63.959.092.142,83

31 Desember 2020
Rp41.790.047.964,00

Kewajiban merupakan kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat dari transaksi keuangan masa lalu. Kewajiban dibagi dua yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang, secara rinci disajikan sebagai berikut.

Tabel Rincian Kewajiban

| Uraian | 31-Dec-21 | 31-Dec-20 | Kenaikan/ (Penurunan) (Rp) | % |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------|
| | (Rp) | (Rp) | | |
| Kewajiban Jangka Pendek | 63.959.092.142,83 | 41.790.047.964,00 | 22.169.044.178,83 | 53,05 |
| Kewajiban Jangka Panjang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah | 63.959.092.142,83 | 41.790.047.964,00 | 22.169.044.178,83 | 53,05 |

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

31 Desember 2021
Rp63.959.092.142,83

31 Desember 2020
Rp41.790.047.964,00

Kewajiban Jangka Pendek secara rinci disajikan sebagai berikut.

Tabel Rincian Kewajiban Jangka Pendek

| Uraian | 31-Dec-21 | 31-Dec-20 | Kenaikan/ (Penurunan) (Rp) | % |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------|
| | (Rp) | (Rp) | | |
| Utang Perhitungan Fihak Ketiga | 0,00 | 34.314.950,00 | (34.314.950,00) | (100,00) |
| Pendapatan diterima Dimuka | 904.505.956,83 | 1.248.346.951,00 | (343.840.994,17) | (27,54) |
| Utang Belanja | 63.054.586.186,00 | 40.507.386.063,00 | 22.547.200.123,00 | 55,66 |
| Utang Jangka Pendek Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah | 63.959.092.142,83 | 41.790.047.964,00 | 22.169.044.178,83 | 53,05 |

Kewajiban Jangka Pendek dibandingkan tahun sebelumnya terdapat kenaikan sebesar 53,05%, antara lain disebabkan Tambahan Penghasilan PNS untuk Bulan Desember 2021 dibayarkan di tahun berikutnya sehingga menambah utang belanja di TA 2021.

5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga

31 Desember 2021
Rp00,00

31 Desember 2020
Rp34.314.950,00

Rincian Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) per OPD per 31 Desember 2021 adalah Rp0,00.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

Tabel Rincian Utang Perhitungan Pihak Ketiga

| No. | SKPD | Jml Utang PFK (Rp) | | Kenaikan/ (Penurunan) | % | Ket |
|-----|-----------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|-----------------|-------------------------|
| | | 2021 | 2020 | | | |
| 1 | Puskesmas Petanahan | 0,00 | 2.070.000,00 | (2.070.000,00) | (100,00) | Dana Prolanis |
| 2 | Dinas Pendidikan | 0,00 | 11.674.932,00 | (11.674.932,00) | (100,00) | Pajak telat setor (BOS) |
| 3 | SMPN 1 Adimulyo | 0,00 | 41.325,00 | (41.325,00) | 100,00 | Pajak telat setor |
| 4 | SMPN 3 Satap Karangsembung | 0,00 | 136.400,00 | (136.400,00) | 100,00 | Pajak telat setor |
| 5 | Puskesmas Ambal II | 0,00 | 1.147.100,00 | (1.147.100,00) | 100,00 | Dana Prolanis |
| 6 | Puskesmas Buluspesantren II | 0,00 | 1.581.000,00 | (1.581.000,00) | 100,00 | Dana Prolanis |
| 7 | Puskesmas Klirong I | 0,00 | 2.127.100,00 | (2.127.100,00) | 100,00 | Dana Prolanis |
| 8 | Puskesmas Sadang | 0,00 | 885.850,00 | (885.850,00) | 100,00 | Dana Prolanis |
| 9 | RSUD Prembun | 0,00 | 14.651.243,00 | (14.651.243,00) | 100,00 | Utang PFK Askes |
| | Jumlah | 0,00 | 34.314.950,00 | (34.314.950,00) | (100,00) | |

Utang Perhitungan Pihak ketiga dibandingkan tahun sebelumnya turun sebesar 100%, hal ini disebabkan penyetoran pajak dana BOS lebih tertib, sehingga tingkat keterlambatan penyetoran pajak menurun. Selain itu transfer dana prolanis dari BPJS ke Puskesmas juga lebih awal dari tahun lalu, sehingga dana prolanis dapat segera diambil dan disalurkan tepat waktu.

5.3.2.1.2 Pendapatan Diterima Dimuka

| | |
|------------------|--------------------|
| 31 Desember 2021 | 31 Desember 2020 |
| Rp904.505.956,83 | Rp1.248.346.951,00 |

Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pendapatan yang sudah diterima oleh Pemerintah Daerah namun belum sepenuhnya merupakan hak Pemerintah Daerah, karena menyangkut pendapatan atas periode berikutnya, yang posisi per 31 Desember 2021 diterima SKPD sebagai berikut.

Tabel Rincian Pendapatan Diterima Dimuka per SKPD

| No. | SKPD | Jml Pendapatan Diterima Dimuka (Rp) | |
|-----|--|-------------------------------------|-------------------------|
| | | 2021 | 2020 |
| 1. | UPTD RSUD Dr. Soedirman | 134.200.000,00 | 181.495.000,00 |
| 2. | Bagian Umum | 44.310.600,00 | 57.497.400,00 |
| 3. | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | 79.911.570,83 | 317.030.720,00 |
| 4. | Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah | 262.381.325,00 | 264.498.225,00 |
| 5. | Kecamatan Kebumen | 91.316.686,00 | 90.330.906,00 |
| 6. | Kecamatan Karanganyar | 188.232.650,00 | 201.911.700,00 |
| 7. | Kecamatan Gombong | 104.153.125,00 | 135.583.000,00 |
| | Jumlah | 904.505.956,83 | 1.248.346.951,00 |

Pendapatan diterima dimuka pada RSUD dr Soedirman berasal dari pendapatan kerjasama dengan pihak ketiga, dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

Tabel Rincian Pendapatan Diterima Dimuka pada RSUD Dr.Soedirman

| No | No Perjanjian | Nama Pihak Ketiga | Nilai Perjanjian | Disetor Tgl | Jangka Waktu | Masa Manfaat (Bln) | Sisa Masa Manfaat (Bln) | Jumlah Pendapatan |
|----|--------------------------------|--|------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|
| 1 | 026/MSD/ADD-RSUDDSK/XII/2019 | PT MAC SARANA DJAYA | 275.000.000,00 | 1 Februari 2016 | 1 April 2015 - 1 April 2025 | 120 | 39 | 89.375.000,00 |
| 2 | 445/02537/PKS/VIII/2019 | UNIVERSITAS JENDERAL A YANI YOGYAKARTA | 6.000.000,00 | 21 September 2019 | 1 Agustus 2019 - 1 Agustus 2022 | 36 | 7 | 1.166.666,67 |
| 3 | 445/00465/PKS/II/2019 | AKADEMI ANALIS KESEHATAN MANGGALA | 750.000,00 | 22 Maret 2019 | 13 Februari 2019 - 12 Februari 2022 | 36 | 1 | 20.833,33 |
| 4 | 445/0459a/PKS/XII/2019 | STIKES MADANI YOGYAKARTA | 5.000.000,00 | 09 Maret 2020 | 23 Desember 2019 - 22 Desember 2024 | 60 | 36 | 3.000.000,00 |
| 5 | 3245/386/03.1 | STIKES AL IRSYAD CILACAP | 7.500.000,00 | 15 Oktober 2020 | 20 September 2019 - 19 September 2022 | 36 | 9 | 1.875.000,00 |
| 6 | 050/1.03/05-EA/PSG/2019 | SMK TAMTAMA KARANGANYAR KBM | 500.000,00 | 19 Agustus 2020 | 1 Februari 2020 - 1 Februari 2022 | 24 | 1 | 20.833,33 |
| 7 | 001/KSO/B/AK. Alkahfi/III/2020 | AKADEMI KOMUNITAS AL KAHFI | 750.000,00 | 17 September 2020 | 11 Maret 2020 - 10 Maret 2023 | 36 | 14 | 291.666,67 |
| 8 | 007/B/MoJ/UA/II/2020 | UNIVERSITAS ALMA ATA | 7.500.000,00 | 19 Agustus 2020 | 21 Februari 2020 - 20 Februari 2025 | 60 | 38 | 4.750.000,00 |
| 9 | KBM/SEWA/003 | BNI CABANG KEBUMEN | 50.000.000,00 | 01 April 2020 | 1 April 2020 - 31 Maret 2025 | 60 | 39 | 32.500.000,00 |

Pendapatan diterima dimuka pada Bagian Umum Setda Kebumen berasal dari sewa tempat untuk Kantin, Koperasi dan ATM Bank Jateng di kompleks Setda Kebumen, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Rincian Pendapatan Diterima Dimuka pada Bag.Umum Setda Kebumen

| No | No Perjanjian | Tgl Perjanjian | Nama Pihak Ke Tiga | Nilai Perjanjian | Jangka Waktu | Masa Manfaat (Bln) | Sisa Masa Manfaat (Bln) | Jumlah Pendapatan |
|----|---------------|----------------|-----------------------|------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|
| 1 | 030/1777.4 | 16-Sep-21 | Koperasi Sumber Agung | 5.184.000 | 16 Sept 2020 - 15 Sept 2021 | 12 | 9 | 2.952.000 |
| 2 | 030/1777.3 | 16-Sep-21 | Koperasi Sumber Agung | 5.940.000 | 16 Sept 2020 - 15 Sept 2021 | 12 | 9 | 3.960.000 |
| 3 | 030/1777.5 | 16-Sep-21 | Dharma Wanita Kab. | 4.428.000 | 16 Sept 2020 - 15 Sept 2021 | 12 | 9 | 3.456.000 |
| 4 | 030/1777.2 | 16-Sep-21 | Dharma Wanita Kab. | 3.780.000 | 16 Sept 2020 - 15 Sept 2021 | 12 | 9 | 2.520.000 |
| 5 | 030/1470 | 29-Jun-18 | Bank Jateng Cab Kbm | 32.670.000 | 01 Juli 2018 - 30 Juni 2023 | 60 | 18 | 9.801.000 |
| 6 | 030/1192.1 | 1-Apr-20 | Bank Jateng Cab Kbm | 33.264.000 | 01 April 2020 s/d 31 Mei 2025 | 60 | 39 | 21.621.600 |
| | JUMLAH | | | | | | | 44.310.600 |

Pendapatan diterima dimuka pada Kecamatan Kebumen, Karanganyar dan Gombong berasal dari pendapatan sewa tanah eks bengkok kelurahan.

Pendapatan diterima dimuka pada BPKAD Kab Kebumen berasal dari pemakaian kekayaan daerah dalam bentuk sewa, dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

Tabel Rincian Pendapatan Diterima Dimuka pada BPKAD Kebumen

| No | Nama Pihak Ketiga | No Perjanjian | Jangka Waktu | Masa Manfaat | Sisa Masa Manfaat | Nilai Sewa | Jml Pendapatan Diterima Di muka |
|---------------|--|-------------------------|---------------------------|--------------|-------------------|----------------|---------------------------------|
| 1 | PT Inti Bangun Sejahtera, Tbk | 050/040/ I/2018 | 1/10/2017 s/d 30/09/2022 | 60 | 9 | 131.400.000,00 | 19.710.000 |
| 2 | Drs.H. Sholeh Said | 030/032 Tahun 2019 | 02/06/2019 sd 01/06/2024 | 60 | 30 | 13.736.475,00 | 6.868.238 |
| 3 | Sewa Rumah ATM Bank Jateng Kec. Sempor | o30/1833/Tahun 2020 dan | 15/06/2020 sd 14/06/2023 | 36 | 18 | 12.000.000,00 | 6.000.000 |
| 4 | Sewa Rumah ATM Bank Jateng Kec. Buayan | 2295/ht.01.06/008/2020 | 15/06/2020 sd 14/06/2023 | 36 | 18 | 12.000.000,00 | 6.000.000 |
| 5 | Sewa Rumah ATM Bank Jateng Kec. Ambal | | 15/06/2020 sd 14/06/2023 | 36 | 18 | 12.000.000,00 | 6.000.000 |
| 6 | Sewa Rumah ATM Bank Jateng Kec. Mirit | | 15/06/2020 sd 14/06/2023 | 36 | 18 | 12.000.000,00 | 6.000.000 |
| 7 | Sewa Rumah ATM Bank Jateng Kec. Poncowarno | | 15/06/2020 sd 14/06/2023 | 36 | 18 | 12.000.000,00 | 6.000.000 |
| 8 | Sewa Rumah ATM Bank Jateng Kec. Padureso | | 15/06/2020 sd 14/06/2023 | 36 | 18 | 12.000.000,00 | 6.000.000 |
| 9 | Sewa Rumah ATM Bank Jateng Kec.Puring | 030/301 Tahun 2021 dan | 01/03/2021 s.d 29/02/2024 | 36 | 26 | 12.000.000,00 | 8.666.667 |
| 10 | Sewa Rumah ATM Bank Jateng Kec.Sruweng | 031/SDU,07/008/2021 | 01/03/2021 s.d 29/02/2024 | 36 | 26 | 12.000.000,00 | 8.666.667 |
| Jumlah | | | | | | | 79.911.571 |

Pendapatan diterima dimuka pada Bapenda Kabupaten Kebumen berasal dari Pajak Reklame dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Reklame

| No | Jenis Reklame | Jumlah |
|---------------------|---------------|--------------------|
| 1 | Permanen | 257.129.465 |
| 2 | Non Permanen | 5.251.860 |
| Jumlah Total | | 262.381.325 |

5.3.2.1.3 Utang Belanja

31 Desember 2021
Rp63.054.586.186,00

31 Desember 2020
Rp40.507.386.063,00

Utang Belanja merupakan kewajiban-kewajiban yang masih harus dibayar yang sampai dengan 31 Desember 2021 belum ditunaikan oleh SKPD, yang disajikan sebagai berikut.

Tabel Rincian Utang Belanja

| Uraian | 31 Desember 2021 | 31 Desember 2020 | Kenaikan/ (Penurunan) (Rp) | % |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------|
| | (Rp) | (Rp) | | |
| Utang Belanja Pegawai | 9.039.224.848,00 | 6.548.092.294,00 | 2.491.132.554,00 | 38,04 |
| Utang Belanja Barang dan Jasa | 54.015.361.338,00 | 33.959.293.769,00 | 20.056.067.569,00 | 59,06 |
| Jumlah | 63.054.586.186,00 | 40.507.386.063,00 | 22.547.200.123,00 | 55,66 |

Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2021 merupakan Tambahan Penghasilan PNS Bulan Desember 2021 yang belum dibayarkan.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

Utang Belanja Barang dan Jasa merupakan beban atas pemakaian daya dan jasa kantor/jasa lainnya pada SKPD yang belum dibayarkan, serta jasa pelayanan yang belum direalisasikan oleh Puskesmas & RSUD sampai dengan 31 Desember 2021.

5.3.3 Ekuitas

| 31 Desember 2021 | 31 Desember 2020 |
|------------------------------|------------------------------|
| <hr/> Rp4.613.094.315.925,07 | <hr/> Rp4.483.948.124.718,03 |

Saldo Ekuitas sebesar Rp4.613.094.315.925,07 bertambah sebesar Rp129.146.191.207,04 dari Ekuitas tahun lalu yang sebesar Rp4.483.948.124.718,03.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

5.4 Laporan Operasional

5.4.1 Pendapatan – LO

| | |
|------------------------|------------------------|
| <u>Tahun 2021</u> | <u>Tahun 2020</u> |
| Rp2.464.759.356.036,17 | Rp2.368.956.659.516,63 |

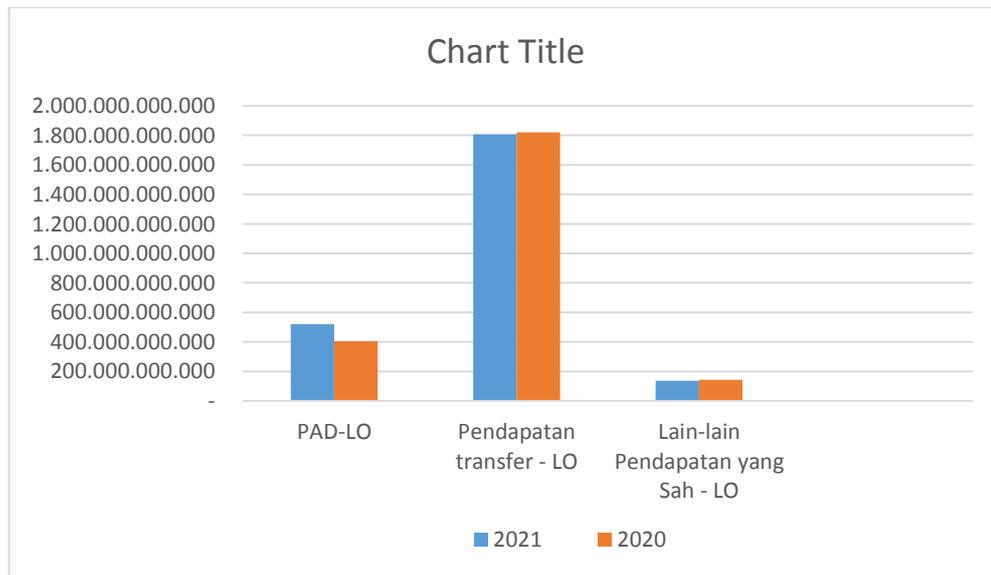
Pendapatan - LO Kabupaten Kebumen yang tersaji dalam Laporan Operasional adalah Pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Daerah Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel Rincian Pendapatan – LO

| Uraian | Tahun 2021 (Rp) | Tahun 2020 (Rp) | Kenaikan / Penurunan | % |
|---|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------|
| Pendapatan Asli Daerah - LO | 519.945.946.249,17 | 405.249.546.265,63 | 114.696.399.983,54 | 28,30 |
| Pendapatan Transfer - LO | 1.807.428.442.052,00 | 1.820.566.476.365,00 | (13.138.034.313,00) | (0,72) |
| Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO | 137.384.967.735,00 | 143.140.636.886,00 | (5.755.669.151,00) | (4,02) |
| Jumlah | 2.464.759.356.036,17 | 2.368.956.659.516,63 | 95.802.696.519,54 | 4,04 |

Dari tabel diatas dapat diketahui pendapatan LO tahun 2021 naik sebesar Rp95.802.696.519,54 atau sebesar 4,04% dibandingkan tahun sebelumnya. Komposisi Realisasi Pendapatan – LO Kabupaten Kebumen sebagaimana tergambar pada diagram berikut.

Grafik Komposisi Pendapatan – LO Tahun 2021



5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah – LO

| | |
|----------------------|----------------------|
| <u>Tahun 2021</u> | <u>Tahun 2020</u> |
| Rp519.945.946.249,17 | Rp405.249.546.265,63 |

Rincian Pendapatan Asli Daerah – LO Tahun 2021 sebagai berikut:



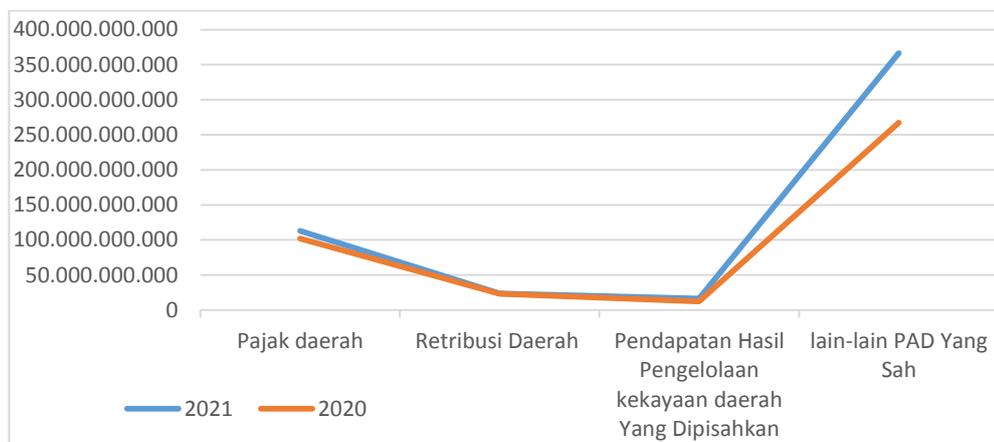
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

Tabel Rincian Pendapatan Asli Daerah – LO

| Uraian | Tahun 2021 | Tahun 2020 | Kenaikan / Penurunan | % |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|
| | (Rp) | (Rp) | | |
| Pajak Daerah - LO | 113.110.600.026,00 | 102.244.578.080,00 | 10.866.021.946,00 | 10,63 |
| Retribusi Daerah - LO | 23.655.625.665,17 | 23.370.297.163,83 | 285.328.501,34 | 1,22 |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah Yang Dipisahkan - LO | 16.552.860.815,00 | 12.515.457.668,00 | 4.037.403.147,00 | 32,26 |
| Lain-lain PAD Yang Sah - LO | 366.626.859.743,00 | 267.119.213.353,80 | 99.507.646.389,20 | 37,25 |
| Jumlah | 519.945.946.249,17 | 405.249.546.265,63 | 114.696.399.983,54 | 28,30 |

Perbandingan per jenis Pendapatan Asli Daerah - LO dari tahun sebelumnya tergambar pada grafik berikut:

Grafik Komposisi Pendapatan Asli Daerah – LO Tahun 2021



5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah – LO

| | |
|----------------------|----------------------|
| Tahun 2021 | Tahun 2020 |
| Rp113.110.600.026,00 | Rp102.244.578.080,00 |

Pendapatan Pajak Daerah – LO Tahun 2021 terdiri dari:

Tabel Pendapatan Pajak Daerah – LO

| URAIAN | Tahun 2021 (Rp) | Tahun 2020 (Rp) | Kenaikan/ Penurunan | % |
|--|---------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------|
| Pajak Hotel-LO | 1.467.420.162,00 | 1.170.134.383,00 | 297.285.779,00 | 20,26 |
| Pajak Restoran-LO | 8.513.895.726,00 | 6.779.091.367,00 | 1.734.804.359,00 | 20,38 |
| Pajak Hiburan-LO | 292.851.222,00 | 260.934.284,00 | 31.916.938,00 | 10,90 |
| Pajak Reklame-LO | 1.586.495.895,00 | 1.182.873.365,00 | 403.622.530,00 | 25,44 |
| Pajak Penerangan Jalan-LO | 31.323.888.090,00 | 29.779.901.282,00 | 1.543.986.808,00 | 4,93 |
| Pajak Parkir-LO | 405.336.131,00 | 394.623.093,00 | 10.713.038,00 | 2,64 |
| Pajak Air Tanah-LO | 369.024.300,00 | 279.050.357,00 | 89.973.943,00 | 24,38 |
| Pajak Sarang Burung Walet-LO | 5.500.000,00 | 2.000.000,00 | 3.500.000,00 | 63,64 |
| Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO | 1.131.544.726,00 | 1.639.699.529,00 | (508.154.803,00) | (44,91) |
| Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO | 49.675.793.360,00 | 49.814.117.482,00 | (138.324.122,00) | (0,28) |
| Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO | 18.338.850.414,00 | 10.942.152.938,00 | 7.396.697.476,00 | 40,33 |
| Jumlah | 113.110.600.026,00 | 102.244.578.080,00 | 10.866.021.946,00 | 9,61 |



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

Pendapatan Pajak – LO dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah, yang untuk tahun 2021 naik sebesar Rp10.866.021.946,00 atau sebesar 9,61% dibandingkan tahun sebelumnya.

5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah – LO

Tahun 2021
Rp23.655.625.665,17

Tahun 2020
Rp23.370.297.163,83

Pendapatan Retribusi Daerah – LO Tahun 2021 sebesar Rp 23.655.625.665,17 terdiri dari:

Tabel Pendapatan Retribusi Daerah – LO

| | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------|-------------|
| Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO | 1.500.485.137,00 | 268.178.500,00 | 1.232.306.637,00 | 459,51 |
| Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan – LO | 1.217.025.100,00 | 1.048.462.600,00 | 168.562.500,00 | 16,08 |
| Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LO | 603.608.000,00 | 1.173.995.000,00 | (570.387.000,00) | (48,59) |
| Retribusi Pelayanan Pasar – LO | 6.633.334.600,00 | 5.456.032.200,00 | 1.177.302.400,00 | 21,58 |
| Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor – LO | 620.980.000,00 | 654.714.000,00 | (33.734.000,00) | (5,15) |
| Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang – LO | 108.471.500,00 | | | |
| Retribusi Pelayanan Pendidikan – LO | 69.468.000,00 | 45.276.000,00 | 24192000,00 | 0,00 |
| Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi – LO | 545.592.000,00 | 1.211.472.000,00 | (665.880.000,00) | (54,96) |
| Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO | 3.365.645.987,17 | 2.570.561.443,83 | 795.084.543,34 | 30,93 |
| Retribusi Tempat Pelelangan – LO | 1.738.334.141,00 | 2.013.456.198,00 | (275.122.057,00) | (13,66) |
| Retribusi Terminal – LO | 67.417.800,00 | 79.163.600,00 | (11.745.800,00) | (14,84) |
| Retribusi Tempat Khusus Parkir – LO | 3.489.110.000,00 | 3.384.771.500,00 | 104.338.500,00 | 3,08 |
| Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa – LO | 51.940.000,00 | 680.000,00 | 51.260.000,00 | 7.538,24 |
| Retribusi Rumah Potong Hewan – LO | 17.807.500,00 | 16.572.500,00 | 1.235.000,00 | 7,45 |
| Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga – LO | 2.528.493.500,00 | 2.874.226.800,00 | (345.733.300,00) | (12,03) |
| Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah – LO | | 613.655.000,00 | (613.655.000,00) | (100,00) |
| Retribusi Izin Mendirikan Bangunan – LO | 1.083.972.400,00 | 1.932.379.822,00 | (848.407.422,00) | (43,90) |
| Retribusi Izin Trayek – LO | 13.940.000,00 | 26.700.000,00 | (12.760.000,00) | (47,79) |
| Jumlah | 23.655.625.665,17 | 23.370.297.163,83 | 176.857.001 | 0,76 |

Pendapatan Retribusi Daerah – LO mengalami kenaikan dibandingkan dengan Pendapatan Retribusi – LO tahun sebelumnya sebesar Rp176.857.001,00 atau 0,76%.
Pendapatan Retribusi Daerah – LO per SKPD disajikan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

Tabel Pendapatan Retribusi Daerah – LO per SKPD

| No. | OPD | Tahun 2021 (Rp) | Tahun 2020 (Rp) | Kenaikan/ (Penurunan) (Rp) | % |
|-----|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | Dinas Kesehatan | 1.500.485.137,00 | 268.178.500,00 | 1.232.306.637,00 | 459,51 |
| 2 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | 1.729.017.400,00 | 2.360.174.122,00 | (631.156.722,00) | (26,74) |
| 3 | Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | 906.807.000,00 | 764.553.500,00 | 142.253.500,00 | 18,61 |
| 4 | Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah | 126.592.000,00 | 98.105.000,00 | 28.487.000,00 | 29,04 |
| 5 | Dinas Perhubungan | 1.502.471.300,00 | 2.038.103.600,00 | (535.632.300,00) | (26,28) |
| 6 | Dinas Komunikasi Dan Informatika | 451.383.723,00 | 0,00 | 451.383.723,00 | |
| 7 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu | 810.839.068,00 | 1.436.358.615,00 | (625.519.547,00) | (43,55) |
| 8 | Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata | 3.192.084.570,00 | 3.456.627.900,00 | (264.543.330,00) | (7,65) |
| 9 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 1.905.521.991,00 | 2.759.802.698,00 | (854.280.707,00) | (30,95) |
| 10 | Dinas Pertanian dan Pangan | 42.167.500,00 | 698.570.500,00 | (656.403.000,00) | (93,96) |
| 11 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 10.549.436.800,00 | 8.991.104.700,00 | 1.558.332.100,00 | 17,33 |
| 12 | Bagian Umum | 98.193.800,00 | 99.316.600,00 | (1.122.800,00) | (1,13) |
| 13 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | 386.118.750,17 | 357.083.528,83 | 29.035.221,34 | 8,13 |
| 14 | Kecamatan Kebumen | 95.110.426,00 | 11.892.400,00 | 83.218.026,00 | 699,76 |
| 15 | Kecamatan Prembun | 1.791.000,00 | 2.120.000,00 | (329.000,00) | (15,52) |
| 16 | Kecamatan Mirit | - | 1.117.600,00 | (1.117.600,00) | (100,00) |
| 17 | Kecamatan Kutowinangun | - | 1.214.000,00 | (1.214.000,00) | (100,00) |
| 18 | Kecamatan Ambal | - | 700.000,00 | (700.000,00) | (100,00) |
| 19 | Kecamatan Pejagoan | - | 3.272.000,00 | (3.272.000,00) | (100,00) |
| 20 | Kecamatan Klirong | - | 1.200.000,00 | (1.200.000,00) | (100,00) |
| 21 | Kecamatan Petanahan | - | 1.732.200,00 | (1.732.200,00) | (100,00) |
| 22 | Kecamatan Sruweng | - | 691.000,00 | (691.000,00) | (100,00) |
| 23 | Kecamatan Karanganyar | 182.482.350,00 | 1.217.200,00 | 181.265.150,00 | 14.891,98 |
| 24 | Kecamatan Gombong | 175.122.850,00 | 10.980.500,00 | 164.142.350,00 | 1.494,85 |
| 25 | Kecamatan Sempor | - | 3.321.000,00 | (3.321.000,00) | (100,00) |
| 26 | Kecamatan Buayan | - | 197.000,00 | (197.000,00) | (100,00) |
| 27 | Kecamatan Ayah | - | 635.000,00 | (635.000,00) | (100,00) |
| 28 | Kecamatan Bonorowo | - | 2.028.000,00 | (2.028.000,00) | (100,00) |
| 29 | Jumlah | 23.655.625.665,17 | 23.370.297.163,83 | 285.328.501,34 | 1,22 |

5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO

Tahun 2021
Tahun 2020
Rp16.552.860.815,00
Rp12.515.457.668,00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Tahun 2021 sebesar Rp16.552.860.815,00 yang Dipisahkan terdiri dari:

Tabel Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LO

| Uraian | Tahun 2021 (Rp) | Tahun 2020 (Rp) | Kenaikan/ (Penurunan) (Rp) | % |
|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------|
| Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik | 16.552.860.815,00 | 12.515.457.668,00 | 4.037.403.147,00 | 32,26 |
| Jumlah | 16.552.860.815,00 | 12.515.457.668,00 | 4.037.403.147,00 | 32,26 |

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO merupakan hak Pemerintah Daerah dari bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

Tabel Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LO

| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|---------------|---------------------|--------------------------|
| 1 | Bank Jateng | 9.506.097.705,00 |
| 2 | PD. BPR BKK Kebumen | 3.655.192.203,00 |
| 3 | PD BPR Bank Kebumen | 1.362.256.022,00 |
| 4 | PDAM | 1.858.068.270,00 |
| 5 | PD Apotik Lukulo | 171.246.615,00 |
| JUMLAH | | 16.552.860.815,00 |

5.4.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah – LO

| Tahun 2021 | Tahun 2020 |
|----------------------|----------------------|
| Rp366.626.859.743,00 | Rp267.119.213.353,80 |

Lain-lain PAD yang Sah – LO Tahun 2021 sebesar Rp366.626.859.743,00 terdiri dari berikut.

Tabel Rincian Lain-lain PAD yang Sah LO

| Uraian | Tahun 2021 (Rp) | Tahun 2020 (Rp) | Kenaikan/ (Penurunan) (Rp) | % |
|---|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------|
| Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak | 125.350.000,00 | 1.342.174.490,00 | (1.216.824.490,00) | (90,66) |
| Hasil Kerjasa Dearah | 27.915.525,00 | | | |
| Penerimaan Jasa Giro – LO | 2.525.596.113,00 | 3.896.010.559,00 | (1.370.414.446,00) | (35,17) |
| Pendapatan Bunga – LO | 10.048.808.180,00 | 12.795.027.102,00 | (2.746.218.922,00) | (21,46) |
| Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LO | 101.398.261,00 | 65.896.066,00 | 35.502.195,00 | 53,88 |
| Pendapatan Denda Pajak – LO | 762.597.148,00 | 836.567.870,00 | (73.970.722,00) | (8,84) |
| Pendapatan Denda Retribusi – LO | 19.375.800,00 | 370.377.740,00 | (351.001.940,00) | (94,77) |
| Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan –LO | | 43035400,00 | (43.035.400,00) | 0,00 |
| Pendapatan dari Pengembalian –LO | 439.796.371,00 | 821.104.559,00 | (381.308.188,00) | (46,44) |
| Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah – | | 1352715,00 | (1.352.715,00) | 0,00 |
| Pendapatan BLUD – LO | 342.683.309.932,00 | 245.405.509.965,00 | 97.277.799.967,00 | 39,64 |
| Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) | | - | - | - |
| Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir- LO | 33.800.000,00 | - | 33.800.000,00 | - |
| Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)-LO | 9.055.846.807,00 | - | 9.055.846.807,00 | - |
| Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO | 375.240.000,00 | - | 375.240.000,00 | - |
| Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya – LO | | 752.553.333,80 | (752.553.333,80) | (100,00) |
| Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum – LO | | 748.978.554,00 | (748.978.554,00) | (100,00) |
| Hasil dari pengelolaan dana bergulir | 427.825.606,00 | 40.625.000,00 | 387.200.606,00 | 953,11 |
| Jumlah | 366.626.859.743,00 | 267.119.213.353,80 | 99.507.646.389,20 | 37,25 |

Pendapatan BLUD – LO merupakan pendapatan dari entitas yang telah menerapkan PPK-BLUD sebagaimana berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

Rincian Tabel Pendapatan BLUD-LO

| No. | OPD | Tahun 2021 (Rp) | Tahun 2020 (Rp) | Kenaikan/ (Penurunan) (Rp) | % |
|-----|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------|
| 1. | Puskesmas Adimulyo | 1.497.294.853,00 | 1.688.776.689,00 | (191.481.836,00) | (12,79) |
| 2. | Puskesmas Alian | 3.114.925.221,00 | 3.523.530.927,00 | (408.605.706,00) | (13,12) |
| 3. | Puskesmas Ambal I | 1.754.970.264,00 | 2.154.446.652,00 | (399.476.388,00) | (22,76) |
| 4. | Puskesmas Ambal II | 1.060.251.456,00 | 1.469.765.516,00 | (409.514.060,00) | (38,62) |
| 5. | Puskesmas Ayah I | 1.731.064.478,00 | 2.348.445.193,00 | (617.380.715,00) | (35,66) |
| 6. | Puskesmas Ayah II | 1.181.170.527,00 | 1.556.390.539,00 | (375.220.012,00) | (31,77) |
| 7. | Puskesmas Bonorowo | 987.070.073,00 | 1.337.441.677,00 | (350.371.604,00) | (35,50) |
| 8. | Puskesmas Buayan | 2.225.925.730,00 | 2.708.784.919,00 | (482.859.189,00) | (21,69) |
| 9. | Puskesmas Buluspesantren I | 1.236.292.685,00 | 1.334.553.121,00 | (98.260.436,00) | (7,95) |
| 10. | Puskesmas Buluspesantren II | 1.217.705.607,00 | 1.114.173.074,00 | 103.532.533,00 | 8,50 |
| 11. | Puskesmas Gombang I | 1.188.123.583,00 | 1.673.008.114,00 | (484.884.531,00) | (40,81) |
| 12. | Puskesmas Gombang II | 977.784.868,00 | 1.138.197.128,00 | (160.412.260,00) | (16,41) |
| 13. | Puskesmas Karanganyar | 2.231.699.460,00 | 2.935.221.118,00 | (703.521.658,00) | (31,52) |
| 14. | Puskesmas Karanggayam I | 2.043.348.433,00 | 2.226.397.439,00 | (183.049.006,00) | (8,96) |
| 15. | Puskesmas Karanggayam II | 952.514.268,00 | 1.130.938.753,00 | (178.424.485,00) | (18,73) |
| 16. | Puskesmas Karangsembung | 2.464.760.202,00 | 2.775.656.217,00 | (310.896.015,00) | (12,61) |
| 17. | Puskesmas Kebumen I | 1.768.282.577,00 | 2.110.203.144,00 | (341.920.567,00) | (19,34) |
| 18. | Puskesmas Kebumen II | 2.005.651.675,00 | 2.460.878.999,00 | (455.227.324,00) | (22,70) |
| 19. | Puskesmas Kebumen III | 1.440.527.558,00 | 1.705.983.320,00 | (265.455.762,00) | (18,43) |
| 20. | Puskesmas Klirong I | 1.859.526.836,00 | 2.222.407.301,00 | (362.880.465,00) | (19,51) |
| 21. | Puskesmas Klirong II | 1.279.660.679,00 | 1.362.849.589,00 | (83.188.910,00) | (6,50) |
| 22. | Puskesmas Kutowinangun | 2.446.755.310,00 | 3.094.438.374,00 | (647.683.064,00) | (26,47) |
| 22. | Puskesmas Kuwarasan | 1.857.294.535,00 | 2.206.952.573,00 | (349.658.038,00) | (18,83) |
| 23. | Puskesmas Mirit | 2.412.354.966,00 | 2.849.536.499,00 | (437.181.533,00) | (18,12) |
| 24. | Puskesmas Padureso | 1.064.698.359,00 | 1.369.533.611,00 | (304.835.252,00) | (28,63) |
| 25. | Puskesmas Pejagoan | 2.696.971.347,00 | 3.176.769.854,00 | (479.798.507,00) | (17,79) |
| 26. | Puskesmas Petanahan | 2.595.008.667,00 | 3.161.677.050,00 | (566.668.383,00) | (21,84) |
| 27. | Puskesmas Poncowarno | 1.140.086.172,00 | 1.245.031.059,00 | (104.944.887,00) | (9,20) |
| 28. | Puskesmas Prembun | 1.079.685.264,00 | 1.294.105.981,00 | (214.420.717,00) | (19,86) |
| 29. | Puskesmas Puring | 2.172.004.880,00 | 2.397.676.685,00 | (225.671.805,00) | (10,39) |
| 30. | Puskesmas Rowokele | 2.498.529.573,00 | 2.328.299.625,00 | 170.229.948,00 | 6,81 |
| 31. | Puskesmas Sadang | 1.318.060.042,00 | 1.511.672.728,00 | (193.612.686,00) | (14,69) |
| 32. | Puskesmas Sempor I | 2.110.887.276,00 | 2.305.509.034,00 | (194.621.758,00) | (9,22) |
| 33. | Puskesmas Sempor II | 1.175.241.802,00 | 1.315.333.687,00 | (140.091.885,00) | (11,92) |
| 34. | Puskesmas Sruweng | 1.926.334.037,00 | 2.254.738.349,00 | (328.404.312,00) | (17,05) |
| 35. | Pengobatan Penyakit Paru | - | 54.754.823,00 | (54.754.823,00) | - |
| 36. | RSUD dr. Sudirman | 193.865.629.346,00 | 144.858.199.881,00 | 49.007.429.465,00 | 25,28 |
| 37. | RSUD Prembun | 88.105.217.323,00 | 28.997.293.723,00 | 59.107.923.600,00 | 67,09 |
| | Jumlah | 342.683.309.932,00 | 245.399.572.965,00 | 97.283.736.967,00 | 28,39 |

5.4.1.2 Pendapatan Transfer – LO

| | |
|------------------------|------------------------|
| Tahun 2021 | Tahun 2020 |
| Rp1.807.428.442.052,00 | Rp1.820.566.476.365,00 |

Rincian Pendapatan Transfer – LO Tahun 2021 sebesar Rp1.807.428.442.052,00 adalah sebagai berikut.

Tabel Pendapatan Transfer – LO

| URAIAN | Tahun 2021 (Rp) | Tahun 2020 (Rp) | Kenaikan / Penurunan (Rp) | % |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------|
| Dana Perimbangan-LO | 1.607.599.153.080,00 | 1.614.994.363.444,00 | (7.395.210.364,00) | (0,46) |
| Dana Insentif Daerah (DID)-LO | 46.433.860.000,00 | 45.243.665.000,00 | 1.190.195.000,00 | 2,63 |
| Pendapatan Bagi Hasil-LO | 147.547.358.972,00 | 142.336.837.332,00 | 5.210.521.640,00 | 3,66 |
| Bantuan Keuangan | 5.848.070.000,00 | 17.991.610.589,00 | (12.143.540.589,00) | (67,50) |
| Jumlah | 1.807.428.442.052,00 | 1.820.566.476.365,00 | (13.138.034.313,00) | (0,72) |



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

Dari tabel diatas dapat diketahui pendapatan transfer LO tahun 2021 turun sebesar Rp13.138.034.313,00 atau sebesar 0,72% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan pendapatan transfer terbesar tahun 2021 yakni pada Bantuan Keuangan turun sebesar Rp12.143.540.589.,00 atau sebesar 67,50%.

5.4.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat –LO

| | |
|------------------------|------------------------|
| Tahun 2021 | Tahun 2020 |
| Rp1.654.033.013.080,00 | Rp1.660.238.028.444,00 |

Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO Tahun 2021 sebesar Rp1.654.033.013.080,00 disajikan sebagai berikut.

Rincian Tabel Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO

| Uraian | Tahun 2021 (Rp) | Tahun 2020 (Rp) | Kenaikan/ (Penurunan) (Rp) | % |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------|
| Bagi Hasil - LO | 41.397.337.217,00 | 25.915.497.308,00 | 15.481.839.909,00 | 59,74 |
| Dana Alokasi Umum (DAU) - LO | 1.179.288.910.000,00 | 1.197.504.293.000,00 | (18.215.383.000,00) | (1,52) |
| Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO | 386.912.905.863,00 | 391.574.573.136,00 | (4.661.667.273,00) | (1,19) |
| DID | 46.433.860.000,00 | 45.243.665.000,00 | 1.190.195.000,00 | - |
| Jumlah | 1.654.033.013.080,00 | 1.660.238.028.444,00 | (6.205.015.364,00) | |

Pendapatan Bagi Hasil – LO Tahun 2021 sebesar Rp41.397.337.217,00 secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:

Rincian Tabel Pendapatan Bagi Hasil – LO

| Uraian | Tahun 2021 (Rp) | Tahun 2020 (Rp) | Kenaikan / Penurunan (Rp) | % |
|--|--------------------------|--------------------------|------------------------------|---------|
| DBH PBB-LO | 11.321.276.739,00 | 3.922.363.042 | 7.398.913.697,00 | 188,63 |
| DBH PPh Pasal 21-LO | 16.423.637.908,00 | - | 16.423.637.908,00 | - |
| DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND-LO | 2.612.765.190,00 | 14.217.691.487 | (11.604.926.297,00) | (81,62) |
| DBH CHT-LO | 8.650.954.298,00 | 6.492.575.607 | 2.158.378.691,00 | 33,24 |
| DBH SDA Minyak Bumi-LO | 213.027.500,00 | 56.090.685 | 156.936.815,00 | 279,79 |
| DBH SDA Gas Bumi-LO | 62.242.900,00 | 391.185.516 | (328.942.616,00) | (84,09) |
| DBH SDA Penusahaan Panas Bumi-LO | 108.913.482,00 | 48.791.038 | 60.122.444,00 | 123,22 |
| DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO | 4.701.350,00 | 18.383.952 | (13.682.602,00) | (74,43) |
| DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO | 2.168.975,00 | 383.553 | 1.785.422,00 | 465,50 |
| DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO | 640.029.725,00 | 154.061.331 | 485.968.394,00 | 315,44 |
| DBH SDA Perikanan-LO | 1.357.619.150,00 | 613.971.097 | 743.648.053,00 | 121,12 |
| Jumlah | 41.397.337.217,00 | 25.915.497.308,00 | 15.481.839.909,00 | 59,74 |

Pendapatan Dana Alokasi Umum – LO Tahun 2021 sebesar Rp1.179.288.910.000,00 secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel Pendapatan Dana Alokasi Umum – LO

| Uraian | Tahun 2021 (Rp) | Tahun 2020 (Rp) | Kenaikan/ (Penurunan) (Rp) | % |
|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|
| Dana Alokasi Umum | 1.179.288.910.000,00 | 1.197.504.293.000,00 | (18.215.383.000,00) | (1,52) |
| Jumlah | 1.179.288.910.000,00 | 1.197.504.293.000,00 | (18.215.383.000,00) | (1,52) |



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

Pendapatan Dana Alokasi – LO tahun 2021 sebesar Rp386.912.905.863,00 secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel Pendapatan Dana Alokasi Khusus – LO

| Uraian | Tahun 2020 (Rp) | Tahun 2019 (Rp) | Kenaikan/ (Penurunan) (Rp) | % |
|--------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------|
| DAK Fisik - LO | 78.732.325.023,00 | 62.784.147.975,00 | 15.948.177.048,00 | 25,40 |
| DAK Non Fisik - LO | 308.180.580.840,00 | 328.790.425.161,00 | (20.609.844.321,00) | (6,27) |
| Jumlah | 386.912.905.863,00 | 391.574.573.136,00 | (4.661.667.273,00) | (1,19) |

Tabel Pendapatan Dana Insentif Daerah (DID) – LO

| Uraian | Tahun 2021 (Rp) | Tahun 2020 (Rp) | Kenaikan/ (Penurunan) (Rp) | % |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------|
| Dana Insentif Daerah - LO | 46.433.860.000,00 | 45.243.665.000,00 | 1.190.195.000,00 | 2,63 |
| Jumlah | 46.433.860.000,00 | 45.243.665.000,00 | 1.190.195.000,00 | 2,63 |

Pendapatan Transfer Dana Insentif Daerah (DID) - LO tahun 2021 naik sebesar Rp1.190.195.000,00 atau 2,63% dibandingkan tahun sebelumnya.

5.4.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO

| | |
|-------------------|----------------------|
| Tahun 2021 | Tahun 2020 |
| Rp153.395.428.972 | Rp160.328.447.921,00 |

Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO Tahun 2021 sebesar Rp153.395.428.972,00 merupakan pendapatan dari .

Tabel Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya LO

| Uraian | Tahun 2021 (Rp) | Tahun 2020 (Rp) | Kenaikan/ (Penurunan) (Rp) | % |
|---|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------|
| Pendapatan Bagi hasil Pajak - LO | 147.547.358.972,00 | 142.336.837.332,00 | 5.210.521.640,00 | 3,66 |
| Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi | 5.848.070.000,00 | 17.991.610.589,00 | (12.143.540.589,00) | (67,50) |
| Jumlah | 153.395.428.972,00 | 160.328.447.921,00 | (6.933.018.949,00) | (4,32) |

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pendapatan transfer antar daerah - LO tahun 2021 turun sebesar Rp6.933.018.949,00 atau sebesar 4,32% dibandingkan tahun sebelumnya. Pendapatan Transfer Antar daerah merupakan hak Pemerintah daerah atas Bagi Hasil Pajak/Retribusi dari Provinsi dari Pajak Kendaraan Bermotor, BBNKB, PBBKB, Pajak Rokok dan Pajak Air Permukaan dan bantuan keuangan, dengan perincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

Rincian Tabel Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah Lainnya

| Uraian | Tahun 2021 (Rp) | Tahun 2020 (Rp) | Kenaikan/ (Penurunan) (Rp) | % |
|--|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------|
| Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor | 36.520.320.649,00 | 33.462.854.991,00 | 3.057.465.658,00 | 9,14 |
| Bagi Hasil dari Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor | 20.413.378.061,00 | 17.407.589.057,00 | 3.005.789.004,00 | 17,27 |
| Bagi Hasil dari Pajak Bea Bahan Bakar Kendaraan Bermotor | 33.321.531.186,00 | 30.151.310.931,00 | 3.170.220.255,00 | 10,51 |
| Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air | 346.069.816,00 | 276.699.601,00 | 69.370.215,00 | 25,07 |
| Bagi Hasil dari Pajak Rokok | 56.946.059.260,00 | 61.038.382.752,00 | (4.092.323.492,00) | (6,70) |
| Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi | 5.848.070.000,00 | 17.991.610.589,00 | -12.143.540.589,00 | (67,50) |
| Jumlah | 153.395.428.972,00 | 160.328.447.921,00 | -6.933.018.949,00 | (4,32) |

5.4.1.3 Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah- LO

| | |
|----------------------|----------------------|
| Tahun 2021 | Tahun 2020 |
| Rp137.384.967.735,00 | Rp143.140.636.886,00 |

Rincian Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut:

Tabel Rincian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO

| Uraian | Tahun 2021 | Tahun 2020 | kenaikan/penurunan | % |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|
| Pendapatan Hibah dari Pemerintah-LO | 8.794.749.700,00 | 1.393.643.553,00 | 7.401.106.147,00 | 531,06 |
| Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan-LO | | 2.014.500.326,00 | (2.014.500.326,00) | (100,00) |
| Lain-lain pendapatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan | 128.590.218.035,00 | 139.732.493.007,00 | (11.142.274.972,00) | (7,97) |
| Jumlah | 137.384.967.735,00 | 143.140.636.886,00 | (5.755.669.151,00) | (4,02) |

Lain-lain pendapatan daerah yang sah LO tahun 2021 turun sebesar Rp5.755.669.151,00 atau sebesar 4,02% dibandingkan tahun sebelumnya,

5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah – LO

| | |
|--------------------|--------------------|
| Tahun 2021 | Tahun 2020 |
| Rp8.794.749.700,00 | Rp1.393.643.553,00 |

Pendapatan hibah – LO tahun 2021 sebesar Rp8.794.749.700,00 dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Tabel Rincian Pendapatan Hibah dari Pemerintah – LO

| Uraian | Tahun 2021 | Tahun 2020 | Kenaikan / (Penurunan) | % |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------|
| | (Rp) | (Rp) | | |
| Hibah Air Minum | 1.764.000.000,00 | - | 1.764.000.000,00 | - |
| Hibah IPDMIP | 6.508.749.700,00 | 344.043.553,00 | 6.164.706.147,00 | 1.791,84 |
| Hibah SAIIG | 522.000.000,00 | 1.049.600.000,00 | (527.600.000,00) | (50,27) |
| Jumlah | 8.794.749.700,00 | 1.393.643.553,00 | 7.401.106.147,00 | 531,06 |



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

5.4.1.3.2 Dana Darurat – LO

Tahun 2021

Tahun 2020

-

-

5.4.1.3.3 Lain-lain pendapatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan - LO

Tahun 2021

Tahun 2020

Rp128.590.218.035,00

Rp139.732.493.007,00

Lain-lain pendapatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan-LO pada tahun 2021 Kabupaten Kebumen sebesar Rp128.590.218.035,00 adalah atas hibah dana BOS dengan rincian sebagai berikut.

| Uraian | Tahun 2021 (Rp) | Tahun 2020 (Rp) | Kenaikan / Penurunan (Rp) | % |
|---------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|---------------|
| Pendapatan Hibah Dana BOS | 128.590.218.035 | 135.114.333.007 | (6.524.114.972) | (4,83) |
| Jumlah | 128.590.218.035 | 135.114.333.007 | (6.524.114.972) | (4,83) |

5.4.2 Beban

Tahun 2021

Tahun 2020

Rp2.430.803.384.187,93

Rp2.344.093.164.482,49

Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Tabel Rincian Beban

| Uraian | Tahun 2021 (Rp) | Tahun 2020 (Rp) | Kenaikan/ (Penurunan) (Rp) | % |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------|
| Beban Pegawai - LO | 1.143.777.516.215,00 | 1.170.541.875.982,00 | (26.764.359.767,00) | (2,29) |
| Beban Barang Jasa | 680.023.351.852,86 | - | 680.023.351.852,86 | - |
| Beban Persediaan | - | 83.506.008.091,72 | (83.506.008.091,72) | (100,00) |
| Beban Jasa | - | 382.110.604.291,00 | (382.110.604.291,00) | (100,00) |
| Beban Pemeliharaan | - | 44.337.343.515,00 | (44.337.343.515,00) | (100,00) |
| Beban Perjalanan Dinas | - | 25.802.705.996,00 | (25.802.705.996,00) | (100,00) |
| Beban Subsidi | 484.527.400,00 | - | 484.527.400,00 | - |
| Beban Hibah | 72.414.174.601,00 | 122.978.836.872,00 | (50.564.662.271,00) | (41,12) |
| Beban Bantuan Sosial | 21.478.899.729,00 | 34.639.637.162,00 | (13.160.737.433,00) | (37,99) |
| Beban Penyusutan dan Amortisasi | 304.071.120.213,82 | 286.931.158.605,02 | 17.139.961.608,80 | 5,97 |
| Beban Penyisihan Piutang | 3.268.730.526,25 | 968.200.867,75 | 2.300.529.658,50 | 237,61 |
| Beban Transfer | - | 192.276.793.100,00 | (192.276.793.100,00) | (100,00) |
| Beban Bagi Hasil | 13.862.929.650,00 | - | 13.862.929.650,00 | - |
| Beban Bantuan Keuangan | 191.422.134.000,00 | - | 191.422.134.000,00 | - |
| Jumlah | 2.430.803.384.187,93 | 2.344.093.164.482,49 | 86.710.219.705,44 | 3,70 |



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

5.4.2.1 Beban Pegawai

| | |
|------------------------|------------------------|
| Tahun 2021 | Tahun 2020 |
| Rp1.143.777.516.215,00 | Rp1.170.541.875.982,00 |

Beban Pegawai tahun 2020 terdiri dari.

Tabel Rincian Beban Pegawai

| URAIAN | Tahun 2021 (Rp) | Tahun 2020 (Rp) | Kenaikan / Penurunan (Rp) | % |
|---|--------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------|
| Beban Gaji dan Tunjangan - LO | 720.872.064.041 | 980.693.682.618 | (259.821.618.577) | (26,49) |
| Beban Tambahan Penghasilan ASN - LO | 93.376.903.392 | 72.056.272.108 | 21.320.631.284 | 29,59 |
| Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN | 269.466.287.145 | - | 269.466.287.145 | - |
| Beban Gaji dan Tunjangan DPRD | 29.959.433.106 | - | 29.959.433.106 | - |
| Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH | 509.329.781 | - | 509.329.781 | - |
| Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH - LO | 993.080.000 | 17.483.700.000 | (16.490.620.000) | (94,32) |
| Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah | - | 274.347.446 | (274.347.446) | (100,00) |
| Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah | - | 37.591.938 | (37.591.938) | (100,00) |
| Beban Uang Lembur - LO | - | 3.567.742.814 | (3.567.742.814) | (100,00) |
| Beban Pegawai BLUD | 403.602.000 | 25.046.053.710 | (24.642.451.710) | (98,39) |
| Beban Honorarium PNS | - | 12.094.026.450 | (12.094.026.450) | (100,00) |
| Beban Honorarium Non PNS | - | 34.817.161.527 | (34.817.161.527) | (100,00) |
| Beban Pegawai BOS | 28.196.816.750 | 24.471.297.371 | 3.725.519.379 | 15,22 |
| Jumlah | 1.143.777.516.215 | 1.170.541.875.982 | (26.764.359.767) | (2,29) |

Rincian Beban Pegawai per SKPD tahun 2020 dijelaskan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

Tabel Rincian Beban Pegawai per SKPD

| No | OPD | 2021 | 2020 | Kenaikan/(Penurunan) | % |
|----|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | Dinas Pendidikan | 764.899.099.217,00 | 769.370.148.037,00 | (4.471.048.820,00) | (0,58) |
| 2 | Dinas Kesehatan | 140.432.567.823,00 | 152.825.893.494,00 | (12.393.325.671,00) | (8,11) |
| 3 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | 19.058.972.987,00 | 19.055.918.799,00 | 3.054.188,00 | 0,02 |
| 4 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 2.611.804.335,00 | 2.795.738.354,00 | (183.934.019,00) | (6,58) |
| 5 | Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | 9.826.877.431,00 | 12.376.787.185,00 | (2.549.909.754,00) | (20,60) |
| 6 | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik | 2.418.085.357,00 | 1.560.669.104,00 | 857.416.253,00 | 54,94 |
| 7 | Satuan Polisi Pamong Praja | 5.524.376.294,00 | 6.854.430.223,00 | (1.330.053.929,00) | (19,40) |
| 8 | Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | 3.909.208.545,00 | 4.381.495.788,00 | (472.287.243,00) | (10,78) |
| 9 | Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah | 5.719.822.010,00 | 6.386.280.997,00 | (666.458.987,00) | (10,44) |
| 10 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 3.388.423.400,00 | 4.728.238.521,00 | (1.339.815.121,00) | (28,34) |
| 11 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak | 4.308.154.368,00 | 4.536.856.890,00 | (228.702.522,00) | (5,04) |
| 12 | Dinas Perhubungan | 3.976.778.257,00 | 5.878.851.510,00 | (1.902.073.253,00) | (32,35) |
| 13 | Dinas Komunikasi Dan Informatika | 3.594.747.263,00 | 4.708.414.458,00 | (1.113.667.195,00) | (23,65) |
| 14 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 3.249.818.288,00 | 3.431.746.132,00 | (181.927.844,00) | (5,30) |
| 15 | Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata | 5.822.866.519,00 | 7.659.599.459,00 | (1.836.732.940,00) | (23,98) |
| 16 | Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan | 2.286.418.693,00 | 2.549.433.278,00 | (263.014.585,00) | (10,32) |
| 17 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 4.026.426.852,00 | 5.194.866.867,00 | (1.168.440.015,00) | (22,49) |
| 18 | Dinas Pertanian dan Pangan | 17.480.126.363,00 | 14.282.948.542,00 | 3.197.177.821,00 | 22,38 |
| 19 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 9.599.720.215,00 | 10.600.898.583,00 | (1.001.178.368,00) | (9,44) |
| 20 | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | - | 25.780.687.972,00 | (25.780.687.972,00) | (100,00) |
| 21 | Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | - | 628.111.508,00 | (628.111.508,00) | (100,00) |
| 22 | Sekretariat Daerah | 18.269.084.149,00 | 17.260.598.085,00 | 1.008.486.064,00 | 1,00 |
| 23 | Sekretariat DPRD | 33.601.055.051,00 | 3.794.149.049,00 | 29.806.906.002,00 | 785,60 |
| 24 | Kecamatan dan Kelurahan | 48.890.187.760,00 | 50.806.491.966,00 | (1.916.304.206,00) | (3,77) |
| 25 | Inspektorat | 5.810.377.963,00 | 4.471.634.846,00 | 1.338.743.117,00 | 29,94 |
| 26 | Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah | 4.854.969.973,00 | 4.803.996.624,00 | 50.973.349,00 | 1,06 |
| 27 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 6.378.446.714,00 | 7.667.720.795,00 | (1.289.274.081,00) | (16,81) |
| 28 | Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah | 8.290.140.650,00 | 11.179.812.725,00 | (2.889.672.075,00) | (25,85) |
| 29 | Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah | 5.548.959.738,00 | 4.866.923.557,00 | 682.036.181,00 | 14,01 |
| | Jumlah | 1.143.777.516.215,00 | 1.170.439.343.348,00 | (26.661.827.133,00) | (2,28) |

5.4.2.2 Beban Barang dan Jasa

Tahun 2021
 Rp680.023.351.852,86

Tahun 2020
 Rp535.756.661.893,72

Beban Barang dan Jasa tahun 2021 sebesar Rp680.023.351.852,86 secara rinci dapat dilihat berikut ini:



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

Rincian Tabel Rincian Beban Barang dan Jasa

| Uraian | Tahun 2021 | Tahun 2020 | Kenaikan/ | % |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|
| | (Rp) | (Rp) | (Penurunan) (Rp) | |
| Beban Barang | 95.502.375.432,16 | 89.764.191.351,72 | 5.738.184.080,44 | 6,39 |
| Beban Jasa | 181.518.209.656,70 | 105.412.726.412,00 | 76.105.483.244,70 | 72,20 |
| Beban Pemeliharaan | 31.852.958.221,00 | 35.871.725.480,00 | (4.018.767.259,00) | (11,20) |
| Beban Perjalanan Dinas | 36.181.261.230,00 | 47.954.636.045,00 | (11.773.374.815,00) | (24,55) |
| Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 1.182.463.000,00 | 2.657.306.490,00 | (1.474.843.490,00) | (55,50) |
| Beban Barang dan Jasa BOS | 70.636.055.279,00 | 72.714.779.407,00 | (2.078.724.128,00) | (2,86) |
| Beban Barang dan Jasa BLUD | 263.150.029.034,00 | 181.381.296.708,00 | 81.768.732.326,00 | 45,08 |
| Jumlah | 680.023.351.852,86 | 535.756.661.893,72 | 144.266.689.959,14 | 26,93 |

Sedangkan Rincian Beban Barang dan Jasa per SKPD tahun 2021 dijelaskan sebagai berikut:

Rincian Tabel Rincian Beban Barang dan Jasa per SKPD

| No | OPD | 2021 | 2020 | Kenaikan/(Penurunan) | % |
|----|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|
| 1 | Dinas Pendidikan | 115.519.516.378,00 | 106.926.817.128,00 | 8.592.699.250,00 | 8,04 |
| 2 | Dinas Kesehatan | 361.138.685.824,16 | 263.102.855.597,72 | 98.035.830.226,44 | 37,26 |
| 3 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | 28.013.557.058,00 | 21.732.679.443,00 | 6.280.877.615,00 | 28,90 |
| 4 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 4.377.837.907,00 | 13.047.573.637,00 | (8.669.735.730,00) | (66,45) |
| 5 | Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | 15.720.488.568,00 | 12.202.531.378,00 | 3.517.957.190,00 | 28,83 |
| 6 | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik | 1.185.829.244,00 | 807.163.019,00 | 378.666.225,00 | 46,91 |
| 7 | Satuan Polisi Pamong Praja | 6.289.372.393,00 | 7.494.165.485,00 | (1.204.793.092,00) | (16,08) |
| 8 | Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | 12.779.360.937,00 | 13.421.058.648,00 | (641.697.711,00) | (4,78) |
| 9 | Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah | 7.910.871.857,00 | 5.598.699.170,00 | 2.312.172.687,00 | 41,30 |
| 10 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 4.390.445.734,00 | 4.055.453.839,00 | 334.991.895,00 | 8,26 |
| 11 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak | 8.620.524.680,00 | 2.889.704.049,00 | 5.730.820.631,00 | 198,32 |
| 12 | Dinas Perhubungan | 14.859.092.834,00 | 9.868.989.641,00 | 4.990.103.193,00 | 50,56 |
| 13 | Dinas Komunikasi Dan Informatika | 6.857.977.614,00 | 4.026.113.772,00 | 2.831.863.842,00 | 70,34 |
| 14 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 2.335.199.502,00 | 1.123.846.081,00 | 1.211.353.421,00 | 107,79 |
| 15 | Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata | 6.081.986.926,00 | 4.114.007.915,00 | 1.967.979.011,00 | 47,84 |
| 16 | Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan | 1.458.945.508,00 | 1.120.594.523,00 | 338.350.985,00 | 30,19 |
| 17 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 4.473.559.131,00 | 2.526.435.889,00 | 1.947.123.242,00 | 77,07 |
| 18 | Dinas Pertanian dan Pangan | 11.625.486.591,00 | 7.920.249.634,00 | 3.705.236.957,00 | 46,78 |
| 19 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 6.996.441.491,00 | 5.642.697.285,00 | 1.353.744.206,00 | 23,99 |
| 20 | Sekretariat Daerah | 10.467.820.388,00 | 8.365.649.249,00 | 2.102.171.139,00 | 25,13 |
| 21 | Sekretariat DPRD | 12.282.543.979,00 | 10.447.669.068,00 | 1.834.874.911,00 | 17,56 |
| 22 | Kecamatan dan Kelurahan | 17.173.618.202,00 | 16.289.895.454,00 | 883.722.748,00 | 5,42 |
| 23 | Inspektorat | 1.224.648.894,00 | 1.477.845.325,00 | (253.196.431,00) | (17,13) |
| 24 | Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan | 3.536.927.255,00 | 2.323.571.872,00 | 1.213.355.383,00 | 52,22 |
| 25 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 3.645.965.014,00 | 2.489.733.221,00 | 1.156.231.793,00 | 46,44 |
| 26 | Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah | 5.360.422.282,00 | 3.462.543.224,00 | 1.897.879.058,00 | 54,81 |
| 27 | Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah | 5.696.225.662,00 | 3.278.118.347,00 | 2.418.107.315,00 | 73,77 |
| | Jumlah | 680.023.351.853,16 | 535.756.661.893,72 | 144.266.689.959,44 | 26,93 |

5.4.2.3 Beban Subsidi

Tahun 2021
Rp484.527.400,00

Tahun 2020

-



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

Beban Subsidi pada tahun 2021 sebesar Rp484.527.400,00 merupakan beban atas subsidi bunga kepada BUMD Tahun Anggaran 2021 dengan total realisasi sebesar Rp500.000.000,00 dengan rincian PT BPR Bank Kebumen sebesar Rp200.000.000,00 ; PT BPR BKK Kebumen sebesar Rp225.000.000,00 dan PT BPR BKK Jateng sebesar Rp75.000.000,00 yang dikeluarkan dengan SP2D No. 00338/LS-SUBSIDI/DAU/2021 Tanggal 26 April 2021, namun terdapat pengembalian subsidi sebesar Rp15.472.600,00 tanggal 10 Desember 2021 dari PT BPR BKK Jateng KC Kebumen.

5.4.2.4 Beban Hibah

| | |
|---------------------|----------------------|
| Tahun 2021 | Tahun 2020 |
| Rp72.414.174.601,00 | Rp122.978.836.872,00 |

Beban Hibah secara rinci disajikan sebagai berikut.

Tabel Rincian Beban Hibah

| Uraian | Tahun 2021 | Tahun 2020 | Kenaikan/ (Penurunan) (Rp) | % |
|--|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------|
| | (Rp) | (Rp) | | |
| Hibah Barang kepada Pemerintah | | 150.000.000,00 | (150.000.000,00) | 100,00 |
| Hibah kepada Badan , Lembaga , Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia | 70.349.298.601,00 | 122.828.836.872,00 | (52.479.538.271,00) | (42,73) |
| Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik | 2.064.876.000,00 | | | |
| Jumlah | 72.414.174.601,00 | 122.978.836.872,00 | (50.564.662.271,00) | (41,12) |

Beban Hibah Tahun 2021 dijelaskan sebagai berikut:

a. Hibah kepada Badan , Lembaga , Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia tahun 2021 sebesar Rp70.349.298.601,00

| Unit Organisasi | Uraian | Realisasi |
|---|---|--------------------------|
| Dinas Pendidikan | Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang | 22.406.050.000,00 |
| Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan | Bersifat Nirlaba, Sukarela, dan Sosial yang | 1.099.876.739,00 |
| Dinas Pertanian dan Pangan | Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- | 3.348.750.000,00 |
| Bagian Kesejahteraan Rakyat | Undangan | 400.000.000,00 |
| Dinas Pendidikan | Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang | 70.139.000,00 |
| Dinas Kesehatan | Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk | 1.146.916.000,00 |
| Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan | 282.945.500,00 |
| Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | | 234.859.600,00 |
| Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan | | 1.495.082.000,00 |
| Dinas Kelautan dan Perikanan | | 5.910.506.150,00 |
| Dinas Pertanian dan Pangan | | 22.764.919.825,00 |
| Bagian Kesejahteraan Rakyat | Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar | 1.821.000.000,00 |
| Dinas Pendidikan | Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, | 49.707.200,00 |
| Dinas Kelautan dan Perikanan | Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat | 2.957.526.587,00 |
| Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Keterangan Terdaftar | 1.111.187.000,00 |
| Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan | 4.990.500.000,00 |
| Dinas Kelautan dan Perikanan | Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan | 57.783.000,00 |
| Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | Hibah Barang Kepada Koperasi | 201.550.000,00 |
| Jumlah | | 70.349.298.601,00 |

b. Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebesar Rp2.064.876.000,00 dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

Tabel Rincian Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

| No | Nama Partai Politik | Realisasi |
|--------|---------------------------------------|--------------------|
| 1 | Partai Nasional Demokrat | 162.873.000 |
| 2 | Partai Kebangkitan Bangsa | 356.487.000 |
| 3 | Partai Keadilan Sejahtera | 126.141.000 |
| 4 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 464.832.000 |
| 5 | Partai Golongan Karya | 228.741.000 |
| 6 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 281.346.000 |
| 7 | Partai Demokrat | 133.671.000 |
| 8 | Partai Amanat Nasional | 146.091.000 |
| 9 | Partai Persatuan Pembangunan | 164.694.000 |
| Jumlah | | 2.064.876.000,00 |

5.4.2.5 Beban Bantuan Sosial

| | |
|-------------------|---------------------|
| Tahun 2021 | Tahun 2020 |
| Rp21.478899729,00 | Rp34.639.637.162,00 |

Beban Bantuan Sosial secara rinci disajikan sebagai berikut.

Tabel Rincian Beban Bantuan Sosial

| Uraian | Tahun 2021 (Rp) | Tahun 2020 (Rp) | Kenaikan / (Penurunan) (Rp) | % |
|--|----------------------|-------------------|--------------------------------|-------------|
| Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu | 14.633.270.000,00 | - | 14.633.270.000,00 | 0,00 |
| Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu | 2.372.371.729,00 | 34.639.637.162,00 | (32.267.265.433,00) | (93,15) |
| Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga | 40.500.000,00 | - | 40.500.000,00 | 0,00 |
| Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga | 3.232.758.000,00 | 0 | 3.232.758.000,00 | 0 |
| Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat | 1.200.000.000,00 | 0 | 1.200.000.000,00 | 0 |
| Jumlah | 21.478.899.729,00 | 34.639.637.162,00 | | |

- a. Beban Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu sebesar Rp14.633.270.000,00 dilaksanakan oleh 7 (tujuh) SKPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Rincian Beban Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu

| No. | SKPD Pengelola | Nilai (Rp) |
|--------|---|-------------------|
| 1 | Dinas Pendidikan | 1.529.270.000,00 |
| 2 | Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup | 10.215.000.000,00 |
| 3 | Satuan Polisi Pamong Praja | 32.000.000,00 |
| 4 | Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 199.500.000,00 |
| 5 | Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 2.520.000.000,00 |
| 6 | Kelurahan Kebumen | 75.000.000,00 |
| 7 | Kelurahan Gombang | 62.500.000,00 |
| Jumlah | | 14.633.270.000,00 |

- b. Beban Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga sebesar Rp40.500.000,00 dilaksanakan oleh SKPD Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- c. Beban Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Keluarga sebesar Rp3.232.758.000,00 dengan rincian sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

Tabel Rincian Beban Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Keluarga

| No. | SKPD Pengelola | Jumlah |
|-----|------------------------------|-------------------------|
| 1. | Dinas Kesehatan | 2.862.746.000,00 |
| 2. | Dinas Kelautan dan Perikanan | 370.012.000,00 |
| | Jumlah | 3.232.758.000,00 |

- d. Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat sebesar Rp1.200.000.000 dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum sesuai Peraturan Bupati Kebumen Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Belanja Bantuan Sosial Masyarakat Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Di Kabupaten Kebumen dan SK Bupati Nomor 600/100 Tanggal 19 Maret 2021 tentang Penerima Belanja Bantuan Sosial Masyarakat Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021.

5.4.2.6 Beban Penyisihan Piutang

| Tahun 2021 | Tahun 2020 |
|--------------------|------------------|
| Rp3.268.730.526,25 | Rp968.200.867,75 |

Beban Penyisihan Piutang tahun 2021 sebesar Rp3.268.730.526,25 merupakan beban penyisihan piutang Pemerintah Kabupaten Kebumen yang terdapat pada SKPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Rincian Beban Penyisihan Piutang

| Uraian | Tahun 2021 (Rp) | Tahun 2020 (Rp) | Kenaikan/ (Penurunan) (Rp) | % |
|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------|
| Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah | 676.537.081,50 | 728.534.941,50 | (51.997.860,00) | (7,14) |
| Beban Penyisihan Piutang Retribusi | 803.870.431,00 | 242.098.480,00 | 561.771.951,00 | 232,04 |
| Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah | 1.707.135.227,00 | (25.291.484,75) | 1.732.426.711,75 | (6.849,84) |
| Beban Penyisihan Piutang Lainnya | 81.187.786,75 | 22.858.931,00 | 58.328.855,75 | 255,17 |
| Jumlah | 3.268.730.526,25 | 968.200.867,75 | 2.300.529.658,50 | (6.369,77) |

5.4.2.7 Beban Penyusutan Peralatan Mesin

| Tahun 2021 | Tahun 2020 |
|----------------------|----------------------|
| Rp109.590.832.608,00 | Rp101.978.559.001,00 |

Beban penyusutan peralatan mesin merupakan penyusutan aset tetap atas peralatan mesin tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

Tabel Rincian Beban Penyusutan Peralatan Mesin

| Uraian | Tahun 2021 | Tahun 2020 | Kenaikan/ (Penurunan) (Rp) | % |
|---|------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|
| | (Rp) | (Rp) | | |
| Dinas Pendidikan | 28.430.995.312 | 26.526.454.474 | 1.904.540.838 | 7,18 |
| Dinas Kesehatan | 52.041.612.801 | 47.008.414.881 | 5.033.197.920 | 10,71 |
| Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | 2.448.556.289 | 2.629.507.789 | (180.951.500) | (6,88) |
| Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | 2.877.724.351 | 2.859.009.000 | 18.715.351 | 0,65 |
| Satuan Polisi Pamong Praja | 1.050.555.205 | 1.150.137.136 | (99.581.931) | (8,66) |
| Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 1.619.750.634 | 1.358.668.994 | 261.081.640 | 19,22 |
| Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | 1.046.512.877 | 851.587.209 | 194.925.668 | 22,89 |
| Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah | 1.066.804.274 | 1.196.495.508 | (129.691.234) | (10,84) |
| Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 854.046.248 | 688.380.726 | 165.665.522 | 24,07 |
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak | 249.684.521 | 308.125.421 | (58.440.900) | (18,97) |
| Dinas Perhubungan | 2.388.825.733 | 2.179.563.938 | 209.261.795 | 9,60 |
| Dinas Komunikasi Dan Informatika | 2.625.934.368 | 2.893.962.721 | (268.028.353) | (9,26) |
| Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 312.428.144 | 342.318.605 | (29.890.461) | (8,73) |
| Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata | 752.254.772 | 783.445.523 | (31.190.751) | (3,98) |
| Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan | 496.140.518 | 464.966.518 | 31.174.000 | 6,70 |
| Dinas Kelautan dan Perikanan | 394.573.671 | 454.686.076 | (60.112.405) | (13,22) |
| Dinas Pertanian dan Pangan | 555.506.894 | 628.168.769 | (72.661.875) | (11,57) |
| Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 1.263.116.366 | 1.361.548.335 | (98.431.969) | (7,23) |
| Sekretariat Daerah | 1.828.745.024 | 2.026.226.409 | (197.481.385) | (9,75) |
| Inspektorat | 269.031.390 | 203.882.374 | 65.149.016 | 31,95 |
| Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah | 240.312.254 | 258.079.204 | (17.766.950) | (6,88) |
| Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | 2.221.293.739 | 959.417.248 | 1.261.876.491 | 131,53 |
| Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah | 424.380.316 | 380.209.089 | 44.171.227 | 11,62 |
| Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah | 202.078.393 | 237.795.118 | (35.716.725) | (15,02) |
| Sekretariat DPRD | 937.785.064 | 1.296.913.204 | (359.128.140) | (27,69) |
| Kecamatan dan Kelurahan | 2.892.214.718 | 2.832.968.012 | 59.246.706 | 2,09 |
| Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 99.968.732 | 97.626.720 | 2.342.012 | 2,40 |
| Jumlah | 109.590.832.608 | 101.978.559.001 | 7.612.273.607 | 7,46 |

5.4.2.8 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

Tahun 2021
Rp32.093.207.221,00

Tahun 2020
Rp29.861.738.581,00

Beban penyusutan gedung dan bangunan merupakan penyusutan aset tetap atas gedung dan bangunan tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

Tabel Rincian Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

| OPD | TA 2021 | TA 2020 | Kenaikan / Penurunan | % |
|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------|
| Dinas Pendidikan | 12.807.804.720,00 | 12.458.699.060,00 | 349.105.660,00 | 2,80 |
| Dinas Kesehatan | 7.082.891.786,00 | 6.111.212.677,00 | 971.679.109,00 | 15,90 |
| Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | 246.939.722,00 | 383.804.084,00 | (136.864.362,00) | (35,66) |
| Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | 905.418.003,00 | 783.690.340,00 | 121.727.663,00 | 15,53 |
| Satuan Polisi Pamong Praja | 99.500.510,00 | 99.500.510,00 | 0,00 | - |
| Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 82.647.995,00 | 43.381.515,00 | 39.266.480,00 | 90,51 |
| Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | 188.896.424,00 | 181.229.184,00 | 7.667.240,00 | 4,23 |
| Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah | 659.600.485,00 | 659.400.485,00 | 200.000,00 | 0,03 |
| Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 75.745.526,00 | 75.745.526,00 | 0,00 | - |
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak | 35.560.590,00 | 35.560.590,00 | 0,00 | - |
| Dinas Perhubungan | 245.673.370,00 | 245.673.370,00 | 0,00 | - |
| Dinas Komunikasi Dan Informatika | 92.469.729,00 | 92.469.729,00 | 0,00 | - |
| Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 75.644.198,00 | 77.120.774,00 | (1.476.576,00) | (1,91) |
| Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata | 1.758.883.814,00 | 1.763.893.162,00 | (5.009.348,00) | (0,28) |
| Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan | 156.038.992,00 | 156.038.992,00 | 0,00 | - |
| Dinas Kelautan dan Perikanan | 302.889.150,00 | 274.566.668,00 | 28.322.482,00 | 10,32 |
| Dinas Pertanian dan Pangan | 393.543.970,00 | 370.835.279,00 | 22.708.691,00 | 6,12 |
| Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 4.778.244.524,00 | 4.127.718.274,00 | 650.526.250,00 | 15,76 |
| Sekretariat Daerah | 304.104.993,00 | 283.661.991,00 | 20.443.002,00 | 7,21 |
| Inspektorat | 125.912.794,00 | 31.361.940,00 | 94.550.854,00 | 301,48 |
| Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah | 14.625.449,00 | 14.625.449,00 | 0,00 | - |
| Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | 281.584.661,00 | 276.145.965,00 | 5.438.696,00 | 1,97 |
| Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah | 60.449.358,00 | 60.449.358,00 | 0,00 | - |
| Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah | 35.232.108,00 | 37.457.604,00 | (2.225.496,00) | (5,94) |
| Sekretariat DPRD | 334.240.024,00 | 334.240.024,00 | 0,00 | - |
| Kecamatan dan Kelurahan | 885.569.651,00 | 820.161.356,00 | 65.408.295,00 | 7,98 |
| Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 63.094.675,00 | 63.094.675,00 | 0,00 | - |
| Jumlah | 32.093.207.221,00 | 29.861.738.581,00 | 2.231.468.640,00 | |

5.4.2.9 Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi

Tahun 2021
Rp161.866.298.450,00

Tahun 2020
Rp154.699.361.720,02

Beban penyusutan jalan jaringan dan irigasi merupakan penyusutan aset tetap atas jalan jaringan dan irigasi tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

Tabel Rincian Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi

| OPD | TA 2021 (Rp) | TA 2020 (Rp) | Kenaikan / | % |
|---|---------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|
| Dinas Pendidikan | 49.351.573,00 | 49.351.573,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dinas Kesehatan | 1.824.157.918,00 | 1.805.704.890,00 | 18.453.028,00 | 1,02 |
| Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | 151.046.197.329,00 | 144.771.597.800,00 | 6.274.599.529,00 | 4,33 |
| Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | 3.116.645.256,00 | 2.405.092.647,00 | 711.552.609,00 | 29,59 |
| Satuan Polisi Pamong Praja | 345.500,00 | 345.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 510.058.375,00 | 428.780.475,00 | 81.277.900,00 | 18,96 |
| Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | 2.101.624,00 | 2.101.624,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah | 8.608.280,00 | 8.608.280,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 2.968.717,00 | 2.968.717,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak | 2.383.346,00 | 2.383.346,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dinas Perhubungan | 1.196.946.994,00 | 1.124.015.091,00 | 72.931.903,00 | 6,49 |
| Dinas Komunikasi Dan Informatika | 181.005.882,00 | 181.005.882,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 1.665.650,00 | 1.665.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata | 1.340.833.061,00 | 1.336.841.530,00 | 3.991.531,00 | 0,30 |
| Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan | 2.409.000,00 | 2.409.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dinas Kelautan dan Perikanan | 163.375.876,00 | 163.375.876,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dinas Pertanian dan Pangan | 866.705.335,00 | 866.705.335,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 1.325.000,00 | 1.325.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sekretariat Daerah | 10.926.558,00 | 10.926.558,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inspektorat | 2.780.745,00 | 2.780.745,00 | 0,00 | 0,00 |
| Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah | 6.863.750,00 | 6.863.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | 18.909.093,00 | 18.909.093,00 | 0,00 | 0,00 |
| Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah | 3.603.363,00 | 3.603.363,00 | 0,00 | 0,00 |
| Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan | 4.132.505,00 | 4.132.505,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sekretariat DPRD | 53.876.715,00 | 53.876.715,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kecamatan dan Kelurahan | 1.448.121.005,00 | 1.443.990.775,02 | 4.130.229,98 | 0,29 |
| Jumlah | 161.866.298.450,00 | 154.699.361.720,02 | 7.166.936.729,98 | 4,63 |

5.4.2.10 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Tahun 2021
Tahun 2020
(Rp520.781.934,82)
(Rp391.499.303,00)

Beban amortisasi aset tidak berwujud merupakan penyusutan atas aset lainya berupa software, kajian dan aset tidak berwujud lainya yang ada di OPD dengan rincian sebagai berikut :

| Uraian | Tahun 2021 (Rp) | Tahun 2020 (Rp) | Kenaikan / Penurunan (Rp) | % |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------------|--------------|
| Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud - Lisensi dan Frenchise | - | 77.217.400,00 | (77.217.400,00) | (100,00) |
| Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud - Software | 355.094.193,00 | 3.300.000,00 | 351.794.193,00 | 10.660,43 |
| Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud - Kajian | 141.511.931,82 | | 141.511.931,82 | - |
| Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainya | 24.175.810,00 | 310.981.903,00 | (286.806.093,00) | (92,23) |
| Jumlah | 520.781.934,82 | 391.499.303,00 | 129.282.631,82 | 33,02 |



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

Tabel Rincian Beban amortisasi aset tidak berwujud

| URAIAN | TA 2021 (Rp) | TA 2020 (Rp) | Kenaikan / | % |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| Dinas Pendidikan | 7.122.560,00 | 5.372.560,00 | 1.750.000,00 | 32,57 |
| Dinas Kesehatan | 153.424.600,00 | 81.267.400,00 | 72.157.200,00 | 88,79 |
| Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | 133.734.931,82 | 91.311.500,00 | 42.423.431,82 | 46,46 |
| Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah | 9.676.500,00 | 9.405.500,00 | 271.000,00 | 2,88 |
| Dinas Perhubungan | 18.194.590,00 | 18.194.590,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dinas Komunikasi Dan Informatika | 35.031.715,00 | 35.031.715,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata | 12.111.000,00 | 12.111.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan | 19.425.810,00 | 19.425.810,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 25.914.818,00 | 22.933.818,00 | 2.981.000,00 | 13,00 |
| Sekretariat Daerah | 34.028.110,00 | 34.028.110,00 | 0,00 | 0,00 |
| Badan Perencanaan dan Penelitian Dan | 10.586.200,00 | 10.586.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | 15.921.500,00 | 6.221.500,00 | 9.700.000,00 | 155,91 |
| Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah | 41.609.600,00 | 41.609.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kecamatan Kutowinangun | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah | 520.781.934,82 | 391.499.303,00 | 129.282.631,82 | 33,02 |

5.4.2.11 Beban Bagi Hasil

| | |
|--|--|
| Tahun 2021 <u>(Rp13.862.929.650,00)</u> | Tahun 2020 <u>(Rp13.527.756.700,00)</u> |
|--|--|

Beban bagi hasil tahun 2021 sebesar Rp13.862.929.650,00 mengalami kenaikan sebesar Rp335.172.950,00 atau 2,48% , yang merupakan bagi hasil pajak daerah kepada Kabupaten/Kota dan Desa serta bagi hasil retribusi daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa dengan rincian sebagai berikut :

Tabel Rincian Beban Bagi Hasil

| No | Uraian | TA 2021 (Rp) | TA 2020 (Rp) | Kenaikan / Penurunan (Rp) | % |
|----|---|--------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------|
| 1 | Beban bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa | 11.148.216.650,00 | 9.657.463.900,00 | 1.490.752.750 | 15,44 |
| 2 | kabupaten/kota kepada pemerintah desa | 2.714.713.000,00 | 3.870.292.800,00 | (1.155.579.800) | (29,86) |
| | Jumlah | 13.862.929.650,00 | 13.527.756.700,00 | 335.172.950,00 | 2,48 |

5.4.2.12 Beban Bantuan Keuangan

| | |
|---|---|
| Tahun 2021 <u>(Rp191.422.134.000,00)</u> | Tahun 2020 <u>(Rp178.749.036.400,00)</u> |
|---|---|

Beban bagi bantuan keuangan tahun 2021 sebesar Rp191.422.134,00 mengalami kenaikan sebesar Rp12.673.097.600,00 atau 7,09% , yang merupakan bantuan keuangan umum daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa serta Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

| No | Uraian | TA 2021 (Rp) | TA 2020 (Rp) | Kenaikan / Penurunan (Rp) | % |
|---------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|
| 1 | Beban bantuan keuangan umum daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa | 169.581.134.000,00 | 176.684.160.400,00 | (7.103.026.400) | (4,02) |
| 2 | Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa | 21.841.000.000,00 | 2.064.876.000,00 | 19.776.124.000 | 957,74 |
| Jumlah | | 191.422.134.000,00 | 178.749.036.400,00 | 12.673.097.600,00 | 7,09 |

- a. Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi Atau Kabupaten/Kota Ke Desa tahun 2021 sebesar Rp169.581.134.000,00 dengan rincian sebagai berikut

| No | Uraian | Realisasi |
|---------------|--|------------------------|
| 1 | Alokasi Dana Desa (ADD) | 167.346.134.000 |
| 2 | Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa untuk Bantuan Keuangan Operasional TPQ | 2.235.000.000 |
| Jumlah | | 169.581.134.000 |

- b. Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa tahun 2021 sebesar Rp21.841.000.000,00 yang digunakan untuk Pembangunan Kawasan Perdesaan sesuai Surat Keputusan Bupati No 900/285 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen No 900/155 Tahun 2021 tentang Penerima Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021.

5.4.3 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Tahun 2021 | Tahun 2020 |
| (Rp11.103.569.757,00) | (Rp14.871.500.954,00) |

Kegiatan Non Operasional merupakan kegiatan yang bersumber dari defisit penjualan aset non lancar, defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang dan defisit dari kegiatan non operasional lainnya.

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar (Rp11.103.569.757,00) adalah sebagai berikut.

Tabel Defisit Kegiatan Non Operasional

| Uraian | Tahun 2021 | Tahun 2020 | Kenaikan/ | % |
|--|----------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------|
| | (Rp) | (Rp) | (Penurunan) (Rp) | |
| Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO | 1.623.258.031,00 | 1.210.699.490,00 | 412.558.541,00 | 34,08 |
| Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO | 12.726.827.788,00 | 16.082.200.444,00 | (3.355.372.656,00) | (20,86) |
| Jumlah | (11.103.569.757,00) | (14.871.500.954,00) | 3.767.931.197,00 | (25,34) |



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

5.4.3.1 Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO

Surplus Penjualan Aset Non Lancar – LO 2020 sebesar Rp1.623.258.31,00 secara rinci dapat dilihat berikut ini:

Tabel Surplus Penjualan Aset Non Lancar – LO

| Uraian | Tahun 2021 | Tahun 2020 | Kenaikan/ | % |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|
| | (Rp) | (Rp) | (Penurunan) (Rp) | |
| Hasil Penjualan Peralatan/Mesin | 1.290.265.031,00 | 974.815.589,00 | 315.449.442,00 | 32,36 |
| Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan | 332.993.000,00 | 235.883.901,00 | 97.109.099,00 | 41,17 |
| Jumlah | 1.623.258.031,00 | 1.210.699.490,00 | 412.558.541,00 | 34,08 |

5.4.3.2 Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO 2020 sebesar Rp12.726.827.788,00 berasal dari penghapusan aset tetap kondisi rusak berat, yang secara rinci sebagai berikut:

Tabel Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO

| No | Uraian | No SK Hapus | Jumlah |
|---------------|--|---------------------|--------------------------|
| 1 | SK Sekda tentang Penghapusan BMD Badan, Dinas, Kantor | 028/2359.6/KEP/2021 | 3.927.391.323,00 |
| 2 | SK Sekda tentang Penghapusan BMD Puskesmas, Kecamatan, SMP | 028/2359.6/KEP/2021 | 2.718.248.707,00 |
| 3 | SK Sekda tentang Penghapusan BMD DISDIK, TK DAN KORWIL | 028/2359.7/KEP/2021 | 5.201.599.828,00 |
| 4 | SK Sekda tentang Penghapusan BMD Kendaraan Dinas | 028/118/KEP/2021 | 879.587.930,00 |
| Jumlah | | | 12.726.827.788,00 |

5.4.4 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa merupakan rekening yang menampung peristiwa atau kejadian luar biasa tahun 2021 yang mempunyai karakteristik kejadian tidak normal dan jarang terjadi serta di luar kendali entitas pemerintah daerah. Secara rinci dapat dilihat berikut ini:

| Uraian | Tahun 2021 | Tahun 220 | Kenaikan/ | % |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| | (Rp) | (Rp) | (Penurunan) (Rp) | |
| Pendapatan Luar Biasa - LO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beban Luar Biasa | 545.318.400,00 | 309.529.716,00 | 235.788.684,00 | 76,18 |
| Jumlah | (545.318.400,00) | (309.529.716,00) | (235.788.684,00) | 76,18 |

5.4.4.1 Beban Tak Terduga

| | |
|------------------|----------------|
| Tahun 2021 | Tahun 2019 |
| Rp545.318.400,00 | Rp309.529.716, |

Beban Luar Biasa 2021 sebesar Rp545.318.400,00 merupakan beban atas Pengembalian Setoran Hak Bersih lelang an. Susmadyo Putro ke KPKNL, Pengembalian gaji bulan ke 13 Tahun Anggaran 2020 an. Alm. Slamet Guru SDN Kalipoh Korwil Bidik Kecamatan Ayah, Bantuan Untuk Korban Bencana Alam, Peny. Jaring Pengaman Sosial Dampak PPKM Darurat Covid, bantuan Migran Korban Tindak kekerasan, bantuan orang kehabisan bekal/PMKS, Bantuan kepada Korban Kebakaran dengan rincian sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

| No | NO. BUKTI | Tgl SP2D | No SP2D | URAIAN | Nilai |
|--------|------------------------------|------------|-----------------------|---|----------------|
| 1 | S-118/WKN.09/ KNL.08/2021 | 19/02/2021 | 00166/LS-BTT/DAU/2021 | Pengembalian Setoran Hak Bersih Lelang (HBL) | 15.500.000,00 |
| 2 | 900/781 | 30/03/2021 | 00131/LS-BTT/DAU/2021 | Permohonan Pembayaran Gaji 13 TA 2020 an. Alm Slamet Guru SD N Kalipoh Korwil Bidik Kecamatan Ayah sesuai surat dari Diknas Kab Kebumen No 900/781 Tgl 08-02-2021 | 5.368.400,00 |
| 3 | 045.2/3422 | 13/04/2021 | 00277/LS-BTT/PAD/2021 | Pencairan Dana Tidak Terduga untuk Bantuan Orang Kehabisan Bekal/PMKS Tahap I TA 2021 | 5.700.000,00 |
| 4 | 900/6348 | 07/05/2021 | 00459/LS-BTT/PAD/2021 | Permohonan Pencairan Dana Belanja Tidak Terduga Bantuan Korban Bencana Alam Tahap 1 di Kabupaten Kebumen TA 2021 | 112.500.000,00 |
| 5 | 900/7132 | 27/05/2021 | 00670/LS-BTT/PAD/2021 | Permohonan Pencairan Dana Belanja Tidak Terduga kepada Korban Kebakaran Tahap 1 TA 2021 | 35.000.000,00 |
| 6 | 045.2/7713 | 23/06/2021 | 00532/LS-BTT/PAD/2021 | Pencairan Dana Tidak Terduga untuk Bantuan Orang Kehabisan Bekal/PMKS | 12.500.000,00 |
| 7 | 900/2754 | 14/07/2021 | 00742/LS-BTT/PAD/2021 | Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga Penyediaan Jaring Pengaman Sosial/Safety Net Bantuan Sosial Dampak PPKM Darurat Covid-19 Tgl 3 s.d. 21-7-2021 Kab Kebumen 2021 | 123.000.000,00 |
| 8 | 900/2903 | 02/08/2021 | 00829/LS-BTT/PAD/2021 | Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga Penyediaan Jaring Pengaman Sosial/Social Safety Net Dampak PPKM Darurat Covid-19 Kab Kebumen TA 2021 | 107.000.000,00 |
| 9 | 900/10490 | 17/09/2021 | 01010/LS-BTT/PAD/2021 | Permohonan Pencairan Dana Belanja Tidak Terduga kepada Korban Kebakaran Tahap 2 TA 2021 | 55.000.000,00 |
| 10 | 0452.2/10960 | 30/09/2021 | 01016/LS-BTT/PAD/2021 | Pencairan Dana Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Orang Kehabisan Bekal/PMKS Tahap III TA 2021 | 7.050.000,00 |
| 11 | 900/10911 | 30/09/2021 | 01017/LS-BTT/PAD/2021 | Pencairan Dana Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Migran Korban Tindak Kekerasan Tahap I di Kabupaten Kebumen TA 2021 | 2.000.000,00 |
| 12 | 045.2/12754 | 23/11/2021 | 01224/LS-BTT/PAD/2021 | Pencairan Dana Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Orang Kehabisan Bekal/PMKS Tahap IV TA 2021 | 4.700.000,00 |
| 13 | 900/12765 | 23/11/2021 | 01226/LS-BTT/PAD/2021 | Permohonan Pencairan Dana Belanja Tidak Terduga kepada Korban Kebakaran Tahap 3 TA 2021 | 47.000.000,00 |
| 14 | 900/12766 | 23/11/2021 | 01227/LS-BTT/PAD/2021 | Permohonan Pencairan Dana Belanja Tidak Terduga kepada Korban Kebakaran Tahap 4 TA 2021 | 8.000.000,00 |
| 15 | 900/12767 | 23/11/2021 | 01228/LS-BTT/PAD/2021 | Permohonan Pencairan Dana Belanja Tidak Terduga kepada Korban Kebakaran Tahap 2 TA 2021 | 5.000.000,00 |
| Jumlah | | | | | 545.318.400,00 |

Defisit dari Pos Luar Biasa Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp545.318.400,00. Dengan demikian, surplus/defisit-LO yang dihasilkan selama Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp22.307.083.691,24.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

5.5 Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode Tahun 2021 yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pembiayaan, dan non anggaran.

Saldo Awal Kas atau saldo kas per 31 Desember 2020 sebesar Rp219.984.624.515,98. Terjadi kenaikan saldo kas selama tahun 2021 sebesar Rp49.195.002.683,00 sehingga saldo akhir Kas per 31 Desember 2021 sebesar Rp269.179.627.198,98 dengan rincian sebagai berikut.

Saldo Kas per 31 Desember 2021

| Rincian SILPA | Kas (Rp) | Utang Pfk (Rp) | Silpa (Rp) |
|------------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------|
| Kas di Kas Daerah | 167.807.726.233,00 | 0,00 | 167.807.726.233,00 |
| Kas di bendahara Penerimaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kas di Bendahara Pengeluaran | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| Kas BLUD RSUD Soedirman | 42.767.044.674,00 | 0,00 | 42.767.044.674,00 |
| Kas BLUD RSUD Prembun | 48.873.491.269,00 | 0,00 | 48.873.491.269,00 |
| Kas BLUD Puskesmas | 4.735.938.728,98 | 0,00 | 4.735.938.728,98 |
| Kas Dana BOS | 4.995.026.294,00 | 0,00 | 4.995.026.294,00 |
| Jumlah | 269.179.627.198,98 | 0,00 | 269.179.627.198,98 |

Kenaikan saldo kas selama tahun 2021 sebesar Rp49.195.002.683,00 berasal dari:

| No | Uraian | Jumlah |
|----|--|--------------------------|
| 1 | Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi | 316.682.009.942,00 |
| 2 | Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi | (264.487.692.309,00) |
| 3 | Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan | (2.965.000.000,00) |
| 4 | Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris | (34.314.950,00) |
| | Jumlah | 49.195.002.683,00 |

5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus kas bersih dari aktivitas operasi diikhtisarkan sebagai berikut.

Tabel Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

| Uraian | Tahun 2021 Rp | Tahun 2020 Rp |
|---|---------------------------|---------------------------|
| Arus Kas Masuk | 2.830.411.757.702,00 | 2.762.018.607.739,80 |
| Arus Kas Keluar | 2.513.729.747.760,00 | 2.449.060.867.062,00 |
| Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi | 316.682.009.942,00 | 312.957.740.677,80 |



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

5.5.1.1 Arus Kas Masuk Aktivitas Operasi

Arus kas masuk aktivitas operasi terdiri dari :

Tabel Rincian Arus Kas Masuk Aktivitas Operasi

| No | Uraian | Tahun 2021 | Tahun 2020 |
|----|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | | Rp | Rp |
| 1 | Pajak Daerah | 112.474.854.190,00 | 100.877.584.517,00 |
| 2 | Retribusi Daerah | 23.652.739.277,00 | 22.068.306.403,00 |
| 3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 16.552.860.815,00 | 15.727.758.649,00 |
| 4 | Lain-lain PAD Yang Sah | 317.713.374.802,00 | 263.141.614.724,80 |
| 5 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 2.059.293.466.080,00 | 2.074.494.939.094,00 |
| 6 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 163.339.494.803,00 | 148.958.135.191,00 |
| 7 | Pendapatan Hibah | 8.794.749.700,00 | 136.750.269.161,00 |
| 8 | Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | 128.590.218.035,00 | 0,00 |
| | Jumlah | 2.830.411.757.702,00 | 2.762.018.607.739,80 |

Arus Kas Masuk sebesar Rp2.830.411.757.702,00 tersebut termasuk pendapatan yang diterima Badan Layanan Umum Daerah dan pendapatan dari Dana Bantuan Operasional Sekolah yang diterima langsung Sekolah (SMP dan SD Negeri) pada tahun anggaran 2021. Pendapatan dari Badan Layanan Umum dirinci sebagai berikut.

Tabel Rincian Pendapatan BLUD Tahun 2020

| No | Uraian | Nilai (Rp) |
|----|--------------------|---------------------------|
| 1 | RSUD Dr. Soedirman | 158.313.728.970,00 |
| 2 | RSUD Prembun | 75.283.603.903,00 |
| 3 | Puskesmas | 61.072.209.513,00 |
| | Jumlah | 294.669.542.386,00 |

Sedangkan pendapatan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima langsung melalui rekening Sekolah adalah sebesar Rp128.590.218.035,00.

5.5.1.2 Arus Kas Keluar Aktivitas Operasi

Arus Kas keluar dari aktivitas operasi terdiri atas berikut.

Tabel Rincian Arus Kas Keluar Aktivitas Operasi

| No | Uraian | Tahun 2021 | Tahun 2020 |
|----|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | Rp | Rp |
| 1 | Belanja Pegawai | 1.141.295.419.703,00 | 1.169.696.600.650,00 |
| 2 | Belanja Barang dan Jasa | 666.965.891.277,00 | 557.946.733.726,00 |
| 3 | Belanja Subsidi | 484.527.400,00 | 0,00 |
| 4 | Belanja Hibah | 72.414.174.601,00 | 81.112.633.737,00 |
| 5 | Belanja Bantuan Sosial | 21.478.899.729,00 | 30.833.250.000,00 |
| 6 | Belanja Tak Terduga | 545.318.400,00 | 10.188.825.249,00 |
| 7 | Transfer Belanja Bagi Hasil | 13.862.929.650,00 | 13.527.756.700,00 |
| 8 | Transfer Belanja Bantuan Keuangan | 596.682.587.000,00 | 585.755.067.000,00 |
| | Jumlah | 2.513.729.747.760,00 | 2.449.060.867.062,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

Arus kas keluar dari Aktivitas operasi sebesar Rp2.513.729.747.760,00 tersebut sudah termasuk belanja operasi pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD dan UPTD Puskesmas dan belanja yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Sekolah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Rincian Belanja BLUD Tahun 2021

| No | Uraian | Nilai (Rp) |
|----|------------------------------|---------------------------|
| 1 | Belanja Pegawai BLUD | 369.862.000,00 |
| 2 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 240.061.869.049,00 |
| | Jumlah | 240.431.731.049,00 |

Sedangkan belanja yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Sekolah, yang dilaporkan oleh Satuan Pendidikan sebagai berikut:

Tabel Belanja Operasi BOS Tahun 2021

| No | Uraian | Nilai (Rp) |
|----|-----------------------------|--------------------------|
| 1 | Belanja Pegawai BOS | 28.196.816.750,00 |
| 2 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 70.727.729.119,00 |
| | Jumlah | 98.924.545.869,00 |

5.5.2 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

Aktivitas Investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap dan aset non-keuangan lainnya. Arus Kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi berkurang sebesar Rp264.487.692.309,00.

Tabel Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

| Uraian | Tahun 2021 Rp | Tahun 2020 Rp |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Arus Kas Masuk | 1.623.258.031,00 | 1.210.699.490,00 |
| Arus Kas Keluar | 266.110.950.340,00 | 288.801.049.018,00 |
| Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi | (264.487.692.309,00) | (287.590.349.528,00) |

Jumlah arus kas bersih dari aktivitas investasi berkurang sebesar Rp264.487.692.309,00 menunjukkan bahwa selama Tahun 2021 dari aktivitas investasi mengurangi saldo kas sebesar Rp264.487.692.309,00.

5.5.2.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Masuk dari aktivitas investasi sebesar Rp1.623.258.031,00 merupakan hasil penjualan Barang Milik Daerah yang sudah dihapus dari daftar barang inventaris dari Peralatan Mesin dan Bangunan Gedung, masing-masing sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

Tabel Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Investasi Tahun 2021

| No | Uraian | Nilai (Rp) |
|----|-------------------------------------|-------------------------|
| 1 | Hasil Penjualan Peralatan/Mesin | 1.290.325.031,00 |
| 2 | Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan | 332.933.000,00 |
| | Jumlah | 1.623.258.031,00 |

5.5.2.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi

Arus kas keluar dari aktivitas investasi merupakan total belanja modal Tahun Anggaran 2021 yaitu sebesar Rp266.110.950.340,00 termasuk didalamnya belanja modal pada Badan Layanan Umum Daerah dan belanja modal yang bersumber dana Bantuan Operasional Sekolah. Arus Kas Keluar Aktivitas Investasi dirinci sebagai berikut.

Tabel Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Tahun 2021

| No | Uraian | Nilai Rp |
|----|---|---------------------------|
| 1 | Belanja Modal Tanah | 4.062.715.011,00 |
| 2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 112.083.903.500,00 |
| 3 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 44.827.545.305,00 |
| 4 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan | 97.454.097.763,00 |
| 5 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 7.682.688.761,00 |
| 6 | Belanja Modal Aset Tak Berwujud | 0,00 |
| | Jumlah | 266.110.950.340,00 |

Arus kas keluar aktivitas investasi dari Belanja Modal yang bersumber Dana Badan Layanan Umum Daerah dirinci sebagai berikut.

Tabel Rincian Belanja Modal BLUD Tahun 2021

| No | Uraian | Nilai Rp |
|----|---|--------------------------|
| 1 | Belanja Modal Tanah | 628.973.110,00 |
| 2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 21.916.143.825,00 |
| 3 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 5.475.832.013,00 |
| 4 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan | 466.936.350,00 |
| 5 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 714.722.000,00 |
| 6 | Belanja Modal Aset Tak Berwujud | 0,00 |
| | Jumlah | 29.202.607.298,00 |

Sedangkan arus kas keluar investasi dari Belanja Modal yang bersumber dana Bantuan Operasional Sekolah yang dilaporkan Satuan Pendidikan dirinci sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

Tabel Rincian Belanja Modal Dana BOS Tahun 2021

| No | Uraian | Nilai Rp |
|----|-----------------------------------|--------------------------|
| 1 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 23.613.813.752,00 |
| 2 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 6.546.060.811,00 |
| | Jumlah | 30.159.874.563,00 |

5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Aktivitas Pendanaan adalah penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi investasi jangka panjang, piutang jangka panjang dan utang pemerintah daerah sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran.

Arus Kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah daerah dan klaim pemerintah daerah terhadap pihak lain di masa yang akan datang.

Arus Kas dari aktivitas pendanaan berkurang sebesar Rp2.965.000.000,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel Rincian Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

| Uraian | Tahun 2021 Rp | Tahun 2020 Rp |
|---|---------------------------|---------------------------|
| Arus Kas Masuk | 2.135.000.000,00 | 1.465.000.000,00 |
| Arus Kas Keluar | 5.100.000.000,00 | 9.550.000.000,00 |
| Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi | (2.965.000.000,00) | (8.085.000.000,00) |

Jumlah arus kas bersih dari aktivitas pendanaan berkurang sebesar Rp2.965.000.000,00 menunjukkan bahwa selama tahun 2021 dari aktivitas pendanaan mengurangi saldo kas sebesar tersebut.

5.5.3.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas masuk dari aktivitas pendanaan tahun 2021 sebesar Rp2.135.000.000,00 adalah penerimaan kembali pokok pinjaman dana talangan yang dikelola Dinas Pertanian dan Pangan serta Dinas Kelautan dan Perikanan.

5.5.3.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas keluar dari aktivitas pendanaan sebesar Rp5.100.000.000,00 merupakan Penyertaan modal/Investasi Pemerintah Daerah, penyaluran dana talangan serta penyaluran dana bergulir, dengan rincian sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

Tabel Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2021

| No | Uraian | Nilai Rp |
|----|----------------------------|-------------------------|
| 1 | Penyertaan Modal pada PDAM | 3.000.000.000,00 |
| 2 | Penyaluran Dana Talangan | 1.500.000.000,00 |
| 3 | Penyaluran Dana Bergulir | 600.000.000,00 |
| | Jumlah | 5.100.000.000,00 |

5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun Anggaran 2021 berkurang sebesar Rp34.314.950,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel Rincian Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

| Uraian | Tahun 2021 Rp | Tahun 2020 Rp |
|---|------------------------|------------------------|
| Arus Kas Masuk | 160.416.587.732,00 | 159.227.636.716,00 |
| Arus Kas Keluar | 160.450.902.682,00 | 159.324.196.405,00 |
| Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi | (34.314.950,00) | (96.559.689,00) |

5.5.4.1 Arus Kas Masuk Aktivitas Transitoris

Arus kas masuk aktivitas transitoris sebesar Rp160.416.587.732,00 merupakan penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK).

5.5.4.2 Arus Kas Keluar Aktivitas Transitoris

Arus Arus kas keluar Aktivitas Transitoris tahun 2021 sebesar Rp160.450.902.682,00 merupakan pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK).

Dari keempat arus kas tersebut di atas, terjadi kenaikan saldo kas selama Tahun 2020 sebesar Rp49.195.002.683,00 ditambah dengan saldo awal Kas sebesar Rp219.984.624.515,98 sehingga diperoleh saldo akhir Kas sebesar Rp269.179.627.198,98.

Saldo Kas sebesar tersebut terdiri dari:

| | | |
|------------------------------|-----------|---------------------------|
| Kas di Kas Daerah | Rp | 167.807.726.233,00 |
| Kas di bendahara Penerimaan | Rp | 0,00 |
| Kas di Bendahara Pengeluaran | Rp | 400.000,00 |
| Kas BLUD RSUD Soedirman | Rp | 42.767.044.674,00 |
| Kas BLUD RSUD Prembun | Rp | 48.873.491.269,00 |
| Kas BLUD Puskesmas | Rp | 4.735.938.728,98 |
| Kas Dana BOS | Rp | 4.995.026.294,00 |
| Jumlah | Rp | 269.179.627.198,98 |



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

5.6 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang menggambarkan kenaikan atau penurunan ekuitas pada periode tahun pelaporan.

Jumlah Ekuitas awal Tahun 2021 sebesar Rp 4.483.948.124.718,03 merupakan ekuitas per 31 Desember 2020.

Surplus/Defisit LO sebesar Rp 22.307.083.691,24 merupakan Surplus-LO tahun 2021 yang dijelaskan pada Laporan Operasional tahun 2021.

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Tahun 2021 sebesar Rp106.839.107.515,80 merupakan koreksi ekuitas lainnya yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel Koreksi Ekuitas Lainnya

| No | Uraian | Nilai (Rp) |
|---|--|---------------------------|
| Koreksi Tambah (kredit) | | |
| 1 | Penyesuaian atas saldo investasi permanen per 31 Desember 2021 dengan metode ekuitas | 3.334.119.269,04 |
| 2 | Penambahan aset tetap karena reklas ke ekstrakompatable | 14.927.262.203,00 |
| 3 | Penyesuaian akumulasi penyusutan aset tetap | 120.095.343.594,40 |
| 4 | Penyesuaian atas akumulasi penyusutan atb | 24.720.300,00 |
| 5 | Penambahan karena mutasi antar SKPD | 54.050.493.135,00 |
| 6 | Penambahan karena hibah dari pihak lain | 114.824.311.524,00 |
| 7 | Penambahan aset tetap karena barang jasa menjadi aset | 2.812.444.008,00 |
| 8 | Penambahan baru ditemukan atau baru dicatat | 7.454.259.530,00 |
| 9 | Penambahan aset lainnya - rusak berat | 36.830.519.517,00 |
| 10 | Penyesuaian aset tetap karena koreksi | 3.239.038.149,00 |
| 11 | Penyesuaian nilai utang | 15.669.108,00 |
| 12 | Penyesuaian saldo awal piutang | 4.155.000,00 |
| Jumlah Koreksi Tambah | | 357.612.335.337,44 |
| Koreksi Kurang (debit) | | |
| 1 | Pengurangan aset tetap karena usul hapus | 23.783.164.890,00 |
| 2 | Pengurangan aset lainnya - rusak berat | 5.218.158.352,00 |
| 3 | Penyesuaian akumulasi penyusutan aset tetap | 116.963.731.628,64 |
| 4 | Penyesuaian akumulasi penyusutan rusak berat | 21.397.772.074,00 |
| 5 | Penyesuaian akumulasi penyusutan amortisasi | 24.720.300,00 |
| 6 | Koreksi kurang aset tetap karena double catat | 376.097.500,00 |
| 7 | Mutasi kurang aset tetap ke SKPD | 52.192.827.721,00 |
| 8 | Penyesuaian aset tetap karena koreksi | 19.858.931.659,00 |
| 9 | Penyesuaian aset tetap karena reklas kode rekening | 3.576.143.150,00 |
| 10 | Pengurangan aset tetap karena reklas ke ekstrakompatable | 7.377.525.547,00 |
| 11 | Penyesuaian nilai piutang | 4.155.000,00 |
| Jumlah Koreksi Kurang | | 250.773.227.821,64 |
| Jumlah Koreksi Ekuitas Lainnya (Koreksi Tambah – Koreksi Kurang) | | 106.839.107.515,80 |

Ekuitas Akhir sebesar Rp 4.613.094.315.925,07 menunjukkan bahwa kekayaan bersih yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Kebumen per 31 Desember 2021 sebesar tersebut.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan otonomi daerah yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Laporan Keuangan Kabupaten Kebumen disusun dengan memperhatikan Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah dan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diberlakukan di Indonesia yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan konsolidasi dari Laporan Keuangan Perangkat Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah, maka ditetapkan Perda Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah agar substansinya dapat selaras dengan tujuan otonomi yang didasarkan pada asas kewenangan, intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah, efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas dan fleksibilitas. Susunan Perangkat Daerah tersebut terdiri atas:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat;
- d. Dinas;
- e. Badan; dan
- f. Kecamatan.

Susunan perangkat daerah terbagi menjadi 3 tipe :

- a. Tipe A adalah kriteria tipologi Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan Urusan Pemerintahan daerah bagi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan dengan kategori beban kerja besar.
- b. Tipe B adalah kriteria tipologi Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan Urusan Pemerintahan daerah bagi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas dan Badan dengan kategori beban kerja sedang dan Kecamatan dengan kategori beban kerja kecil.
- c. Tipe C adalah kriteria tipologi Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan Urusan Pemerintahan daerah bagi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas dan Badan dengan kategori beban kerja kecil.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

Untuk Rinciannya adalah sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah tipe A;
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD tipe A;
- c. Inspektorat merupakan Inspektorat tipe A
- d. Dinas berjumlah 17 dengan rincian tipe sebagai berikut:
 - 1) Dinas Tipe A : 5 Dinas
 - 2) Dinas tipe B : 10 Dinas
 - 3) Dinas Tipe C : 2 Dinas
- e. Badan berjumlah 4 dengan rincian tipe sebagai berikut :
 - 1) Badan Tipe A : 2 Badan
 - 2) Badan Tipe B : 2 Badan
- f. Kecamatan : 26 Kecamatan tipe A

Pada tanggal 28 April 2020 ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik. Sehingga mengubah nomenklatur Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Nomenklatur SKPD pada penyusunan LKPD Tahun Anggaran 2021 disajikan sesuai tabel berikut.

Tabel Nomenklatur SKPD pada Penyusunan LKPD Tahun Anggaran 2021

| No | Kode OPD | Nama OPD |
|----|-------------|---|
| 1 | 1 . 01 . 01 | Dinas Pendidikan |
| 2 | 1 . 02 . 01 | Dinas Kesehatan |
| 3 | 1 . 03 . 01 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 4 | 1 . 04 . 01 | Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup |
| 5 | 1 . 05 . 01 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 6 | 1 . 05 . 02 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 7 | 1 . 06 . 01 | Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |
| 8 | 2 . 01 . 01 | Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah |
| 9 | 2 . 06 . 01 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 10 | 2 . 07 . 01 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| 11 | 2 . 09 . 01 | Dinas Perhubungan |
| 12 | 2 . 10 . 01 | Dinas Komunikasi Dan Informatika |
| 13 | 2 . 12 . 01 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 14 | 2 . 13 . 01 | Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata |
| 15 | 2 . 18 . 01 | Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan |
| 16 | 3 . 01 . 01 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| 17 | 3 . 03 . 01 | Dinas Pertanian dan Pangan |
| 18 | 3 . 06 . 01 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 19 | 4 . 01 . 01 | Sekretariat Daerah |
| 20 | 4 . 02 . 01 | Inspektorat |
| 21 | 4 . 03 . 01 | Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| 22 | 4 . 04 . 01 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| 23 | 4 . 04 . 02 | Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah |
| 24 | 4 . 05 . 01 | Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah |
| 25 | 4 . 08 . 01 | Sekretariat DPRD |



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

| No | Kode OPD | Nama OPD |
|----|-------------|-----------------------------------|
| 26 | 4 . 11 . 01 | Kecamatan Kebumen |
| 27 | 4 . 11 . 02 | Kecamatan Alian |
| 28 | 4 . 11 . 03 | Kecamatan Karangsembung |
| 29 | 4 . 11 . 04 | Kecamatan Prembun |
| 30 | 4 . 11 . 05 | Kecamatan Mirit |
| 31 | 4 . 11 . 06 | Kecamatan Kutowinangun |
| 32 | 4 . 11 . 07 | Kecamatan Ambal |
| 33 | 4 . 11 . 08 | Kecamatan Buluspesantren |
| 34 | 4 . 11 . 09 | Kecamatan Pejagoan |
| 35 | 4 . 11 . 10 | Kecamatan Klirong |
| 36 | 4 . 11 . 11 | Kecamatan Petanahan |
| 37 | 4 . 11 . 12 | Kecamatan Sruweng |
| 38 | 4 . 11 . 13 | Kecamatan Karanganyar |
| 39 | 4 . 11 . 14 | Kecamatan Karanggayam |
| 40 | 4 . 11 . 15 | Kecamatan Adimulyo |
| 41 | 4 . 11 . 16 | Kecamatan Kuwarasan |
| 42 | 4 . 11 . 17 | Kecamatan Puring |
| 43 | 4 . 11 . 18 | Kecamatan Gombong |
| 44 | 4 . 11 . 19 | Kecamatan Sempor |
| 45 | 4 . 11 . 20 | Kecamatan Buayan |
| 46 | 4 . 11 . 21 | Kecamatan Rowokele |
| 47 | 4 . 11 . 22 | Kecamatan Ayah |
| 48 | 4 . 11 . 23 | Kecamatan Sadang |
| 49 | 4 . 11 . 24 | Kecamatan Poncowarno |
| 50 | 4 . 11 . 25 | Kecamatan Padureso |
| 51 | 4 . 11 . 26 | Kecamatan Bonorowo |
| 52 | 4 . 12 . 01 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |

Di Tahun Anggaran 2021 terdapat 37 entitas yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, yaitu 35 Puskesmas dan 2 Rumah Sakit Umum Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

| No | Kode OPD | Nama OPD |
|----|------------------|----------------------------------|
| 1 | 1 . 02 . 01 . 02 | UPTD RSUD Dr. Soedirman |
| 2 | 1 . 02 . 01 . 03 | UPTD RSUD Prembun |
| 3 | 1 . 02 . 01 . 04 | UPTD Puskesmas Adimulyo |
| 4 | 1 . 02 . 01 . 05 | UPTD Puskesmas Alian |
| 5 | 1 . 02 . 01 . 06 | UPTD Puskesmas Ambal I |
| 6 | 1 . 02 . 01 . 07 | UPTD Puskesmas Ambal II |
| 7 | 1 . 02 . 01 . 08 | UPTD Puskesmas Ayah I |
| 8 | 1 . 02 . 01 . 09 | UPTD Puskesmas Ayah II |
| 9 | 1 . 02 . 01 . 10 | UPTD Puskesmas Bonorowo |
| 10 | 1 . 02 . 01 . 11 | UPTD Puskesmas Buayan |
| 11 | 1 . 02 . 01 . 12 | UPTD Puskesmas Buluspesantren I |
| 12 | 1 . 02 . 01 . 13 | UPTD Puskesmas Buluspesantren II |
| 13 | 1 . 02 . 01 . 14 | UPTD Puskesmas Gombong I |
| 14 | 1 . 02 . 01 . 15 | UPTD Puskesmas Gombong II |
| 15 | 1 . 02 . 01 . 16 | UPTD Puskesmas Karanganyar |
| 16 | 1 . 02 . 01 . 17 | UPTD Puskesmas Karanggayam I |
| 17 | 1 . 02 . 01 . 18 | UPTD Puskesmas Karanggayam II |
| 18 | 1 . 02 . 01 . 19 | UPTD Puskesmas Karangsembung |
| 19 | 1 . 02 . 01 . 20 | UPTD Puskesmas Kebumen I |
| 20 | 1 . 02 . 01 . 21 | UPTD Puskesmas Kebumen II |



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

| No | Kode OPD | Nama OPD |
|----|------------|-----------------------------|
| 21 | 1.02.01.22 | UPTD Puskesmas Kebumen III |
| 22 | 1.02.01.23 | UPTD Puskesmas Klirong I |
| 23 | 1.02.01.24 | UPTD Puskesmas Klirong II |
| 24 | 1.02.01.25 | UPTD Puskesmas Kutowinangun |
| 25 | 1.02.01.26 | UPTD Puskesmas Kuwarasan |
| 26 | 1.02.01.27 | UPTD Puskesmas Mirit |
| 27 | 1.02.01.28 | UPTD Puskesmas Padureso |
| 28 | 1.02.01.29 | UPTD Puskesmas Pejagoan |
| 29 | 1.02.01.30 | UPTD Puskesmas Petanahan |
| 30 | 1.02.01.31 | UPTD Puskesmas Poncowarno |
| 31 | 1.02.01.32 | UPTD Puskesmas Prembun |
| 32 | 1.02.01.33 | UPTD Puskesmas Puring |
| 33 | 1.02.01.34 | UPTD Puskesmas Rowokele |
| 34 | 1.02.01.35 | UPTD Puskesmas Sadang |
| 35 | 1.02.01.36 | UPTD Puskesmas Sempor I |
| 36 | 1.02.01.37 | UPTD Puskesmas Sempor II |
| 37 | 1.02.01.38 | UPTD Puskesmas Sruweng |

Pemerintah Kabupaten Kebumen selama tahun 2021 memperoleh beberapa prestasi diantaranya.

Rincian Penghargaan Kabupaten Kebumen Tahun 2021

| No | Nama Penghargaan |
|----|--|
| 1 | Penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Pengelolaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2020 dari Kementerian Keuangan |
| 2 | Penghargaan Smart City katagori Smart Governance atau tata pemerintahan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI |
| 3 | Penghargaan atas capaian 100 persen pelaksanaan Pendataan Keluarga tahun 2021(PK 21) dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Tengah |
| 4 | Penghargaan sebagai Pemerintah Kabupaten yang berkomitmen terhadap perlindungan anak, serta pelaporan melalui aplikasi Sistem Informasi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan (SIMEP) Perlindungan Anak 2021 dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia |
| 5 | Penghargaan Parahita Ekapraya (APE) tahun 2020 kategori utama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 6 | Penghargaan Pencipta Arsip Terbaik tingkat kabupaten/kota dari Arsip Nasional Republik Indonesia |
| 7 | Peringkat ke 6 Kabupaten/Kota dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) terbaik di Indonesia Tahun 2020 |